

Bunga Rampai

SEJARAH DAN BUDAYA

Efrianto

Zusneli Zubir

Jumhari

Nurmatias dan Undri

Ajisman

Rois Leonard Arios

Seno

Refisrul

orat
aan

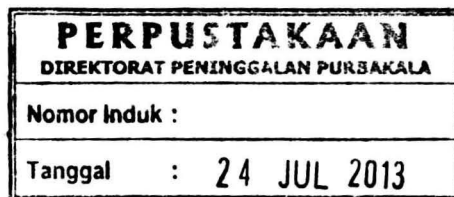
**BPSNT Padang
Press**



959.8 EFR b



BUNGA RAMPAI



BUNGA RAMPAI

Sejarah dan Budaya

Oleh :

Efianto

Zusneli Zubir

Jumhari

Nurmatias dan Undri

Ajisman

Rois Leonard Arios

Seno

Refisrul



Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

BPSNT PADANG

2011

Efrianto, Zusneli Zubir, Jumhari, Nurmatias dan Undri,
Ajisman, Rois Leonard Arios, Seno, Refisrul

BUNGA RAMPAI

©2011 BPSNT Padang

Cetakan Pertama: November 2011

Hak Penerbitan Pada BPSNT Padang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apapun termasuk dengan cara penggunaan
mesin fotokopi, scan, photo, dan lain-lain tanpa izin sah
dari penulis dan atau penerbit (UU No. 19 tahun 2002)*

Editor:

Prof. DR. Nursyirwan Effendi

Desain Cover:

Rois Leonard Arios

Lay-out isi:

CV. Faura Abadi

Percetakan:

CV. Faura Abadi

ISBN:

978-602-8742-30-6

Penerbit:

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Sumatra Barat

Telp/faksmile: 0751-496181

www.bpsnt-padang.info

e-mail: surat@bpsnt-padang.info

**SAMBUTAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Sembari mengharap rahmad dan ridha Allah SWT, Saya menyambut gembira atas terbitnya buku ***Bunga Rampai*** yang memuat tulisan-tulisan berbasis ilmu sejarah dan budaya ini. Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian para peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang yang kemudian disempurnakan kembali oleh para penulisnya sehingga hadir di tangan pembaca.

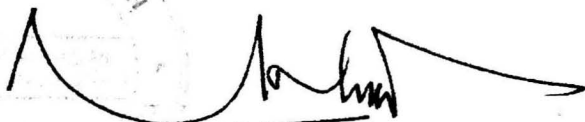
Buku bunga rampai ini terdiri dari 8 judul : *Pertama*, Peninggalan Kerajaan-kerajaan di Dharmasraya : Dari Zaman Hindu dan Budha sampai Islam oleh Efrianto A. *Kedua*, Dinamika Pendidikan di Lubuk Linggau oleh Zuneli Zubir. *Ketiga*, Dilema Perempuan Minangkabau Antara Tradisi dan Modernitas; Kajian Sejarah Sosial Atas Peranan Perempuan Minangkabau di Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman Tahun 1970-2005, oleh : Jumhari. *Keempat*, Hubungan Ranah dan Rantau : Studi Kasus Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) Tahun 2010 oleh Nurmatias dan Undri. *Kelima*, Bengkulu Selatan dalam Lintasan Sejarah dan Budaya oleh Ajisman. *Keenam*, Hubungan Sosial Masyarakat Nias dengan Masyarakat Setempat di Nagari sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman oleh Rois Leonard A. *Ketujuh*, Organisasi Aisyiah: Peran dan Perkembangannya di Kota Palembang oleh Seno. *Kedelapan*, Kerajinan “Rendo Bangku” Koto Gadang oleh Refisrul.

Kami menyadari banyak ketidaksempurnaan dalam penerbitan bunga rampai ini, dan membuka diri menerima kritikan serta saran guna penyempurnaan dalam penerbitan yang akan datang. Semoga buku bunga rampai ini menambah wawasan, membuka cakrawala berfikir serta memperkaya khasanah referensi ilmiah pembaca, terutama

dalam rangka melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya daerah di tengah-tengah masyarakat.

Jakarta, Oktober 2011

Setdijen NBSF,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Drs. Mumus Muslim, MM.

NIP. 19630502 198403 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan Setditjen NBSF	i
Daftar Isi	iii
1. PENINGGALAN KERAJAAN-KERAJAAN DI DHARMASRAYA ; DARI ZAMAN HINDU- BUDHA SAMPAI ISLAM. Oleh : Efrianto.....	1
2. DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA OTONOM LUBUK LINGGAU. Oleh : Zusneli Zubir	24
3. DILEMA PEREMPUAN MINANGKABAU ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS ; KAJIAN SEJARAH SOSIAL ATAS PERANAN PEREMPUAN MINANGKABAU DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN 1970-2005. Oleh : Jumhari	54
4. HUBUNGAN RANAH DAN RANTAU ; STUDI KHASUS KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU (KKM) TAHUN 2010. Oleh : Nurmatias dan Undri.....	106
5. BENGKULU SELATAN DALAM LINTAS SEJARAH DAN BUDAYA. Oleh : Ajisman	180

6. HUBUNGAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT NIAS DAN MASYARAKAT NAGARI SUNGAI BULUH KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
Oleh : Rois Leonard Arios..... 231
7. PERAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI AISYIAH DI KOTA PALEMBANG.
Oleh : Seno.....293
8. KERAJINAN “RENDU BANGKU” KOTO GADANG.
Oleh : Refisrul.....334

PENINGGALAN BERSEJARAH DI DHARMASRAYA: DARI ZAMAN HINDU-BUDHA SAMPAI ISLAM¹

Oleh : Efrianto. A²

A. Pendahuluan

Dharmasraya merupakan sebuah nama yang pernah tercatat dalam sejarah masyarakat di Sumatera Barat. Nama ini dikenal sebagai nama ibukota kerajaan besar di pinggir Sungai Batanghari. Ini merupakan salah satu alasan, kenapa Dharmasraya dijadikan nama kabupaten, ketika kawasan di pinggir Sungai Batanghari ini memisahkan diri dengan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung pada tahun 2003.

Nama Dharmasraya menjadi terkenal dalam catatan sejarah, ketika Kerajaan Singgori melakukan Ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menaklukkan kerajaan di Pulau Sumatera. Pada tahun 1275, Raja Kertanegara memutuskan untuk menguasai lalu lintas perdagangan Selat Malaka. Tujuan utamanya ialah untuk membendung pengaruh kekuasaan Khubilai Khan atau bangsa Mongol. Menurut *Nagarakretagama*, rencana tersebut semula hendak dijalankan secara damai, akan tetapi raja Malayu menolak hal itu, sehingga Kertanegara terpaksa mengirim pasukan untuk menyerang Sumatra dan serangan tersebut dipimpin oleh Kebo Anabrang.³

Pasukan Kebo Anabrang mendarat dan merebut pelabuhan Malayu di Jambi dan kemudian merebut daerah

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari tulisan tentang “ Sejarah Kerajaan – Kerajaan di Dharmasraya

² Penulis merupakan staf pengkaji pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang

³ Bambang Budi Utomo “ Sebuah Acra Amoghopasa Sebuah Hadiah dari Kertanegara ke Dharmasraya. Diambil dari www.melayuonline.com pada tanggal 21 juli 2009

penghasil lada di Kuntu-Kampar. Dengan demikian, kehidupan ekonomi Kerajaan Malayu berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Singosari. Pasukan Kebo Anabrang terus bergerak sehingga berhasil masuk dan mengalahkan ibu kota Malayu, di Dharmasraya. Mulai saat itu kerajaan Malayu Dharmasraya telah menjadi bahagian dari Kerajaan Singosari.⁴

Prasasti Padangroco yang ditulis pada tahun 1286 menyebutkan tentang pengiriman Arca Amoghapasa sebagai hadiah Singosari untuk rakyat Dharmasraya. Dalam prasasti itu, Tribhuwanaraja bergelar maharaja, sedangkan Kertanagara bergelar Maharajadhiraja, sehingga terbukti kalau saat itu Sumatra telah menjadi bawahan Jawa.⁵ Arca Amoghapasa diberangkatkan dari Jawa menuju Sumatra dikawal 14 orang, di antaranya ialah Rakryan Mahamantri Dyah Adwayabrahma, Rakryan Sirikan Dyah Sugatabrahma, Payaman Hyang Dipangkaradasa, dan Rakryan Demung Mpu Wira.⁶

Pasukan Ekspedisi Pamalayu ketika kembali ke Singosari membawa dua orang Putri Dharmasraya yaitu Dara Jingga dan Dara Petak. Kedua putri Dharmasraya melahirkan dua orang putra, yaitu Kertanegara yang kemudian menjadi raja Majapahit dan Adityawarman yang menjadi raja di Dharmasraya.⁷ Adityawarman kemudian memindahkan kerajaan Dharmasraya dan mendirikan Kerajaan Pagaruyung di daerah pedalaman Minangkabau. Pada masa pemerintahan Adityawarman Kerajaan Melayu meninggalkan jejak-jejak yang saat ini masih bisa kita nikmati. Nama Adityawarman

⁴ *Ibid*

⁵ Koran Tempo " Kerajaan di Tepi Batanghari terbit 21 -27 Januari 2008 diambil dari www.slbcibinong.net pada tanggal 21 juli 2009

⁶ Slamet Muljana. 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bharatara

⁷ *Laporan Kuliah Lapangan Kenagari Siguntur* Tanggal 28 – 30 November 2009. diambil dari blog www.corat_coret.wordpress.com pada tanggal 21 Maret 2009

merupakan nama yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat hingga saat ini.

Peninggalan Kerajaan Malayu-Dharmasraya, di Kabupaten Dharmasraya dapat dibuktikan dengan banyaknya tinggalan budaya masa lampau yang ditemukan di daerah ini. Antara lain kompleks bangunan candi, arca, dan prasasti yang semuanya dibuat pada abad ke-13-14 Masehi. Bangunan-bangunan candi ini seluruhnya dibuat dari bata dan tidak mempunyai dinding yang membentuk ruangan.

Kerajaan Malayu Dharmasraya, pada akhir abad ke 15 dipindahkan oleh Adityawarman ke daerah pedalaman di Suraso. Perpindahan ini lebih disebabkan oleh semakin berkembangnya ajaran agama Islam di pantai timur Sumatera. Dengan berpindahnya pusat kerajaan dari Dharmasraya ke daerah pedalaman maka berakhirnya masa kejayaan Dharmasraya sebagai ibukota kerajaan. Ketika Bangsa Belanda berkuasa di Indonesia mereka menemukan peninggalan dari Kerajaan Malayu Dharmasraya, dalam kondisi hancur/rusak, keadaan ini diperkirakan oleh alam dan tangan manusia yang ingin mencari harta karun.⁸

Perpindahan pusat kerajaan dari Dharmasraya pada abad ke-15, mengakibatkan daerah Dharmasraya menjadi wilayah kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Kondisi tersebut berlangsung sampai datangnya masyarakat dari berbagai daerah ke wilayah tersebut. Penduduk yang datang tidak lagi menggunakan nama Dharmasraya sebagai nama daerah, kondisi ini disebabkan terputusnya hubungan dan sejarah antara penduduk yang menghuni kawasan tersebut setelah pusat kerajaan dipindahkan.⁹

Abad ke-16 kawasan ini dibangun kembali oleh masyarakat dengan menggunakan identitas berdasarkan wilayah yang mereka diami. Pada masa inilah muncul beberapa nagari dan kerajaan, sebagaimana lazimnya nagari di Minangkabau merupakan sebuah daerah yang otonomi

⁸ Op.cit Bambang

⁹ *Ibid*

namun mengakui kedudukan Pagaruyung sebagai pucuk tertinggi di alam Minangkabau. Kondisi ini berlangsung hingga kedatangan Belanda ke kawasan ini. Dalam konteks itulah tulisan ini disampaikan untuk menggambarkan tentang peninggalan zaman Hindu, Budha dan Islam di Kabupaten Dharmasraya.

B. Pembahasan

1. Peninggalan Masa Hindu Budha

Kerajaan Malayu adalah kerajaan yang pernah ada di Pulau Sumatra. Kerajaan ini dibedakan atas dua periode, yaitu Kerajaan Malayu Tua pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga Tamwa, dan Kerajaan Malayu Muda pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya. Berdasarkan letak ibu kotanya, Kerajaan Malayu Tua atau Malayu Kuno sering pula disebut dengan nama Kerajaan Malayu Jambi, sedangkan Kerajaan Malayu Muda sering pula disebut dengan nama Kerajaan Dharmasraya.¹⁰ Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa nama Dharmasraya bukanlah nama kerajaan tapi nama ibukota kerajaan, kondisi ini sejalan dengan kenyataan, bahwa Kerajaan Melayu di Sumatera merupakan sebuah kerajaan yang memiliki banyak ibukota..

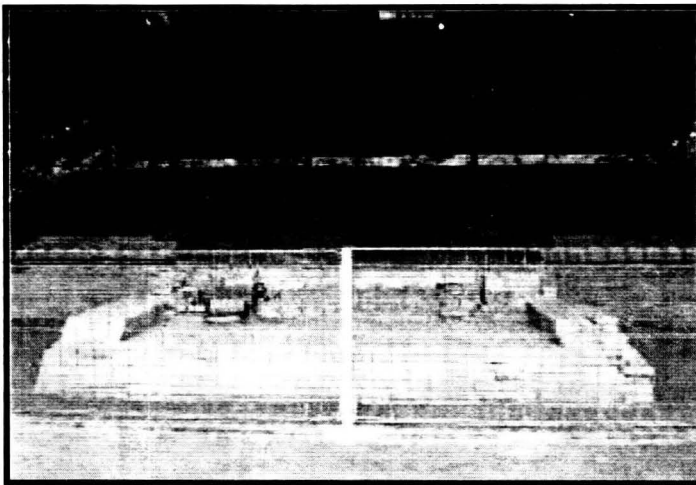
Sedikit catatan sejarah yang bisa menerangkan tentang sejarah dan kondisi Kerajaan Dharmasraya. Catatan yang cukup terkenal adalah tentang rajanya yang bernama Shri Tribhuana Raja Mauliwarmadhwewa (1270-1297) yang menikah dengan Puti Reno Mandi. Sang raja dan permaisuri memiliki dua putri, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak.¹¹ Namun, berdasarkan nama Dharmasraya memiliki arti sebagai sebuah

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Laporan Kuliah Lapangan Kenagari Siguntur Tanggal 28 – 30 November 2009. diambil dari blog www.corat_coret.wordpress.com pada tanggal 21 Maret 2009*

kota yang taat akan hukum¹², ini menjadi bukti bahwa kota Dharmasraya merupakan sebuah daerah yang memiliki tata hukum yang cukup baik.

Keberadaan pusat pemerintahan Kerajaan Malayu-Dharmasraya di daerah ini dibuktikan dengan banyaknya tinggalan budaya masa lampau yang ditemukan di daerah itu, antara lain berupa kompleks bangunan candi, arca, dan prasasti yang semuanya dibangun sekitar abad ke-13-14 Masehi. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat dua kompleks percandian dan tiga situs yang terdapat runtuh bangunan.



Komplek Candi Padang Roco

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Kompleks percandian terletak di Padangroco dan Pulau Sawah, sedangkan runtuh bangunan yang tidak termasuk dalam sebuah kompleks ditemukan di Padanglaweh, Bukik Awang Maombiak, dan Rambahan. Padangroco merupakan suatu situs percandian yang terdiri dari tiga buah bangunan

¹² Budi Istiawan Makalah " *Pengelolaan Potensi Sejarah di Dharmasraya* " disampaikan dalam seminar nasional di Gunung Medan tanggal 1 – 2 Desember 2009

candi. Situs ini untuk pertama kalinya ditemukan pada sekitar tahun 1930-an dengan temuannya yang menarik adalah arca raksasa yang tingginya 4,41 meter. Arca ini menggambarkan Adityawarmman, seorang putra Malayu yang dibesarkan di Majapahit, dalam wujudnya sebagai Bhairawa.¹³

Alasan berpindahnya pusat pemerintahan Kerajaan Malayu dari Jambi ke Dharmasraya adalah untuk menghindari ancaman dari penyebaran agama Islam yang telah berkembang di Aceh pada akhir abad ke-13 Masehi yang disusul oleh beberapa daerah di pantai timur Sumatera. Dikhawatirkan, apabila sebagian besar penduduk Malayu beragama Islam, ini merupakan ancaman bagi kekuasaannya. Adityawarmman menginsyafi bahwa tantangan rohani tidak dapat dihadapi dengan kekuatan tentara, melainkan harus dihadapi dengan "senjata" keagamaan.

Arca Bhairawa itu dapat dipandang sebagai lambang yang harus melindungi negara Adityawarmman terhadap penyebaran agama Islam. Arca Bhairawa yang ukurannya besar, sengaja ditempatkan di Padangroco. Tempat ini diduga merupakan gerbang masuk melalui Batanghari menuju pusat pemerintahan Kerajaan Malayu. Penempatan dan fungsi arca itu tidak terbatas pada agama dalam arti yang sempit, melainkan perlambangan dari kesiap-siagaan terhadap ancaman bahaya yang mungkin datang dari arah timur.

Pada tahun 1911 di Padangroco ditemukan sebuah alas arca Amoghapasa yang pada tiga sisinya terdapat prasasti. Prasasti ini dipahatkan 4 baris tulisan dengan aksara Jawa Kuno, dan memakai bahasa Melayu Kuno dan Sansekerta. Isinya menyebutkan bahwa pada tahun 1286 Masehi, atas perintah Sri Kertanagara Wikrama Dharmmottunggadewa, sebuah arca Amoghapasa Lokeswara dipindahkan dari Bhumi Jawa ke Swarnabhumi untuk ditempatkan di Dharmasraya. Penempatan arca itu dipimpin oleh empat orang pejabat tinggi dari Jawa. Pemberian hadiah itu membuat seluruh rakyat Bhumi Malayu bergembira,

¹³ *Op.cit* Bambang Budi Utomo

terutama sekali rajanya yang bernama Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa¹⁴.

Menuju ke arah hulu dari Padangrocok, di kampung Rambahan ditemukan sebuah Arca Amoghapasa dengan prasasti yang dipahatkan di bagian punggung arca. Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh Kontrolir Twiss kepada Direksi Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada tahun 1884. Berdasarkan keterangan prasasti yang dipahatkan pada bagian alas arca yang ditemukan di Padangroco tahun 1911, Amoghapasa ini merupakan arca yang dikirimkan oleh Kertanagara pada tahun 1286 Masehi untuk ditempatkan di Dharmasraya.

Prasasti pada arca Amoghapasa ditulis dalam aksara Jawa Kuna dengan menggunakan bahasa Sansekerta, berangka tahun 1347 Masehi, dan dikeluarkan oleh Sri Maharajadhiraja Adityawarmman. Dalam prasasti itu ia menyebutkan pula dirinya dengan nama Srimat Sri Udayadityawarmman. Disebutkan juga penyelenggaraan upacara yang bercorak tantrik, pentahbisan arca Buddha dengan nama Gaganaganja, dan pemujaan kepada Jina.

Peninggalan lain dari Kerajaan Dharmasraya adalah kompleks percandian Pulau Sawah terdapat 9 buah gundukan (munggu) yang diperkirakan mengandung struktur bata. Adapun yang baru dibuka baru 2 munggu. Kedua munggu tersebut sekarang disebut Candi Pulau Sawah I dan Candi Pulau Sawah II.¹⁵

Candi Pulau Sawah I berbentuk bujur sangkar persegi berukuran 10,5 x 10,5 m. Dinding sisi utara membentuk penampil dua buah. Penampil dalam berukuran 5,2 x 0,8 m dan penampil luar berukuran 3,4 x 0,45 m, sedangkan dinding timur tidak berpenampil dengan panjang 3,9 m. Sisi luar dari

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Laporan Pendataan Benda-Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Dharmasraya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar.

struktur bata ini dikelilingi oleh struktur batu kali berukuran lebar antara 1-1,5 m yang disusun dengan cara direkat dengan tanah lempung. Bagian lantai susunan batunya masih relatif utuh dan merupakan susunan tertinggi sebanyak 37 lapis dihitung dari susunan lapis terbawah yang terdapat pada bagian tengah sisi utara. Adapun lantai pada sisi barat agaknya sudah banyak lapisan batunya yang hilang akibat digali oleh penduduk setempat.¹⁶

Lantai sisi timur seolah-olah disekat oleh susunan batu kali selebar 85 cm, panjang 163 cm, dan tinggi dari dasar 160 cm, serta tinggi dari lantai 20 cm. Lantai sebelah timur struktur batu kali ini membentuk lantai selasar berukuran lebar 93 cm kemudian berbelok ke barat membentuk lantai selasar selebar 115 cm untuk menuju ke lantai bawah sisi selatan yang tinggal 13 lapis bata. Salah satu hal yang menarik adalah adanya lubang persegi berukuran lebih kurang 2,25 x 2,25 m yang berada di bagian tengah lantai. Keempat sisi dinding bak persegi ini merupakan susunan bata yang sekaligus merupakan susunan bata yang membentuk lantai. Belum diketahui dengan pasti fungsi dari bak persegi ini.¹⁷



Candi Pulau Sawah II
(Dokumen BP3 Batusangkar)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Candi Pulau Sawah II diperkirakan ada dua struktur bangunan yang ditunjukkan pada temuan beberapa struktur sudut bangunan. Sudut bangunan pertama yaitu berada pada sisi timur laut dan sudut baratdaya. Dua sudut bangunan ini merupakan satu kesatuan dari bangunan pertama, sedangkan bangunan kedua berada di sebelah timur laut bangunan satu.¹⁸

Peninggalan Hindu Budha juga ditemukan di Nagari Padang Laweh yang berbentuk pecahan-pecahan bata yang dari ukurannya dapat dipastikan sebagai bata lama. Pecahan bata berserakan diantara semak-semak dan ilalang serta akar pohon.

Situs Candi Padang Laweh letaknya kurang lebih 100 meter arah kanan dari bangunan Rumah Gadang Kerajaan Padang Laweh. Di bawah pohon ditemukan pecahan-pecahan bata yang dari ukurannya dapat dipastikan sebagai bata lama. Pecahan bata berserakan diantara semak-semak dan ilalang serta akar pohon. Lokasi ini mempunyai permukaan yang relatif tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya dan berada di halaman depan yang empunya tanah. Menurut penduduk setempat, dulunya pernah ditemukan struktur/susunan bata candi yang tampak di permukaan kurang lebih 30 cm terdiri dari beberapa lapis. Disebutkan juga bata candi tersebut mempunyai ukuran jauh lebih besar dari bata yang sekarang dengan ketebalan mencapai 8 cm, dengan perkiraan lebar panjang $\pm 20 \times 26$ cm.¹⁹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *ibid*

Makam kuno ini terdiri dari dua buah makam yang saling berdampingan dan berorientasi arah utara-selatan. Dua makam tersebut adalah makam Tuanku Basusu Ampat dan Makam Tuanku Babulu Lidah. Makam Tuanku Basusu Ampat merupakan makam tanpa jirat yang dilengkapi dengan dua buah nisan dari batuan andesit. Nisan sisi utara relatif masih baik sedangkan nisan sisi selatan sudah patah menjadi dua. Makam Tuanku Basusu Ampat mempunyai ukuran panjang 2,30 meter dihitung dari jarak nisan. Nisan sisi utara yang masih berdiri dengan kondisi baik mempunyai ketinggian dari permukaan tanah kurang lebih 50 centimeter dengan bentuk persegi enam. Pada bagian atas, nisan ini dipahat sehingga menyerupai bentuk bunga teratai sedang mekar.²⁰

Makam Babulu Lidah terletak di samping barat makam Tuanku Basusu Ampat berjarak kurang lebih 1,5 meter. Nisan makam Tuanku Babulu Lidah tinggal sisi utara dan tampaknya telah patah, yang tertinggal hanya bagian bawah dengan tinggi 20 centimeter. Sedangkan nisan sisi selatan sudah hilang dan sekarang telah diganti dengan batu baru. Ukuran panjang makam Tuanku Babulu Lidah kurang lebih 2,4 meter. Menurut informasi Sultan Alif Kedua tokoh yang dimakamkan tersebut merupakan raja yang pernah memerintah di kerajaan Padang lawas.²¹

Kerajaan Malayu Dharmasraya, pada akhir abad ke 15 dipindahkan oleh Adityawarman ke daerah pedalaman di Suraso, perpindahan ini lebih disebabkan oleh semakin berkembangnya ajaran agama Islam di pantai timur Sumatera. Dengan berpindahnya pusat kerajaan dari Dharmasraya ke daerah pedalaman maka berakhirnya masa kejayaan Dharmasraya sebagai ibukota kerajaan. Ketika Bangsa Belanda berkuasa di Indonesia mereka menemukan peninggalan dari Kerajaan Malayu Dharmasraya, dalam kondisi hancur/rusak, keadaan ini diperkirakan oleh alam dan tangan manusia yang ingin mencari harta karun.

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

Perpindahan pusat kerajaan dari Dharmasraya pada abad ke 15, mengakibatkan daerah Dharmasraya menjadi wilayah kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya. Kondisi tersebut berlangsung sampai datangnya masyarakat dari berbagai daerah ke wilayah tersebut. Penduduk yang datang tidak lagi menggunakan nama Dharmasraya sebagai nama daerah, kondisi ini disebabkan terputusnya hubungan dan sejarah antara penduduk yang menghuni kawasan tersebut setelah pusat kerajaan dipindahkan.

2. Peninggalan Zaman Islam

Kekosongan penduduk akibat berpindahnya pusat kerajaan dari Dharmasraya ke Pagaruyung segera berakhir. Hal tersebut dibuktikan pada awal abad ke 15 di sekitar wilayah Dharmasraya telah muncul beberapa buah kerajaan kecil yang dapat ditemukan hingga hari ini adalah kerajaan Siguntur, Padang Laweh, Pulau Punjung dan Kota Besar. Kerajaan tersebut, tidak bisa dipahami sebagaimana kita memahami kerajaan di Jawa maupun di dunia, sebab kerajaan di Minangkabau umumnya hanya ditandai dengan sebuah Rumah Gadang yang menjadi simbol bahwa mereka berbeda dengan masyarakat lainnya.

Di samping itu para raja di Minangkabau tidak memiliki bukti tertulis yang membuat mereka diakui sebagai raja, pengakuan mereka peroleh hanya dari masyarakat di wilayah kekuasaan mereka. Proses pewarisan cerita tentang kerajaan di Minangkabau lebih banyak melalui tambo dan sastra lisan dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerajaan tersebut. Masing-masing kerajaan memiliki peninggalan yang menjadikan mereka berbeda dibandingkan dengan kerajaan lain. Peninggalan yang dimiliki telah mendapatkan pengaruh dari agama Islam yang mulai berkembang saat itu. Berikut peninggalan masa Islam di Dharmasraya:

a. Kerajaan Pulau Punjung



Rumah Raja Pulau Punjung

(Ket: Dokumen Pribadi)

Peninggalan terbesar dari Kerajaan Pulau Punjung yang bisa dinikmati hingga hari ini adalah Rumah Gadang Pulau Punjung. Bangunan ini didirikan pada tahun 1838, yang berbentuk rumah panggung bergonjong dua sebagaimana ciri khas Rumah Gadang di Minangkabau. Secara keseluruhan bangunan bekas istana ini terbagi dalam dua ruangan, yaitu ruangan luar dan ruangan dalam. Bekas istana Pulau Punjung menghadap arah utara. Dinding luar bangunan utama di bagian muka terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bawah dan atas. Bagian bawah merupakan bangunan yang terbuat dari dinding tembok. Bagian ini merupakan bagian tambahan yang dibuat lebih kemudian yang dahulu sebenarnya tidak ada.

Adapun bagian atas, yang berada di atas dinding tembok, adalah berupa dinding kayu. Bagian dinding kayu ini juga bukan merupakan bangunan asli karena bangunan aslinya berupa kayu berukir sebagaimana sering terdapat di atas rangkiang. Di bagian muka bangunan utama terdapat jendela berjumlah 6 buah, yang berukuran tidak sama besar. Pintu utama berada di bagian tengah bangunan yang dihubungkan oleh bangunan tangga masuk dari lepa semen berjenjang 6

buah dari halaman muka untuk menuju ke ruang dalam, berukuran panjang 3,40 cm dan lebar 1,85 cm .²²

Ruang dalam terdiri dari bagian lantai, dinding dalam, kamar, jendela dan tiang penyangga. Lantai terdiri dari lima tingkatan, tinggi dari dasar tanah masing-masing 60 cm, 180 cm, 220 cm, dan 228 cm. Lantai yang terdiri dari beberapa tingkatan tersebut menurut Tuanku Sati menunjukkan bahwa Rumah Gadang tersebut disesuaikan dengan keselarasan dari suku Koto Piliang. Pada lantai yang terendah setelah pintu masuk digunakan sebagai tempat duduk masyarakat biasa. Di lantai tengah di dekat bilik, digunakan sebagai tempat duduk pemuka masyarakat dan sanak famili, sedangkan di lantai teratas digunakan sebagai tempat duduk Tuanku Sati, para pembesar kerajaan, dan ninik-mamak pemangku adat.²³

Denah bangunan utamanya berbentuk empat persegi panjang. Dinding bagian dalam seluruhnya terbuat dari kayu yang sebagian sudah diganti dengan yang baru. Kamar-kamar yang semula berjumlah 7 buah sekarang tinggal 5 buah. Seluruh jendelanya berjumlah 6 buah masing-masing 3 buah ada di tengah, 2 buah di sebelah kanan, dan 1 buah ada di sebelah kiri. Seluruh tiang berjumlah 30 buah yang terdiri dari tiang utama 12 buah berada di tengah-tengah bangunan, 6 buah tiang penyangga berada di bagian muka, dan 12 buah tiang penyangga bagian belakang bangunan²⁴.

Pembangunan Rumah Gadang Pulau Punjung mulai dilaksanakan semenjak zaman Raja Timbalan, sebelum itu kaum kerajaan tinggal di Rumah Gadang Sungai Dareh. Setelah Rumah Gadang di Pulau Punjung selesai dibangun maka pusat kerajaan dipindahkan ke Pulau Punjung, pada Rumah Gadang inilah pelepasan gelar Tuanku Sati dilaksanakan, disamping itu dalam Rumah Gadang ini boleh

²² *Ibid*

²³ *ibid*

²⁴ Laporan Pendataan Benda-Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Dharmasraya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar.

juga dilewakan gelar datuk bagi Pulau Punjung, Sungai Dareh dan Sungai Kambut. Hal itu melambangkan bahwa kedudukan Rumah Gadang ini sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat di Pulau Punjung.²⁵

Di samping sebuah Rumah Gadang, Kerajaan Pulau Punjung juga memiliki berbagai peninggalan yang menggambarkan kebesaran dari kerajaan yang mereka miliki. benda-benda yang mereka miliki merupakan benda yang mereka bawa ketika mereka pindah dari istana "*Kaco Puri*" dulunya, diantara benda pusaka dari kerajaan Pulau Punjung adalah : Sepasang Pakaian Tuanku Sati, yang terdiri dari Mahkota Bertahta Emas, Keris Gajah Menong, Selambar Samurai dengan Wing dari emas, Pedang, Tombak, Marawa tiga warna, Satu buah carano, Dua buah uncang selengkapnyanya. Dua buah gong, 1 dulang berkaki, Seperangkat Pakaian Bundo, 2 Helai Kalung dari emas, Sebuah gelang bungkal emas, 2 buah cinci emas, Sebuah ikat pingang emas bergagang perak, 3 lembar kain tenun lapak, 1 lembar kodek tenun lapak, Sebuah Stempal Kerajaan, Sebuah Mahkota ikat penobatan, Ranji keturunan, Sebuah peti besi.²⁶



Benda Pusaka Kerajaan Pulau Punjung

(Sumber : Dokumen Pribadi)

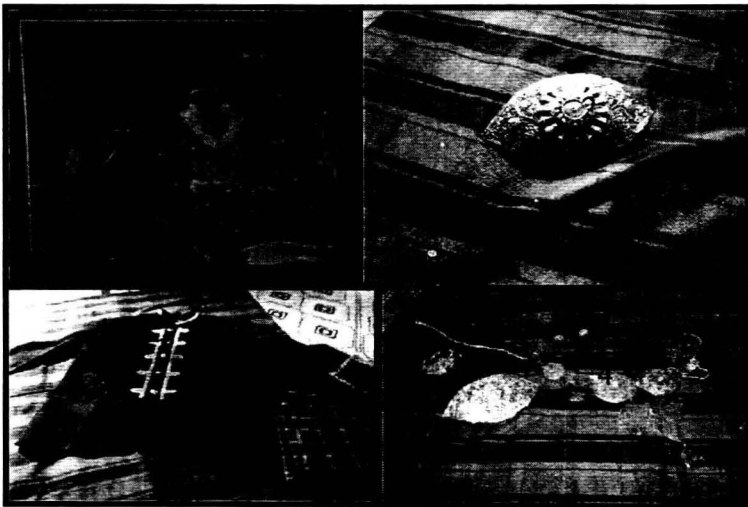
²⁵ Tuanku Sati IV "*Tambo Sejarah dan Sisilah Keturunan Rajo Pulau Punjung*" cerita turun temurun yang ditulis kembali (tidak diterbitkan), Ranji Kerajaan Pulau Punjung diambil di Pulau Pulau Punjung

²⁶ *Ibid*

Keterangan Gambar

Gambar 1 adalah Ikatan Penobatan Penghulu yang digunakan untuk penobatan penghulu yang ada di wilayah kekuasaan Pulau Punjung seperti Pulau Punjung, Sungai Dareh, dan Sungai Kambuik. Ikatan penobatan penghulu ini terbuat dari kayu yang diberi ukiran, benda ini merupakan salah satu peninggalan yang dibawa dari istana "*kaco puri*".

Gambar 2 adalah mahkota Tuanku Sati, mahkota ini hanya dipakai oleh Tuanku Sati ketika acara adat seperti pelantikan para penghulu atau acara adat lainnya. Sedangkan gambar 3 adalah Keris Tuanku Sati yang dipakai oleh Raja Pulau Punjung bersama dengan mahkota kerajaan, Gambar 4 merupakan stempel kerajaan yang menggambarkan bahwa kerajaan Pulau Punjung memiliki kedaulatan sendiri terhadap daerah yang mereka kuasa. Semua benda tersebut dibawa dari istana *Kaco Puri*.²⁷



Benda Pusaka Kerajaan Pulau Punjung

(Sumber : Dokumen Pribadi)

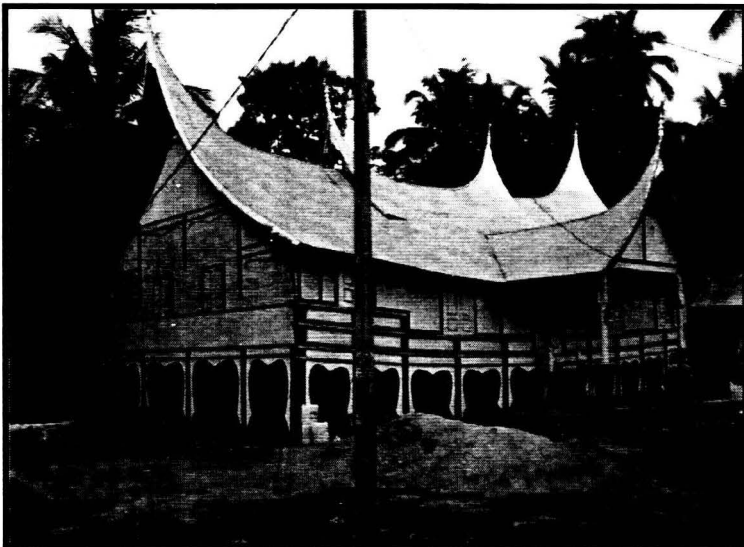
²⁷ Ibid

Keterangan Gambar

Gambar 1 menjelaskan tentang H. Abdul Haris Tuanku Sati ketika berpakaian lengkap, dengan mahkota, keris, ikat pinggang dan segala atribut kerajaan lainnya. Foto ini merupakan gambar ketika Abdul Haris dilantik menjadi Tuanku Sati ke V. Gambar 2 Ikat Pinggang yang dipakai raja ketika memakai baju kerajaan

Gambar 3 adalah baju kebesaran Tuanku Sati yang dibawa dari Istana "*Kaco Puri*" baju ini merupakan warisan turun temurun dari Sutan Kimpalan raja Pulau Punjung yang pertama. Sedangkan gambar 4 merupakan perlengkapan bundo kandung kerajaan Pulau Punjung.

b. Peninggalan Kerajaan Siguntur



Rumah Gadang Kerajaan Siguntur

(Ket : Dokumen pribadi)

Benda-benda *Pusako* peninggalan kerajaan Siguntur yang utama adalah rumah gadang. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat musyawarah ninik mamak sampai sekarang. Selain tempat musyawarah rumah gadang juga digunakan untuk tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan kerajaan. Bangunan ini merupakan bangunan tradisional Minangkabau dengan ciri khas atap bergonjong, pada awalnya terbuat dari ijuk, namun pada tahun 1974 rumah gadang terbakar, sehingga atap ijuk ditukar dengan bahan seng. Sedangkan dinding dan lantai masih dari bahan kayu, begitu juga jendela dan pintu. Pada awalnya bangunan tersebut kaya akan ornamen dan ukiran tradisional yang melambangkan status sosial Raja Siguntur mengingat rumah tersebut adalah tempat tinggal raja. Bentuk bangunan adalah panggung dengan memiliki denah bangunan persegi panjang dan memiliki teras di depan. Alat-alat peninggalan Kerajaan Siguntur saat ini tersimpan di masing-masing kerabat kerajaan, karena rumah gadang tidak lagi dihuni oleh penerus kerajaan. Bangunan Rumah Gadang tersebut saat ini masih terawat dan dalam tahap renovasi.



Mesjid Kerajaan Siguntur
(Ket : Dokumen Pribadi)

Bangunan masjid ini diperkirakan telah berumur 100 tahun. Masjid ini berdenah empat persegi. Atap masjid berbentuk atap tumpang yang melambangkan Bodi Caniago. Bangunan masjid ini ditopang oleh 1 buah tiang soko guru berdiameter 40 dan tinggi 7,85 m, serta dikelilingi tiang yang lain sebanyak 12 buah yang berbentuk segi delapan setinggi 5 m.²⁸ Dengan ditemukan mesjid di kawasan ini, maka dapat dipastikan bahwa Kerajaan Siguntur merupakan sebuah kerajaan yang telah mendapat pengaruh dari Agama Islam.

Di samping peninggalan yang berbentuk benda kerajaan Siguntur juga memiliki peninggalan yang berbentuk kesenian yang dikenal dengan nama tari Toga. Tari Toga yang artinya "Tari Larangan" adalah tari tradisional kuno Kerajaan Siguntur, karena masih berhubungan dengan Minangkabau dan Melayu, beberapa gerak tari ini mirip dengan tari minang dan melayu. Menurut Pewaris Kerajaan Siguntur, Tari Toga merupakan tari resmi kerajaan sejak zaman Kerajaan Dharmasraya yang berpusat di Siguntur pada abad ke-14. Tari ini masih dipakai ketika Kerajaan Hindu-Buddha itu beralih ke Islam sejak abad ke-15 atau tahun 1673 dengan raja Islam pertama Sutan Abdul Jalil Sutan Syah Tuanku Bagindo Ratu.²⁹

Tari Toga menjadi tari resmi kerajaan dan ditampilkan pada upacara penobatan raja (batagak gala), pesta perkawinan keluarga raja, upacara turun mandi anak raja, perayaan kemenangan pertempuran, dan gelanggang mencari jodoh putri raja. Ketika Belanda berhasil masuk ke Siguntur pada 1908 dan raja-raja di Siguntur dan sekitarnya terpaksa mengakui kedaulatan Pemerintahan Kolonial Belanda, raja kehilangan kedaulatannya. Banyak benda kerajaan yang diambil, termasuk tambo (riwayat kerajaan yang tertulis) dan aktivitas kesenian kerajaan, termasuk Tari Toga, pun vakum sudah, "Tari Toga nyaris hilang."³⁰

²⁸ *Op.cit* Laporan BP3 Batusangkar

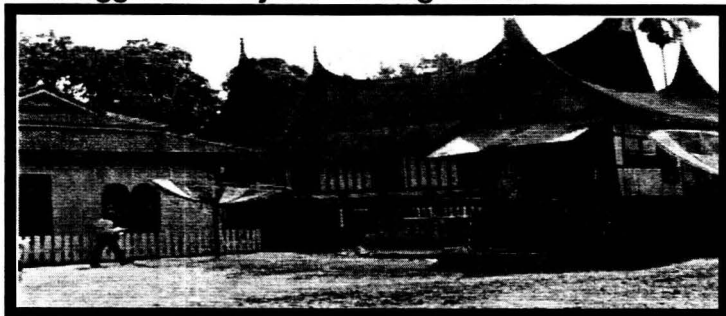
²⁹ Tari Toga Kerajaan Siguntur yang nyaris punah diambil dari www.padangkini.com pada tanggal 25 April 2009

³⁰ *Ibid*

Syair Tari Toga berisi cerita tentang seorang laki-laki yang baik hati bernama Sutan Elok yang mati ditanduk kerbau. Si pemilik kerbau bernama Bujang Salamaik dibawa ke hadapan raja untuk diadili. Raja akhirnya mengeluarkan titah agar ia dihukum pancung, hukuman biasa di zaman Kerajaan Dharmasraya. Mendengar hukuman itu, maka Cati Bilang Pandai, penasehat raja, yang digambarkan dengan deretan pendendang, berdendang menghibur raja. Kata Cati, kenapa kerbau yang membunuh tapi pemiliknya yang dihukum mati. Dendang yang disampaikan bersama-sama itu akhirnya menghibur raja dari kegundahannya dan mengampuni si pemilik kerbau dengan pesan agar si Bujang Salamaik tidak melakukan kesalahan lagi memelihara ternaknya. "Dulu dendang dan tarinyanya sampai 7 jam dan dilakukan para pemain yang usianya di atas 40 tahun³¹.

Tari Toga dengan dendang Bujang Salamaik hanya satu dari beberapa dendang lainnya yang pernah hidup di Kerajaan Siguntur yang dilantunkan dalam Tari Toga. Sayang, hanya kisah Bujang Salamaik itu yang tersisa. Dendang lainnya, seperti Dendang Ameh, hanya diingat oleh generasi yang tinggal judulnya tanpa mengetahui isi dendangnya.

c. Peninggalan Kerajaan Padang Laweh



Rumah Gadang Padang Laweh
(Sumber : Dokumentasi BP3 Batusangkar)

³¹ *Ibid*

Rumah Kerajaan Padang Laweh terbuat dari bahan kayu dengan atap seng berbentuk gonjong 2 buah ditambah gonjong pada bangunan samping. Bangunan ini merupakan bangunan kecil yang telah menempel pada bangunan induk. Bentuk bangunan dengan gonjongnya membujur arah depan belakang, sedangkan bangunan induknya melintang/ menyamping. Bangunan Induknya mempunyai ukuran 9,25 m, dengan lebar 4,75 m. Sedangkan bangunan bilik samping mempunyai ukuran 6,5 m x 1,8 m, dengan ketinggian panggung 50 cm, serta tiang penyangga 20 buah berbentuk persegi.³²

Rumah Gadang peninggalan Kerajaan Padang Laweh, menurut Sultan Alif (juru pelihara) sebenarnya tidak di lokasi yang sebenarnya, tetapi karena sesuatu hal akhirnya dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini. Demikian juga bahan dan bentuk Rumah Gadang yang sekarang tidak lagi sesuai aslinya. Jenis dan jumlah benda-benda peninggalan di kerajaan Padang Laweh, paling banyak dibandingkan dengan kerajaan Siguntur, Pulau Punjung dan Koto Besar.³³

Tingkat Sumatera Barat peninggalan di Kerajaan Padang Laweh merupakan nomor dua terbanyak setelah peninggalan yang terdapat di Kerajaan Mandeh Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan. Kerajaan Padang Laweh memiliki tiga buah stempel, yang digunakan untuk pengiriman surat-surat ke masing-masing kelurahan, sebab di Kerajaan Padang Laweh untuk mengirim surat ke masing-masing lareh harus menggunakan stempel yang berbeda, namun stempel yang memiliki tanggal telah hilang, ketika Kerajaan Padang Laweh diundang untuk mengikuti kegiatan pekan budaya di Payakumbuh, saat ini yang tertinggal hanya besinya.

Peninggalan kerajaan Padang Laweh, yang paling banyak dalam bentuk senjata perang, kondisi ini disebabkan

³² Op.cit Laporan pendataan BP3 Batusangkar

³³ *urang tuo* Kerajaan Padang Laweh " Sejarah Kerajaan Padang Laweh " Dokumen tidak diterbitkan

proses kedatangan raja Padang Laweh, disamping untuk menjadi raja, beliau juga bertugas untuk membantu kerajaan-kerajaan kecil yang mendapat gangguan dari kerajaan lain, kondisi ini menyebabkan rombongan raja Padang Laweh datang dengan membawa banyak senjata perang. Beberapa benda bersejarah yang ditemui di Kerajaan ini adalah:

1. Tiga buah tombak, dan disebut dengan Tombak Hulu Janggi. Tombak tua ini memiliki tataran saga jantan dan juga dinamakan dengan tombak Siampang.
2. Empat buah keris yang memiliki hulu Raja Monang dimana selapahnya terbuat dari emas serta tiga buah keris panjang
3. Dua buah dulang, yang dinamaka dengan Dulang Tinggi dan Dulang Rendah Selain itu juga ditemukan dua buah Carano, yang dinamakan Carano Tinggi dan Carano Duduk.
4. Dua buah gong besar, dengan nama Gong Jantan dan Gong Betina, serta sebuah mundam untuk memandikan anak Raja.
5. Sebuah teropong panjang dimana keadaanya hingga sekarang masih dalam keadaan baik, dan sebuah pedang Jinawi namun dalam keadaan rusak.
6. Empat buah stempel dari dua orang Raja diatas. Disamping sebuah merawa besar berwarna putih, hitam dan merah.
7. sebuah ikat pinggang dengan pending terbuat dari emas³⁴

Peninggalan Kerajaan Padang Laweh juga berbentuk benda-benda rumah tangga dan kebutuhan rumah gadang. Benda-benda rumah tanga yang terdapat di Padang Laweh adalah gong, puro tempat emas, dulang kebesaran, carano rendah. pariuk kuning, carono tinggi, carono randah akat.

³⁴ *Ibid*

Benda-benda tersebut biasanya digunakan untuk acara kebesaran kerajaan.³⁵

C. PENUTUP

Kabupaten Dharmasraya merupakan sebuah daerah yang baru dimekarkan, namun berdasarkan peninggalan yang mereka miliki, kawasan ini jauh lebih dahulu disentuh oleh peradaban dan kemajuan. Apa yang disampaikan dalam tulisan ini merupakan jejak jejak peninggalan zaman Hindu, dan Budha di Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu peninggalan zaman Islam juga banyak ditemukan dikawasan ini, tulisan ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi para mahasiswa sejarah untuk lebih aktif dan peduli terhadap peninggalan zaman Hindu dan Budha di daerah mereka. Kajian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan stakeholder untuk membuat perencanaan dan pengembangan agar kekayaan sejarah dan budaya yang terdapat di kawasan ini bisa dioptimalkan.

¹ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

Bambang Budi Utomo “ Sebuah Acra Amoghopasa Sebuah Hadiah dari Kertanegara ke Dharmasraya. Diambil dari www.melayuonline.com pada tanggal 21 juli 2009

Budi Istiawan Makalah “ *Pengelolaan Potensi Sejarah di Dharmasraya* ” disampaikan dalam Seminar Nasional di Gunung Medan tanggal 1 – 2 Desember 2009

Datuk Naiman *urang tuo* Kerajaan Padang Laweh “ Sejarah Kerajaan Padang Laweh “ Dokumen tidak diterbitkan

Hendri Bin Sora Tuanku Bagindo Ratu VIII “Catatan Kecil Tentang Kerajaan Siguntur” Dokumen tidak diterbitkan

Efrianto. *A Laporan Penelitian* (2009) Sejarah-sejarah di Kabupaten Dharmasraya: Padang Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

Koran Tempo “ Kerajaan di Tepi Batanghari terbit 21 -27 Januari 2008 diambil dari www.slbcibinong.net pada tanggal 21 juli 2009

Laporan Kuliah Lapangan Kenagari Siguntur Tanggal 28–30 November 2009. diambil dari blog www.corat_coret.wordpress.com pada tanggal 21 Maret 2009

Laporan Pendataan Benda-Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Dharmasraya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar.

Slamet Muljana. 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA OTONOM LUBUK LINGGAU

Oleh: Zusneli Zubir

A. Perkembangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Lubuk Linggau mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan berbagai lembaga atau organisasi Islam yang mengelola pendidikan. Semua lembaga tersebut mengelola pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Perkembangan pendidikan Islam tersebut tidak tumbuh begitu saja, tetapi melalui perjalanan dan proses yang panjang.

Secara informal pendidikan Islam sudah dikenal oleh masyarakat Lubuk Linggau dan Musi Rawas, semenjak Lubuk Linggau di buka tahun 1925 oleh Belanda. Pendidikan Islam yang dikembangkan para ulama atau guru agama pada waktu itu tidak sama dengan sistem pendidikan Islam saat ini, tetapi masih bersifat personal dengan sistem yang juga sudah dikenal oleh sebagian umat muslim yang disebut dengan sistem *halaqah*. Tujuan utama pendidikan Islam untuk membina mental spiritual anak dengan memberikan dasar kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga mampu mengamalkan syariat Islam secara benar dan sesuai dengan pengetahuan agama Islam.¹

Pendekatan personal, keluarga dan masyarakat dalam pendidikan Islam pada awal perkembangannya merupakan proses pendekatan kearah sistematis yang memandang

¹ Edi Sedyawati., et., al. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991), hal. 46.

bahwa orang perorangan merupakan bagian dari unit keluarga, sedangkan keluarga menjadi sub sistem masyarakat, sementara itu masyarakat yang semakin berkembang menjadi makro sistem yang berada dalam naungan Negara.

Dalam konteks Islam, pendidikan sudah dikenal sejak jaman nabi, karena eksistensi pendidikan Islam sudah dikenal sejak pertama kali Islam diwahyukan. Hal itu juga dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an yang pertama – Q.S. 96 : 1 – 5 – diturunkan berhubungan langsung dengan pendidikan. Perintah membaca (iqra') dalam surah al-Alaq, mengandung nilai filosofis dan menjadi dasar bagi kegiatan pendidikan.²

Hal ini pula yang menyebabkan kenapa berbagai kalangan dalam umat Islam sangat antusias guna mendirikan berbagai lembaga pendidikan untuk kepentingan umat. Lembaga pendidikan dianggap sebagai alat yang sangat efektif dan strategis bagi proses terjadinya transformasi nilai dan budaya pada suatu komunitas social.

Berbagai lembaga Islam yang di pelopori oleh Muhammadiyah dan NU muncul sebagai penggerak dunia pendidikan di Lubuk Linggau. Semua lembaga pendidikan Islam yang didirikan tersebut mendasari paling tidak empat unsur pokok kebudayaan seperti dibawah ini :

1. Unsur etika (moral) untuk membentuk ikatan-ikatan sosial
2. Unsur estetika untuk membentuk cita rasa umum
3. Logika terapan untuk menentukan bentuk-bentuk aktivitas umum
4. Teknologi terapan yang sesuai dengan semua jenis yang ada dalam ragam masyarakat atau "industri".

Menariknya adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren yang ada dibawah NU, tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan saat ini.

² Samsul Nizar. *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam ; Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*. (Jakarta : Quantum Teaching. 2005), hal. 143.

Padahal pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam dengan sistem pendidikan tertua khas Indonesia., tetapi mampu berperan sebagai pemberi inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencinta ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai dimensi. Dari kawahnya, sebagai obyek studi telah lahir doktor-doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat pesantren sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini yang kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia seutuhnya. Ada beberapa nilai fundamental pendidikan pesantren yang selama ini jarang dipandang oleh kalangan yang menganggap dirinya modern, antara lain:

- (1) komitmen untuk ***tafaquh fi ad-din***, nilai-nilai untuk teguh terhadap konsep dan ajaran agama;
- (2) pendidikan sepanjang waktu (***fullday school***);
- (3) pendidikan integrative dengan mengkolaborasikan antara pendidikan formal dan nonformal (pendidikan seutuhnya, teks dan kontekstual atau teoritis dan praktis);
- (4) adanya keragaman, kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab;
- (5) dalam pesantren diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat.³

Setelah melalui beberapa kurun waktu, pesantren saat ini tetap tumbuh dan berkembang secara subur dengan tetap menyandang ciri-ciri tradisionalnya. Sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, menurut Azra, pesantren memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakatnya dan sekaligus bertahan di tengah berbagai gelombang perubahan.⁴

³ Chabib Thoha, " Mencari Format Pesantren Salaf", dalam *Majalah Bulanan Rindang* No. 9 Th.XXVI April 2001, hal. 87

⁴ Azyurmardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*, cet. I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1998), hal. 87.

Ada beberapa prinsip yang tetap dipegang teguh oleh lembaga penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Lubuk Linggau dan Musi Rawas pada umumnya. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah :

1. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang membawa manusia kepada api neraka (Q.S At-Tahrim: 6)
2. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sebagai realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertaqwa, yang senantiasa memanjatkan do'a sehari-hari.
3. Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar serta membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kenistaan.
4. Prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta rasa dan karsanya.
5. Prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan dirinya pada sang pencipta.⁵

Lima prinsip inilah yang menjadi suatu alasan kenapa pondok pesantren tetap mampu bertahan dalam menghadapi tantangan jaman. Disamping itu tentu tidak terlepas dari kemampuan dari lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan Islam tersebut dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan nasional yang diatur oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional.

⁵ Enung K. Rukiati, et., al. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia. 2006), hal. 100

Bahwa kemudian muncul tuntutan modernisasi pesantren, sebagai dampak dari modernisasi pendidikan pada umumnya, tentu hal itu merupakan suatu yang wajar sepanjang menyangkut aspek teknis operasional penyelenggaraan pendidikan. Jadi, modernisasi tidak kemudian membuat pesantren terbawa arus sekularisasi karena ternyata pendidikan sekuler yang sekarang ini menjadi *tren*, dengan balutan pendidikan moderen, tidak mampu menciptakan generasi mandiri. Sebaliknya, pesantren yang dikenal dengan tradisionalnya justru dapat mencetak lulusan yang berkepribadian dan mempunyai kemandirian. Pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok kepulauan nusantara, turut pula menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia membentuk "*character building*" bangsa Indonesia.⁶

Justru pada saat arus jaman yang mengemukakan ciri-ciri modernisasi tersebut, bukannya mengurangi kemampuan Pondok Pesantren untuk tetap bertahan dengan kondisi seperti itu, bahkan pada saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Pesantren bukan semakin redup, tetapi semakin berkembang dan tumbuh dimana-mana. Meskipun minat masyarakat terhadap sistem pendidikan Islam yang dikelola oleh pondok pesantren tidak memiliki peminat yang besar, tetapi pondok pesantren memiliki segmen pasar sendiri yang membuat keberadaannya tetap bertahan.

Sampai tahun 2007 Lubuk Linggau memiliki Pondok Pesantren sebanyak 14 pondok. Semua pondok tersebut mengelola sekolah berbasiskan pendidikan Islam hampir pada semua tingkatan. Pondok-pondok pesantren tersebut dikelola oleh yayasan berbadan hukum dan berada dibawah satu organisasi yaitu Nahdatul Ulama (NU).

Guna mendukung kegiatan belajar mengajar di semua pondok tersebut, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang

⁶ Faisal Ismail, *Percikan Pemikiran Islam*, (Yogyakarta : Bina Usaha, 1984), hal. 69

memadai. Semua pondok membangun fasilitas bagi kenyamanan belajar santri, mulai dari fasilitas ruang belajar, asrama, baik putra maupun putri, mesjid atau mushola dan labor serta perpustakaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 1: Data Fasilitas Pondok Pesantren yang Ada di Lubuk Linggau Tahun 2007

No	Nama Pondok Pesantren	Aset dan Fasilitas				
		Luas tanah M2	Ruang Belajar/ Local	Asrama Putra/ putri	Mesjd id/ Mush ola	Labor atau Pustaka
1.	Al-Azhaar	8.015	14	15	2	3 unit
2.	Al-Ihklas	57.000	22	8	2	-
3.	Al-Furqon	25.000	4	5	1	-
4.	Ittihadul Ulum	10.050	8	5	1	-
5.	Lukmanul Hakim	3.700	3	8	1	-
6.	Mafaza	25.240	5	4	1	-
7.	Annajiyah	1.000	4	1	-	-
8.	Darussalam	3.000	8	-	-	-
9.	ICM	500.000	19	18	1	1
10.	Pertanian Hubbul Aitam	2.500	6	7	1	-
11.	Nurunnajah	6.110	1	6	2	-
12.	Ar-Risalah	80.000	9	15	1	-
13.	Mazroillah	3.750	11	26	2	2
14.	Saifullah	2.800	9	5	1	-

Sumber data Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 2007

Berbeda dengan model pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Organisasi seperti Muhammadiyah. Model pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah pada awalnya sudah semi klasifikasi, salah satu cikal bakalanya yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Sekolah ini didirikan pertama kali di Yogyakarta oleh Ki Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember 1911 dengan jumlah murid sebanyak 29

orang siswa. Sekolah yang didirikan oleh Ki Ahmad Dahlan ini berkembang dengan cepat, hanya dalam waktu enam bulan sekolahnya sudah memiliki sebanyak 62 orang siswa.

Pada dasarnya tujuan Muhammadiyah mengembangkan lembaga Pendidikan Islam berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dirumuskan menjadi tiga pola perjuangan Muhammadiyah, yang secara eksplisit dirumuskan sebagai berikut: 1). Menegakkan keyakinan tauhid yang murni, sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh seluruh Rasul Allah, sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad SAW; 2). Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, Kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia, dan Sunnah Rasul; 3). Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Model pendidikan Islam yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Muhammadiyah merupakan sistem pendidikan yang telah diperbaharui dengan memadukan antara unsur lama yaitu Islam sebagai dasar pembaharuan dengan unsur baru berupa metodologi yang diambil dari sistem pendidikan modern. Semuanya itu tentu saja tidak terlepas dari pengaruh modernisasi yang sedang terjadi pada saat Muhammadiyah muncul di Indonesia.

Semua daerah yang mendirikan ranting maupun cabang Muhammadiyah di suatu daerah selalu diikuti dengan mendirikan sekolah. Pada awalnya sekolah-sekolah yang didirikan ranting maupun cabang Muhammadiyah semuanya berbentuk madrasah. Begitu pula dengan Lubuk Linggau, pertama kali mendirikan sekolah pada tahun 1938 juga berbentuk madrasah, setingkat Sekolah Rakyat (SR) dan itu sekaligus menjadi syarat untuk menaikan status Muhammadiyah Lubuk Linggau yang pada waktu itu masih sebagai ranting naik statusnya menjadi Cabang.⁷

⁷ Wawancara dengan Suwandi, pensiunan PNS dan sekarang sebagai Dosen di STKIP Lubuk Linggau, Umur 66 tahun, pada tanggal 16 April 2010 di Lubuk Linggau.

Setelah menjadi cabang, Muhammadiyah Lubuk Linggau semakin aktif mengembangkan berbagai usaha untuk kepentingan umat. Berbagai usaha dilakukan, termasuk mengembangkan pendidikan berbentuk Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) pada ranting-ranting Muhammadiyah yang kemudian menyusul di bentuk.



Foto 1. Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh pengurus Muhammadiyah dalam rangka pembangunan salah satu gedung sekolah yang di kelola oleh Muhammadiyah.

(Sumber foto: Zusneli Zubir)

Guna mendukung perkembangan pendidikan, Muhammadiyah Lubuk Linggau pada tahun 1967 membangun sebuah gedung atas sumbangan para perantau Minangkabau (Sumatera Barat) yang berasal dari berbagai organisasi ke daerahan yang digunakan untuk sekolah.⁸ Gedung itu dibangun di atas tanah wakaf yang di berikan oleh Haji Khottob dan untuk pertama kali gedung itu di bangun hanya

⁸ Wawancara dengan Syamsudurar. R, mantan guru Muhammadiyah, umur 83 tahun, pada tanggal 16 April 2010 di Lubuk Linggau

memiliki lima lokal. Semenjak gedung sekolah itu di bangun, Muhammadiyah mulai mengembangkan pendidikan dengan cepat. Beberapa sekolah menyusul didirikan, pertama adalah Mu'alimin. Kemudian sampai tahun 1975 menyusul berturut didirikan SD Muhammadiyah, SPG, SMP dan SMK. Semua sekolah itu pada awalnya hanya mempergunakan satu gedung yang di bangun tahun 1967 secara bersama.⁹

Sampai tahun 2010 Muhammadiyah Lubuk Linggau telah memiliki sekolah-sekolah dari semua tingkatan, mulai dari sekolah umum sampai sekolah berbasiskan pendidikan agama. Adapun sekolah berbasiskan pendidikan agama yang dikelola oleh Muhammadiyah dimulai dari tingkatan TK (Raudatul Athfal) sebanyak lebih kurang 12 sekolah, Madrasah Tsanawiyah tiga sekolah, dan Madrasah Awwaliyah satu sekolah. Begitu pula dengan sekolah umum, Muhammadiyah mengelola SD empat sekolah, SMP sebanyak lima sekolah dan SMA satu sekolah. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah berikut ini :

Tabel 2 : Sekolah-Sekolah Yang di Kelola Oleh Muhammadiyah Tahun 2010

No	Sekolah	Jumlah
1.	Raudatul Atfal (RA) atau TK	12
2.	Madrasah Tsanawiya	3
3.	Madarasah Aliyah	1
4.	Sekolah Dasar (SD)	4
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1

Sumber : Dokumen Muhammadiyah tahun 2010

Kemajuan dalam pengelolaan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah maupun NU, disusul oleh berbagai lembaga pendidikan Islam lainnya. Ada banyak lembaga pendidikan Islam di Lubuk Linggau yang mengelola

⁹ Dokumen atau arsip Bapak Andhy Mangara, BS, Maret 2001.

berbagai sekolah berbasis agama Islam. Diperkirakan ada sekitar 34 lembaga pendidikan Islam yang mengelola sekolah-sekolah berbentuk Madrasah tersebar di seluruh daerah Lubuk Linggau, begitu pula dengan pondok pesantren diperkirakan ada sekitar 10 sampai 11 pondok pesantren yang juga mengelola sekolah-sekolah untuk semua tingkatan madrasah.

Selanjutnya bagaimana perhatian pemerintah dan responnya dalam membina dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga swasta maupun oleh pemerintah sendiri, akan dibahas dalam sub bab berikut.

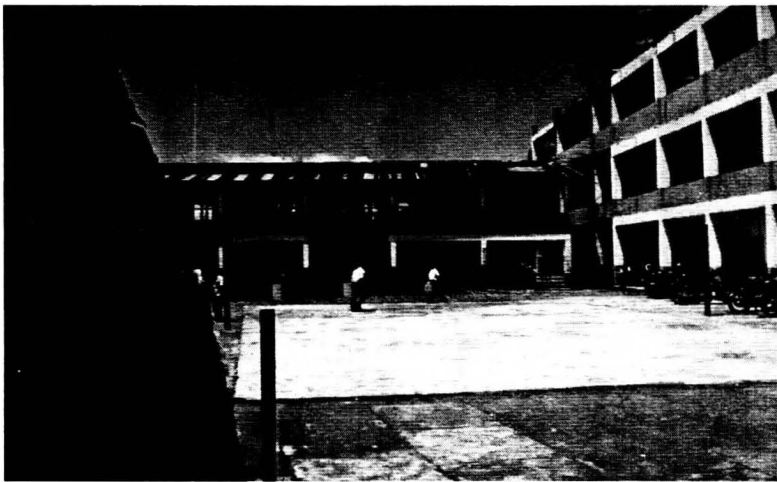


Foto. 2 Salah satu kompleks sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah Lubuk Linggau Tahun 2010
(Sumber foto: Zusneli Zubir)

B. Respon Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam

Perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia sudah cukup baik, meskipun disana sini masih terdapat berbagai kekurangan. Mengingat hal itu Departemen Agama berencana mengajukan

Rancangan Peraturan tentang diskriminatif terhadap penyelenggaraan Pendidikan Islam. Adanya perlakuan yang berbeda terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam dan umum mendorong munculnya ide untuk mengusulkan rancangan peraturan tentang perlakuan yang sama terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam dan umum.

Terlepas dari semuanya itu, kenyataan yang ditemukan dilapangan memang banyak perlakuan yang berbeda terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan umum. Meskipun pemerintah memperhatikan kemajuan dari penyelenggaraan pendidikan Islam dengan memberikan berbagai bantuan, tetapi bantuan itu tidak terlalu banyak artinya dalam mendorong kemajuan dari pendidikan Islam itu sendiri.

Bantuan yang diberikan oleh Departemen Agama guna membantu kemajuan lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan Islam secara finansial relative sangat kecil. Buktinya adalah bantuan yang diberikan pada beberapa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Lubuk Linggau pada tahun anggaran 1984 hanya berupa bantuan pembangunan untuk beberapa local seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yadarma dengan bantuan 2 lokal, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri juga dapat dua sampai tiga local. Jadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mendapat bantuan tambahan lokal dari pemerintah melalui Departemen Agama di Lubuk Linggau di tahun anggaran 1984 ada sekitar 19 Madrasah Ibtidaiyah (MI).¹⁰ Selain bantuan tambahan lokal Departemen Agama Lubuk Linggau atau Musi Rawas juga memberikan bantuan pembinaan guru-guru dalam rangka meningkatkan kualitas dengan mengikutkannya pada berbagai kegiatan penataran guru.

Pada tahun anggaran 1985 Pemerintah melalui Departemen Agama terus memberikan bantuan terhadap Madrasah-madrasah yang ada di Lubuk Linggau dan Musi

¹⁰ Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 1984

Rawas pada umumnya, meskipun jenis bantuan dan besaran bantuannya tidak ada peningkatan, tetapi perhatian terhadap semua madrasah tetap ada. Paling tidak perhatian dalam bentuk pembinaan terhadap peningkatan kualitas guru dan sekolah tetap berjalan secara rutin.

Fokus pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Agama salah satu ruang lingkupnya adalah pembinaan dan pengembangan materi pendidikan agama Islam yang meliputi ; akidah, syari'ah, dan ahklak. Tuntutan ideal ini menekankan bahwa pendidikan dan pengajaran yang di berikan di sekolah-sekolah, selain mengajarkan kepadaian akal (rasio) juga dituntut menanamkan benih kemerdekaan, demokrasi, kebenaran yang luhur, keikhlasan hati, serta kesetiaan dan kecintaan kepada kebenaran, sebagaimana yang diterapkan pada system pendidikan zaman keemasan Islam. Ini menjadi cita-cita ideal bagi semua lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam.

Sehubungan dengan hal itu Pemerintah melalui Departemen Agama dengan intensif selalu memberikan bantuan dan pembinaan terhadap semua lembaga pendidikan Islam tersebut. Oleh sebab itu pada tahun anggaran 1986 Pemerintah melalui Departemen Agama Lubuk Linggau kembali memberikan bantuan terhadap beberapa madrasah yang dikelola oleh swasta maupun negeri guna meningkatkan fasilitas ruang belajar bagi sekolah-sekolah tersebut. Dari 19 madrasah yang ada di Lubuk Linggau ada 6 madrasah yang memperoleh bantuan pembangunan dari Pemerintah pada tahun anggaran 1986, sedangkan yang lain bantuan dalam bentuk pembinaan tetap berjalan seperti biasanya.¹¹

Setelah Lubuk Linggau berubah status menjadi Kota Administrasi, bantuan terhadap sekolah mulai ada peningkatan yang lebih baik, karena bantuan yang diterima oleh sekolah-sekolah tidak lagi hanya tergantung dari dana anggaran Departemen. Perubahan itu terjadi terutama setelah

¹¹ Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 1986

masuknya era reformasi, dengan digelindingkannya satu program khusus yang kemudian dikenal dengan "Bantuan Operasional Sekolah" (BOS). Semenjak BOS ini dilemparkan ketengah lapangan pembangunan sekolah, maka semenjak itu banyak sekolah yang menikmati hasil yang lebih baik untuk peningkatan kualitas sekolah masing-masing.

Pada tahun anggaran 2000, Lubuk Linggau dan Musi Rawas pada umumnya telah menyalurkan dana BOS melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 049/SK/BAPPEDA/2000 tanggal 13 November 2000 kepada sekolah berbasis Islam seperti madrasah sebanyak 69 sekolah dengan besar bantuan beragam.¹² Tiap sekolah menerima bantuan tidak sama, Jadi bantuan yang diterima dimasing-masing sekolah berbeda, tergantung kondisi yang ada di sekolah penerima bantuan.

C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam

Secara umum dasar kebijakan pengembangan pendidikan di Indonesia adalah "Undang-Undang Dasar 45" pasal 31 yang berisikan tentang ; pertama tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan kedua Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.¹³ Selain Undang-Undang Dasar 45 ini, dasar kebijakan pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Menurut Undang-Undang Dasar 45 tersebut di atas seluruh warga Negara Indonesia di jamin untuk memperoleh pendidikan karena itu adalah hak warga Negara. Guna melaksanakan pendidikan, pemerintah juga menjamin terlaksananya suatu system pendidikan secara nasional.

¹² Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 2000.

¹³ Samsul Nizar. *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam ; Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*. (Jakarta : Quantum Teaching. 2005), hal. 168.

Hanya dari kedua Undang-Undang tersebut tidak diatur tata cara pelaksanaan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan umum dan agama setingkat Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diatur hanya tata cara pelaksanaan pendidikan umum. Mengingat hal itu, maka Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera pada bulan Januari 1947 mengambil kebijakan dengan menetapkan memasukan pendidikan agama pada sekolah umum untuk semua tingkatan selama dua jam seperti Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).¹⁴

Ketetapan yang dikeluarkan oleh Jawatan Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berlaku untuk seluruh daerah yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera, termasuk di dalam hal ini adalah daerah Lubuk Linggau yang menjadi Ibu Kota Musi Rawas.

Sementara itu pengaturan tentang tata cara pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum baru di atur pada masa Menteri Agama K Fathur Rahman pada tanggal 2 Oktober 1946. Dasar pengaturan itu dilakukan berdasarkan penetapan dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Ketetapan Menteri Agama dilakukan pada tanggal 12 Desember 1946 No 1285/K-7 dan Ketetapan menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan di keluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1946 No 1142/Bhg A. Dalam ketetapan tersebut diatur tata cara pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum yaitu, pendidikan agama hanya dapat diberikan mulai dari kelas IV Sekolah Rakyat (SR), sedangkan kelas I, II dan III pendidikan agama tidak boleh diberikan.¹⁵

Penetapan bersama Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama tersebut pada tahun

¹⁴ Mahmud Yunus *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Hidakarya. 1979), hal. 125 - 128

¹⁵ *Ibid*, Mahmud Yunus, hal. 357.

1946 disusul dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah berupa peraturan bersama dua Menteri. Peraturan dua menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 1951 No 1432/Kab. dan peraturan Menteri Agama tanggal 20 Januari 1951 No K.1/651 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan sekolah agama. Pasal 2 Peraturan tersebut berisikan; pertama di sekolah-sekolah rendah pendidikan Agama dimulai pada kelas IV (empat), dengan lama belajar 2 (dua) jam dalam satu minggu. Kedua, di lingkungan yang istimewa pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas I (satu) dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan, bahwa mutu pengetahuan umum, bagi sekolah-sekolah rendah tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.¹⁶ Agar lebih jelas, maka untuk itu dapat dilihat pada table mata pelajaran dan pembagian jam belajar bagi Sekolah Rakyat (SR) berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1951 adalah sebagai berikut :

Tabel 3: Mata Pelajaran Agama dan Pembagian Jam Belajar Bagi Sekolah Rakyat (SR) Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1951

No	Mata Pelajaran	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6
1.	Kimanan				40	40	40
2.	Akhlak	80	80	80	40	40	40
3.	Ibadat				40	40	40
4.	Al-Qur'an	80	80	80	40	40	40

Sumber : Departemen Agama

Catatan :

80 jam berarti 2 jam dalam seminggu

40 jam berarti 1 jam dalam seminggu

¹⁶ *Ibid*, Mahmud Yunus, hal. 358.

Semenjak dikeluarkannya peraturan dua Menteri menyangkut pendidikan agama Islam, maka kebutuhan akan guru agama juga terjadi peningkatan. Atas pertimbangan hal tersebut pada tahun 1950-an, bermunculan banyak sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Guru Agama Islam. Hampir semua daerah menyelenggarakan pendidikan guru agama ini, termasuk Lubuk Linggau. Pada tahun 1960-an Muhammadiyah Lubuk Linggau mendirikan Mualimin atau Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang ujian persamaannya menumpang pada Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 (empat) tahun di Lubuk Linggau.¹⁷

Sehubungan dengan maraknya bermunculan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama dan Pendidikan Guru Agama, maka pada tahun 1950 Menteri Agama memutuskan untuk membentuk Jawatan Pendidikan Agama yang khusus mengatur pelaksanaan pendidikan agama secara nasional.

Khusus untuk sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan agama Islam, pada tahun 1952 pemerintah mengeluarkan ketetapan perubahan untuk penyeragaman semua jenis pendidikan agama Islam. Jadi apapun lembaga yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam semuanya mengacu kepada ketetapan pemerintah tersebut.

Setelah ketetapan pemerintah tahun 1952 tentang penyelenggaraan pendidikan Islam tersebut, beberapa kali menyusul keluar peraturan yang intinya menyempurnakan aturan sebelumnya. Peraturan yang keluar mengenai penyelenggaraan pendidikan Islam oleh pemerintah adalah pada tahun 1967 yang intinya berisikan pengakuan terhadap keberadaan pendidikan Islam seperti madrasah. Semenjak itu madrasah punya kesempatan untuk menjadi madrasah negeri untuk semua tingkatan. Oleh sebab itu pada saat ini banyak madrasah-madrasah swasta yang berusaha untuk menjadi madrasah negeri.

¹⁷ Wawancara dengan Syamsudurar. R umur 83 tahun, mantan guru Muhammadiyah, pada tanggal 16 April 2010 di Lubuk Linggau.

Mengingat banyaknya madrasah swasta yang berlomba-lomba untuk menjadi madrasah negeri, sementara untuk pembiayaan dan bantuan fasilitas sangat terbatas, maka pemerintah memutuskan untuk mengatur tata cara pengusulan madrasah swasta menjadi madrasah negeri. Sehubungan dengan hal itu maka pada tahun 1970 pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 213 tahun 1970 tentang pencabutan keputusan tahun 1967 tentang penegerian madrasah swasta.¹⁸

Semenjak keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 213 tahun 1970 tersebut di atas, maka dapat dikatakan tidak ada lagi madrasah swasta hampir disemua tingkatan tidak ada lagi yang lolos untuk menjadi sekolah negeri. Hanya saja semua madrasah swasta tersebut tetap mendapat bantuan pembiayaan dan pembinaan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah masing-masing, begitu pula dengan bantuan tenaga pengajar.

Kemudian pada tahun 1975 pemerintah mengeluarkan keputusan baru mengenai penyelenggaraan pendidikan Islam di seluruh Indonesia. Keputusan itu menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, adapun keputusan tersebut adalah Surat Keputusan Bersama tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Menurut SKB 3 menteri ini yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Islam sebagai mata pelajaran dasar utamanya. Madrasah yang dimaksud dalam SKB 3 Menteri tersebut mencakup tiga tingkatan yaitu; Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah

¹⁸ Enung K Rukiati, et.al. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia. 2006), hal. 121.

Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).¹⁹

Guna merealisasikan pelaksanaan SKB 3 menteri tahun 1975 tersebut di atas, maka pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan acuan kurikulum sebagai standar dalam pelaksanaan pengajaran oleh sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Akan tetapi tidak semua madrasah yang pada akhirnya mengikuti acuan SKB 3 menteri tersebut, karena ada sebagian madrasah yang tetap mempertahankan pola lamanya. Tujuannya hanya ingin menyelenggarakan pendidikan berbentuk sekolah agama murni, contohnya adalah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wustho (MDW). Pada perkembangan selanjutnya MDA dan MDW ini masuk kedalam golongan pendidikan non formal yang di kelola oleh lembaga mesjid, mushola, langgar atau surau khusus untuk di Sumatera Barat.

Setelah SKB 3 menteri, pada tahun 1984 pemerintah kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang merupakan tindak lanjut dari SKB yang di keluarkan pada tahun 1975. Adapun SKB yang di keluarkan tahun 1984 berisikan tentang pembukuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Dalam SKB ini disebutkan bahwa madrasah memiliki persamaan sepenuhnya dengan sekolah umum dalam mencapai cita-cita pendidikan nasional dan madrasah diharapkan dapat berperan sama dengan sekolah umum dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Agar Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) tersebut mempunyai kekuatan hukum pasti, maka pada tahun 1989 pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai tindak lanjut dari SKB tersebut. Adapun Undang-Undang yang di keluarkan oleh pemerintah pada tahun 1989 tersebut adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun

¹⁹ Musyrifah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005), hal. 129.

1989,²⁰ yang selanjutnya menjadi wadah terintegrasinya lembaga pendidikan Islam dalam system pendidikan nasional. Adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan.

Ada beberapa pernyataan strategis yang memberikan peluang besar bagi penyelenggarakan pendidikan Islam untuk berkembang, yaitu salah satu isi dari UUSPN Nomor 2 tersebut menyatakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rsa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan."²¹

Meskipun secara tegas tidak dinyatakan tentang peluang bagi semua lembaga pendidikan Islam untuk memanfaatkan kesempatan untuk berkembang berdasarkan pernyataan yang ada dalam UUSPN tersebut, tetapi paling tidak secara implisit peluang itu tergambar dengan jelas. Jadi sekarang yang penting adalah bagaimana lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan Islam memanfaatkan kesempatan tersebut, tentu saja dengan cara merebutnya, kalau hanya menunggu jelas hal itu tidak akan bisa dilakukan.

Hal yang hampir sama juga ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2003. Dalam pasal 1 (satu) ayat 5 (lima) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa "Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan perubahannya yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia serta

²⁰ *Op., cit.* Enung K Rukiati, hal. 73.

²¹ Departemen P&K. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang SISPENAS. (Jakarta : Kloang Klede Jaya. 1989), hal 7.

tanggap terhadap perubahan zaman". Kemudian pada pasal 4 (empat) hal itu lebih diperkuat bahwa, "Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi mulia, sehat, berilmu, kompeten, terampil, kreatif, mandiri, estetis, demokratis, dan memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kalau mau jujur apa yang telah ditetapkan oleh kedua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tersebut di atas terlihat, bahwa justru posisi lembaga penyelenggara pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya yang porsi pendidikan Islamnya lebih kecil. Hal itu disebabkan, karena orientasi pendidikan Islam tidak hanya sekedar pengembangan IQ (mencerdaskan) anak didik, akan tetapi juga mengembangkan EQ (kecerdasan Emosi) dan SQ (kecerdasan Moral) secara harmonis. Sesuai dengan pesan edukasi yang disampaikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional seperti tersebut diatas agar pendidikan mampu melahirkan out put manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kualitas intelektual yang tinggi.

Selanjutnya peraturan pemerintah tentang pendidikan agama ini keluar pada tahun 2007, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peraturan ini dan peraturan-peraturan sebelumnya menjadi dasar pijakan bagi setiap penyelenggaraan pendidikan Islam.

Oleh sebab itu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia no 55 tahun 2007, ditegaskan bahwa fungsi pendidikan agama untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Hal ini tercantum

dalam bab 2 pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2007 tersebut.²²

Selain itu dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang bentuk-bentuk pendidikan agama, mulai dari pendidikan bagi anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi.

Adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia no 55 ini, maka semua penyelenggara pendidikan Islam harus mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Jadi semua aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan Islam, sampai pada penetapan sistem pendidikannya, harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan itu.

Selain peraturan pemerintah No 55 tersebut di atas, pada tahun 2008 pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.²³ Jadi setelah adanya kerangka acuan pelaksanaan pendidikan Islam yang disamakan dengan pendidikan umum, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan terhadap seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Pada peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tersebut Pemerintah Pusat melalui menteri terkait menjamin terselenggaranya program wajib belajar bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna melaksanakan program tersebut pemerintah menetapkan kebijakan tersebut dalam rencana kerja pemerintah, rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Program wajib belajar ini menjadi salah satu rencana kerja strategis pemerintah, mulai dari

22 Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 2007

23 Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 2008

pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten.

Bahkan dalam peraturan pemerintah nomor 47 tersebut pada Bab VI (enam) tentang penjaminan wajib belajar dalam pasal 9 (Sembilan) ayat 1 (satu) pemerintah menyatakan menjamin bahwa selama program ini berlangsung pemerintah menjamin tidak akan ada dipungut biaya apapun.

Jadi semua keputusan, peraturan-peraturan dan Undang-undang tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan Islam maupun pendidikan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi kerangka acuan bagi semua lembaga-lembaga itu. Baik lembaga pendidikan yang sedang melaksanakan program pendidikannya maupun lembaga pendidikan yang baru merencanakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut.

Apa yang telah ditetapkan oleh Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera pada tahun 1946 tidak mengatur tentang tata cara pelaksanaan pendidikan pada perguruan-perguruan Islam untuk semua tingkatan. Oleh sebab itu semua pendidikan Islam yang ada di Sumatera tidak melaksanakan tata cara pendidikan berdasarkan rujukan yang jelas. Secara esensial pada prinsipnya semua mata pelajaran yang diajarkan dalam satuan pengajaran hampir sama saja. Kalau lembaga pendidikan tersebut berada dalam satu payung organisasi besar seperti Muhammadiyah, semua satuan pengajarannya telah ditetapkan dari organisasi pusat.

Begitu pula dengan organisasi-organisasi lain seperti Nahdatul Ulama (NU), mereka juga mengeluarkan kerangka acuan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pengajaran di setiap sekolah-sekolah yang diselenggarakannya. Bukan hanya NU atau Muhammadiyah, tetapi termasuk lembaga keagamaan seperti, Al-Jami'atul Washliyah, dan pesantren-pesantren yang ada di bawah organisasi PERSIS serta Al-Irsyad..

Melihat kondisi yang seperti itu, pada tahun 1952 pemerintah melakukan penyeragaman terhadap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Islam pada semua tingkatan dengan sekolah umum. Jadi semua lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam, semenjak dikeluarkannya ketetapan penyeragaman tersebut, harus mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.

Bahkan dalam Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri juga ditegaskan bahwa untuk semua lembaga pendidikan yang mengelola sekolah-sekolah berbasiskan agama ditetapkan hanya boleh memasukkan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30 %, disamping mata pelajaran umum.

Sedangkan acuan untuk melaksanakan kurikulum bagi semua lembaga pendidikan, baik untuk sekolah-sekolah agama maupun sekolah-sekolah umum di seluruh Indonesia, termasuk untuk daerah Lubuk Linggau, pemerintah melalui Departemen Agama pada tahun 1976 mengeluarkan ketetapan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh madrasah, baik untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta. Ketetapan kurikulum yang dikeluarkan tahun 1976 tersebut juga tidak terlepas dari realisasi Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) menteri tahun 1975.

Adapun ketetapan kerangka acuan pengadaan kurikulum tersebut juga dilengkapi dengan beberapa petunjuk seperti berikut :

1. Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum.
2. Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi baik untuk bidang studi agama maupun bidang studi pengetahuan umum.

Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 pada pasal 37 menyatakan bahwa, kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memerhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Guna melengkapi aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tersebut di atas, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar pada pasal 4 (empat) ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing di sebut Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

D. Kesimpulan

Dinamika pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, dimulai semenjak Islam masuk yang diperkenalkan oleh pembawanya. Hanya saja dinamika di masing-masing daerah mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dalam penerimaannya, tergantung kondisi sosial budaya daerah masing-masing.

Pengalaman yang dihadapi oleh Kota Lubuk Linggau dalam usaha pengembangan pendidikan Islam jelas sangat berbeda dengan pengalaman yang dihadapi oleh daerah lain. Masing-masing tantangan tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi sosial budaya yang ada di daerah dimana usaha pengembangan pendidikan Islam itu dilakukan.

Pendidikan Islam terkait dengan usaha tentu juga tidak terlepas dari kondisi seperti itu, kalau mampu menghadapi semua tantangan tersebut tentu akan mampu bertahan (*survive*). Sebaliknya kalau tidak mampu bertahan dan mengikuti perkembangan yang ada tentu akan tertinggal dan

tidak akan berkembang.

Tantangan yang paling berat di hadapi oleh banyak lembaga pendidikan Islam di Lubuk Linggau, terutama disebabkan oleh kondisi sosial masyarakatnya sendiri. Ada semacam imeje yang merugikan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang akhirnya membuat lembaga-lembaga tersebut jadi lamban perkembangannya. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah, ditutupnya lembaga pendidikan Islam setingkat Madrasah Aliyah (MA) swasta disebabkan karena tidak ada siswa.

Ada semacam anggapan yang salah ditengah masyarakat terhadap pendidikan Islam, bahwa peluang untuk berkembang pada sekolah-sekolah berbasis agama sangat terbatas. Ini menjadi salah satu penyebab kenapa minat masyarakat, untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah berbasis agama menjadi berkurang. Begitu pula dengan anak-anak sendiri, mereka lebih suka memilih sekolah umum, apalagi sekolah-sekolah favorit, semuanya berebutan untuk bisa masuk ke sekolah tersebut.

Secara umum perhatian dan respon pemerintah terhadap perbaikan dan peningkatan terhadap kualitas sekolah cukup baik, meskipun di sana-sini masih ada kesan diskriminatif antara bantuan dan pemberian pembinaan terhadap sekolah-sekolah agama dan sekolah umum. Namun paling tidak pemerintah sudah berbuat untuk melakukan pembinaan terhadap semua sekolah-sekolah agama tersebut, meskipun untuk masa-masa yang akan datang perlu ada peningkatan yang lebih baik. Terutama untuk melengkapi kebutuhan akan guru-guru di sekolah agama. Kalau di lihat perkembangan guru di sekolah-sekolah agama terlihat lambat pertumbuhannya contohnya semenjak tahun 1984 sampai tahun 2000 pertambahan guru hanya sekitar 200 orang guru. Selama rentang waktu 16 (enam belas) tahun guru-guru sekolah agama Islam yang ada di Lubuk Linggau dan Musi Rawas pada umumnya hanya bertambah 200 orang, suatu gambaran pertumbuhan yang sangat luar biasa lambat. Kedepannya ini yang perlu menjadi perhatian serius bagi

semua pihak terkait dalam menangani masalah tersebut.

Atas dasar semua aturan yang ditetapkan pada kurikulum tersebut diatas, maka lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan Islam di seluruh daerah di Indonesia memiliki dua tanggungjawab yang harus dikembangkan pada sekolah berbasis agama Islam. Mengingat hal itu, maka tanggungjawab lembaga pendidikan berbasiskan agama Islam jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, karena disamping mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Pendidikan Nasional, mereka juga mengikuti kurikulum berdasarkan mata pelajaran agama Islam.

Agar lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat berkembang dan *survive*, maka perlu keberanian mengadakan perubahan-perubahan esensial secara periodik. Kalau ini dilakukan tentu ini hanya sekedar bisa bertahan, tidak berkembang. Jadi kalau ingin maju dan berkembang, tidak hanya *survive*, maka harus berani melakukan perubahan yang fundamental sebagaiantisipasi ke masa depan sesuai dengan trend yang berkembang.

Hanya saja perlu diingat, bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan tidak lari dari tujuan yang paling mendasar dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu ; sebuah proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan yang meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik. Sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk melaksanakan tujuan kehadirannya di sisi Tuhan sebagai hamba dan wakilNya di muka bumi.

Jadi bagi lembaga pendidikan Islam perlu diingat, bahwa perlu tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga yang membentuk manusia dengan pengetahuan yang kaffah. Jangan sampai terjebak dengan trend pendidikan umum yang cenderung sedang berkembang saat ini. Memang harus diakui bahwa disatu sisi pendidikan umum mampu memainkan peranannya secara positif. Akan tetapi keberhasilannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena system pendidiks masih bersifat parsial; antara pendidikan umum dan

pendidikan agama. Akibatnya pendidikan yang dilaksanakan hanya mampu menciptakan out put yang terpecah; kokoh dalam dimensi kognitif-intelektual, tetapi rapuh pada dimensi afektif-moralitas religious.

Kelebihan lembaga pendidikan Islam ada pada keduanya, mampu membentuk manusia dari dimensi kognitif-intelektual, sekaligus mampu membentuk manusia dari dimensi afektif-moralitas religious. Oleh sebab itu kalau lembaga-lembaga pendidikan mau mengikuti perkembangan trend pendidikan, yang perlu dipertahankan adalah kelebihanannya karena mampu membentuk manusia yang berkualitas dengan tetap bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*, cet. I Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1998,

Abd al Rohman al Nahkawi, *Ushul al tarbiyah al Islamiyah wa Asalibuha* Damaskus : Dar al Fikr 1992

Ali Saifullah. *Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan; Pendidikan Sebagai Gejala Kebudayaan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1982

A Malik Fajar, *"Pengembangan Pendidikan Islam"*, dalam Nafis (Ed), *Konstekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali*, MA, Jakarta : IPHI dan Paramadina, 1995

Chabib Thoha, *" Mencari Format Pesantren Salaf"*, dalam *Majalah Bulanan Rindang* No. 9 Th.XXVI April 2001,

Departemen P&K. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang SISPENAS. Jakarta : Klong Klede Jaya. 1989

Edi Sedyawati., et., al. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat*. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991

Enung K. Rukiati, et., al. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia. 2006.

Faisal Ismail, *Percikan Pemikiran Islam*, Yogyakarta : Bina Usaha, 1984.

Mahmud Yunus *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakata : Hidakarya. 1979

Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Jakara: Pustaka Muhammadiyah.

M. Dawam Raharjo, *"Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren"*, Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah* Jakarta: P3M, 1985

M. Said. *Pendidikan Awal abad ke Dua Puluh dengan*

Latarbelakang Kebudayaan. Jakarta: Mutiara. 1981.

Musyrifah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005

Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan*, Cet. 1 Jakarta : Paramadina, 1997

Samsul Nizar. *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam ; Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*. Jakarta : Quantum Teaching. 2005

Sumarsono Mestoko et al., *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.

Suriyadi, *Strategi Peningkatan Mutu pendidikan dengan metode Pondok pesantren*. (Studi Kritis tentang Manajemen di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Kismantoro Wonogiri), Tesis MSI, Yogyakarta :UII, 2005,

Suwandi. *Historiografi Lubuk Linggau*. Lubuk Linggau : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia. 2008

Syed Muhammad al Naquid al Attas, *Konsep Pendidikan Islam*, Bandung : Mizan, 1990

Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet I Jakarta : LP3ES, 1982

I. Artikel

Andhy Mangara. Sekilas Riwayat Muhammadiyah Dahulu di Musi Rawas, *Dokumen*, 25 Maret 2001

Selamet Rosyidi, et.,al. *Sepintas Kilas Muhammadiyah di Musi Rawas*, Lubuk Linggau : Muhammadiyah Musi Rawas. Mei 1986

II. Laporan

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 1984

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 1986

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 2000.

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 1984 – 2000

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 1986

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 2007

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 2008

Dokumen Departemen Agama Kota Lubuk Linggau tahun 1984 - 2000

**DILEMA PEREMPUAN MINANGKABAU ANTARA
TRADISI DAN MODERNITAS;
KAJIAN SEJARAH SOSIAL ATAS PERANAN
PEREMPUAN MINANGKABAU DI KECAMATAN
ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG
PARIAMAN 1970-2005.**

Oleh : Jumhari

A. Pendahuluan

Diskurs mengenai peran dan status perempuan terkait dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender belakangan ini mendapat perhatian yang cukup luas, baik dari penentu kebijakan, akademisi maupun para aktifis pembela hak-hak perempuan sendiri. Isu-isu yang dilontarkan tidak hanya menyangkut peranan perempuan dalam ranah domestik maupun publik semata. Akan tetapi telah mengarah pada tuntutan adanya perlakuan yang tidak adil atas konstruksi sosial perempuan yang selama ini cenderung termarginalkan akibat sistem sosial dan budaya dimana mereka berada. Bergulirnya isu-isu di atas, merupakan refleksi atas kesadaran akan ketertindasan hak-hak perempuan.

Lahirnya gerakan feminisme yang pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1880-an yang berjuang untuk memperoleh hak-hak politik. Semula gerakan itu berkembang di daratan Eropa dan Amerika, kemudian menjalar ke negara-negara Timur lewat politik imperialisme bangsa barat.¹ Pada dasarnya munculnya gerakan feminisme merupakan upaya untuk membongkar mitos perempuan yang melahirkan *stereotype* bahwa perempuan dianggap sebagai benda antik dan unik yang harus dijaga dan diperlakukan secara istimewa. Persoalannya adalah bahwa perlakuan istimewa itu justru

¹ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bapakuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001

melahirkan konstruksi sosial yang justru menindas hak perempuan sendiri.

Pemahaman yang keliru atas interpretasi menyangkut perbedaan gender. Pada akhirnya akan melahirkan ketidakadilan gender, sebagaimana konsep masyarakat umum yang menyakini bahwa tugas pokok perempuan hanya berkutat dalam persoalan domestik. Sedangkan urusan publik menjadi persoalan dan bagian dunia laki-laki. Adanya dikotomi dan distingsi kerja yang membedakan perempuan dan laki-laki menurut Mansour Pakih merupakan ciri khas dan cara kerja sistem *patriarkhi*.²

Dalam konteks perempuan Minangkabau persoalan kesetaraan gender menarik untuk diperbincangkan, mengingat suku bangsa Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di dunia yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (*matrilineal*).³ Wacana mengenai persoalan gender *mainstream* perempuan Minangkabau dan konstruksi sosialnya tidak akan pernah habis untuk diulas. Bahkan akhir-akhir ini berbagai fenomena menyangkut perempuan Minangkabau seperti persoalan adanya bias gender dan ketimpangan sosial yang dialaminya mewarnai polemik di beberapa surat kabar lokal di kota Padang.⁴ Secara garis

² *Ibid.*, hlm. 2

³ Banyak tokoh perempuan Minangkabau yang memiliki reputasi mengharumkan dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia seperti Rohana Kudus, perintis pers dengan Korannya *Soenting Melayoe*, Rahmah El Yunusiyah dengan Perguruan Diniyah Putri (Padang Panjang), H.R. Rasuna Said dan masih banyak nama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa perempuan Minangkabau memiliki kualitas yang setara dengan kaum prianya.

⁴ Padang Ekspres, tanggal 2 Januari 2006 dengan judul "Minangkabau bukan Republik Gender" yang dilontarkan oleh Budayawan kondang Sumatera Barat, Wisran Hadi. Kemudian dihari yang sama tanggal 3 Januari 2006 dengan tema "Perempuan Harus Aktif, Tanggap dan Bersuara, *interview* wartawan Padang Ekspres dengan Ibu Meuthia Hatta, Menteri Pemberdayaan Wanita serta ulasan kolom Teras Utama Harian Padang Ekspres tanggal 14 Januari 2006 oleh Ruda K. Idrus, aktifs perempuan serta naggota legislatif DPRD Sumatera Barat periode 2004-2009 dengan judul "Gender dan Pemberdayaan Perempuan".

besar inti dari polemik di berbagai pemberitaan tersebut tak lain adalah mengulas persoalan posisi sosial perempuan Minangkabau dan respon kultural masyarakat menyangkut paradigma perempuan dalam konteks masyarakat yang menganut garis matrilineal.

Dalam perpektif ideal normatif, perempuan Minangkabau karena tradisi matrilinealnya lebih mandiri secara sosial ekonomi sebab perempuan Minangkabau mewarisi harta pusaka dari kaumnya. Akan tetapi fakta empirik menunjukkan kualitas hidup perempuan Minangkabau masih terpinggirkan. Hasil Sensus 2003 memperlihatkan bahwa penduduk Sumatra Barat yang berusia 10 tahun ke atas yang belum / tidak sekolah jumlahnya lebih besar dari laki-laki (perempuan 30, 78 %, laki-laki 27,16 %). Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lebih rendah daripada laki-laki (perempuan 42,94 %, laki-laki 71,80 %), sedangkan perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif hanya 8,66 %. Dalam bidang kesehatan masih ditemui tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu 305/100.000 kelahiran.⁵

Alam Minangkabau secara kultural mengenal daerah Luhak nan tigo (Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota) serta daerah rantau pesisir barat dan pesisir timur, seperti Pariaman dan Padang di rantau pesisir barat. Dua kawasan ini memiliki karakteristik dan corak tradisi berbeda, seperti pepatah Minangkabau mengatakan “Luhak Bapanghulu, Rantau Barajo”. Perbedaan ini tak lain karena kawasan rantau yang cenderung bersifat dinamis karena persinggungan dengan budaya lain sebagai akibat adanya aktifitas perdagangan laut pada masa lampau. Meskipun begitu, kawasan rantau seperti daerah Pariaman mengakui pula, bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari daerah

⁵ Rusda K. Idrus, *Gender dan Pemberdayaan Perempuan*, dalam Kolom Teras Utama Harian Padang Ekspres tanggal 14 Januari 2006.

luhak atau darek.⁵ Kawasan rantau juga merupakan pintu masuk bagi berkembangnya agama Islam di ranah Minangkabau. Sedangkan daerah Luhak nan tigo merupakan kawasan inti tempat asal-usul adat Minangkabau, sehingga ada ungkapan yang menyatakan "Syara' mandaki, Adat manurun.

Sama seperti masyarakat Minangkabau lainnya, kawasan rantau seperti kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman juga memegang teguh prinsip matrilineal Minangkabau, seperti keanggotaan suku diperoleh dari garis ibu. Adat menetap sesudah menikah mengikuti sistem matrilokal dan sebagainya. Masyarakat daerah ini juga memberikan sejumlah hak adat kepada anak-anak mereka, khususnya bagi anak perempuan. Anak-anak perempuan tidak mendapat hak tertentu dari garis ayahnya. Hak perempuan terutama berkaitan dengan gelar adat yang disandang oleh mamaknya. Gelar kebangsawanan bagi anak laki-laki di Ulakan, seperti *Sidi*, *Bagindo*, dan *Sutan* menjadikan pemiliknya masuk dalam kelompok elit tradisional masyarakat Minangkabau di daerah Pariaman khususnya.

Sistem perkawinan di daerah Pariaman dikenal dengan tradisi *bajapuik*, yakni tradisi dimana pihak mempelai perempuan melakukan proses menjemput untuk melamar calon mempelai laki laki. Tradisi *bajapuik* menurut Syafri Syairin sebagaimana pengantarnya dalam karya Welhendri Azwar, proses tradisi *bajapuik* di Pariaman telah mengalami pergeseran. Tradisi ini menurutnya seperti menggiring masyarakat Minangkabau di Paarianan untuk menganut sistem kekerabatan yang *bilineal* dan membawa masyarakatnya kepada pembentukan pelapisan sosial yang relative tegas. Pelapisan sosial di daerah ini pada gilirannya berimplikasi pada dinamika sosial kehidupan masyarakatnya, seperti tercermin dalam tradisi *bajapuik* pada proses

⁵ Umar Junus, "Kebudayaan Minangkabau", dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1988, hlm. 248-265.

perkawinan masyarakat Pariaman (Nagari Ulakan Tapakis).⁷ Tradisi bajapuk inilah menurut beberapa penulis seperti Welhendri Azwar memposisikan perempuan sebagai subordinasi dari dunia patriaki.⁸

Tradisi bajapuk di daerah Pariaman, baru merupakan satu contoh betapa persoalan menyangkut posisi sosial perempuan Minangkabau terlihat begitu kompleks. Persoalan akan bertambah rumit manakala posisi perempuan Minangkabau dikaitkan dengan beberapa hal seperti, penguasaan akses dan pengelolaan harta pusaka. Pengambilan keputusan dalam rumah gadang, kekerasan dalam rumah tangga, kemampuan ekonomi serta berbagai persoalan sosial budaya lainnya.⁹

Perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa sebagaimana amanat UU no. 5 tahun 1979, telah merubah bangunan sosial masyarakat Minangkabau. Selama masa pemerintahan Orde Baru dengan slogan pembangunismenya, penyeragaman warna budaya menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik teritor. Jatuhnya rezim Soeharto menandai era reformasi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.

⁷ Dalam adat Minangkabau telah ditentukan bahwa dalam proses perkawinan, keluarga pihak calon pengantin perempuan (*anak daro*) diharuskan mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki (*marapulai*) untuk menyampaikan peminangan secara resmi. Dalam tradisi adat ini, sejumlah barang diserahkan oleh pihak keluarga calon *anak daro* kepada keluarga calon *marapulai* sebagai tanda pinangan. Tradisi meminang ini pada perkembangannya mengalami pergeseran jika semula gelar kebangsawanan (simbol lama) menjadi acuannya. Maka hal yang bersifat materi, jabatan, gelar akademis, dan kepangkatan dalam pekerjaan kini menjadi simbol baru.

⁸ Welhendri Azwar, *op.cit.*,

⁹ Persoalan seperti marginalisasi perempuan Minangkabau dalam aspek kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya tidak pernah habis diulas, sebagaimana isu dan berita yang diangkat oleh Media Perempuan, seperti Rohana Kudus, Edisi I/November-Desember 2004, Edisi November 2005 serta Bulletin Limpapeh Edisi I Tahun 2004.

Dalam konteks Sumatera Barat upaya “membangkitkan batang tarandam” sebagaimana diamanatkan oleh Perda No. 9 tahun 2000 mengenai kebijakan kembali ke nagari¹⁰ menjadi momentum penting untuk merebitalisasi kehidupan sosial masyarakatnya, yang sempat terpasung pada masa Orde Baru. Adanya perubahan dalam rezim pemerintahan sebagaimana disebut di atas, tentunya berpengaruh bagi gerak sosial perempuan Minangkabau baik di daerah Luhak nan tigo maupun rantau, seperti nagari Ulakan di Tapakis.

Kajian mengenai status sosial perempuan Minangkabau terkait dimensi sosial dan kulturalnya dengan berbagai sudut pandang yang berbeda baik secara ekonomi, politik, hukum dan budaya telah banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut secara umum biasanya mengenai persoalan yang muncul kepermukaan dan secara substansi mempersoalkan perempuan Minangkabau dalam tataran ideal normatif. Sedangkan persoalan yang menyangkut realitas perempuan yang sesungguhnya dalam rentang waktu dari tahun 1970-an sampai awal-awal reformasi belum pernah dilakukan. Disinilah letak urgensi buku perubahan sosial masyarakat rantau di nagari Ulakan Tapakis.

“Dilema Perempuan Minangkabau antara Tradisi dan Modernitas; Kajian Sejarah Sosial atas Peranan Perempuan Minangkabau di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman 1970-2005” perlu dilakukan, karena minimnya literatur yang mengangkat status sosial perempuan Minangkabau dengan tema historiografi lokal sejarah perempuan.

Pembahasan kajian dalam tulisan ini mengambil batasan spatial, nagari Ulakan Tapakis Kabupaten Pariaman dan kawasan sekitarnya. Sedangkan batasan temporal dari tahun 1970-2005. Pemilihan tahun 1970-an periode awal pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai titik awal dari

¹⁰ Uraian Menarik mengenai persoalan seputar kembali nagari dapat dibaca dalam buku karya Sutoro Eko, *Menggantang Asap, Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari*, Yogyakarta: IRE, 2005.

perubahan paradigma masyarakat Minangkabau. Pada masa itu orang Minangkabau mulai kembali memberdayakan potensi sosial budaya dan ekonomi, baik yang ada kampung halaman maupun rantau untuk membangun kembali ranah Minangkabau, termasuk kaum perempuannya.

Sedangkan batasan akhir permasalahan yang dipilih yakni tahun 2005, lima tahun setelah pemberlakuan Perda No. 9 tahun 2000 tentang kembaili kenagari. Tenggang waktu selama 5 tahun untuk melihat adakah perubahan yang signifikan pada konstruksosial perempuan Minangkabau. Akan tetapi batasan temporal tersebut tidaklah bersifat kaku, karena fakta dan peristiwa sejarah merupakan suatu hal yang sifatnya berkesinambungan. Ada beberapa permasalahan yang cukup aktual untuk dibahas dalam kajian ini, antara lain :

- a. Bagaimanakah kehidupan sosial perempuan Minangkabau di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman pada 1970-2005 ?
- b. Bagaimanakah halnya dengan posisi dan kedudukan perempuan Minangkabau dalam konteks tradisi dan modernitas terkait dengan perkembangan masyarakatnya pada periode ini ?

B. Perempuan antara Tradisi dan Modernitas: Tinjauan Konseptual dan Kajian Pustaka.

Soerjono Soekanto dalam karya klasiknya "Sosiologi suatu pengantar" menyatakan pengertian kedudukan (status) dan kedudukan (social status) memiliki arti berbeda. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok masyarakat, sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya terkait dengan lingkungan pergaulannya, prestisnia, hak-hak serta kewajibannya. Dalam konteks penelitian ini lebih cenderung penggunaan konsep peranan (role) yang merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang

dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, sedangkan peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian sendiri dan sebagai suatu proses.

Dalam konteks kajian menyangkut “Dilema Perempuan Minangkabau antara Tradisi dan Modernitas, Kajian Sejarah Sosial atas Peranan perempuan Minangkabau di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman 1970-2005”, fungsi dari konsep peranan tersebut di atas merupakan landasan atau kerangka berpikir untuk membantu peneliti menuju pada sasaran atau prioritas fokus kajian tersebut diatas, sebab validitas dan kredibilitas data sumber tetap merupakan prasyarat utama dalam konteks penulisan ilmiah.

Boestami dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan dan Peranan Wanita, dalam kebudayaan bangsa Minangkabau”, secara umum cukup memadai dalam memberikan informasinya seputar persoalan sosial yang dialami perempuan Minangkabau. Dalamnya diulas pula mengenai pergeseran kedudukan perempuan dan perannya serta implikasi yang muncul akibat pergeseran tersebut. Karya ini juga menjadi bagian dari riset awal mengenai perbedaan kedudukan dan peran perempuan Minangkabau daerah di darek dan rantau, karena lokasi penelitiannya di nagari Lima Kaum (Lima Puluh Kota, darek) dan nagari Pauh (Padang, rantau). Mungkin yang luput dari pembahasan buku ini adalah aspek diakronisnya, sebab dari sisi inilah terlihat gerak perubahan posisi perempuan dan Minangkabau yang sebenarnya.

Karya kedua dari Welhendri Azwar, “Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapauk”. Karya Welhendri Azwar cukup representatif untuk mengulas persoalan status perempuan Minangkabau yang tinggal di daerah rantau, berbagai persoalan ketimpangan sosial dan adat yang dialami karena adanya aturan dan norma dalam tradisi *bajapauk*. Senada dengan karya Boestami dan kawan-kawan karya Welhendri Azwar kurang melihat dimensi diakronik dalam melihat persoalan perempuan Minangkabau.

Karya ketiga Bustanul Arifin, “uang Hilang dan Masalahnya Dalam Perkawinan di Pariaman” bercorak kajian hampir mirip dengan karya Welhendri Azwar yang membicarakan masalah uang hilang dalam tradisi *bajapuik*, mungkin yang membedakan ulasan Bustanul Arifin lebih bersifat yudiris formal, sedangkan aspek sosialnya kurang dibahas secara mendalam daripada karya Welhendri azwar.

Karya keempat dari Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed), “Menggugat Budaya Patriarki”. Karya ini tidak hanya mengulas persoalan teoritis yang menyangkut ketimpangan sosial perempuan dan ketidakadilan gender akibat hegemoni budaya patriarki, aspek demografi, kesehatan (reproduksi perempuan) menjadi tema bahasan utama. Sedangkan aspek sosial budaya menyangkut posisi perempuan kurang dibahas secara mendalam.

Terakhir buku karya Franz von Benda-Beckman, “Properti dan Kesenambungan Sosial”. Jika dibandingkan karya-karya yang disebutkan di atas, karya Benda-Beckman lebih komprehensif dalam memotret perubahan sosial dan kepemilikan berbagai properti masyarakat Minangkabau, seperti harta pusaka, dasar hukumnya, serta sengketa yang ditimbulkan. Meskipun ulasan dalam buku ini bersifat antropologis, aspek diakronik juga di tekankan secara mendalam oleh penulisnya.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi (Louis Gottschalk, 1986 ; 32).

Metode penelitian tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Antara tahapan berikut saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar tahapan dalam metode sejarah terdiri dari 4 tahap yakni : pertama, pencarian pengumpulan sumber data (heruistik), baik yang berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer di peroleh dengan melacak arsip

maupun dokumen yang terkait dengan kegiatan yang penelitian, yakni dengan melakukan studi perpustakaan (library research) melalui kunjungan ke berbagai perpustakaan yang terdapat kota Padang dan di luar kota padang, seperti; Perpustakaan Wilayah Propinsi Sumatra Barat, Unand, UNP, IAIN, PDIKM Padang Panjang, Dinas Pendidikan Nasional, LKAM, KAN, KUA, Bundo Kandung, Pengadilan Agama serta instansi terkait lainnya di nagari Taram (kab. Lima Puluh kota) dan Nagari Ulakan Tapakis (Kab. Pariaman).

Sedangkan sumber lisan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para nara sumber yang memiliki otoritas dengan tema penelitian di atas seperti tokoh adat, ketua LKAM, KAN dan Bundo Kandung serta menjangkau informasi dari lapangan dengan menggunakan pendekatan "analisis life histori " dalam kaidah ilmu antropologi atau oral histori (sejarah lisan) dalam perspektif Ilmu sejarah.

Kedua, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah, yang meliputi kritik eksteren dan kritik interen. Kritik interen dan eksteren dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber). Sedangkan kritik interen dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber). Ketiga, interpretasi yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa fakta-fakta sejarah.

Historiografi, yaitu tahap penulisan searah. Pada tahap akhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substantial sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis struktural yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. Konstruksi Fisik dan Sosial Kecamatan Ulakan Tapakis

Kecamatan Ulakan Tapakis terletak antara 100° 07' 12' BT dan 2° 46' 00' LS dengan batas wilayah sebagai berikut ; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lubuk Alung dan sebelah barat berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.¹¹ Luas keseluruhan Kecamatan Ulakan Tapakis adalah 38,85 km dengan posisi wilayahnya berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Wilayah Ulakan Tapakis terdiri dari areal persawahan (36 %), ladang (6,5 %), kebun (26 %) perumahan (15 %), jalan (7%) dan lainnya (9,5 %). Jarak antara ibukota kecamatan Ulakan Tapakis dari Kota Pariaman adalah 12 km sebagaimana halnya daerah tropis di bagian wilayah Sumatra lainnya memiliki temperatur harian sekitar 29°-31° dengan curah hujan berkisar 5.036 mm pertahun.

Dalam konsepsi tradisional mengenai alam Minangkabau yang bersumber pada Tambo, dinyatakan bahwa daerah Minangkabau terdiri dari darek (luhak nan tigo) dan rantau. Daerah darek dianggap sebagai asal atau inti dari pemangku kebudayaan Minangkabau, sedangkan rantau merupakan kawasan rantau yang sekaligus merupakan daerah perluasan daerah inti alam Minangkabau.¹²

Bahkan berdasarkan Tambo Alam Minangkabau, wilayah kultural meliputi sebagian besar Sumatra Barat, sebagian daerah Riau, Bengkulu dan Jambi. Wilayah Minangkabau menurut tambo itu meliputi Sikilang Aia Bangih sampai ke Taratak Air Hitam, dari Sipisok-pisok Pisau Hanyuik sampai ke

¹¹ BPS Kabupaten Padang Pariaman, *Kecamatan Ulakan Tapakis dalam Angka 2003*, hlm. 2.

¹² Umar Junus, *op.cit*, hlm. 248, lihat juga A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, hlm 53, serta Muchtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau*, Yogyakarta: UGM Press, 1984, hlm. 61.

Sialang Balantak Besi, dari Riak Nan Badabua sampai ke Durian Ditakuak Rajo.

Masyarakat yang mendiami daerah Pariaman termasuk di Ulakan Tapakis mengakui bahwa nenek moyang mereka berasal dari daerah Darek, tepatnya berasal dari daerah Tanah Datar, yaitu nagari Pariangan. Sejak diberlakukannya kebijakan kembali ke nagari di seluruh wilayah administratif Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2001 berdasarkan Perda Sumatra Barat nomor 9 tahun 2001, Kecamatan Ulakan Tapakis terdiri dari nagari Ulakan dan nagari Tapakis, dimana masing-masingnya memiliki 14 korong di Nagari Tapakis dan 19 korong di Ulakan. Nama-nama Korong tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Nama Korong / Nagari di Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2003

No.	Korong	Nagari
1.	Batang Gadang	Tapakis
2.	Tiram	Tapakis
3.	Rimbo Karambie	Tapakis
4.	Surau Kandang	Tapakis
5.	Parit Tapakih	Tapakis
6.	Batang Kambaru	Tapakis
7.	Surau Duku	Tapakis
8.	Kala Muntung	Tapakis
9.	Lubuk Aro	Tapakis
10.	Kampung Pauh	Tapakis
11.	Kabu	Tapakis
12.	Rawang	Tapakis
13.	Kasai	Tapakis
14.	Kabun	Tapakis
15.	Lapau Kandang	Ulakan
16.	Maransi	Ulakan
17.	Kampung. Ladang	Ulakan
18.	Tiram	Ulakan
19.	Sungai Rimba Gantiang	Ulakan
20.	Sikabu	Ulakan
21.	Padang Toboh	Ulakan

22.	Kepala Koto	Ulakan
23.	Kampung Galapuang	Ulakan
24.	Pasa Ulakan	Ulakan
25.	Padang Pauh	Ulakan
26.	Bungo Pasang	Ulakan
27.	Tanah Padang	Ulakan
28.	Palak Gadang	Ulakan
29.	Manggopoh Dalam	Ulakan
30.	Manggopoh Luar	Ulakan
31.	Binuang	Ulakan
32.	Koto Panjang	Ulakan
33.	Tanjung Medan	Ulakan

Sumber : Kecamatan Ulakan Tapakis dalam Angka 2003,
BPS Padang Pariaman, hal.7.

Jumlah penduduk Kecamatan Ulakan Tapakis dari periode 1970-an sampai 2005 mengalami fluktuasi, hal ini tidak terlepas dari adanya factor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti kelahiran, kematian serta migrasi penduduk yang keluar dan masuk di wilayah ini. Pasang surut perubahan jumlah penduduk Kecamatan Ulakan Tapakis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Ulakan Tahun1996-2003

No.	Tahun	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	1996	8.532	9.839	18.371
2.	1997	8.715	11.042	19.757
3.	1998	8.483	9.433	17.916
4.	1999	9.116	10.752	19.668
5.	2000	8.812	9.790	18.602
6.	2001	8.913	9.879	18.792
7.	2002	8.823	9.751	18.574
8.	2003	9.237	9.979	19.216

Sumber : Kecamatan Ulakan Tapkis dalam angka 2003,
BPS Padang Pariaman, hal.1

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ulakan Tapakis tidak mengalami perubahan secara ekstrim dalam pengertian jumlah lonjakan yang luar biasa, baik dalam hal kenaikan maupun penurunan jumlahnya. Bahkan jumlah relative konstan berkisar di antara jumlah 18.000-19.000 orang. Sedangkan dari sisi jenis kelamin antara jumlah laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 3 : Jumlah Penduduk Menurut Nagari / Korong, Jenis Kelamin dan Rasio Kelamin Tahun 2003

No.	Nagari/Korong	Penduduk		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	
I.	Tapakis	2.839	2.816	101
1.	Batang Gadang	176	183	96
2.	Tiram	237	238	100
3.	Rimbo Karambie	291	322	90
4.	Surau Kandang	231	196	118
5.	Parit Tapakih	213	203	105
6.	Batang Kambaru	23	24	96
7.	Surau Duku	143	151	95
8.	Kala Muntung	252	258	98
9.	Lubuk Aro	154	164	94
10.	Kampung Pauh	86	92	93
11.	Kabu	106	105	101
12.	Rawang	293	275	107
13.	Kasai	252	242	104
14.	Kabun	382	363	105
II	Ulakan	6.398	7.163	89
15	Lapau Kandang	224	245	91
16	Maransi	263	305	86
17	Kampung Lading	138	161	86
18	Tiram	153	175	87
19	Sungai Rimba	286	302	95
20	Gantiang	462	545	85
21	Sikabu	241	233	103
22	Kampung Paneh	422	438	96
23	Rimbo Akar	355	403	88
24	Kepala Koto	336	341	99
25	Kampung	127	153	83
26	Galapuang	293	320	92
27	Pasa Ulakan	293	335	87

28	Padang Pauh	360	435	83
29	Bungo Pasang	429	508	84
30	Tanah Padang	351	359	98
31	Palak Gadang	304	312	97
32	Manggopoh Dalam	151	186	81
33	Manggopoh Ujung	493	532	93
34	Binuang	717	873	82
	Koto Panjang			
	Tanjung Medan			

Sumber: kecamatan ulakan tapakis dalam angka 2003,

BPS padang pariaman, hal 15-16

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa korong yang dimiliki rasio jumlah laki laki dan perempuan besar yakni korong Kampong Paneh di Nagari Ulakan (103 jiwa) dan Korong Surau Kandang (118 jiwa) di nagari Tapakis. Sedangkan beberapa korong yang memiliki rasio jumlah laki laki dan perempuan yakni Kampong Pauh di nagari Tapakis (93 jiwa) serta Tanjung Medan di Ulakan (82 jiwa).

Minangkabau merupakan salah satu kelompok suku bangsa di dunia yang menganut garis matrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak ibu dan hak milik harta pusaka diberikan kepada perempuan. Mamangan Minangkabau menyatakan tanah yang berbidang, sawah yang bertumpak, sehingga orang Minangkabau memiliki pandangan bahwa sistem matrilineal melindungi dan menjamin kelangsungan hidup perempuan Minangkabau. Meskipun dalam tataran praktisnya otoritas pengelolaannya harta pusaka berada dibawah kontrol mamak (saudara laki laki ibu).

Sistem matrilineal menyebabkan secara emosional orang Minangkabau lebih dekat kepada kerabat dari ibu daripada kerabat bapak. Berdasarkan "suku" yang mula mula di Minangkabau, masyarakat mengenal dua suku. Sebagaimana daerah Minangkabau lainnya, masyarakat Ulakan Tapakis juga berasal dari bermacam suku, seperti suku Koto, Panyalai, Guci, Jambak, Tanjung, dan Sikumbang.

¹³Pepatah Minangkabau mengatakan bahwa nagari *baampeks* suku, yakni bahwa nagari secara defakto dikatakan ada, apabila nagari tersebut setidaknya dihuni oleh sedikitnya terdiri dari empat suku. Seseorang tidak bisa dipandang sebagai orang Minangkabau seandainya ia tidak memiliki suku.

Paruik merupakan kesatuan keluarga yang terkecil dalam masyarakat Minangkabau. Pimpinan dari *saparuik* adalah *tungganai* atau mamak rumah. Beberapa *paruik* menyatu dalam bentuk yang lebih besar yang disebut kaum. Pemimpin kaum adalah penghulu kaum atau dikenal sebagai mamak kepala waris. Anggota dari sebuah keluarga *paruik* keluarga pada masyarakat Minangkabau dapat diperhitungkan sebagai berikut; seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk dalam keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya. Sama halnya dengan seorang anak laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya.

Kecenderungan keluarga Minangkabau bergerak pada unit keluarga inti dalam pengasuhan dan pendidikan anaknya. Seorang suami sekaligus bertindak sebagai *mamak* bagi saudara perempuannya. Posisi suami di rumah isterinya dalam struktur sosial Minangkabau diibaratkan sebagai *abu di ateh tunggul* yang sewaktu waktu bisa tertiuap angin, sedangkan di rumahnya mereka tidak memiliki tempat, karena rumah hanya diperuntukkan untuk anak perempuan. Posisi laki laki yang goyah inilah yang oleh Muchtar Naim disebut sebagai faktor sosial yang mendorong lahirnya tradisi merantau.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bapak Tarjudin Dt. Nan Podo Sati (sekretaris KAN Ulakan) di Ulakan, tanggal 20 Desember 2006. Menurut keterangan yang beliau sampaikan kepada penulis, bahwa di daerah ini memiliki 6 penghulu suku sebagai representasi jumlah kelompok suku yang ada, yakni suku Sikumbang penghulunya bergelar "Datuk Sikumbang", suku Panyalai (Datuk Panyalai), Koto (Datuk Rajo Basa), Tanjung (Datuk Intang), Guci (Datuk Majolelo) dan Jambak (Datuk Putih).

¹⁴ Muchtar Naim, *op.cit.* hlm. 266-284.

Hubungan kekerabatan dalam system matrilineal menurut A.A Navis, yakni :

- a. Hubungan kekerabatan *mamak kemenakan*, yaitu hubungan antara anak dengan saudara laki-laki ibunya atau hubungan anak laki-laki dan anak saudara perempuannya.
- b. Hubungan kerabat suku-sako, yaitu hubungan kerabat yang berdasarkan pada sistem genealogis matrilineal.
- c. Hubungan *induk bako-pisang*, yaitu hubungan kekerabatan antara anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau antara seorang perempuan dan anak saudara saudara laki lakinya. Artinya seorang perempuan merupakan *induk bako* dari anak saudara laki lakinya dan sekaligus anak pisang dari saudara perempuan bapaknya. Secara sosial hubungan ini mencerminkan peran perempuan di tengah kerabatnya. Seorang perempuan selain bertindak sebagai kemenakan saudara laki laki ibunya, ia juga merupakan anak pisang dan *induk bako*.
- d. Hubungan kekerabatan *andan pasumandan*, yaitu hubungan antara satu rumah dengan rumah, kampung dan kampung lain yang disebabkan adanya ikatan perkawinan. Hubungan kekerabatan ini bersifat horizontal, kedua belah pihak mempunyai status sama. Tali kerabat *pasumandan* memberi konsekuensi dalam bentuk moral dan material sedangkan tali kerabat *andan* memiliki konsekuensi dalam hal moral saja.

Dalam struktur sosial Minangkabau yang menjadi ukuran dalam penentuan lapisan sosial seseorang atau kelompok penduduk adalah orang / kaum sedarah sebagai orang yang pertama kali membuka sebuah negeri (*manaruko*). Bagi mereka yang memiliki hubungan darah dengan kelompok *manaruko* dianggap memiliki tingkat kedudukan sosial tinggi.

Sedangkan bagi masyarakat pendatang posisinya dianggap lebih rendah, bahkan agar mereka diperkenankan untuk tinggal di wilayah tersebut, mereka harus terlebih dahulu *malakok* sebagai mamangan Minangkabau “cupak diisi limbago dituang”, yang berarti bahwa seseorang yang hendak menetap atau selamanya di nagari atau tempat yang dituju tidak bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Adat Minangkabau mengatur “tanah sabingkah alah bamilik, rumpuik sahalai alah bapunyo, malu nan alun babagi, suku indak dapek diasak, diasak layua dibubuik mati, nagari dapek baraliah”.

Selain itu di Minangkabau dikenal pula konsep *urang asa* (penduduk asli) dan *urang datang* (pendatang). Penduduk asli adalah orang yang pertama kali *datang* ke nagari itu. Mereka mengaku bermamak kepada penduduk asli. Masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat egaliter dan demokratis, tercermin dalam pepatah *bulek kato jo mufakat*. Proses interaksi sosial antar masyarakat tercermin dari ungkapan *rancak diawak katuju diurang*, yang bermakna saling menghormati dan timbang rasa di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Falsafah adat Minangkabau telah mengajarkan adanya hierarki dalam pengambilan keputusan sebagaimana tamsilan, *luhak bapanghulu, rantau baraja, kampuang nan batuo, rumah nan batungganai, kamanakan barajo kamamak, mamak barajo ka panghulu*. Menurut A.A Navis dalam masyarakat Minangkabau perbedaan stratifikasi sosial tergambar pada istilah *kamanakan tali paruik, kamanakan tali budi, kamanakan tali ameh dan kamanakan dibawah lutuik*. Kamanakan tali paruik merupakan keturunan langsung dari orang yang *manaruko*, kamanakan tali budi merupakan anggota keluarga yang datang kemudian, akan tetapi karena mampu membeli tanah yang cukup luas, mereka dianggap sama dengan penduduk asli, sedangkan kamanakan tali ameh yakni pendatang baru yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan salah satu penduduk asli sedangkan kamanakan dibawah

lutuik yakni orang yang menghambakan diri pada keluarga penduduk asli.

Orang di daerah rantau seperti Pariaman dan Padang memiliki gelar jabatan adat yang diwariskan secara turun temurun menurut garis patrilineal sesuai dengan langgam yang ada di tempat itu, seperti gelar Rangkayo, Tan Tuah di wilayah timur (daerah pesisir selatan), Rang Gadang, Bagindo, Sutan, Sidi di pantai barat (Pariaman). Bahkan ada pula yang bergelar “Rajo” dengan nama sampiran lainnya hingga menjadi “Rajo Mudo” (Raja Muda), Rajo Kaciak (Raja Kecil). Khusus bagi yang bergelar ganda, seperti Sutan Bagindo, Sutan Sidi, Sutan Sati, Sutan Mudo, Sutan Ketek, dan sebagainya berarti bahwa pemakai gelar itu bukanlah keturunan bangsawan, hanya merupakan pemberian gelar untuk sekedar panggilan bagi mertunya ketika memasuki dunia perkawinan.

Daerah rantau secara kultural merupakan wilayah Minangkabau. Walaupun kebudayaannya telah berbaur dengan kebudayaan luar, tetapi adat Minangkabau masih dijalankan secara penuh. Akibatnya tidak seperti halnya dengan daerah luhak dimana gelar diturunkan menurut garis matrilineal, maka daerah rantau seperti Pariaman dan pesisir Padang gelar diwariskan dari garis ayah dan garis mamak. Pepatah Minangkabau mengungkapkan “ketek banamo, gadang bagala”, Laki laki di Pariaman memakai gelar Bagindo, Sutan, dan Sidi, yang berasal dari gelar ayah. Akan tetapi mereka juga memakai gelar adat warisan sako dan sangsoko, sesuai dengan gelar mamaknya masing-masing.

Masyarakat Ulakan Tapakis mengenal gelar kebangsawanan seperti sidi, bagindo, marah, dan sutan.¹⁵ Gelar tersebut merupakan pengaruh dari kerajaan tradisional Minangkabau di daerah pesisir serta pengaruh kebudayaan Islam yang berasal dari Aceh. Gelar sidi menurut asalnya konon dihubungkan dengan seorang Arab yang bernama

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sofyan Bagindo, Sekretaris KAN Ulakan, tanggal 21 Desember 2006 di Ulakan.

syekh Magribi yang menetap dan kawin di nagari Gasan Gadang. Ia memiliki anak laki laki yang diberi nama Said yang dilafalkan menurut lidah orang Pariaman menjadi Sidi.

Gelar bagindo merujuk pada sebutan mereka yang memiliki hubungan darah dengan kerajaan Aceh yang menetap di nagari Tiku dan Pariaman. Bagindo berasal dari kata Baginda, sebutan raja dalam pemerintahan yang bercorak Islam. Gelar sutan berasal dari kata sultan, yang merujuk pada pemerintahan Islam pula. Sedangkan gelar "marah" berasal dari bahasa Aceh "meurah" yang artinya raja kecil.¹⁶ Namun di sekitar Tiku dan Pariaman gelar marah menunjukkan bahwa pemakainya bukanlah keturunan bangsawan. Mereka diberi gelar marah karena tidak memiliki gelar apa pun. Gelar bagindo, sutan dan sidi agaknya muncul setelah wilayah pesisir pantai Pariaman dan Tiku dikuasai oleh kerajaan Aceh. Berdasarkan fakta sejarahnya, Aceh pernah menguasai kawasan pantai barat sumatra, seperti Tiku, Pariaman, dan Indrapura pada sekitar abad 16-17 M terutama pada masa pemerintahan sultan Iskandar Muda.¹⁷

Daerah Pariaman merupakan pintu masuk bagi penyebaran Islam ke daerah pedalaman Minangkabau. Nagari Ulakan merupakan salah satu tempat terpenting di wilayah rantau Pariaman. Nagari ini banyak disebut dalam dokumen Belanda. Sejak paruh abad ke-17 Ulakan sudah menjadi tempat penyebaran Islam di rantau pesisir Minangkabau yang dipimpin oleh Syekh Burhanuddin atau Tuanku Ulakan (1646-1704). Bahkan di tempat ini masih bisa dilihat Mesjid Syekh Burhanuddin sebagai bukti kebesaran tokoh ini.

Namun sebelumnya seorang ulama Arab bernama Syekh Abdullah Arif atau Tuanku Sirah, yang sering dipanggil sebagai Syekh Madinah. Ia sudah bermukim Tapakis dan telah mengajarkan Islam terlebih dahulu sebelum Syekh

¹⁶ Ematif dkk, *Upacara Tabuik di Pariaman, Kajian Nilai dan Fungsi bagi Masyarakat Pendukungnya*, Padang: BKSNT Padang, 2001, hlm. 12.

¹⁷ A.A. Navis, *op.cit.*, hlm. 22.

Burhanuddin. Dikisahkan bahwa Syekh Abdullah Arif atau Tuanku Sirah adalah murid dari Syekh Ahmad al-Qusyasyi, teman seperguruan Syekh Abdurahman al-Singkili di Madinah. Berdasarkan perintah gurunya, ia mengembara ke negeri timur untuk menyebarkan agama Islam. Ia menceritakan bahwa ia dibekali oleh gurunya dengan sebuah kitab dan dua botol. Satu botol berisi dari tanah yang berasal dari Arab dan botol yang lainnya masih kosong. Pesan gurunya adalah apabila tanah yang ditemukan nantinya sama beratnya dengan berat tanah dalam botol, maka di situlah Syekh Abdullah Arif atau Tuanku Sirah harus berhenti dan menyebarkan agama Islam.

Setelah mengembara dari India, Syekh Abdullah Arif kemudian menyusuri Aceh dan sampai di pantai barat Minangkabau. Ia sampai di daerah Tapakis, suatu daerah yang tanahnya sama berat dengan tanah di dalam botol yang dibawanya, sesuai dengan perintah gurunya. Namun sebelum sempat menyebarkan agama Islam kepada semua penduduk di sekitar Tapakis, ia keburu meninggal. Kemudian misi penyebaran Islam dilanjutkan oleh salah seorang muridnya yang cerdas, bernama Pono, yang kelak lebih dikenal sebagai Syekh Burhanuddin Ulakan.¹⁸

Syekh Burhanuddin Ulakan meninggal dan dimakamkan di Ulakan. Makamnya masih dihormati oleh para pengikutnya (terutama pengikut tarekat syatariyyah). Hari wafat Syekh Burhanuddin Ulakan diperingati oleh masyarakat setempat dengan upacara basafa, berziarah ramai-ramai ke makamnya di Ulakan. Para pengunjung yang datang dari seluruh pelosok Minangkabau pada acara basafa, melakukan ritual seperti membaca shalawat, zikir dan shalat di makam tersebut. Tradisi basafa dimulai pada hari rabu setelah tanggal sepuluh bulan syafar setiap tahun. Kepercayaan tersebut sama halnya dengan sebutan "Haji Singapura" yakni menunjuk pada orang Hindia Belanda yang tidak jadi berangkat menunaikan haji ke

¹⁸ Suryadi, *Syair Sunur, Teks dan Konteks Otobiografi Seorang Ulama Minangkabau Abad ke-19*, Padang: Citra Budaya, 2004, hlm. 88-93.

tanah suci Mekkah¹⁹, karena suatu perjalanan terhenti di Singapura, yang saat itu sebagai pelabuhan pemberangkatan jemaah haji asal Hindia Belanda.

Bahkan Jongeman mengatakan bahwa peserta ritual basapa dihadiri oleh 12 sampai 15.000 orang yang datang dari daerah sekitar pantai pariaman dan daerah pedalaman minangkabau. Begitu ramainya kegiatan ritual ini, sampai digambarkan oleh jongeman pada acara upacara basapa, orang sulit melewati pasar ulakan.

Menurut P.H. S. Van Ronkel ada kepercayaan di kalangan masyarakat Minangkabau di nagari-nagari tertentu yang menganggap, bahwa kalau mereka telah melakukan kegaitan basafa selama tujuh kali, sama artinya dengan sekali naik haji ke Mekah. Akan tetapi menurut Jongeman, seorang bekas kontrolir Belanda di Pariaman pada awal abad ke-20, banyak ulama kritis yang menentang tradisi tersebut, karena dianggap sebagai pemicu perkelahian. Akan tetapi pada tahun 1980 kegiatan ini dihidupkan kembali bahkan sejak tahun 1991 dijadikan agenda wisata budaya bagi daerah Pariaman.

Dalam adat perkawinan di daerah Pariaman termasuk di Ulakan Tapakis, dikenal tradisi *bajapuik*. Tradisi *bajapuik* merupakan tradisi perkawinan yang merupakan tradisi orang Pariaman. Bajapuik bisa dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan untuk memberi sejumlah barang atau uang kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilakukan. Menurut Dt. Nan Podo Sati:

"Bajapuik dibuek timbal balik antara mamak dengan mamka, dijapuik menurut kesepakatan berapa, berupa ameh (emas), uang jemputan dilakukan saat anak daro manjalang kerumah mintuo, uang jamputan dikembalikan misalnya 5 ameh, malahan kadang kadang ditambahkan misalnya 1,5 ameh yang istilah ditendeck."

¹⁹ *Ibid.*,

Bahkan pada akhir-akhir ini dikenal istilah uang hilang atau uang dapur. Perbedaan uang japuik dan uang hilang adalah bahwa uang japuik akan dikembalikan pada pihak perempuan dan biasanya harga atau jumlahnya sengaja dilebihkan dari uang japuiknya. Uang japuik dalam perspektif sosial di daerah ini merupakan cara menghargai mempelai laki-laki (marapulai). Pengembalian uang japuik oleh pihak laki-laki dilakukan pada saat *manjalang*, yakni kunjungan pertama anak daro ke rumah orang tua marapulai. Proses pengembalian uang japuik dikenal istilah “agiah jalang”, biasanya sehari setelah pesta perkawinan.

Sedangkan uang hilang, sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki, yang tidak dikembalikan. Uang hilang tidak dikembalikan kembali kepada pihak perempuan oleh marapulai, baik sebelum maupun sesudah akad nikah dilakukan.

Syekh Burhanuddin Ulakan merupakan ulama yang mempelopori pendidikan surau di Minangkabau. Penyebaran Islam secara luas di Pariaman tidak terlepas dari peranannya. Proses Islamisasi Minangkabau berawal dari daerah Ulakan kemudian meluas ke pedalaman (darek), seperti ditamsilkan dalam pepatah Minangkabau “syara mandaki, adat manurun” Syekh Burhanuddin Ulakan juga dianggap sebagai ulama yang merintis surau sebagai pusat transformasi ilmu (ilmu agama), seperti menjadikan surau tua Tanjung Medan dan terakhir Ulakan sebagai basis pengajaran Islam.

Selain tradisi basafa, di daerah Pariaman dikenal pula upacara Tabuik, yakni tradisi masyarakat Pariaman untuk memperingati kematian cucu nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husein yang meninggal di Padang Karbela. *Tabuik* berasal dari kata Tabut. Orang Pariaman menyebutnya dengan tabuik, yang sebenarnya berasal dari bahasa arab, yang maknanya berarti peti atau keranda yang dihiasi bunga-bunga dan kain berwarna warni lalu dibawa berarak keliling kampung. Orang Pariaman memahami *tabuik* sebagai simbolisasi pengusungan keranda, usungan mayat Husein yang terbuat dari bambu, kayu, dan rotan yang dihiasi dengan

bunga *nan salapan*. Pada bagian bawah *tabuik* terdapat seekor buraq (kuda terbang berkepala manusia), yang di bagian atasnya terdapat satu tangkai bunga *nan salapan*, yang dikatakan sebagai puncak *tabuik*.²⁰

Konon katanya *tabuik* Pariaman berasal dari Bengkulu, yang dibawa oleh orang Keling (Muslim Tamil) yang dipimpin oleh Imam Kadar Ali. Akan tetapi tidak ditemukan pusat pendidikan Islam yang berarti di Bengkulu. Sementara cerita yang ada dalam upacara *tabut* lebih dekat dengan tarekat Syatariyah. Orang Keling merupakan orang yang berasal dari India. Mereka dibawa oleh orang Inggris ketika berkuasa di Bengkulu. Sejarah *tabuik* mengalami pasang surut serta tidak lepas dari kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.

Pada masa kolonial Belanda, *tabuik* menjadi alat penguasa kolonial untuk mengadu domba masyarakat pribumi. Bahkan pemerintah kolonial memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan upacara *tabuik*. Pada masa ini peserta *tabuik* yang tampil sampai 12 buah. Perayaan *tabuik* juga merupakan sebagai media dan sarana untuk menunjukkan kepentingan politis pemerintah kolonial. Kegiatan *tabuik* dalam kaca mata Belanda adalah cara efektif untuk memunculkan konflik yang berujung pada terjadinya perkelahian antara peserta *tabuik*.

Setelah Indonesia merdeka tradisi *tabuik* masih dijalankan meskipun tidak dilaksanakan secara rutin karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tradisi *tabuik* sebagai tradisi sakral biasanya dimulai dengan doa, diiringi dengan penyembelihan ayam serta pembakaran kemenyan di dalam rumah *tabuik* yang diiringi dengan bacaan doa untuk kemuliaan arwah Husein dan Hasan.

²⁰ Ernati dkk, *op.cit.*, hlm. 14-16.

D. Kehidupan Sosial Perempuan di Kecamatan Ulakan Tapakis

Susan Carol Rogers menyatakan bahwa untuk memahami sebaik baiknya kedudukan wanita dalam suatu kebudayaan tertentu adalah dengan mempelajari hubungan antara kedua kelompok kelamin yang berbeda yakni perempuan dan laki laki.²¹ Rogers mengembangkan dua pola hubungan. Pertama hubungan dipahami dalam arti distribusi kekuasaan dan melihat sejauh mana masing masing kelompok kelamin yang berbeda menguasai sumber-sumber berharga seperti rumah, tanah, tenaga kerja, makanan, pengetahuan serta informasi sesuai konsepsi kebudayaannya. Kedua, hubungan secara konsepsional adanya perbedaan dalam perilaku dan perbedaan ideology, sehingga masing masing pria dan wanita mempunyai pandangan sendiri terhadap nilai, norma, tujuan dan sebagainya.

Dalam konteks budaya masyarakat minangkabau yang menganut garis matrilineal posisi perempuan memiliki posisi yang sentral dan penting, sebagaimana ungkapan Minangkabau yang menggambarkan perempuan sebagai sosok Bundo Kandung dengan pepatah :

<i>Bundo kandung</i>	(kaum ibu,
<i>Limpapeh rumah nan gadang</i>	Tiang rumah yang besar,
<i>Sumarak dalam nagari</i>	Umbun pura pegangan kunci,
<i>Hiyasan kampuang</i>	Hiasan dalam kampung,
<i>Umbun puro pagangan kunci</i>	Semarak dalam negeri,
<i>Nan gadang basa batuah</i>	Yang besar banyak bertuah,
<i>Kok hiduik tampek banasa,</i>	Kalau hidup tempat bernazar,
<i>Kalu mati tampek baniat</i>	Kalau mati tempat berniat,
<i>Ka unduang unduang ka madinah,</i>	Untuk undang undang ke madinah,
<i>Ka payuang panji ka surago</i>	Untuk ganti payung ke surga

²¹ Boestami, *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*, Padang: Esa, 1992, hlm. 85.

Dari ungkapan pepatah di atas ada beberapa hal yang bisa dipahami menyangkut posisi perempuan Minangkabau dalam konteks di atas. Pertama, bahwa perempuan Minangkabau berperan sebagai penerus garis keturunan karena sistem matrilinealnya, sebagai pewaris harta pusaka milik kaumnya. Kedua aspek kefemininan merupakan salah satu kriteria yang sangat penting dalam menilai sosok perempuan Minangkabau. Besarnya harapan dan tumpuan masyarakat atas posisi perempuan dalam menentukan baik buruknya kelangsungan hidup masyarakatnya.

Figur perempuan Minangkabau yang ideal dalam konteks budaya Minangkabau, sebagaimana juga tercermin dalam ungkapan pepatah di bawah ini :

*Limbago hiduik bausaho
Pandai manakek manarawang
Pandai mancukia jo batanun
Tahu disuri mato karok
Tahu dipakan rabah tagak
Arif jo bijak dipakaiakan
Kok tak tapakai nan bakkian
Bukan parampuan tu namonyo,
(hidup untuk berusaha
Pandai memikat dan menerawang
Pandai mencongkel dan bertenun
Tahu disuri mata karok
Tahu di pakan rebah tegak
Arif dan bijak diterapkan
Kalau tidak terpakai yang begitu
Bukan perempuan itu namanya*

Berkaitan dengan citra ideal perempuan Minangkabau yang tercermin (digambarkan) dalam kaba²² dan tambo, ada

²² Penulis mengambil referensi *Kaba Cindua Mato* versi bahasa Indonesiannya dengan judul *Cindumato* dari Minangkabau karya Agustiar yang diterbitkan oleh PT. Pertja Jakarta tahun 1955, *Kaba Rancak DiLabuah* karangan M.Z. St. Pamuncak dan *Kaba Anggun Nan Tungga* karya Ambas Mahkota, keduanya berbahasa Minang. Kedua kaba ini diterbitkan oleh Pustaka Indonesia Bukittinggi tahun 1990 dan 1982.

beberapa bagian cerita dari kaba yang menyebut sosok perempuan Minangkabau ideal, misalnya disebutkan dalam salah satu bagian alur dari kaba Rancak Dilabuah, yang menceritakan tentang kriteria perempuan Minangkabau yang baik dan tidak baik sifatnya), sebagaimana kutipan di bawah.

"adapun sabana parapuan, tapaka, tapakai taratik martabak, nan mandeh tarangko cako. Nan banamo simarayuan, pahamnya bak gatah caia, elok iko katuju inyak, bana sarupo pimpiang di lereng, bak baliang baliang di bukuk, ka mano angin nan dareh, kakiun pulo pikirannyo, walaupun balaki bana, bak umpamo indak juo, itu lahia kutuak Allah, isi narao tujuh lampih. Nan banamo mambang tali awan, inyo padusi tinggi hati, kok mangecek samo gadang, atau barundiang dinan ramai, anganyo indak kanan lain, tasambia juo kalakinyo, dibincang bapak siupiak, tasabuik jo bapak sibuyuang, sabagai labiah dari urang, barabo ribu dangan ratuih, lakinyo inyo labiah sakali, pihak dibanyak balanonya. Kasihnyo lakek dirumah sajo, indak indak baranja-ranjak amek, malagakkan mulie tinggi pangkek, susah nan lai manyamoi, itu nan banyak maso kini. Walau lakinya jatuh hino, usah disangko tak bahiduang, pujinya bak itu juo. Banyak denliek den pandangi, tinggi dimandeh jo bapaknyo, anak nan indak baajar."²³

Artinya :

Adapun perempuan yang sebenar-benarnya, hendaknya memiliki tata krama, martabat yang diajarkan orang tua (ibu), harus diterapkan. Yang bernama simarayuan, fahamnya seperti getah cair, baik itu setuju ini, benar seperti pimbing (sejenis rumput gajah yang tumbuh di lereng), seperti baling-baling di bukit, ke mana arah berhembus kencang angin kesana pula pikirannya, walaupun memiliki suami tetapi merasa tidak memiliki, makanya hal itu dilaknat Allah, dimasukkan ke neraka tujuh lapis. Yang bernama mambang tali awan, dia perempuan tinggi hati, kalau berbicara sama besar, atau kalau berunding di tempat yang ramai, angannya

²³ M.Z. St.Pamuncak, *op.cit*, hlm. 48-49.

tidak ke tempat lain, menyebut nama suaminya, membicarakan bapak siupiak, menyebut pula bapak sibuyuang, sebagai yang lebih dari urang, berupa ribu dengan ratus, suami dipuji sekali, pihak lebih banyak belanjanya. Kasihnya lengket dirumah saja, tidak beranjak anjak benar, membanggakan tinggi pangkat. Walaupun lakinya jatuh hina, jangan disangka tak punya. Banyak dilihat dan dipandang, tinggi di ibu dan bapaknya, anak yang tidak pernah belajar.

Dari keterangan di atas menggambarkan bahwa citra perempuan Minangkabau yang baik hendaklah memiliki tata krama dan harga diri. Kalau berbicara hendaknya sesuai dengan kenyataan, sedangkan perempuan yang kurang ideal (tidak baik sifatnya), yakni perempuan yang berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, kasar, tinggi hati dan tidak bisa menyimpan rahasia keluarganya, sebagaimana perumpamaan sifat perempuan yang disebut di atas (*nan banamao simarayuan dan mambang tali awan*).

Sosok perempuan Minangkabau yang ideal senantiasa dikaitkan pula dengan sifat dan tingkah laku seperti; kehalusan budi, kearifan dan kebijaksanaannya. Sikap perempuan sebagai mande (ibu) haruslah berlaku bijak. Ia merupakan tempat anak meminta nasehatnya. Ketika melihat anak kandungnya yang sedang dirundung masalah, ibulah merupakan orang yang selalu mencarikan solusi, sehingga bisa membuat si anak lebih paham dan sadar akan tindakannya, sebagaimana kutipan bagian alur cerita dalam kaba anggun nan tungga dibawah ini :

"Duduak tamanuang mande kanduang, itulah kato sabananyo, tando anak laki laki untuak pahapuih malu di kaniang, untuak pambangkik tareh tarandam. Manjawab sanan suto suri : anak kanduang janyo denai, jikoklah kareh hati anak, nak balayia ka lautan, izin jo rela mande bari, tapi hanyo nan saketek, sajak di rahim bundo kanduang, anak lah sudah batunangan iyo jo puti Gondoriah, etan di ranah banda Tiku. Kok anak kan pai balayia, jalang dahulu tunangan anak mintak

izin jo kato rela, barulah mande malapeh pulo mencari mamak nan batigo".²⁴

Artinya :

Duduk termenung Bundo Kanduang itulah kata sebenarnya, tanda anak laki laki untuk penghapus malu di jidat, untuk mengangkat batang yang terendam. Menjawab sanan Suto Suri. Anak kandung saya, jikalau hati anak bersikeras mau berlayar ke lautan ijin dan rela bunda beri tetapi hanya sedikit, sejak di rahim Bundo Kanduang, anak sudah tunangkan dengan putri Gondorih, orang dari bandar Tikur, jika anak mau pergi berlayar, kunjungi dahulu tunangmu minta ijin dan kata rela, baru mande melepas pula mencari mamak yang bertiga.

Keterangan di atas, seorang anak yang berkeras hati hendak pergi merantau untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarganya. Sikap seorang ibu pada akhirnya rela mengijinkan anaknya berlayar, akan tetapi sang ibu menganjurkan pula kepada anaknya untuk terlebih dahulu mengunjungi perempuan yang telah ditunangkannya (Putri Gondorih) terlebih dahulu.

Dalam kaba klasik seperti Cinduo Mato, versi bahasa Indonesia yang ditulis oleh Agustinus Idris dengan judul Cindurmatu Dari Minangkabau. Pencitraan perempuan Minangkabau dilukiskan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keluhuran seorang ibu (Bundo Kanduang), kasih sayangnya jauh melampaui ruang dan waktu, perhatian kepada anaknya lebih baik ketimbang figure ayah sebagaimana bagian kutipan cerita *kaba* Cinduo Mato di bawah ini :

"garis temurun ibu yang dianut oleh Bundo Kanduang adalah pancaran kearifan dari leluhur kita terdahulu. Di rahim ibu bersemayam dan bersemi umat manusia. Apabila benih itu telah berujud dan berupa dan genap bilangan bulannya, tampilah anak manusia ke permukaan bumi. Alam menyambut sang bayi dengan hidangnya udara dan cahaya

²⁴ Amba Mahkota, *op.cit*, hlm. 27.

dan melengkinglah pekik pertama dari mulutnya sebagai perkenalan sapaan terhadap alam. Air susu ibu yang bersumber dari telaga cintanya menggenang memenuhi rongga payudaranya. Sang bayi dengan tingkat kearifan pemulanya mencucup dan menghirup putik susu ibunya dan mengalirkan air kehidupan ke seluruh penjuru batang tubuhnya. Siraman kasih ibu tak henti hentinya mengguyuri jiwa raga sang bayi dan mengantarkannya sampai ke gerbang laras kehidupan yang sebenarnya. Adakah orang yang menyangkal kenyataan ini ? Adakah seorang ibu yang ragu atau tak percaya bahwa yang dilahirkannya bukanlah putra putri kandungnya? Bukankah berasal dari darah dagingnya ? keraguan dan ketakpercayaan itu tak pernah terbetik di hati seorang ibu. Entah kalau dihati kaum ayah.”²⁵

Dalam bagian berikutnya dikisahkan bagaimana posisi perempuan karena posisinya yang penting dalam struktur sosial Minangkabau, sudah sepatutnya mendapat tempat yang terhormat sebagaimana kutipan dibawah ini :

“Ibu adalah satu satunya lorong manusia untuk dapat hadir di dunia. Kasih sayang ibu memberi wama terhadap watak dan perilaku anak manusia dalam menjalani laras kehidupannya. Maka pada tempatnyalah kepada kaum ibu diberikan terhormat dan teraman dimuka bumi. Kaum ibulah pemilik rumah gadang. Kaum ibulah pemilik sawah lading. Kaum ibulah penguasa rangkiang berderet dihalaman. Seluruh anak anak yang lahir dari rahimnya menganut garis temurun ibu. Dengan sehat, sejahtera dan damainya kehidupan seorang ibu, dia akan menghidangkan bayi bayi sehat dan manusia berbakat untuk alam dan isinya.”²⁶

Selain kaba, sumber lain yang memposisikan perempuan sebagai sosok sentral dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau adalah tambo. Dalam tambo Minangkabau disebutkan mengenai asal usul mengapa harta

²⁵ Agustar Idris, *op.cit*, hlm. 92.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

warisan diwariskan kepada kemenakan bukan kepada anak, yang tidak lain mengandung maksud sebagai bentuk penegasan garis matrilineal (ibu) yang dianut masyarakat Minangkabau, sebagaimana kutipan isi tambo minangkabau dibawah ini :

“Datuk Katumanggungan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang mufakat pula di balairung panjang hendak berlayar ke aceh. Dalam pelayarannya itu perahunya terdampar di pasir karena pasang surut. Mulanya semua anak diperintahkan menarik perahu itu, tetapi semua menolak karena takut. Kemudian semua kemenakan diperintahkan menarik perahu itu. Semua kemenakan patuh dan berhasil menarik perahu itu ke laut. Perahu itu berlayar kembali setelah ditarik oleh Sikati Muno dan jin Sikumlambai. Sejak peristiwa itu diputuskan oleh Cati Bilang Pandai, bahwa harta pusaka diwariskan kepada kemenakan karena kemenakan patuh dan berjasa”.²⁷

Dari beberapa kutipan alur cerita dari kaba klasik di atas, citra perempuan Minangkabau yang ideal paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria apabila hendak disebut sebagai Bundo Kanduang, yakni paling tidak harus memiliki kearifan , tata krama yang baik, penuh cinta kasih, selalu memberi bimbingan dan nasehatnya. Ibu merupakan penerus garis keturunan dan sumber kebijakan. Sudah semestinya kaum ibu mendapatkan tempat yang terhormat, ibu pemilik sah rumah gadang, sawah, dan ladang serta kunci *rangkiang*.

Pada umumnya orang Minangkabau termasuk di daerah Ulakan Tapakis menganggap bahwa mereka yang masih berumur 5 sampai 15 tahun masih dianggap anak-anak. Pada masa ini pendidikan anak tergantung kepada orang tua mereka. Posisi ibu memiliki peran sentral dalam pendidikan dini tersebut di atas. Perempuan Minangkabau sebagai kelompok masyarakat yang menganut sistem matrilineal, posisinya dilindungi dengan keberadaan harta pusaka.

²⁷ Edwar Jamaris, *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002, hlm. 157.

Bahkan rumah gadang boleh digadaikan seandainya dalam sebuah keluarga atau kaum memiliki *gadih gadang indak balaki*.

Bagi masyarakat Minangkabau adat merupakan kebudayaan yang dipahami secara utuh, sedangkan kebudayaan menurut Koentjaraningrat, secara konsepsional mempunyai tiga wujud, yaitu wujud ideal, wujud kelakuan dan wujud fisik.²⁸ Sehubungan dengan adat, dalam konsepsi tradisional masyarakat Minangkabau ada empat klasifikasi adat yaitu : Adat nan sabana adat, Adat nan diadatkan, Adat nan teradat, dan Adat istiadat. Adat nan sabana adat berisi aturan pokok yang bersifat fundamental serta berlaku secara turum temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan yang dinyatakan dalam pepatah Minangkabau "Indak lakang dek paneh (tidak lekang karena panas), Indak lapuak dek hujan (tidak lapuk karena hujan), Paliang balumuik dek cendawan (paling berlumut karena cendawan)".

Adat nan sabana adat bersifat konstan, keberadaanya baik di daerah darek maupun rantau tidak boleh berubah. Kategori ini antara lain : syistem kekerabatan matrilineal, perkawinan eksogami, harta pusaka tinggi menjadi milik kaum perempuan. Kedua, adat nan diadatkan, yakni merupakan peraturan setempat yang diputuskan secara mufakat atau kebiasaan yang berlaku umum di suatu nagari. Termasuk dalam kategori ini misalnya tata cara, syarat-syarat pengangkatan penghulu, perkawinan yang berlaku di setiap nagari berbeda satu sama lain.

Ketiga, adat nan teradat merupakan kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi selama tidak menyalahi hidup orang Minangkabau yakni bersandar pada nilai *alua jo patuik* dan *raso jo pareso*, seperti gaya berpakaian, tata cara makan dan lain lainnya. Keempat, adat istiadat adalah kebiasaan umum dalam suatu nagari yang mengikuti perkembangan perubahan zaman yang bersifat situasional.

²⁸ Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 10.

Tradisi *bajapauik* bisa dikategorikan sebagai dari *adat nan diadatkan*, artinya tradisi muncul dan berkembang berkat adanya kesepakatan dalam musyawarah kaum adat, ulama, dan cerdik pandai, sehingga mereka disebut tungku tigo sajarangan. Dalam filosofi masyarakat Minangkabau memandang bahwa suami sebagai orang datang atau *urang sumando*, sebagai tamu di rumah istrinya. Dia harus dihormati, sehingga berlaku konsep moral *datang karano dipanggil tibo karano dijapauik*.

Tradisi *bajapauik* dengan kata lain bisa dimaknai sebagai bentuk penghargaan pihak keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki laki. Selain itu dari sudut pandang sosial uang *japauik* bisa berarti memberikan modal awal bagi keluarga. Uang *japauik* harus ditanggung oleh kerabat perempuan, artinya melalui kesepakatan kolektif antar para mamak kedua belah pihak dalam menentukan besar atau jumlah nominalnya.

Uang *japauik* di Ulakan Tapakis selalu dikaitkan dengan status sosial laki-laki, dimana semakin tinggi status sosial laki laki, maka semakin tinggi pula uang *japauik*-nya. Pada masa lampau orang Pariaman termasuk Ulakan Tapakis sangat menghargai bahkan berusaha untuk meminta seseorang yang memiliki gelar kebangsawanan, seperti Sidi, Bagindo, dan Sutan untuk menjadi menantu mereka. Namun seiring dengan perubahan waktu terjadi pergeseran fungsi dari persoalan prestise sosial ke arah kepentingan ekonomi (materi). Terlebih lagi muncul kecendrungan baru yakni munculnya "uang dapur". Beberapa informan mengemukakan bahwa fenomena "uang hilang" mulai muncul pada tahun 1975 akan tetapi ada pula yang menyatakan bahwa tradisi uang hilang sudah berjalan sebelum tahun tersebut. Fenomena uang hilang yang melekat dengna "uang *japauik*" menjadi pokok pembicaraan dalam transaksi kesepakatan perkawinan dalam masyarakat Pariaman. Bahkan "uang hilang" menjadi salah satu tolak ukur dan gengsi bagi keluarga perempuan untuk menghargai calon marapulai. Fenomena uang hilang sarat

dengan hitung-hitungan ekonomis ketimbang prestise sosial dari “uang japuik”.

Hal lain yang menjadi kecendrungan masyarakat di daerah ini adalah seorang memiliki gelar akademis, punya pekerjaan mapan serta punya penghasilan besar misalnya seorang dokter ataupun insinyur misalnya akan diharga lebih ketimbang seorang Sidi atau Bagindo yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Orientasi orang Pariaman sering dikatakan “telah basidi ka saku”, status yang melekat pada gelar keturunan yang hanya tinggal gelar semata, yang pada kenyataanya telah kehilangan kharismanya. Pergeseran cara pandang masyarakat tersebut secara tidak langsung dapat dinyatakan bahwa relasi antara pertimbangan-pertimbangan kepentingan ekonomi yang lebih besar dalam bentuk uang hilang daripada pertimbangan prestise sosial dalam bentuk “uang japuik” semata.

Menurut Welhendri Azwar, dari hasil pengamatan dan riset lapangannya, disebutkan bahwa setidaknya ada empat faktor yang turut mempengaruhi munculnya pergeseran tersebut di atas. Pertama, terjadinya perubahan jumlah penduduk yang meningkat pesat setiap tahun, menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang, dan secara otomatis pola hierarki sosial yang bertumpu pada sistem feodalisme (kepemilikan tanah) yang dulunya banyak dikuasai oleh kaum Sidi, Bagindo dan Sutan otomatis mulai menurun. Secara ekonomi berarti mengurangi tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh kaum bangsawan ini, dan itu berarti mengurangi status sosial mereka.²⁷

Kedua, perubahan dalam aktifitas ekonomi, dari sistem ekonomi pertanian ke ekonomi jasa, sebagai akibat langsung dari berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Para pekerja mulai mengalihkan ke sektor jasa, dan kemungkinan bahwa sektor jasa barang kali lebih dominan berasal dari

²⁷ Welhendri Azwar, *op.cit.*

mereka yang tidak bergelar. Keempat, pendidikan, jelas bahwa pendidikan berkorelasi positif terhadap perubahan kesejahteraan dan yang terakhir mobilitas sosial penduduk yang semakin intensif.

Pendidikan sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu masyarakat mengalami kemajuan atau masih terbelakang dari penduduk lainnya. Akses pendidikan yang semakin terbuka, maka ada kemungkinan bahwa sebuah masyarakat telah bergerak meninggalkan kelompok masyarakat dalam konteks tradisi. Se jauh pendidikan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok perempuan Minangkabau untuk merubah tingkat kesejahteraan sosial mereka.

Berdasarkan data BPS tahun 2003 di Ulakan Tapakis setidaknya terdapat 17 lembaga pendidikan dasar (SD), sebuah sekolah lanjutan pertama (SMP), dan sebuah SLTA. Kemudian jumlah peserta didik tercatat 3.249 siswa untuk tingkat SD, SMP (600 siswa) dengan jumlah guru 117 orang guru SD dan 31 orang guru SMP. Kemudian menyangkut partisipasi anak perempuan di dalam mengikuti pendidikan, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, orang tua murid tidak lagi mengutamakan anak laki laki dari pada anak perempuan untuk bersekolah. Justru saat ini yang menjadi ukuran adalah kemampuan seorang anak di dalam menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut. Seandainya dia seorang perempuan dan memiliki kemampuan dalam belajar, maka ia akan disekolah pada jenjang yang lebih tinggi.³⁰

Bagi mereka yang tidak sempat memperoleh pendidikan formal, di Ulakan juga terdapat sebuah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut salah seorang pengurus PKBM, kebanyakan dari peserta PKBM yang ikut dalam aktifitas belajar mengajar pada umumnya telah berumur, artinya bukan usia sekolah lagi. Pola pengajaran di tempat ini menyediakan kejar paket A dan B yang disejajarkan dengan tingkat SD sampai SLTP.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Kusneli, seorang guru SD dan pamong PKBM di Ulakan pada tanggal 21 Desember 2006.

Hasil sensus tahun 2003 memperlihatkan bahwa penduduk Sumatera Barat yang berusia 10 tahun ke atas yang belum / tidak sekolah jumlahnya lebih besar dari laki laki (perempuan 30,78% laki laki 27,16%). Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lebih rendah daripada laki laki (perempuan 42,94% laki laki 71,80%). Sedangkan perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif hanya 8,66%. Dalam bidang kesehatan masih ditemui tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu 305/100.000 kelahiran.³¹ Sebelum sensus tahun 2000 di Sumatera Barat tercatat kelompok perempuan yang berada dalam usia produktif mencapai 51,41%, bahkan komposisi lebih tinggi dari pada laki-laki (51,66%).³²

Untuk menangani masalah kesehatan di Ulakan Tapakis telah tersedia 2 buah Puskesmas dan 35 buah Posyandu yang tersebar di setiap korong yang ada pada masing masing nagari. Kondisi kesehatan dan jenis penyakit yang umumnya dialami penduduk Ulakan Tapakis, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5: Jenis Penyakit Pengunjung Puskesmas dan Posyandu Ulakan Tapakis Pada Tahun 2003

No	Jenis penyakit	Pengunjung		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1	TBC	5	7	12
2	Muntaber	-	-	-
3	Malaria	-	-	-
4	Lepra	4	3	-
5	Prambusia	-	-	-
6	Rabies	-	-	-
7	Demam berdarah	-	-	-
8	Diare	141	155	296
9	ISPA	739	990	1.729
10	lainnya	1.631	1.820	3.451
	Jumlah	2.520	2.975	5.495

Sumber : Kecamatan Ulakan Tapakis Dalam Angka Tahun 2003, BPS Padang Pariaman, hal 38.

³¹ Rusda K. Idrus, *op.cit.*

³² Media Komunikasi FKK-P3A, Rohana Kudus, Edisi I/Nov-Des, 2004, hlm. 6-7.

Tabel di atas terlihat dua jenis penyakit yang umumnya menyerang atau diderita oleh penduduk Ulakan Tapakis, yakni diare (296) dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Barangkali faktor kebersihan lingkungan serta buruknya sanitasi diduga sebagai penyebab tingginya angka penduduk yang menderita kedua jenis penyakit diatas.

Posisi perempuan senantiasa ditempatkan sebagai objek ketimbang subjek dalam penerapan program Keluarga Berencana (KB). Meskipun data statistik tidak menjelaskan berapa jumlah perempuan yang aktif mengikuti KB, namun dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan, perempuan selalu menjadi objek kampanye dari program pemerintah ini . Target dan realisasi dari jumlah akseptor KB di Ulakan Tapakis bisa dilihat pada tabel di bawah :

Table 6 : Target dan Realisasi Akseptor KB di Kecamatan Ulakan Tapakis 2003

No	Nagari	Target	Realisasi
1	Ulakan	645	681
2	Tapakis	1.161	1.034
	Jumlah	1.806	1.715

Data diolah dari BPS Padang Pariaman 2003, hal 42

Berdasarkan tabel di atas secara kuantitas jumlah akseptor KB di Ulakan Tapakis terlihat aktif, artinya jika melihat target pencapaian peserta akseptor yang berjumlah 1.806 orang, ternyata dalam realisasinya mencapai 1.715 orang. Tabel ini bisa pula dibaca bahwa jumlah anggota keluarga di Ulakan Tapakis bisa diasumsikan terdiri dari minimal 4 jiwa per kepala keluarga. Hal ini berbeda dari jumlah keluarga tradisional yang umumnya memiliki 5-10 orang anak.

Dalam konteks terjadinya hal perkawinan dan perceraian yang terdapat Kecamatan Ulakan Tapakis menunjukkan kecenderungan positif pada saat ini, artinya jumlah angka perceraian cenderung menurun atau relatif rendah. Barangkali bisa diasumsikan bahwa meningkatnya tingkat kesejahteraan keluarga, pendidikan yang lebih baik serta kehidupan yang semakin kondusif, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7: Jumlah Angka Nikah, Kawin, Cerai, Talak dan Rujuk di Kecamatan Ulakan Tapakis Tahun 2003.

NO	Tahun	Nikah	Talak/Cerai	Rujuk
1	1962	399	56	-
2	1983	438	60	-
3	1984	472	51	1
4	1985	431	10	-
5	1986	360	38	-
6	1987	380	27	-
7	1988	437	28	1
8	1989	408	12	-
9	1990	417	4	10
10	1991	443	2	2
11	1992	459	7	-
12	1993	444	13	-
13	1994	387	4	-
14	1995	432	10	-
15	1996	448	13	7
16	1997	475	-	7

Data diolah dari KUA Kecamatan Tapakis

Tabel di atas bisa dilihat dan dianalisa bahwa angka perceraian yang terjadi pada masyarakat Ulakan Tapakis menunjukkan kecenderungan menurun. Apabila dilihat rentang waktu antara 1980-an sampai dengan 1990-an sebagai contoh tahun 1982 angka perceraian tercatat 56 kali, sedangkan 10 tahun kemudian yakni tahun 1992 tercatat 7 kali atau 8 kali

lipat angka penurunnya, sedangkan jumlah pasangan yang menikah setiap tahunnya cenderung stabil yakni berkisar dari angka 400-450.

E. Dilemma Perempuan Minangkabau Antara Tradisi Dan Modernitas di Kecamatan Ulakan Tapakis

Modernisasi dan globalisasi telah menyeret perempuan Minangkabau kepada dua pilihan yang sulit, yakni antara mempertahankan tradisi lama atau mengikuti roda perubahan zaman. Perempuan Minangkabau berada di antara dua pilihan yang dilematis, meminjam istilah Muchtar Naim seorang sosiolog, budayawan dan tokoh masyarakat Minangkabau yang menyebutnya posisi perempuan Minangkabau seperti berada dipersimpangan jalan.³³

Keinginan untuk mempertahankan entitas lokal Minang, bukanlah persoalan yang mudah dilakukan di tengah terpaan budaya global yang sarat dengan nilai materialisme dan individualistik. Pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mengubah tingkat kesejahteraan perempuan Minangkabau merupakan institusi yang efektif didalam merubah paradigma berpikir perempuan Minangkabau.

Melalui pendidikan pula perempuan Minangkabau memperoleh kesetaraan di dalam urusan domestik (keluarga) dan publik. Meskipun begitu rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam pendidikan tinggi menyebabkan perempuan tidak banyak memperoleh manfaat yang besar dari kemajuan pendidikan, sehingga pekerjaan yang tersedia bagi perempuan Minangkabau yang hanya menamatkan pendidikannya setingkat Sekolah Dasar, tidak jauh dari pekerjaan rumah tangga ataupun pada usaha yang masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai contoh, mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti di daerah Ulakan Tapakis, biasanya mereka hanya sebagai

³³ Muchtar Naim, *Tiga Menguak Tabir: Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Hasanah, 2006.

buruh, misalnya menjemur gabah dan seandainya kalau mereka punya sedikit modal, mereka hanya berjualan kecil-kecilan dan hasilnya hanya cukup menambah biaya belanja untuk keperluan sehari-hari saja.

Menurut budayawan Wisran Hadi, posisi perempuan Minangkabau secara adat, seharusnya memiliki tempat yang terhormat. Sayangnya perempuan Minangkabau belum berperan secara maksimal³⁴ sebagaimana pepatah Minangkabau *Bundo Kandung, limpapeh rumah nan gadang, sumarak dalam nagari, hiyasan kampuang, umbun puro pagangan kunci*. Ungkapan ini sarat makna, akan tetapi dalam realitas kehidupan perempuan Minangkabau dewasa ini seperti *jauh panggang dari api*.

Kian kaburnya pemahaman terhadap nilai-nilai adat, tidak terlepas semakin tergerusnya peran orang tua, terutama ibu sebagai tokoh sentral dalam keluarga. Artinya, ibu harus bertanggung jawab dengan menguatnya degradasi moral dalam generasi muda. Intinya menurut Puti Reno Raudha Taib, ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat, untuk keluar dari kondisi ini pembenahan harus dimulai dari keluarga. Bahkan menurut salah seorang aktifis perempuan Sumatra Barat, Lusi Herlina, keberadaan perempuan Minangkabau masih termaginalkan dan posisinya masih menjadi subordinat kaum laki-laki.³⁵

Pendidikan sebagai sarana bagi perempuan Minangkabau untuk maju serta sejajar dengan laki-laki, tidak secara otomatis. Sebab pendidikan kita menurut Muchtar Naim bersifat skolastik-teoritik³⁶, yakni berorientasi metropolis dan priyayi. Pendidikan model ini menurutnya tidak menciptakan manusia terpelajar yang mandiri dalam arti pendidikan yang siap pakai.

³⁴ Padang Ekspres, 17 Desember 2006, hlm. 5.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Muchtar Naim, *op.cit*, hlm. 11-32.

Kualitas lulusan pendidikan dengan model skolastik-teoritik menurut Muchtar Naim, hanya menghasilkan lulusan yang bekerja sebagai di kantor-kantor pemerintah dan kantor swasta bagi mereka yang memperoleh pendidikan tinggi. Sedangkan bagi mereka yang cuma setingkat pendidikan dasar harus bekerja sebagai buruh dan pelayan saja. Apa yang dikemukakan oleh Muchtar Naim, mungkin saja ada benarnya, paling tidak berdasarkan pada pengamatan di lapangan. Beberapa tempat di Ulakan Tapakis, banyak ditemukan beberapa industri kecil yang mempekerjakan pekerja perempuan, seperti kerajinan bordiran dan sulaman.

Usaha bordir dan sulaman menjadi salah satu bidang pekerjaan yang diminati oleh perempuan di daerah ini. Bahkan menurut salah seorang informan, yang bernama Ita, lulusan sebuah MTsN, terpaksa bekerja pada usaha ini, karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain usaha kerajinan dan bordiran, usaha penyediaan perangkat dan perlengkapan untuk kegiatan penyelenggaraan hajatan seperti perkawinan banyak mempekerjakan perempuan sebagai pelayan untuk melayani kepentingan pembeli dan pengguna jasa ini.

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang semakin lama mengalami perkembangan semakin cepat seiring dengan factor perubahan yang semakin beragam. Muchtar Naim setidaknya mencatat ada empat faktor utama yang menjadi pendorong perubahan sosial perempuan Minangkabau, yakni : faktor ekonomi, pendidikan, teknologi dan struktur masyarakat.³⁷

Faktor pendidikan dan ekonomi merupakan faktor yang bersifat *tangible* dan dampaknya memiliki spektrum yang lebih luas dan mudah dideteksi. Sedangkan faktor teknologi dan struktur masyarakat bersifat *intangible* dan berjalan melalui rentang waktu yang lebih lama dan proses tidak mudah untuk dilihat secara real. Menurut Mochtar Naim, secara struktural fungsional faktor pendidikan dan ekonomilah yang pertama

³⁷ *Ibid.*, hlm. 33-50.

pertama akan menentukan apakah perempuan Minangkabau sebagian besar masih akan terkait dengan kebudayaan agraris-pedesaan atau makin menjurus kepada kebudayaan modern yang metropolis perkotaan.

Pada masa lampau keseimbangan titik *equilibrium* bisa berubah ketika sawah dan lahan pertanian lainnya tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Pada fase ini dimungkinkan terjadinya migrasi penduduk desa ke kota, terlebih kepada anak muda laki-laki yang secara kultural diharuskan melakukan ritual merantau, sebelum akhirnya mereka mengemban tanggung jawab sosial ekonomi keluarganya, sebagaimana pepatah minang menyebutkan :

<i>Ka rantau madang di hulu,</i>	(ke rantau medan di hulu,
<i>Babuah bungo balun,</i>	Berbuah berbunga belum,
<i>Maranatu bujang dahulu,</i>	Merantau bujang dahulu,
<i>Dirumah baguno balun,</i>	Di kampung belum berguna

Pada periode selanjutnya, ketika pendidikan telah terbuka luas kepada perempuan, maka merantau juga menjadi pilihan untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan tinggi mereka. Pada fase inilah terjadi urbanisasi penduduk perempuan dari daerah pedesaan ke perkotaan. Selain itu ketiadaan fasilitas yang memadai di daerah pedesaan ikut mendorong pada perempuan untuk menetap dan bekerja di kota.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi salah satu faktor bagi terjadinya perubahan sosial masyarakat pedesaan. Kemajuan berlangsung dalam bidang telekomunikasi, transportasi dan ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti perumahan, rumah sakit serta fasilitas umum lainnya. Termasuk masuknya teknologi pertanian di daerah pedesaan, menjadikan desa orang desa secara

berangsur angsur menjadi orang kota kota, meskipun tetap tinggal di desa.

Struktur sosial sendiri merupakan perubahan yang cukup berarti, baik karena dampak ekonomi dan pendidikan maupun terjadinya proses pelapukan secara internal, seperti tidak efektifnya lagi fungsi keluarga luas (*extended family*) dalam konteks keluarga matrilineal. Fungsi kaum dan suku lebih bersifat seremonial, meskipun orang masih tetap menggunakan akar primordialnya dimasa transisional ini. Peranan keluarga inti menjadi lebih penting, sehingga orang tua, bapak dan ibu telah menggantikan fungsi mamak sebagai panutan keluarga.

Padahal bergesernya peran mamak ke bapak di daerah yang berorientasi urban secara antropologis-sosiologis berarti bergesernya posisi perempuan dalam keluarga itu sendiri. Secara kultural posisi perempuan Minangkabau dalam sistem matrilinealnya merupakan pihak yang secara *de facto* memegang kendali ekonomi keluarga, meskipun secara *de jure* mamaklah yang berperan mengaturnya. Apalagi hal ini juga didukung oleh sistem pemilikan dan peruntukkan harta warisan yang pada hakekatnya untuk menunjang posisi dan harkat perempuan Minangkabau.

Pergeseran fungsi perempuan Minangkabau, pada akhirnya berimbas pada tidak berfungsinya peran mereka dalam keluarga. Ketergantungan ekonomi perempuan-istri kepada suami telah membuat posisi perempuan berada dibawah kendali-sub ordinat laki-laki suaminya. Persoalan yang selama ini jarang terjadi dalam persoalan rumah tangga, seperti kekerasan terhadap perempuan dalam internal keluarga juga meningkat. Menurut Wisran Hadi, kaum perempuan tidak lagi mendapat naungan dari kaumnya.³⁸ Seandainya mamak masih berperan sebagai pengontrol kehidupan saudara perempuan dan anaknya, maka hal ini kemungkinan kecil terjadi. Bukankah secara adat mamak berperan secara sosial ekonomi atas kehidupan kerabatnya,

³⁸ Padang Ekspres, *op.cit.*,

seperti yang ditamsilkan oleh pepatah Minangkabau; “anak dipangku kamanakan dibimbiang” (anak dipangku, kemenakan dibimbing).

Wisran Hadi juga menambahkan bahwa meningkatnya kekerasan perempuan, karena suami tidak lagi merasa takut pada keluarga perempuan. Sebaliknya, ia akan berfikir dahulu melakukan tindakan itu, karena salah salah bertindak berakibat kehancuran keluarganya. Dalam adat diatur bahwa suami ataupun istri yang ditelantarkan oleh suami atau istri, ia dapat kembali ke kaumnya, sebagaimana mamangan Minangkabau yang menyebutkan :

“Sigai mencari anau, anau tatap sigai baranjak, datang dek bajapuik, pai jo baanta, ayam putiah tabang siang. Basuluah matahari, bagalanggan mato rang banyak.”. (sigai mencari anau, anau tetap sigai berpindah, datang karena dijemput, pergi karena diantar, ayam putih terbang siang, bersuluah matahari, bergelangan orang banyak).

Sebenarnya titik persoalan berada posisi perempuan yang berada di tengah dua kutub yang berbeda, antara mengikuti derap modernitas ataupun tetap memegang entitas keminangkabauannya. Tarik menarik dua kekuatan besar ini, tidak bisa dihindarkan. Mereka yang menginginkan perubahan dan terlepas dari belenggu adat akan berhadapan dengan pihak yang menuntut perlunya adat diletakkan pada posisi semula sebagai filter yang membendung arus modernitas.

Secara kelembagaan sejak diterapkan UU Nomor 5 tahun 1979, yakni berlakunya sistem pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia, maka kedudukan perempuan Minangkabau berada dibawah seksi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dikordinasikan dibawah lembaga ketahanan masyarakat desa. Hal ini tentunya berbeda, bahwa perempuan Minangkabau secara kultural posisinya tidak berada dibawah sub ordinat kelompok laki-laki kaumnya.

Secara adat pusaka adalah milik suku dan kaum. Pada kenyataannya harta telah terbagi merata pada keluarga *saparuik* yang terdiri dari beberapa rumah tangga. Von Benda Backmann menafsirkan sebagai biang kehancuran sistem matrilineal.³⁹ Peran perempuan secara ekonomi di daerah pedesaan kondisi perempuan tidak lebih baik dengan perempuan yang tinggal dikota.

Kelompok perempuan rela bekerja dengan menggunakan tenaga (fisik) bukan pemandangan yang aneh lagi di daerah Ulakan Tapakis. Banyak ditemukan perempuan yang berprofesi sebagai buruh tani ataupun usaha yang berhubungan dengan sektor ini. Perempuan merupakan mayoritas tenaga kerja di lapangan industri kecil seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Table 8 : Perkembangan Industri Kecil Dan Kerajinan

No	Tahun	Jumlah unit usaha	Tenaga kerja
1	1997	1.905	3.847
2	1998	1.902	3.863
3	1999	1.997	3.900
4	2000	1.985	3.950
5	2001	1.998	3.971
6	2002	2.213	4.371
7	2003	2.312	4.378

Sumber : Kecamatan Ulakan Tapakis Dalam Angka 2003, BPS Padang Pariaman, hal 67

Data tabel di atas, meskipun tidak dijelaskan berapa jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor usaha kerajinan kecil. Akan tetapi dari survai lapangan serta fakta berdasarkan informasi berbagai pihak yang berwenang seperti

³⁹ Boestami dkk, *op.cit.*, hlm.150-180.

Walinagari Ulakan, sekretaris camat serta wawancara dengan pengrajin ini, bahwa sebagian besar pekerja mereka adalah kaum perempuan.

Berdasarkan tabel di atas pula jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usaha kerajinan kecil cukup signifikan, dari jumlah 3.847 orang pada tahun 1997 menjadi 4.378 orang pada tahun 2003, jadi selama kurang lebih 6 tahun saja meningkat 531 orang (500-an). Artinya meskipun tidak terlalu besar jumlahnya, paling tidak sektor ini mampu menampung tenaga kerja perempuan yang kebanyakan putus sekolah di daerah pedesaan. Pada umumnya sektor usaha kecil yang berkembang tidak jauh dari okupasi pekerjaan yang diminati oleh kaum perempuan, sehingga usaha bordir, sulaman dan penyewaan tempat pelaminan merupakan usaha yang lazim ditekuni oleh perempuan Minangkabau di daerah ini.

Kedudukan perempuan sampai permulaan tahun 1960 adalah di rumah, menjaga anak, memasak dan mengurus rumah tangga sedangkan pekerjaan dan tugas laki-laki pada umumnya terdapat di luar rumah tangga mencari nafkah untuk keluarganya. Akan tetapi seiring dengan perubahan zaman, ketika harta pusaka sudah mulai habis dan saudara laki-laki mereka mulai banyak merantau, maka perempuan secara perlahan-lahan juga mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Dalam menentukan jodoh dan pendidikan, seorang perempuan Minangkabau pada masa dulu diatur oleh keluarganya. Jodoh mereka ditentukan oleh saudara laki-lakinya beserta dengan "urang sumando" yang tinggal dengan mereka. Wanita harus menerima jodoh yang sudah dipilihkan oleh kerabatnya. Kemudian menyangkut pendidikan, perempuan hanya memperoleh pendidikan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga nantinya. Perempuan Minangkabau seringkali menjadi korban dari poligami dari kaum laki-laki. Akan tetapi sejak ada perubahan politik di tanah Minangkabau terutama pasca peristiwa PRRI tahun 1958, banyak perempuan Minangkabau mulai menuntut

persamaan hak atau emansipasi dalam segala hal, termasuk pendidikan.

Meningkatnya jumlah perempuan yang berpendidikan dan sebagian di antara mereka bekerja membuat konfigurasi keluarga dan tanggung jawab hubungan antara suami-istri mengalami perubahan. Perubahan peranan perempuan Minangkabau yang sebelumnya lebih banyak bekerja di ranah domestik ke publik, tampaknya memperlihatkan seolah-olah keluarga modern Minangkabau seperti bergeser dari sistem matrilineal ke sistem parental.

F. Penutup

Diskurs mengenai peran dan status perempuan terkait dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender belakangan ini mendapat perhatian yang cukup luas, baik dari penentu kebijakan, akademisi maupun para aktivis pembela hak-hak perempuan sendiri. Isu-isu tidak hanya menyangkut peranan perempuan dalam ranah domestik maupun publik semata.

Dalam konteks perempuan Minangkabau persoalan kesetaraan gender menarik untuk diperbincangkan, mengingat suku bangsa Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di dunia yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal). Wacana mengenai persoalan gender *mainstream* perempuan Minangkabau dan konstruksi sosialnya tidak akan pernah habis untuk diulas. Dalam perspektif ideal normatif, perempuan Minangkabau karena tradisi matrilinealnya lebih mandiri secara sosial ekonomi sebab perempuan Minangkabau mewarisi harta pusaka dari kaumnya. Akan tetapi fakta empirik menunjukkan kualitas hidup perempuan Minangkabau masih terpinggirkan.

Alam Minangkabau secara tradisional mengenal daerah Luhak Nan Tigo (Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Koto) serta daerah rantau (seperti Pariaman dan Padang) dua kawasan ini secara diametral

memiliki karakteristik dan corak budaya berbeda, seperti pepatah Minangkabau mengatakan luhak bapanghulu rantau barajo. Perbedaan ini tidak lain karena kawasan rantau yang cenderung bersifat dinamis karena persinggungan dengan budaya lainnya sebagai akibat adanya aktifitas perdagangan laut pada masa lampau.

Kecamatan Ulakan Tapakis (Pariaman) juga memegang teguh prinsip matrilineal Minangkabau seperti keanggotaan suku diperoleh dari garis ibu, adat menetap sesudah menikah mengikuti sistem matrilokal dan sebagainya. Masyarakat daerah ini juga memberikan sejumlah hak adat kepada anak-anak mereka, khususnya bagi anak laki-laki. Anak laki-laki mendapat hak tertentu dari garis ayahnya.

Tradisi *bajapuik* dikenal di daerah Ulakan Tapakis, yakni tradisi dimana pihak mempelai perempuan melakukan proses menjemput untuk melamar calon mempelai laki-laki. Tradisi *bajapuik* di daerah Pariaman, merupakan satu contoh betapa persoalan menyangkut posisi sosial perempuan Minangkabau terlihat begitu kompleks. Persoalan akan bertambah rumit manakala posisi perempuan Minangkabau dikaitkan dengan beberapa hal, seperti penguasaan akses dan pengelolaan harta pusaka, pengambilan kaputusan dalam rumah gadang, kekerasan dalam rumah tangga, kemampuan ekonomi serta berbagai persoalan sosial budaya lainnya. Modernisasi dan globalisasi telah menyeret perempuan Minangkabau kepada dua pilihan yang sulit, yakni antara mempertahankan tradisi lama atau mengikuti roda perubahan zaman. Keinginan untuk mempertahankan entitas lokal Minangkabau bukanlah persoalan yang mudah dilakukan di tengah terpaan budaya global yang sarat dengan nilai materialisme dan individualistik. Pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mengubah tingkat kesejahteraan perempuan Minangkabau merupakan institusi yang efektif didalam merubah paradigma berpikir perempuan Minangkabau. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang semakin lama mengalami perkembangan semakin cepat seiring dengan faktor perubahan yang semakin beragam. Pergeseran fungsi perempuan Minangkabau, pada

akhirnya berimbas pada tidak berfungsinya peran mereka dalam keluarga. Ketergantungan ekonomi perempuan istri kepada suami telah membuat posisi perempuan berada dibawah kendali sub ordinal laki-laki suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Bustanul, *Uang Hilang dan Masalahnya Dalam Perkawinan di Pariaman*, Padang : Skripsi FH Unanad tidak diterbitkan, 1984.
- Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta : Galang Press, 2001.
- Bigalke, Terry, *The Oral History Metode*, Dalam Sejarah Lisan, Jakarta : Lembaran Berita ARNAS RI, No. 9 Oktober 1982.
- Boestami dkk, *Kedudukan Dan Peranan Wanita, Dalam Kebudayaan Bangsa Minangkabau*, Padang : Penerbit Esa Padang, 1992.
- BPS Padang Pariaman, *Kecamatan Ulakantapis Dalam Angka 2003*.
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran (ed), *Menggugat Budaya Patriaki*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.
- Eko, Sutoro, *Menggantang Asap, Kritik dan Refleksi Atas Gerakan Kembali Ke Nagari*, Yogyakarta : IRE, 2005.
- Ernatip, dkk, *Upacara Tabuik di Pariaman, Kajian Nilai Budaya dan Fungsi Bagi Masyarakat Pendukungnya*. Padang : BKSNT Padang, 2001.
- Idris, Agustas, *Kaba Cindur Mato*, Jakarta : PT Pertija, 1995.
- Junus, Umar, *Kebudayaan Minangkabau dalam Koentjaraningrat (ed), manusia dan kebudayaan Indonesia*, Jakarta : Djambatan , 1988.

Koentjaraningrat, *Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Penyunting Koentjaraningrat), Jakarta : Gramedia , 1984.

-----, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1997.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1998.

Naim, Muchtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau*, Yogyakarta : UGM Press, 1984.

-----, *Tiga Menguk Tabir : perempuan minangkabau di persimpangan Jalan*, Jakarta : Hasanah, 2006.

Mahkota, Ambas, *Kaba Anggun Nan Tungga*, Bukittinggi : Pustaka Indonesia, 1982.

Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Press, 1984.

St.Pamuncak, M.Z *Kaba Rancak Dilabuah*, Bukittinggi : Pustaka Indonesia, 1990.

Suryadi, Syair Sunur, *Teks dan Konteks Otobiografi Seorang Ulama Minang Kabau Abad ke-19*, Padang : Citra Budaya, 2004.

Von, Benda-Beckman, Franz, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Jakarta : Grasindo, 2000.

Zed, Mestika dkk, *Sumatera Barat Dipangggung Sejarah 1945-1995*, Jakarta : Sinar Harapan , 1998.

Majalah dan Koran

Harian Padang Ekspres tanggal 2 Januari 2006.

Harian Padang Ekstpress tanggal 3 Januari 2006

Harian Padang Ekspres tanggal 14 Januari 2006

Rohana Kudus, Edisi November–Desember 2004

ROhana Kudus, edisi November 2005

Bulletin LImpapeh Edisi I tahun 2004

HUBUNGAN RANAH DAN RANTAU : STUDI KASUS KONGRES KEBUDAYAAN MINANGKABAU (KKM) TAHUN 2010*

Oleh

Nurmatias dan Undri

A. Latar Belakang Masalah

Orang Minangkabau merupakan masyarakat yang unik, selain dikenal dengan kebiasaannya merantau, berupaya untuk memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai keagamaan (Islam), dan merupakan komunitas masyarakat *matrilineal* terbesar di dunia, juga dibesarkan dalam suasana masyarakat egalitarian, dan sangat menghargai kebebasan individual mereka (Abdullah, 1966 ; Abdullah, 1971 ; Naim, 1984 ; Kato, 2005). Dengan kondisi masyarakat egalitarian yang sangat menghargai kebebasan individu tersebut maka tidak jarang muncul perdebatan intelektual di antara orang Minang mengenai berbagai masalah dalam kehidupan mereka.

Perdebatan intelektual yang dimaksud merupakan upaya perumusan dan penyampaian pemikiran kritis tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah dan bangsa. Pemikiran-pemikiran kritis tersebut lazimnya disampaikan secara terbuka dan terus terang diberbagai kesempatan, baik secara lisan pada saat dilangsungkan rapat, kongres dan seminar maupun secara tertulis di surat kabar dan majalah. Orang Minang selalu memperdebatkan ide, dan tidak menelan mentah-mentah segala sesuatu yang berhubungan dengan perihal kehidupan mereka, baik yang berasal dari rantau maupun dari *ranah* sendiri. Berlangsungnya konflik secara berkepanjangan di dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan.

Salah-satu kasus perdebatan intelektual dan konflik mutakhir yang menarik untuk dikaji adalah rangkaian persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan Kongres

* Tulisan ini merupakan ringkasan dari penelitian Nurmatias dan Undri dengan judul dan tema yang sama.

Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010.¹ Kongres tersebut di gagas oleh orang rantau yakni organisasi Gebu Minang yang berkantor di Jakarta. Motivasi utama Gebu Minang, untuk melaksanakan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK); (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani; (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir; (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari–atas tanah ulayat; dan (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Dalam pelaksanaannya pihak Gebu Minang banyak dibantu oleh pegawai Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang terutama oleh Nurmatias, Undri, dan Zusneli Zubir. Keikutsertaan pegawai Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang tersebut hanya bersifat pribadi bukan atas nama institusi lembaga.

Sebagai catatan dapat disampaikan bahwa KKM berfokus pada tema pertama, sebagai upaya bersama untuk merumuskan ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK), yang tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Gebu Minang (2005). Urgensi dibahasnya ABS SBK di dalama KKM tersebut selain oleh karena belum ada rumusannya yang jelas, juga oleh karena ABS SBK ini juga merupakan dasar organisasi dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang didirikan pada tahun 1966. LKAAM sendiri belum mengeluarkan pedoman

¹ Sedianya kegiatan tersebut direncanakan di Kota Bukit Tinggi pada tanggal 7-8 Agustus 2010. Namun, oleh karena kerasnya aksi terorganisasi dan berkelanjutan untuk menentang KKM ini, akhirnya KKM tersebut berganti nama menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM), dan dilaksanakan di kota Padang lebih dari empat bulan kemudian, pada tanggal 12 dan 13 Desember 2010. Untuk efektifitas dalam penulisan selanjutnya kata Kongres Kebudayaan Minangkabau ditulis KKM saja.

pelaksanaan ABS SBK ini, baik untuk masyarakat Minangkabau yang bermukim di Ranah, maupun untuk yang bermukim di Rantau. Dengan maksud untuk mengisi kekosongan itu, Gebu Minang mengambil prakarsa untuk mengajak semua pihak terkait untuk membahas kepentingan bersama ini.

Ada empat ciri khas dari gagasan konseptual Gebu Minang mengenai KKM ini, yaitu 1) berorientasi ke masa depan; 2) bersifat komprehensif dan integral, dengan juga membahas masalah-masalah sosial ekonomi dan sosial budaya yang terkait; 3) mendorong kesetaraan antara orang Ranah dan orang Rantau; dan 4) dikembangkan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum dimulainya tersebut, Gebu Minang telah meluncurkan serangkaian kegiatan FGD (*Focused Group Discussion*) untuk menjangkau aspirasi masyarakat dari pihak-pihak terkait, seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol Padang, dan lain-lainnya.

Setelah rangkaian FGD tersebut secara khusus diadakan sebuah kegiatan Pra Seminar dengan tema : *Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana*.² Seminar ini berupaya menyajikan pandangan dari para pakar/pembicara dari beberapa sudut pandang, tentang suatu tema yang belum pernah dibicarakan dalam rangka kebudayaan Minangkabau, yaitu peranan dunia maritim terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan Minangkabau. Dalam Pra Seminar ini telah dibahas aspek-aspek, hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Tema-tema yang berkaitan dengan dunia maritim tersebut adalah (1) Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat, (2) Menumbuhkan Kembali Semangat Bahari di Ranah Minang, (3) Pememfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera Barat, (4) Pemberdayaan Masyarakat pesisir

² Pra Seminar ini dilangsungkan di halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang pada tanggal 7 Agustus 2010.

dalam Mendukung Revolusi Biru, (5) *The Indonesian Tsunami Early Warning System* (inaTEWS) dan Peringatan Dini Tsunami di Kota Padang, (6) Orang Minang Sebagai Bangsa Pelaut, dan (7) Masyarakat Pesisir dan Bencana Alam.

Berbagai langkah persiapan telah dilakukan oleh pihak Gebu Minang untuk memperlancar pembahasan lima tema tersebut, seperti melakukan kegiatan pertemuan dengan pihak pemerintah Sumatera Barat pada 12 Oktober 2010 di Auditorium Gubernuran Sumbar.³ Namun pihak yang menentang kegiatan KKM tidak bersedia hadir. Walaupun pihak yang menentang KKM ini tidak bersedia untuk hadir, namun seluruh hadirin undangan yang hadir menyatakan pendapat bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan oleh Gebu Minang.⁴

Adanya berbagai tanggapan dari *Ranah Minang* tersebut tidak dapat dihindarkan, yang bermula dengan kritik dan memuncak pada aksi penolakan secara terorganisasi dan berkelanjutan terhadap KKM tersebut. Elemen-elemen masyarakat yang menentang dilaksanakannya kegiatan tersebut terdiri dari unsur budayawan perseorangan, dan organisasi-organisasi, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat,⁵ Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, dan Bundo Kandung.

Di antara alasan yang disampaikan secara terbuka untuk menolak KKM ini diantaranya adalah oleh karena 1) bahan KKM sudah disiapkan terlebih dahulu oleh panitia Gebu

³ Undangan kepada peserta yang menentang KKM 2010 diantar langsung oleh Nurmatias, seperti kepada Darman Moenir, Wisran Hadi dan lainnya.

⁴ Ini merupakan hasil kesepakatan peserta pertemuan. Lebih lanjut lihat hasil rumusan dari pertemuan tersebut pada Arsip KKM 2010 di Kantor Pusat Gebu Minang Jakarta.

⁵ Sebagai catatan dapat disampaikan bahwa walaupun sama-sama mendasarkan diri pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK), namun pimpinan LKAAM periode 2010-2015 adalah pihak yang pertama kalinya menentang KKM 2010 ini.

Minang serta 2) para budayawan ingin menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut.

Puncak dari reaksi terorganisasi dan berkelanjutan terhadap KKM ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2010—seminggu sebelum dibukanya acara KKM—sewaktu Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama para tokoh-tokoh adat masyarakat Kurai di Bukit Tinggi secara resmi menyatakan menolak diselenggarakannya KKM di kota.⁶

Dalam situasi yang kritis – dan belum pernah terjadi dalam sejarah konflik di Minangkabau – Walikota Padang –Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si,⁷ memegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya KKM ini. Setelah mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak – termasuk fihak yang melancarkan aksi menentang KKM -- Walikota Padang menyarankan agar nama Kongres Kebudayaan Minangkabau diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM) Gebu Minang. Panitia Pengarah KKM menyetujui saran Walikota Padang tersebut, sehingga nama Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 secara resmi diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau –Gebu Minang.(SKM GM 2010), yang ternyata memang merupakan solusi terbaik untuk meredam konflik yang sangat tajam antara fihak yang menyetujui dan fihak yang menolak kegiatan ini.

Kalau ditelusuri lebih lanjut bahwa penyampaian pemikiran kritis yang berpuncak pada konflik kebudayaan dalam perspektif sejarah di Minangkabau tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah dan bangsa bukan saja terjadi pada kegiatan KKM 2010 belaka, tetapi juga telah terjadi

⁶ Sudah barang tentu penolakan resmi secara gabungan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan tokoh-tokoh masyarakat Kurai ini tidak bisa diabaikan panitiya, sehingga selain seluruh pesanan kamar hotel untuk seribu orang serta pesanan Balai Sidang Bung Hatta terpaksa dibatalkan, juga dalam waktu satu minggu itu harus dicari lokasi KKM yang baru, dipesannya kamar hotel yang baru, serta diperbaharainya undangan kepada seluruh peserta kongres

⁷ Walikota Fauzi Bahar adalah seorang perwira menengah TNI-Angkatan Laut.

sebelumnya. Konflik tersebut membayangkan kedinamikaan, sesuai konsep *basilang kayu dalam tungku, baitu api mako ka iduik* (bersilang kayu dalam tungku, dengan begitu maka api akan hidup) (Nasroen, 1971 ; Naim, 1983). Artinya, konflik diperlukan dan dari konflik-konflik itu diharapkan lahir konsensus-konsensus dan sintesis-sintesis kultural (Hasanuddin, 2000).

Wacana adat Minangkabau, tidak semua masyarakat Minangkabau sepakat dengan praktek adat. Di antara ulama Minangkabau yang menentang beberapa aspek adat Minangkabau adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Thaher Jalaluddin, dan Hamka. –Ahmad Khatib al-Minangkabawi, umpamanya mengkritik hukum pembagian harta waris yang berlaku dalam adat Minangkabau sebagai hukum adat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist, begitu juga dengan sistem *matrilineal* (Nizar, 2008 : 63).

Dalam zaman Reformasi sekarang, penyampaian pemikiran kritis yang melahirkan konflik masih tetap berlangsung, kali ini bukan antara sesama orang Ranah, tetapi antara orang ranah terhadap orang rantau, dan sebaliknya. Lebih dari itu, selain dari skala perdebatan intelektual serta konflik yang mengiringinya mencakup hampir seluruh orang Minang, substansi yang diperdebatkan serta menimbulkan konflik terbuka tersebut juga berkenaan dengan masalah yang bersifat mendasar, yaitu ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK). Kelihatannya dalam sejarah Minangkabau belum pernah terjadi perdebatan terbuka serta konflik yang seintensif ini.

Bertitik tolak dari persoalan diatas, maka tulisan ini berupaya menjelaskan polemik hubungan ranah dan rantau di Minangkabau dengan studi kasus KKM. Walaupun penelitian ini mengambil kasus tahun 2010 namun peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan hubungan ranah dan rantau juga akan disigi. Hal ini berguna untuk memperlihatkan bahwa hubungan Ranah dan Rantau dalam penyampaian pemikiran kritis bukan saja terjadi pada sekarang ini namun juga sudah terjadi dalam abad-abad sebelumnya. Rangkaian

rumusan pertanyaan dibawah ini akan dapat mengarahkan kepada pokok persoalan diatas, yakni : (1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010 ? (2) Bagaimana respon orang di *ranah* Minang dan pemetaan, yang setuju, mencaik dan netral atas kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010 ? (3) Bagaimana hubungan *ranah* dan rantau seperti tercermin dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010?

Adapun batasan spasial dalam penelitian ini adalah daerah Sumatera Barat yang merupakan *ranahnya* orang Minangkabau. *Ranah* dalam penelitian ini adalah Propinsi Sumatera Barat, yang mayoritas dihuni oleh etnik Minangkabau sedangkan rantau adalah orang Minang yang berada di luar daerah Sumatera Barat terutama orang yang ikut dalam kepengurusan Gebu Minang, yang berkantor di Jakarta.

Sedangkan batasan temporal dalam penelitian ini adalah tahun 2009 sampai 2010. Tahun 2009 diambil sebagai batasan awalnya karena pada tahun tersebut direncanakan kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 sedangkan tahun 2010 diambil karena pada tahun tersebut dilaksanakan kegiatan Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM) Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan *metode sejarah*. Metode sejarah terdiri dari atas empat tahap, yaitu *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber; *kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber itu; *ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu; dan *keempat*, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis (Gottschalk, Louis, 1985 : 32 ; Kuntowijoyo, 1999 : 89)

Tahap *pertama, heuristic* yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah dengan sasaran utamanya sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip, naskah dokumen, surat-surat yang ditulis berkenaan dengan tema penelitian sedangkan sumber primer bersifat lisan

adalah melalui wawancara dengan pelaku maupun saksi sejarah. Untuk penelitian ini telah dilakukan pendekatan sejarah lisan, melakukan wawancara terhadap orang yang ikut terlibat dalam pelaksanaan KKM tahun 2010, yakni terhadap pihak Gebu Minang yakni pihak panitia kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau dan Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang Tahun 2010; Pemerintah Daerah; komunitas atau orang yang menyetujui dan yang menolak; serta peserta dari kegiatan KKM tahun 2010 dan SKM GB tahun 2010. Serta melakukan pengajuan pertanyaan secara tertulis kepada informan dengan mengirimkan daftar informan melalui *email*. Ini dilakukan terhadap informan yang berada di Jakarta, Surabaya dan daerah lainnya yang tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung disebabkan oleh pertimbangan- baik dari segi waktu maupun pendanaan.

Pengumpulan data lapangan pada tahap awal dilakukan dengan studi kepustakaan dan arsip, yakni Kantor Koran Harian *Haluan* di Padang, Kantor Koran Harian *Padang Ekspres* di Padang, Kantor Koran Harian *Singgalang di Padang*, dan Kantor Koran Harian *Posmetro Padang* di Padang. Kemudian juga arsip panitia berupa hasil notulen serta perdebatan yang terjadi di *facebook*. Sebab berbagai rangkaian aksi menolak dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini juga ramai diperbincangkan pada *facebook* tersebut. Data tersebut dianalisa dengan *content* analisis, terutama pada data yang bersumber pada koran, majalah dan *facebook*. Sedangkan data wawancara dilakukan pengecekan atas kebenaran data kepada pihak lain.

Tahap *kedua*, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren dan intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber) sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarawan, budayawan dan politisi sebagai sumber lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya.

Tahap *ketiga*, sintesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu. Dalam hal ini juga diadakan interpretasi, dalam arti merangkaikan fakta-fakta antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan pengertian. Tahapan ini, melakukan analisa berdasarkan fakta sejarah.

Tahap *keempat*, *historiografi*, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial dan akurat sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis struktural yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Alam Minangkabau dan Masyarakatnya

Secara tradisional, daerah-daerah dalam pengaruh Minangkabau disebut alam Minangkabau. Di dalam historiografi Minangkabau tradisional, *tambo*, dijelaskan bahwa alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama. Pertama *luhak* merupakan kawasan pusat atau inti dari alam Minangkabau yang disebut juga dengan *luhak nan tigo*, yaitu *luhak Agam*, *luhak Tanah Datar*, dan *luhak Limopuluh Kota*. Kedua *rantau*, yaitu kawasan pinggiran dan sekaligus merupakan daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat. Kendati pun penduduk Minangkabau di kawasan inti (*core region*) terus-menerus menyebar ke segala penjuru, *luhak nan tigo* tetap dianggap sebagai kampung halaman atau tempat asal mereka yang sebenarnya.

Graves (2007 : 4) menjelaskan bahwa kawasan utama dari perkembangan alam Minangkabau merupakan penghasil beras, yang masing-masing dilingkari dinding perbukitan yang memisahkan Minangkabau dengan daerah tetangganya. Kawasan ini-dalam perpustakaan Belanda sering disebut *Padangsche Bovenlanden* atau kadang-kadang juga *Minangkabausche Bovenlanden* terletak di sekitar dataran tinggi yang membentang diantara kelompok Bukit Barisan

bagian tengah yang membujur dari utara-selatan Pulau Sumatera. Daerah ini berpenduduk padat, dan secara bersama-sama membentuk semacam mangkok alam yang besar, dengan lereng-lerengnya yang landai dan menawan hati menjadi dinding-dinding alami, dimana teras sawah yang berjenjang-jenjang diairi oleh curah hujan tetapi juga tersedia sumber mata air yang mengalir secara alami berkat topografinya yang cukup menguntungkan.

Kawasan ini dilingkari oleh tiga buah gunung yakni Merapi, Singgalang dan Sago), yang senantiasa mengingatkan anak nagari kepada nenek-moyang mereka yang turun dari gunung Merapi sejak dulu kala, ketika orang belum lagi mengenal sistem bercocok tanam padi dan ketika orang masih di alam liar, suatu masa yang terlalu sukar untuk diingat. Gunung Merapi yang masih aktif dan berbahaya itu, seolah-olah bertindak sebagai penjaga perbatasan antara *luhak* Agam dengan *luhak* Tanah Datar. Gunung Singgalang tidak aktif lagi, terletak diperbatasan sebelah selatan *luhak* Agam. Serta Gung Sago, yang sekarang tidak lagi aktif terletak di kawasan *luhak* Lima Puluh Kota.

Tempat tinggal utama orang Minangkabau adalah Propinsi Sumatera Barat, yang mencakup lebih kurang 49.800 kilometer persegi yang merentang dari utara ke selatan dan diapit oleh Samundra Hindia. Daerah pedalaman (*darek*) sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan beberapa hamparan tanah yang agak datar, sedangkan daerah pesisir (*rantau*) merupakan dataran rendah yang diselang-selingi oleh rawa-rawa. Tanah di Sumatera Barat umumnya subur dan tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Padi sawah adalah tanaman utama pertanian. Karet, kelapa, kopi, gambir, kayu manis dan cengkeh merupakan beberapa tanaman perdagangan yang penting. Selain kegiatan bertani, kerajinan tangan misalnya menenun dikerjakan secara meluas di beberapa tempat khususnya di sekitar Bukittinggi (Kato, 2005 : 2).

Dalam lingkungan alam yang demikian itulah kawasan pusat dari alam Minangkabau ditemui dan secara lambat laun

penduduknya menyebar ke wilayah pinggiran yang kemudian disebut *rantau*. *Rantau*, karenanya adalah wilayah kedua dari alam Minangkabau. Dalam perkembangan sejarahnya merupakan daerah kolonisasi orang Minangkabau yang pergi "merantau" ke sana. *Rantau* juga merupakan permukiman di daerah pinggiran yang didirikan oleh orang dari luhak dan kadang kala oleh orang-orang dari luar alam Minangkabau. *Rantau* merupakan daerah yang berbatasan dengan dunia luar dan melaluinya ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan baru diperkenalkan kepada alam (Abdullah, 1972a : 187 dalam Kato, 2005 : 21).

Alam Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai konsep "geografis" dimana daerah kebudayaan Minangkabau menyebar, tetapi juga mengandung pengertian sosiologis, yang dapat menjelaskan ruang-lingkup dimana wujud interaksi antara kedua kawasan (*luhak* dan *rantau*) alam Minangkabau tumbuh dan berkembang dalam proses sejarahnya. Hubungan antara pusat, *luhak* dan kawasan pinggiran, *rantau* dapat dilihat dalam dua bentuk interaksi. Yang pertama dalam bentuk ikatan politis, dan yang kedua dalam bentuk hubungan perdangangan(Zed, 1983 : 25). Ini akhirnya mempengaruhi secara geografis nagari-nagari-sebagai unit terkecil- yang ada di daerah Minangkabau, termasuk gaya hidup masyarakatnya.

Persoalan ini kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Graves (2007 : 10), di mana menurut dia secara geografis dan sejauh berhubungan dengan gaya hidup penduduknya, orang dapat membedakan nagari-nagari di Minangkabau ke dalam tiga kategori yang masing-masingnya berbeda-beda tipe. Di daratan tinggi pedalaman (atau sering juga disebut Padang Darat), yang menjadi titik focus sejarah dan kebudayaan Minangkabau yang utama, telah berkembang dua tipe gaya-hidup penduduknya : yang *pertama* berdasarkan pertanian sawah dengan hasil panen padinya yang berlimpah ruah, sedangkan yang *kedua* adalah tipe nagari-nagari "*marginal*" yang berada di sekitar lereng perbukitan dan pegunungan, tempat ciri khas kehidupan penduduknya berusaha di luar bidang pertanian ; di sini terutama menonjol sikap

“*entrepreneurship*” (kepengusahaanya), kerajinan tangan dan beberapa jenis pekerjaan keterampilan lainnya.

Dalam hal penduduk, konsepsi sosial Minangkabau membedakan penduduk atas dua kriteria yaitu penduduk asli (*urang asa*) dan penduduk pendatang (*urang datang*). Orang asli (*urang asa*) adalah orang yang lebih dahulu mendiami suatu daerah, biasanya mereka dianggap golongan bangsawan. Mereka adalah orang yang merintis suatu daerah, mulai dari *taratak* kemudian berubah menjadi *dusun*, dari *dusun* menjadi *koto* dan akhirnya terbentuknya *nagari*. Proses semacam ini di istilahkan Kato dengan *metamorfosa* pemukiman (Kato, 1989 :48).

Berbeda dengan penduduk asli (*urang asa*), penduduk pendatang (*urang datang*) merupakan mereka yang datang lebih kemudian dan statusnya dianggap lebih rendah dari penduduk asli (*urang asa*). Mereka sebenarnya dapat dibagi atas dua golongan, yang mempunyai ikatan keluarga dengan penduduk asli (*urang asa*) dan tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan penduduk asli (*urang asa*), golongan ini dianggap berada pada posisi lebih rendah dalam strata sosial Minangkabau.

Untuk membedakan antara orang asli (*urang asa*) dengan orang pendatang (*urang datang*) adalah sebagai berikut : *pertama*, mempunyai tanah pusaka secara turun temurun diwariskan dari nenek moyang pertama didapatkan dengan *menaruko* (meneruka). *Kedua*, mempunyai pandam pekuburan, dimana nenek moyang yang mula-mula sekali membuka nagari, berkubur pada daerah tersebut, *Ketiga*, mempunyai gelar kebesaran. *Keempat*, mempunyai rumah adat yang bergonjong sesuai dengan kebesarannya didalam lapisan sosial.

Walaupun status sosial orang pendatang (*urang datang*) lebih rendah dari orang asli (*urang asa*), tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk menyamakan statusnya dengan orang asli (*urang asa*). Untuk itu perlu melaksanakan beberapa ketentuan adat (mengisi adat) “*cupak diisi limbago dituang*” (cupak diisi lembaga dituang), pepatah

tersebut mengiaskan tata cara tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban oleh orang datang (*orang datang*) pada daerah dimana ia tinggal. Kewajiban tersebutlah yang nantinya “mengikat” dia menjadi bagian dari orang asli (*orang asa*).

Kedudukan penting dalam setiap unit keturunan ialah mamak, dan selaku *mamak*⁸ ia bertanggung jawab mengawasi anggota keluarganya yang disebut anak-buah, kekuasaannya bertambah besar seiring dengan bertambah besar anak-kemenakannya. Seorang mamak dianggap ikut membantu bertanggung-jawab memajukan anak kemenakannya, melindungi mereka dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Berdiri sejajar dengan penghulu lainnya, seorang mamak dalam suatu suku tertentu disebut “penghulu suku”, ia diberi gelar kehormatan dengan datuk. Kedudukan penghulu, sebagaimana halnya dengan mamak, pada umumnya berasal dari anggota keluarga terpilih dari saudara laki-laki dari ibu atau anak-anak laki-laki di antara saudara-saudara perempuan.

C. Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) Tahun 2010

3.1. Dari Pembentukan Panitia Sampai Penyebaran Undangan Kepada Peserta

KKM Tahun 2010 dilaksanakan oleh Gebu Minang sebagai amanat dari Musyawarah Besar (Mubes) Gebu Minang tahun 2005 di Sawahlunto. Amanat ini dijadikan sebagai dasar utama oleh kepengurusan Gebu Minang untuk melakukan Kongres Kebudayaan Minangkabau serta sebagai program kerja yang harus mereka lakukan. Langkah awalnya yakni menyusun kepanitiaan pengarah (*Streering Committee*) Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Kepanitiaan tersebut terdiri dari pihak Gebu Minang, para akademisi yang berada di Sumatera Barat, seniman, wartawan, birokrat dan

⁸ *Mamak* adalah saudara laki-laki ibu yang dituakan didalam rumah gadang atau famili yang diangkat dari garis keturunan ibu.

lainnya. Adapun kapanitiaan yang dibentuk terdiri dari : Pimpinan terdiri dari Ketua Dr. Syafoedin Bahar, Wakil Ketua Dr. Mochtar Naim, Sekretaris Drs. H. Farhan Muin Dt. Bagindo, M.Si, Wakil Sekretaris I H. Amri Aziz, M.Sc dan Wakil Sekretaris II Warni Darwis. Anggota *Streering Committe* /Tim Perumus terdiri dari (1) Drs. H. Farhan Muin Dt. Bagindo, M.Si, (2) H. Amri Aziz, M.Sc, (3) Dr. Mochtar Naim, (4) Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.Si, (5) Drs. Alfitri, MS, (6) H. Muhardi Rajab, SH. M.Hum, (7) Dr. Erwiza Erman, (8) Dra. Sri Setiawati, (9) Bachtiar Abna Dt. Rajo Penghulu, SH.MH, (10) Prof. Dr. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo, (11) Prof. Dr. Zainudin Husni Dt. Rajo Lenggang, (12) Dr. Zaim Rais, (13) Dr. Rer. Soc. Nursyirwan Effendi, (14) Drs. Sjafnir Aboe Naim, (15) Drs. Nurmatias Zakaria. Anggota *Streering Committe* / Tim Koordinator Persiapan di Rantau, yakni (1) Drs. H. Farhan Muin Dt. Bagindo, M.Si, (2) Ny. Sulfah Achni E. Jamin, (3) Nadiar, SH, (4) Prof. Dr. Armai Arief, MA, (5) Lym Campay Sidi Sri Maharajo Lelo, (6) Drs. Djauhari Syamsudin, (7) Dr. Ir. H. Abdul Razak Manan, M.Si Glr Marah Marajo, (8) Ir. Basri Mangun, dan (9) Ir. M.Noer. Anggota *Streering Committe* / Tim Koordinator Persiapan di Ranah Minangkabau, terdiri dari (1) Drs. Nurmatias Zakaria, (2) Dt. Nagari Basa, (3) Prof. Dr. Salmadanis, M.Sc, (4) Ilhamdi Taufik, SH.MH, (5) Drs. H. Bagindo Letter, (6) Marzul Veri, dan (7) Abdul Samad.⁹

Kemudian kepanitiaan pengarah yang dibentuk tersebut dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan oleh pihak Gebu Minang untuk mengakomodir beberapa nama yang sebelumnya masuk kedalam kepanitiaan Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Untuk pimpinan tidak ada perubahan. Begitu juga dengan Anggota *Streering Committe*/Tim Perumus. Namun dalam Anggota *Streering Committe*/ Tim Koordinator Persiapan di Rantau nama Lym Campay Sidi Sri Maharajo Lelo digantikan oleh Drs. Mishar Dt. Mangkuto Sepuluh, anggota lainnya tetap dengan nama-nama

⁹ Lebih jelas uraian tentang kepanitiaan KKM 2010 lihat *Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010* yang dibuat oleh Sekretariat Gebu Minang Jalan Kayu Manis I Nomor 24 RT.002/02/ Jakarta Timur 13130.

kepengurusan sebelumnya. Begitu juga dengan Anggota *Streering Committe* / Tim Koordinator Persiapan di Ranah Minangkabau terjadi perubahan struktur yakni menambahkan beberapa orang nama yakni Undri. SS.M.Si, Dra. Zusneli Zubir, M.Hum dan Yoka Yunizar. Ketiga nama tersebut berasal dari Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang. Ketiga nama tersebut dimasukkan kedalam kepanitiaan disebabkan oleh adanya “negosiasi” kepala kantor BPSNT Padang yakni Drs. Nurmatias Zakaria dengan pihak Gebu Minang. Negosiasi tersebut akhirnya diterima dan konsekuensinya adalah bahwa ketiga nama tersebut diikutsertakan sebagai kepanitia Kongres Kebudayaan Minangkabau.

Persoalan muncul kemudian setelah dibentuk kepanitiaan tersebut, pencantuman beberapa nama-nama dalam kepanitiaan hanya dilakukan sepihak oleh Gebu Minang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nama yang bersangkutan. Dr. Nursyirwan Effendi misalnya, mempersoalkan namanya dicantumkan dalam kepanitiaan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu oleh pihak Gebu Minang. Kondisi ini tergambar dalam emailnya yang dikirimkan kepada Asraferi Sabri.¹⁰ Surat tersebut ditujukan kepada ketua atau pimpinan Kongres Kebudayaan Minangkabau. Adapun isi surat tersebut yakni :

Dengan Hormat: Ketua/Pimpinan KKM

Hal: Pencabutan Nama dari daftar Panitia.

Dengan ini saya meminta dengan sangat agar nama saya yang tercantum pada daftar kepanitiaan dicabut karena beberapa alasan:

1. Saya belum lama ini mengetahui bahwa nama saya ternyata dicantumkan sebagai salah seorang Panitia KKM, sementara itu sebelumnya TIDAK ADA SAMA SEKALI konfirmasi/permintaan lisan kepada saya dari

¹⁰ Ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada Femmy yang telah berkenaan untuk memberikan data ini kepada Penulis.

GM dan Ketua KKM untuk meminta saya sebagai panitia. Berarti pencantuman nama saya tidak syah dan dicatut.

- 2. Sampai hari ini tidak pernah sama sekali saya diajak/disertakan/dihubungi/diundang/dimintakan saran untuk membicarakan soal kepanitiaan apalagi tupoksi, sampai akhirnya KKM menjadi pro dan kontra, berarti tidak komunikasi/keseriusan/kesungguhan seluruh pimpinan KKM dan GM untuk menempatkan saya sbg panitia. Hal ini jelas bahwa memang saya tidak ada artinya sama sekali, selain hanya untuk embel-embel dalam daftar kepanitiaan.*
- 3. Saya merasa tidak ada kepentingan ikut dalam kepanitiaan KKM, karena memang tidak pernah dianggap ada, selain hanya nama saya dicatut/cokok saja.*
- 4. Pimpinan KKM dan GM memang tidak pernah mengenal saya secara personal, meskipun saya sudah beberapa kali berhadapan dgn bapak2 terhormat di KKM dan GM pada beberapa kesempatan acara penting di Padang. Jadi memang keberadaan saya di dalam kepanitiaan tidak didasari keinginan dan niat yang tulus dari pimpinan/ketua.*

Demikian permintaan ini saya ajukan agar dapat ditindak-lanjuti dan dimaklumi. Sengaja semua ini saya sampaikan dgn sms, karena memang selama ini tidak ada hubungan formal maupun informal yang dibangun oleh ketua/pimpinan KKM dan GM kepada saya.

Demikian dan terimakasih.

Wassalam

Prof. Dr. Nursyirwan Effendi

Univ. Andalas Padang.

*SMS ini saya cc-kan kepada yth: Gubernur Sumbar -
Rektor Univ. Andalas - Bundo Kanduang - Dewan*

Begitulah isi surat dari Dr. Nursyirwan Effendi tersebut. Namun bagi sebagian kepanitiaan yang dicantumkan dalam kepanitiaan Kongres Kebudayaan Minangkabau oleh Gebu Minang juga telah dikonfirmasi terlebih dahulu, seperti misalnya Nurmatias, Undri, dan lainnya.

Disamping menetapkan kepanitiaan KKM Tahun 2010 tersebut, juga ditetapkan para pembicara. Adapun pembicara dalam KKM tersebut yakni : Prof. Dr. Nursyirwan Effendi, Dr. Duski Samad, Prof. Zainuddin Husein Dt. Rajo Lenggang, Bachtiar Abna Dt. Rajo Sulaiman SH.MH, Prof. Dr. Salmadanis, Masrul Veri, Prof. Dr. Hasyim Djalal, Prof. Dr. Syaifei Maarif dan Prof. Dr. Fasli Jalal.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Gebu Minang yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Sosialisasi tersebut terutama dalam bentuk siaran pers. Adapun isi dari siaran pers tersebut yakni :

- *Didorong oleh kenyataan bahwa seluruh masyarakat Minangkabau berpegang kepada ajaran 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' --disingkat sebagai ABS SBK -- dan didorong pula oleh kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada dokumen atau penjelasan otentik dan disepakati seluruh kalangan mengenai ABS SBK tersebut walaupun telah berkali-kali diadakan seminar, diskusi, dan lokakarya mengenai ABS SBK, maka sebagai gerakan budaya selain dari sebagai gerakan ekonomi, Gebu Minang merasa perlu untuk mengambil prakarsa untuk memfasilitasi dan mendorong terselenggaranya sebuah pertemuan besar orang Minangkabau -- kalau mungkin dalam bentuk kongres --*

¹¹<http://www.facebook.com/home.php#!/topic.php?uid=135702213116007&topic=267>

untuk menuntaskan rumusan tentang apa kandungan hakekat; apa tolok ukur ABS SBK tersebut; apa lembaga-lembaganya; bagaimana melaksanakannya; serta apa kebijakan tindaklanjutnya untuk masa datang.

- Suatu masalah lagi yang mendorong diadakannya pertemuan besar atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut adalah oleh karena telah terjadi demikian banyak perubahan dalam masyarakat Minangkabau, baik yang bermukim di Ranah Minang maupun yang bermukim di Rantau. Seluruh perubahan ini perlu ditanggapi dengan baik agar jelas apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap tidak baik sesuai dengan ajaran ABS SBK.
- Sudah barang tentu pertemuan besar atau kongres kebudayaan Minangkabau yang akan dihadiri oleh 1.000 - 1.200 orang tersebut tidak mungkin berlangsung lancar jika tidak ada kerangka acuan yang jelas dan tidak ada semacam konsep awal tentang apa yang akan dibahas dan bagaimana cara membahasnya.
- Sebagai pemrakarsa, Gebu Minang selain telah mencoba mempersiapkan sebuah kerangka acuan dan sebuah konsep mengenai materi yang akan dibahas dalam pertemuan atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut, juga telah mengajak berbagai kalangan untuk ikut mendukung dan menjadi sponsor dari Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 ini.
- Kerangka acuan dan konsep yang disiapkan untuk dibahas tersebut hanya dimaksudkan khusus untuk memperlancar pembahasan, dan sama sekali bukan berarti merupakan konsep jadi yang harus diterima begitu saja. Gebu Minang mengharapkan adanya berbagai konsep alternatif lainnya dari seluruh warga Minangkabau. Secara bertahap, konsep yang berkembang dari waktu ke waktu tersebut telah disiarkan ke masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk mendapat masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan tersebut dimanfaatkan untuk menyempurnakan kerangka acuan dan konsep yang telah disiarkan itu.

- Kerangka acuan dan konsep yang akan diajukan tersebut disusun berdasar seluruh bahan yang terdapat dalam wacana mengenai Minangkabau, baik yang berlangsung dalam seminar, lokakarya, atau diskusi, yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir.
- Dalam penyusunan kerangka acuan dan konsep yang akan diajukan kepada pertemuan atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut dianut empat prinsip, sebagai berikut :
 - 1) Adat kebiasaan, tatanan, serta lembaga-lembaga 'adat nan salingka nagari' yang sudah berjalan baik tetap dihormati dan sama sekali tidak disentuh, oleh karena yang akan dibahas terbatas pada hal-hal yang bersifat lintas-nagari dan merupakan kepentingan bersama sebagai suku bangsa Minangkabau.
 - 2) Seluruh kerangka acuan dan konsep yang akan dibahas dalam kongres didasarkan pada nash Al Quran dan Hadits Nabi; serta pada pepatah-pepatah adat yang terkait dengan ajaran ABS SBK, dilengkapi dengan berbagai undang-undang yang penting serta daftar bacaan, yang tentunya sepanjang yang dapat dijangkau oleh staf Gebu Minang.
 - 3) Pertemuan atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut berorientasi ke masa depan – dan tidak menuju ke belakang – serta menempatkan suku bangsa Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di antara demikian banyak suku bangsa Indonesia. Sejarah masa lampau Minangkabau tetap dijadikan sebagai latar belakang penyusunan konsep.
 - 4) Ranah Minang yang merupakan kampung halaman suku bangsa Minangkabau adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- Dengan demikian, pembahasan dalam pertemuan besar atau kongres kebudayaan Minangkabau tersebut diharapkan akan merupakan sumbangan pemikiran kita semua dalam membangun masa depan Minangkabau, dengan tidak mengusik apa yang sekarang sudah berjalan baik.
- Antara bulan Februari sampai dengan bulan April 2010 telah diadakan 10 (sepuluh) kali diskusi dalam rangka sosialisasi mengenai rencana akan diadakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau ini beserta gagasan yang akan dibahas, yang dilangsungkan baik di Ranah Minang maupun di Jakarta dan Pekanbaru, baik dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun dengan pejabat-pejabat pemerintahan, dengan hasil sementara sebagai berikut.
 - 1) Sebagian terbesar undangan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut mendukung diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010.
 - 2) Pada umumnya peserta sosialisasi menerima baik – bahkan menyatakan merasakan sangat membutuhkan – akan terbentuknya sebuah sarana kebersamaan suku bangsa Minangkabau untuk membicarakan masalah-masalah bersama keminangkabauan, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa datang.
 - 3) Memang sudah sangat dirasakan adanya sebuah sarana kebersamaan Minangkabau, yang mulanya direncanakan bernama Majelis Adat dan Syarak (M.A.S), namun setelah berdiskusi dengan beberapa kalangan akhirnya direncanakan akan bernama Forum Adat dan Syarak atau Forum Tungku Tigo Sajarangan. [Demikianlah, Pengurus LKAAM Sumatera Barat yang mulanya menolak konsep Majelis Adat dan Syarak, setelah bertukar fikiran secara mendalam dengan tim sosialisasi Kongres

Kebudayaan Minangkabau 2010, sekarang ini menyatakan mendukung diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 dengan saran agar nama 'Majelis Adat dan Syarak' (MAS) dipertimbangkan untuk diganti dengan 'Forum Tungku Tigo Sajarangan' atau 'Sekretariat Bersama Tungku Tigo Sajarangan'.]

- 4) Setelah pengurus Gebu Minang memberikan penjelasan mengenai rencana Kongres Kebudayaan Minangkabau ini, pada saat ini Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Menteri Sosial RI dan Menteri Dalam Negeri RI menerima baik dan mendukung Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 tersebut.
- Dari rangkaian dialog yang cukup intensif baik di Ranah Minang maupun di Rantau, sangat terasa enam kesimpulan sebagai berikut.
 - 1) Terdapat kecintaan yang sangat kuat terhadap kebudayaan Minangkabau yang didasarkan pada ajaran ABS SBK, terutama di nagari-nagari, dan ingin agar ajaran ABS SBK tersebut benar-benar terwujud dalam kenyataan, tidak hanya sekedar pemanis bibir belaka.
 - 2) Walaupun demikian, ternyata bahwa kaum muda pada umumnya kurang memahami apa yang dimaksud dengan ABS SBK. Muatan lokal Budaya dan Adat Minangkabau (BAM) di tingkat SD dan SLTP seringkali tidak diajarkan oleh guru yang berwenang untuk mengajarkannya.
 - 3) Dalam berbagai buku dan penerbitan tentang ABS SBK, terdapat kesimpang-siuran penjelasan para pengarang mengenai ABS SBK itu pada umumnya dan tentang adat nan sabana adat pada khususnya.
 - 4) Masyarakat Minangkabau sudah sangat banyak mengalami perubahan, dan selain belum terlihat jalan keluar yang memuaskan untuk menangani perubahan itu, juga belum terlihat munculnya kepemimpinan masyarakat yang cukup berwibawa,

yang dapat menyelesaikan demikian banyak masalah, sehingga terasa ada suasana tanpa arah dalam masyarakat.

- 5) Juga terdapat kesan bahwa komunikasi horizontal antar berbagai kelompok dalam masyarakat masih belum berjalan lancar. Setiap kelompok praktis berkomunikasi hanya dalam lingkungannya sendiri. Suasana kebersamaan semakin lama semakin tipis.
 - 6) Seandainya Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 dapat terlaksana dengan baik – termasuk dengan pembentukan Forum Adat dan Syarak atau Forum Tungku Tigo Sajarangan – diharapkan akan tersedia suatu lembaga kebersamaan untuk menampung, membahas, dan memutuskan demikian banyak masalah kita bersama sebagai warga suku bangsa Minangkabau.
- Setelah menghimpun, membahas, serta merumuskan kembali seluruh bahan masukan tersebut di atas, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah swt, dapat disampaikan bahwa pada saat ini telah dapat diselesaikan kerangka acuan kongres serta draft 15 kesepakatan bersama, sebagai draft paling akhir yang akan disampaikan secara resmi kepada para peserta kongres.
 - Kerangka Acuan dan Draft 15 dari Kesepakatan Bersama yang akan dibahas dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 dapat diminta melalui email kepada Sekretariat Gebu Minang, dengan alamat gebuminangpusat@gmail.com.
 - Untuk keperluan perencanaan akomodasi, konsumsi, serta pengiriman undangan resmi oleh Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 – selain dari utusan nagari-nagari dan tokoh-tokoh masyarakat di Ranah Minang yang akan diundang secara langsung – kepada sanak saudara pimpinan organisasi ikatan keluarga Minang (IKM) di Rantau, serta kepada para

peminat perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau, dipersilakan dengan hormat untuk menghubungi Ibu Warni Darwis, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Gebu Minang, Kompleks Rawabunga Building, Blok B-5, Jatinegara, HP Nomor 0812 8220 321, tilpon/faks 021 85913120, email gebuminangpusat@gmail.com.

Semoga Allah subhana wa taala selalu memberkati kita sekalian. Amin.

Jakarta, April 2010.

DEWAN EKSEKUTIF GEBU MINANG

Siaran pers tersebut diserahkan kepada media massa cetak terbitan Padang untuk diterbitkan, seperti *Harian Umum Singgalang*, *Padang Ekspres* dan *Haluan*. Disamping itu untuk mensosialisasikan kegiatan ini pihak Gebu Minang juga menyebarkan liflet-liflet. Liflet tersebut berisi tentang jadwal kegiatan yakni tanggal 7 – 8 Agustus 2010 di Balai Pertemuan Bung Hatta Bukittinggi, Sumatera Barat. Dasar hukum, tema, sub tema, visi, misi tujuan dan lainnya.

Kemudian juga telah dilakukan pula kegiatan FGD (*Focused Group Discussion*) untuk menjangkau aspirasi masyarakat dari beberapa lembaga seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol Padang, dan lain-lainnya. FGD tersebut awalnya dilakukan di ruang sidang Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang Kamis, 4 Februari 2010. FGD itu sendiri dihadiri oleh beberapa tokoh perguruan tinggi, seniman, budayawan dan unsur lainnya. Dari pihak panitia (Gebu Minang) hadir Sjaafruddin Bahar (Ketua Panitia), Dr. Muchtar Naim (Wakil Ketua), H. Asril Tanjung (Ketua Umum Gebu Minang), Erman Jamin, Irwan Husein dan lainnya (*Padang Ekspres*, Sabtu 27 Februari 2010).

FGD tersebut kemudian ditanggapi oleh beberapa kalangan akademisi. Tanggapan tersebut disampaikan melalui media massa cetak terbitan Padang. Misalnya Hasanuddin, seorang peneliti Sastra dan Budaya Minangkabau sekaligus dosen Sastra Daerah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang menanggapi FGD tersebut dengan membuat artikel opini di *Padang Ekspres*. Ada semacam kegalauan yang dirasakannya atas pelaksanaan FGD tersebut. FGD menurut dia mempertemukan dua cara pandang antara pandangan orang kampung (orang Minang di ranah Minang) dengan pandangan perantau (diwakili oleh Gebu Minang), terhadap perihal yang sama, yaitu identitas dan eksistensi masyarakat dan kebudayaan Minangkabau. Juga dalam FGD tersebut memperlihatkan kekhasan diskusi *urang awak* yang egaliter-dan karena itu-kritis dan dinamis, juga mengalir disitu.

FGD tersebut juga dilakukan di Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. FGD tersebut diadakan pada Hari Kamis, 11 Mei 2010. Hampir sama dengan FGD yang dilakukan di Fakultas Sastra Universitas Andalas, pihak panitia (Gebu Minang) juga melakukan diskusi kelompok dengan para dosen IAIN Imam Bonjol atas kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut.

Tepat Hari Jum'at tanggal 12 Mei 2010, sehari setelah melakukan FGD di Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang, pihak panitia berkunjung ke *Harian Umum Singgalang*. Pihak panitia yang hadir yakni Dr. Sjaafruddin Bahar, Erman Jamin, Khairul Amri, Lany Verayanti, Riski M. Sikumbang, Khalid, Syaifullah, Armen Zulkarnain, Nurmatias, Undri. Tujuan dari kunjungan tersebut yakni mensosialisasi kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Pada acara pertemuan tersebut pihak panitia menjelaskan tentang maksud Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut serta permasalahan yang akan dibahas dalam kongres tersebut nantinya. Dijelaskan bahwa kegiatan KKM Tahun 2010 direncanakan dilaksanakan di Bukittinggi tanggal 7 sampai 8 Agustus 2010 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Permasalahan besar yang diusung dalam kongres tersebut adalah masalah *Adat Basandi Syarak –Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) (*Harian Umum Singgalang*, Rabu 12 Mei 2010 dan Sabtu, 12 Juni 2010).

Kemudian oleh panitia melakukan penyebaran undangan terhadap peserta khususnya dari nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Undangan kepada peserta berjumlah 648 buah sesuai dengan jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat. Pendistribuan undangan dilakukan oleh Armen Zulkamain dan staf Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang yakni Hariadi, Syafrilman dan Fuad Hasan. Undangan diantar langsung kepada setiap nagari-nagari. Setiap nagari diminta untuk mengirimkan peserta 2 (dua) orang per nagari. Setelah undangan tersebut terdistribusikan, maka pihak nagari kemudian mengkonfirmasi kembali keikutsertaannya pada kegiatan KKM Tahun 2010 dengan melampirkan identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk). Konfirmasi tersebut dilakukan baik dengan mengunakan jasa pos dan faxmail. Adalah Mawaddatul Izzah atau dipanggil Wiwid-seorang staf sukarela pada kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang yang banyak berjasa menerima dan merekap hasil konfirmasi dari para walinagari tersebut.

Peserta dari nagari yang mengkonfirmasi atas kehadirannya pada KKM Tahun 2010 sebanyak 176 orang. Walaupun tingkat konfirmasi kehadiran peserta dari nagari sedikit yakni 176 orang dari 1296 orang tidak membuat surut niat para panitia untuk tidak melakukan kegiatan KKM Tahun 2010. Namun pihak panitia juga memperlihatkan kesungguhannya untuk melakukan KKM Tahun 2010 tersebut. Walaupun ada sebagian kalangan menolak kegiatan tersebut. Penolakan kegiatan tersebut disamping dari segi substansi juga dari segi nama kegiatan yakni kongres. Namun akhirnya dengan “kerendahan hati” panitia nama kongres diganti dengan seminar.

Perubahan nama dari Kongres ke Seminar merupakan sebuah usaha untuk meredam gejolak yang terjadi di

Sumatera Barat. Sebab beberapa kalangan seperti para seniman dan lembaga lainnya menolak diadakan kongres (Mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian dari Kongres ke Seminar).

Disamping itu pihak panitia juga melakukan pra KKM Tahun 2010, walaupun dalam perjalanannya pra KKM Tahun 2010 diganti namanya menjadi pra SKM Tahun 2010. Kegiatan ini bertemakan :*Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana*. Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang tanggal 7 Agustus 2010. Seminar ini telah berupaya menyajikan pandangan dari para pakar dan pembicara dari beberapa sudut pandang, yaitu hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Tema-tema yang berkaitan dengan pemaparan tersebut antara lain (1) Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat, (2) Menumbuhkan Kembali Semangat Bahari di ranah Minang, (3) Pememfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera Barat, (4) Pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mendukung Revolusi Biru, (5) *The Indonesian Tsunami Early Warning Sistem* (inaTEWS) dan Peringatan Dini Tsunami di Kota Padang, (6) Orang Minang Sebagai Bangsa Pelaut, dan (7) Masyarakat Pesisir dan Bencana Alam.

Para narasumber dalam kegiatan ini yakni: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (tema : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (tema : Sosialisasi Penanggulangan Bencana), Lantamal II (tema : Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat), Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat (tema : Pemanfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera Barat), Martono Yuwono (tema : Potensi Bahari dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir), Hasyim Djalal(tema : Hukum Laut dan Masyarakat Pesisir), Pontjo Sutowo (tema : Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Bahari), Prof. Dr. Gusti Asnan (tema : Bahari dalam Perspektif Sejarah), Drs. Nurmatias, (tema : Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir), Dra. Maryetti, M. Hum (tema : Budaya Masyarakat

Pesisir), dan Michael W Hoppe (tema : Tsunami dan Peringatan Dini)

Kegiatan ini pada intinya telah berusaha memaparkan fakta-fakta sejarah, ekonomi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau-Sumatera Barat pada khususnya, terutama dalam kaitannya dengan berbagai kondisi objektif yang ada dan berkembang di dunia bahari-maritim kita. Seminar ini juga telah berupaya menyajikan pandangan dari para pakar/pembicara dari beberapa sudut pandang, yaitu hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Mencermati jalannya Seminar dalam rangka Pra Seminar Kebudayaan Minangkabau, dengan tema : Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana, pada tanggal 7-8 Agustus 2010 di Halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang.

3. 2. Mendapat Restu dari Tokoh Nasional

Usaha untuk menyelesaikan Kongres Kebudayaan Minangkabau terus dilakukan oleh pihak panitia (Gebu Minang). Disamping melakukan FGD, siaran press dan lainnya juga meminta restu dari tokoh nasional. Usaha ini dilakukan untuk memperkuat posisi Kongres Kebudayaan Minangkabau tersebut. Awal untuk mendapat restu dari tokoh nasional dilakukan oleh pihak panitia kepada Ketua MPR (Majelis Pemusyawaratan Rakyat) Republik Indonesia Taufiq Kiemas Dt Basa Batuah. Alasannya disamping posisi Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR RI juga dia merupakan keturunan yang berasal dari Minangkabau sendiri. Langkah yang diambil oleh pihak panitia yakni mendatangi beliau di Gedung Nusantara III DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia, Senayan, Jakarta pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010. Saat itu Ketua MPR RI Taufiq Kiemas Dt Basa Batuah meminta berbagai pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Minangkabau. Sebagai sumber inspirasi dan soko guru demokrasi di Indonesia, lanjut Taufiq, adalah tepat bagi

masyarakat Minangkabau untuk segera menyelenggarakan kongres kebudayaan, sebagai respon terhadap nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme yang terus bergerak. "Sejarah mencatat, Minangkabau adalah inspirasi pergerakan kemerdekaan dan demokrasi. Setelah 65 tahun bangsa ini merdeka, maka sudah waktunya bagi masyarakat Minang untuk menyempurnakan nilai-nilai demokrasi dan nasionalismenya kembali," katanya. Menurut Taufiq Kiemas pula, jangan sampai acara kongres kebudayaan ini terganggu atau batal, hanya karena hal-hal teknis yang secara substansif tidak ada kaitannya dengan tema utama kongres, yakni "Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK).

Kemudian panitia Kongres yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Ermansyah Yamin Dt. Tanmaliputi, menemui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia -Patrialis Akbar di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Kedatangan pihak panitia yang terdiri dari Ermansyah, H. Buyung (Zakirwan) dan Firdaus Effendi itu adalah untuk melaporkan persiapan penyelenggaraan KKM dan sekaligus meminta Patrialis untuk bisa membuka atau paling tidak bisa menghadiri acara ini untuk memberi semangat. Namun Patrialis sendiri tidak bisa memastikan kehadirannya di Padang untuk acara KKM tersebut, sebab pada waktu bersamaan Kongres Kebudayaan Minangkabau ada kegiatan HAM bersama mahasiswa di Istora dan pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) di DPR. Patrialis Akbar juga meminta KKM jangan sekedar kongres-kongresan. KKM tersebut harus memiliki makna yang besar, harus berwibawa dan berdaya guna serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau.¹²

¹² Hasil lengkap mengenai respon Patrialis Akbar mengenai KKM Tahun 2010 lebih lanjut lihat *Haluan*, Minggu 20 Juni 2010.

D. Respon Orang di Ranah Minang dan Pemetaan Yang Setuju, Menolak dan Netral Atas Kegiatan KKM Tahun 2010

4.1. Ranah Menolak Kegiatan KKM Tahun 2010

Sikap kritis masyarakat Sumatra Barat juga terlihat pada kegiatan ini yakni penolakan atas KKM. Penolakan atas KKM Tahun 2010 pertama datang dari lembaga formal LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), kemudian dari Bundo Kandung, Dewan Kesenian Sumatera Barat, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Barat, sejumlah tokoh penting dan utama (budayawan, seniman, wartawan dan bahkan kalangan ilmunan di perguruan tinggi). Bahkan didunia maya juga terjadi aksi penolakan. Ada situs Gerakan Menolak KKM Tahun 2010 dan 10.000.000 *urang awak* Menolak KKM 2010. Belum lagi penolakan dari mulut ke mulut, dari SMS ke SMS dan dari *Facebook* ke *Facebook*. Ada delapan alasan penolakan terhadap kongres ini. Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang mengagendakan ikrar bersama di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau di hadapan siapa pun. Menurut mereka, ikrar bersama yang mengatasmakan orang Minangkabau itu menyatakan 'akan' menjadikan 'Adat Basyandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai pandangan hidup dan filosofi orang Minangkabau. Disebutkan, ABS-SBK sudah menjadi pegangan orang Minangkabau sejak tahun 1403 M atau sejak Bai'ah Bukit Marapalam.

Poin kedua, menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang mengagendakan pembentukan Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajarangan atau lembaga apa pun yang potensial menciptakan konflik internal dan horizontal di wilayah kebudayaan Minangkabau. Poin ketiga, menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 yang akan menyeragamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tanpa mempertimbangkan adat salingka nagari, pusako salingka kaum.

Poin keempat, penolakan berkaitan dengan penetapan Sumpah Satie Marapalam yang menurut panitia kongres ini

terjadi pada tahun 1837. "Haji Asbir Latif Dt Rajo Mangkuto dari unsur ninik-mamak yang ikut dalam GM-KKM menyebutkan, penetapan tersebut terkait dengan pembohongan penulisan sejarah Perang Paderi yang lebih banyak versi Belanda. Bai'ah Marapalam telah menetapkan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah-Syara' Mangato, Adat Memakai, Syara' Mandaki, Adat Manurun, sejak bulan Sya'ban 804 H/1403 M. Bukan pada zaman Perang Paderi. Poin lima penolakan dinyatakan alasan menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 karena pesertanya tidak mencerminkan representasi ninik mamak dan perwakilan masyarakat adat dari nagari-nagari yang ada.

Selain itu, penolakan Kongres Kebudayaan Minangkabau juga karena mencampurbaurkan antara wilayah adat atau kebudayaan Minangkabau dengan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat. GM-KKM dengan bahasan yang lebih tegas menyatakan, penolakan KKM dengan alasan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 konsepnya dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memahami Minangkabau secara utuh.¹³

Kebudayaan Minangkabau yang cenderung mempolitisasi adat dan kebudayaan Minangkabau untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu yang tidak mewakili masyarakat Minangkabau. Penolakan KKM Tahun 2010 juga muncul di 'Facebook' dengan judul akun 'Gerakan Menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010. Muhammad Ibrahim Ilyas, yang juga ikut gerakan ini, mengatakan, penolakan atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 dimaksud sebagai antisipasi, atau '*maminteh*'. "Karena, kita tidak ingin adat dan budaya Minangkabau mengalami '*jalan dialiah urang lalu, cupak dipapek urang panggaleh*'. KKM Tahun 2010 digagas sejumlah tokoh-tokoh Minang yang

¹³ Wawancara dengan Muhammad Ibrahim Ilyas tanggal 22 April 2011 di Kota Padang dan mengenai hal ini juga diungkapkan oleh Darman Moenir, wawancara tanggal 22 April 2011 di Kota Padang.

tinggal di Jakarta, di antaranya Mochtar Naim dan Saifroeddin Bahar.¹⁴

Untuk meredakan pertikaian pemikiran ini akhirnya dilaksanakan rapat antara utusan Gebu Minang dengan kalangan budayawan, LKAAM, MUI, Pers Sumatera Barat. Rapat yang dilaksanakan pada Hari Jumat siang, tanggal 3 September 2010 di gubernuran Sumatera Barat, Padang akhirnya menghasilkan suara bulat yakni menolak dilaksanakannya KKM Tahun 2010 yang dibesut oleh Gebu Minang. (*Padang Media*, Sabtu 4 September 2010).

LKAAM Sumatera Barat, salah satu lembaga yang menolak pelaksanaan KKM Tahun 2010 dengan alasan utama dari LKAAM menolak karena KKM 2010 digagas untuk membentuk Majelis Adat Syara' (MAS) atau Forum Adat dan Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan. Praktis jika MAS atau Forum Adat dan Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan terbentuk maka LKAAM dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) akan "tersingkir" (*Harian Umum Singgalang*, Rabu, 24 Maret 2010). Bagi Gebu Minang sendiri sebagai pengagas diadakannya KKM Tahun 2010, pembentukan MAS atau Forum Adat dan Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan karena ketidakberdayaan lembaga adat yang ada dan majelis ulama yang lemah.

Sesuai dengan draf KKM Tahun 2010 mengenai Rancangan Anggaran Dasar MAS atau Forum Adat dan Syarak/Forum Tungku Tigo Sajarangan bahwa tujuan dibentuknya yakni lancar dan intensifnya komunikasi serta berkembangnya kesamaan visi dan misi dari Tungku Sajarangan dalam rangka membangun masyarakat Minangkabau yang berdasarkan *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (ABS SBK), *Syarak Mangato Adat Mamakai*, Alam Takambang Jadi Guru dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhineka

¹⁴Data ini berasal dari :

http://www.riaumandiri.net/rm/index.php?option=com_content&view=article&id=10830:sejumlah-tokoh-tolak-kongres-kebudayaan-minangkabau&catid=57:sumbar-bangkit&Itemid=68

Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan segala perubahannya. Sedangkan fungsinya yakni (1) Memberikan pelayanan kelembagaan secara terpadu untuk pelaksanaan dan peningkatan fungsi ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai, sebagai sekretariat bersama dari 'Tungku nan Tigo Sajaringan' di tingkat nagari, kecamatan, kabupaten. Kota, dan provinsi. (2) Melakukan pengkajian berlanjut tentang kandungan isi / rumusan dan penjabaran Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, sejak dari tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. (3) Mempraksai dan mendorong kompilasi kaidah *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, (4) Menyelenggarakan penataran dan sertifikasi sejarah dan kebudayaan Minangkabau bagi kader kepemimpinan sosial masyarakat Minangkabau pada umumnya, dan bagi kader tungku nan tigo sajarangan pada khususnya. (5) Menilai dan membahas kecenderungan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau. (6) Menyampaikan petunjuk dan nasihat kepada masyarakat Minangkabau dalam menanggapi perkembangan dan perubahan sosial. (7) Memberikan saran terpadu kepada pejabat pemerintah mengenai masalah yang terkait dengan adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau. (8) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian Kongres Kebudayaan Minangkabau. (9) Mewakili pandangan budaya suku bangsa dan masyarakat-hukum adat Minangkabau pada forum nasional dan forum internasional. (10) Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum Tungku Tigo bekerjasama erat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumatera Barat, (11) Forum Adat dan Syarak/ Forum Tungku Tigo Sajaringan dapat dibentuk di rantau. (12) Forum Adat dan Syarak/ Forum Tungku Tigo Sajaringan menyampaikan pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kongres Minangkabau.¹⁵

¹⁵ Mengenai Anggaran Dasar Rumah Tangga Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajaringan Lebih jelas uraian tentang kepanitiaan KKM 2010 lihat Draf *Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 07-08 Agustus 2010* yang dibuat oleh Sekretariat Gebu Minang Jalan Kayu Manis I Nomor 24 RT.002/02/ Jakarta Timur 13130.

Gagasan membentuk MAS atau Forum Adat dan Syarak/ Forum Tungku Tigo Sajaringan oleh Gebu Minang mendapat tanggapan di media cetak terbitan Padang. Alfian Jamrah-Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Datar menilai bahwa pembentukan MAS sebagai solusi untuk untuk pengamalan adat dan agama, rasanya perlu lebih dipikirkan lagi. Membentuk lembaga seperti MAS bukanlah soal yang mudah, apalagi bila lembaga itu merupakan lembaga bentukan *yang manitiak dari ateh*. Lembaga ini tidak *mambusek dari bumi* atau tidak kebutuhan yang lahir dari masyarakat. Berarti ada sesuatu yang baru yang harus diterima dan disesuaikan oleh masyarakat.¹⁶

Penolakan atas KKM Tahun 2010 datang juga dari daerah, yakni ninikmamak Kurai Limo Jorong-Bukittinggi. Ninikmamak tersebut menolak KKM Tahun 2010 diadakan di Kota Bukittinggi. Hal ini sangat menyulitkan bagi pihak panitia, sebab rencana untuk melaksanakan KKM tersebut di Kota Bukittinggi. Pemilihan Kota Bukittinggi sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan ini cukup beralasan karena selain tempatnya strategis juga adanya komitmen awal dari hasil pertemuan dengan ninikmamak Kurai Limo Jorong-Bukittinggi, Minggu tanggal 21 November 2010 pukul 22.45. Walaupun sebelumnya adanya semacam kesepakatan pertemuan antara Gebu Minang dengan para ninikmamak Kurai Limo Jorong-Bukittinggi. Adapun kesepakatan tersebut adalah (1) Agar para ninikmamak Kurai Limo Jorong dibawa serta dalam KKM Tahun 2010.; 2). Draft yang sudah ada diperbaiki; 3). Tahun 2004 sudah ada kesepakatan untuk membentuk Tali Tigo Sapilin Tungku Tigo Sajaringan; 4). Pokok-pokok pedoman pengamalan ABS SBK perlu ditulis. 5). KKM Tahun 2010 dapat dilaksanakan karena identik dengan yang dilaksanakan oleh Badan Silaturrahmi Nagari Kurai. 6.) Ikrar Bersama, Anggaran Dasar, dan Program Forum Adat Dan

¹⁶ Alfian Jamrah, *Perlukan MAS dibetuk*, dalam *Haluan*, Jum'at 12 Maret 2010.

Syarak dan/atau Tungku Tigo Sajaringan dicabut, diutamakan kesepakatan bersama tentang Forum Tungku Tigo Sajaringan.⁷⁾ Panitia agar menghubungi Gubernur. 8) Adat salingka nagari yang berdasar *matrilineal* tetap dihormati tidak diubah; 9). KKM Tahun 2010 telah diciutkan jadi KKM Gebu Minang, tak ada alasan bagi pihak lain untuk menolak. Kesepakatan tersebut diparaf oleh Asril H, Tanjung, S.Ip, Ketum Gebu Minang, H.Buyung, Kurai, E.Jamin Dt Tanmaliputi, Ketua Umum Penyelenggara, Y.St Mangkuto, Sekum Badan Silaturahmi Masyarakat Kurai, G.Dt Rajo Basa, Ninik Mamak Pangka Tuo, T. Dt. Nan Laweh, Ninik Mamak, M.H.Dt Pandak, Ninik Mamak Kurai, F. Dt Bagindo, Ninik Mamak Agam, Saafoedin Bahar, SC KKM, H.Sy.Dt Palimo, Ninik Mamak, dan Warni Darwis, Panitia KKM.¹⁷

Penolakan atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 dari ninik mamak Kurai Limo Jorong setelah melakukan musyawarah tiga jam, ninik mamak dan masyarakat adat merumuskan alasan. Alasan dari masyarakat Kurai Limo Jorong khususnya ninik mamak Kurai Limo Jorong menolak KKM Tahun 2010 adalah Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 adanya rencana KKM Tahun 2010 yang tidak patut dilakukan yakni mengukuhkan *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) yang sudah menjadi filosofi orang Minangkabau sejak berabad yang lalu serta KKM Tahun 2010 tersebut mengagendakan pembentukan Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajaringan atau lembaga apa pun yang potensial menciptakan konflik internal dan horizontal di wilayah kebudayaan Minangkabau serta adanya usaha dalam KKM Tahun 2010 tersebut yang akan menyeragamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tanpa mempertimbangkan adat salingka nagari, pusako salingka kaum serta penolakan dinyatakan alasan menolak KKM 2010 karena pesertanya

¹⁷ Tentang hal ini dimuat dalam dokumen Kesepakatan Antara Gebu Minang dengan Tokoh Masyarakat Kurai Limo Jorong serta lebih jauh lihat *Singgalang*, Serin 29 November 2010.

tidak mencerminkan representasi ninik mamak dan perwakilan masyarakat adat dari nagari-nagari yang ada.¹⁸

Rumusan sikap penolakan ninikmamak pemangku adat dan masyarakat adat terhadap KKM Tahun 2010 kemudian dibawa untuk didiskusikan di LKAAM Bukittinggi. Akhirnya LKAAM Bukittinggi dengan Ketuanya yakni M.H. Datuak Pandak dan pengurus inti lainnya menandatangani sikap penolakan KKM Tahun 2010 itu.¹⁹

Penolakan atas KKM Tahun 2010 tersebut juga datang dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Penolakan tersebut berawal dari pertemuan khusus Muspida pulus Kota Bukittinggi dengan ninikmamak, ulama Kurai Limo Jorong. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah bahwa pendapat dan aspirasi ninik mamak, alim ulama, urang mudo Kurai Limo Jorong, meminta Pemerintah Kota Bukittinggi menyikapi KKM Tahun 2010 dengan tegas, Pemerintah Kota Bukittinggi menyatakan tanpa ragu secara prinsip menolak KKM Tahun 2010. Kesimpulan tersebut dibacakan oleh Wakil Walikota Bukittinggi-Arma Zaldi dihadapan rapat Muspida Plus dengan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai Kurai Limo Jorong Hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 di Balai Kota Bukittinggi (*Singgalang*, Sabtu 4 Desember 2010).

Aksi penolakan atas KKM Tahun 2010 tersebut juga diikuti dengan membuat spanduk dan memasangkannya dijalan utama di Kota Bukittinggi. Ruang publik dalam Kota Bukittinggi disemarakai belasan spanduk penolakan KKM Tahun 2010. Spanduk yang mengutip pernyataan tokoh-tokoh Sumatera Barat yang menolak KKM Tahun 2010 di depan kantor DPRD Kota Bukittinggi, didepan kantor Pos, dikawasan lapangan kantin, Mandiangin, Simpang Tembok dan lainnya. Uniknya, desain spanduk memasang foto disertai pernyataan tokoh mulai dari gubernur Sumatera Barat, mantan Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas, Ketua Gebu Minang Jawa Timur,

¹⁸ Wawancara dengan Datuak Pandak tanggal 3 Mei 2011 di Bukittinggi

¹⁹ Wawancara dengan Datuak Pandak tanggal 3 Mei 2011. Lihat Juga *Haluan*, Kamis 21 Oktober 2010.

Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia Irman Gusman. Spanduk berfoto Gubernur Sumatera Barat berisi teks : "Tunda KKM Demi Keutuhan Tatanan Sosial dan Adat Minangkabau". Spanduk Azwar Anas di depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi bertuliskan : "KKM Tidak Perlu Diadakan. Bisa Merusak Ketentaraman Orang Minang" (*Singgalang*, Sabtu 4 Desember 2010). Begitu juga dengan tokoh Minang lainnya seperti Basrial Koto bertuliskan : "Tidak Tepat Orang Rantau Datang Melaksanakan Kongres Malu Kita Sama Orang Kampung, KKM Bukan Pekerjaan Kita" (*Haluan*, Minggu 5 Desember 2010). Serta ada juga spanduk yang menggabungkan beberapa elemen organisasi masyarakat untuk menentang KKM Tahun 2010.

Pernyataan penolakan tokoh-tokoh Minang tersebut dikutip berdasarkan pernyataan yang telah dimuat di media cetak terbitan Padang. Pembiayaan pembuatan spanduk ini dilakukan secara sukarela dengan melakukan pengumpulan dana dari orang perorang. Tidak terorganisir seperti penuturan Asraferi Sabri, bahwa "pembiayaannya berasal dari sukarela dari orang perorang".²⁰

Pelaksanaan KKM yang hampir dekat yakni tanggal 12-13 Desember 2010 membuat pihak panitia ekstra keras terutama masalah tempat pelaksanaan. Dengan ditolaknya pelaksanaan KKM Tahun 2010 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan masyarakat Kurai Limo Jorong mengharuskan pihak panitia memindah tempat pelaksanaan. Pihak panitia memutuskan untuk melaksanakan KKM Tahun 2010 tersebut di Kota Padang.

Facebook merupakan salah-satu media yang digunakan dalam aksi penolakan KKM Tahun 2010 disamping media lainnya seerti spanduk, tulisan di media cetak, SMS (*short Message Service*) dan lain sebagainya. Sebagai jejaring sosial, facebook sebagai ajang untuk mencurahkan pemikiran terutama yang menolak KKM Tahun 2010. Beberapa perihan

²⁰ Wawancara dengan Asraferi Sabri tanggal 3 Mei 2011 di Kenagarian Pasie Kabupaten Agam.

dalam jejaring sosial ini misalnya di jejaring sosial facebook, Azhari Chaniago di *page* Kongres Kebudayaan Minangkabau, menulis Gubernur Sumatera Barat selaku kepala daerah seharusnya netral karena Minangkabau bukan Sumatera Barat. Dalam menghindari permasalahan yang lebih besar, sebaiknya Gubernur bertindak selaku fasilitator yang mempertahankan kedua pihak yang bertikai untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik.

Nampaknya, penggunaan *Facebook* ini bukan digunakan saja oleh pihak penolak KKM Tahun 2010, tapi juga oleh pihak Gebu Minang. Saafroedin Bahar, *Steering Committee* (SC) KKM dalam statusnya di FB begini : " Hari ini saya senang sekali, oleh karena buku saku karya almarhum Buya Fachruddin Hs tentang "Petunjuk Al-Quran tentang Berbagai Persoalan Disusun Menurut Alfabet" telah selesai dicetak dan dapat dibagikan kepada seluruh peserta KKM Tahun 2010 di Bukittinggi pada 12-13 Desember yang akan datang". Asraferi Sabri, salah seorang inisiator Gerakan Menolak KKM di *page* FB mengajak semua elemen yang menolak KKM Tahun 2010 untuk tetap mengikuti dan mengintensifkan gerakan penolakan. KKM Tahun 2010 wajib hukumnya ditolak "Jadi, tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan kita melakukan penolakan terhadap KKM". Begitulah yang tertulis di *page* FB Asraferi Sabri (*Haluan*, Minggu 5 Desember 2010). Begitulah suasana "riuhnya" facebook dalam membicarakan perihal KKM Tahun 2010 tersebut.

Berbagai langkahpun diambil untuk "mempertemukan" dua kubu, baik yang pro dan kontra. Atas inisiatif dari Gebu Minang maka dilaksanakanlah Pra KKM Tahun 2010. Prakongres tersebut dilaksanakan sebagai sebuah bentuk *melunaknya* penyelenggaraan KKM yakni Gebu Minang. Prakongres tersebut sebagai sebuah upaya yang dianjurkan oleh Gubernur Sumatra Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno karena adanya sikap yang pro dan kontra atas penyelenggaraan KKM Tahun 2010 tersebut. Bagi sebagian penggagas dan aktivis Gerakan Menolak KKM- Asraferi Sabri bahwa KKM dapat menjadi bumerang dan jebakan terhadap gubernur bila

dilaksanakan juga (*Singgalang*, Sabtu 9 Oktober 2010). Bahkan Darman Moenir dalam tulisannya yang diterbitkan di media cetak lokal menyebutkan bahwa dengan mengadakan prakongres tersebut membuat *titian barakuak* untuk Gubernur Sumatera Barat oleh panitia penyelenggara KKM Tahun 2010. Sebuah metafora yang menggambarkan bahaya laten *barakuak* –bila tetap lanjut melangkah bisa-bisa terjerbambab (*Singgalang*, Senin 11 Oktober 2010).

Walaupun banyak argumentasi yang muncul akibat akan dilaksanakannya pra kongres KKM Tahun 2010 tersebut. Namun Gubernur Sumatera Barat tetap memberikan fasilitas dan memfasilitasi terselenggaranya prakongres tersebut. Buktinya adalah penyelenggaraan prakongres tersebut dilaksanakan di aula Gubernuran Sumatera Barat. Sebuah komitmen dari sang gubernur untuk menjernihkan persoalan penyelenggaraan KKM Tahun 2010 tersebut.

Pra kongres tersebut berupaya untuk menyamakan persepsi dengan seluruh lapisan masyarakat diranah dan dirantau. Adapun peserta dari prakongres tersebut yakni *pituo* Minang di Jakarta, pimpinan kelompok masyarakat di ranah dan kampung, termasuk LKAAM, MUI, Budayawan, Bundo Kandung dan lainnya (*Singgalang*, Jum'at 8 Oktober 2010).

Untuk memuluskan pra kongres tersebut, tepat Hari Kamis, 7 Oktober 2010 pihak panitia KKM Tahun 2010 yakni Mayjend TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung (Ketua Gebu Minang), Saafruddin Bahar (Ketua SC . KKM) juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan mantan Gubernur Sumatera Barat-Hasan Basri Durin dan H.M Jusuf Kalla *sumando* Minang yang juga mantan wakil presiden Republik Indonesia. Hasan Basri Durin menyambut baik diselenggarakannya prakongres tersebut untuk menyamakan persepsi tentang rencana dan materi yang akan diusung dalam KKM Tahun 2010. Kemudian HM. Jusuf Kalla menilai bahwa KKM Tahun 2010 itu sesungguhnya sangat baik dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan orang Minangkabau sekarang ini (*Singgalang*, Jum'at 8 Oktober 2010).

Hasil dari prakongres tersebut yakni KKM Tahun 2010 akan tetap diselenggarakan. Akan tetapi waktunya diundur dari rencana semula yang diagendakan 30-31 Oktober 2010 menjadi pertengahan bulan November 2010. Dalam prakongres tersebut, satu orang yang menolak KKM Tahun 2010 dan satu orang lainnya tidak menyatakan sikap alias menolak. Keputusan itu disetujui sekitar 160 peserta yang hadir dalam pra KKM Tahun 2010 dan kesimpulan itu ditandatangani oleh sembilan perwakilan yang hadir (*Haluan*, Rabu 13 Oktober 2010). Prakongres tersebut awalnya dilaksanakan digedung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat sebab aula Gubernuran Sumatera Barat dipakai dalam kegiatan Sosialisasi Gempa yang dilaksanakan oleh BPNB Sumatera Barat. Tepat jam 12.35 Wib, barulah peserta prakongres mengalihkan kegiatannya ke aula Gubernuran Sumatera Barat sebab kegiatan sosialisasi gempa selesai dilaksanakan.

Gedung Rumah Dinas Gubernuran Sumatra Barat yang berukuran sekitar 6 x 4 meter tersebut dianggap tidak layak dengan jumlah anggota prakongres mencapai 160 orang lebih. Namun kegiatan prakongres tersebut hanya sebentar saja dilakukan (sekitar 2.5 jam). Adapun kegiatan digedung tersebut yakni berdialog langsung dan mendengarkan arahan dari Gubernur Sumatra Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno, dan Mantan Gubernur Sumatera Barat-Hasan Basri Durin. Gubernur Sumatra Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno mengatakan bahwa tidak akan memihak alias netral dalam penyelenggaraan KKM. Gubernur memberikan kesempatan kepada panitia untuk membicarakan hal-hal yang dipermasalahkan hingga terjadi pro kontra, setelah itu baru ditetapkan kongres tersebut. Mantan Gubernur Sumatera Barat-Hasan Basri Durin mengatakan bahwa keputusan akhir pra KKM Tahun 2010 itu tetap dilakukan, karena semuanya berangkat dari niat baik.

Setidaknya dari acara prakongres yang diadakan di kantor Gubernur Sumatra Barat, Selasa 12 Oktober 2010 membuktikan bahwa KKM Tahun 2010 belum “mati” (*Padang Ekspres*, Rabu 13 Oktober 2010). Persoalan kemudian

muncul, nampaknya pernyataan dari Gubernur Sumatra Barat yang bersifat netral mendapat tanggapan positif dari pihak Gebu Minang. Sebelumnya melalui tulisan dari Hawari Siddik yang berjudul "Surat Terbuka kepada Gubernur" (*Singgalang*, 2 Desember 2010) yang berisi "ajakan" terhadap Gubernur Sumatra Barat untuk menolak KKM Tahun 2010 tersebut. Tulisan dan tanggapan dari Gubernur Sumatera Barat ditanggapi oleh panitia KKM Tahun 2010 melalui Tim Advokasi KKM GM 2010. Dalam penjelasannya, Tim Advokasi KKM Tahun 2010 menjelaskan bahwa sesungguhnya pihak panitia tidak perlu menggunakan hak jawab terhadap surat Bung Hawari Siddik (HS) yang berjudul : " Surat Terbuka kepada Gubernur" (*Singgalang*, 2 Desember 2010). Ada tiga sebabnya: 1) oleh karena surat tersebut ditujukan kepada Bapak, dan bukan kepada kami, jajaran Gebu Minang, yang sedang menyiapkan KKM Tahun 2010 pada tanggal 12-13 Desember yang akan datang; 2) sebagian besar isinya tentang KKM Tahun 2010 memuat khayalnya sendiri, tidak ada kaitannya dengan kegiatan KKM Tahun 2010 yang sedang kami persiapkan; dan 3) secara menyeluruh, kandungan suratnya tersebut terasa lucu, oleh karena bung HS ini meminta Bapak untuk mencari jalan agar "rencana kongres itu dibatalkan" dan "kalau mau berkongres lakukanlah di rantau.". Bapak tentu tahu, bahwa selain Bapak tidak mempunyai wewenang untuk itu, juga – jika Bapak melakukan hal itu – Bapak akan melanggar Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dalam bahasa Minang, ini namanya Bapak diberi *titian barakuak* oleh bung HS ini. Namun, oleh karena isi surat terbuka yang lucu tersebut menyebut-nyebut KKM Tahun 2010, kami merasa perlu memberi saran dan masukan kepada Bapak, yang intinya adalah: *tetaplah netral, pak Gubernur, sesuai dengan kata sambutan yang Bapak sampaikan pada acara pembukaan Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 di Auditorium Gubernuran Padang, 12 Oktober 2010 pagi*. Pada acara tersebut, secara *gamblang* Bapak mengatakan bahwa Bapak sebagai Gubernur tidak pro dan

tidak kontra. Memang itulah sikap yang tepat, bukan hanya dari segi Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, tetapi juga berdasar ajaran adat Minangkabau ("basilang kayu dalam tunggu, disinan api makonyo hiduik"), dan ajaran agama Islam {"Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat"}. Oleh karena itu Surat Terbuka bung HS ini tidak usah Bapak *gubris*. Walaupun begitu, tulisan dari Hawari Siddik juga ditanggapi oleh Gebu Minang. Sebab menurut Gebu Minang jika tidak dijawab secara lugas akan bisa menyedatkan publik.

4.2. Pemetaan yang Setuju, Menolak dan Netral Atas KKM Tahun 2010

Pemetaan yang setuju, Menolak dan netral atas dilakukannya KKM Tahun 2010 memang sulit untuk dilakukan mengingat begitu beragamnya pandangan dari berbagai lembaga yang menyatakan atas hal tersebut. Begitu juga dengan perihal perorangan yang melakukan pro, kontra dan netral atas KKM Tahun 2010 tersebut. Penulis hanya menjelaskan perihal lembaga saja dalam pemetaan ini. Alasannya pertama, dalam perjalanannya individu baik yang setuju, menolak dan netral atas KKM Tahun 2010 tersebut tidak terlepas dari lembaga tempat ia bekerja. Kedua, pernyataan yang ia keluarkan mengenai hal tersebut selalu dikaitkan atau mengatasnamakan lembaga tempat ia bekerja. Walaupun disadari beberapa nama seperti Wisran Hadi, Darman Moenir, Hawari Sidik selalu mengatakan bahwa ia mengatasnamakan pribadi dalam persoalan KKM Tahun 2010 ini. Ini tercermin dalam beberapa wawancara dengan penulis serta argumentasinya dalam beberapa surat khabar lokal terbitan Padang.

4.2.1. Kelompok Setuju KKM Tahun 2010 Gebu Minang

Cikal bakal Gebu Minang yang berawal dari gagasan spontan Presiden Soeharto ketika peresmian Pekan Penghijauan Nasional tahun 1982 di Desa Arian Singkarak,

Kabupaten Solok, Presiden bertatap muka dengan para petani Sumatra Barat. Seorang petani berdiri dan meminta traktor serta alat alat pertanian kepada presiden. "Kalian sebetulnya mempunyai kekuatan...." jawab presiden dalam forum temu wicara itu. Kepala negara mengingatkan akan besarnya potensi para perantau Minang yang jumlahnya hampir sama banyaknya dengan penduduk Sumatera Barat sendiri dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Gagasan spontan Presiden Soeharto inilah yang mengilhami lahirnya istilah Gebu Minang, awalnya merupakan singkatan dari Gerakan Seribu (rupiah) Minangkabau yaitu semacam konsep alternatif partisipatif pembangunan dari bawah yang diprakarsai masyarakat sendiri, dan sejak Musyawarah Besar (Mubes) III pada tanggal 5 sampai 6 Januari 2001 di Bukit Tinggi telah diputuskan Gebu Minang yang semula merupakan Gerakan Seribu Minang diubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Undri, 2009).

KKM Tahun 2010 dilaksanakan oleh Gebu Minang sebagai amanat dari Musyawarah Besar (Mubes) Gebu Minang tahun 2005 di Sawahlunto. Ini dijadikan sebagai dasar utama oleh kepengurusan Gebu Minang untuk melakukan Kongres Kebudayaan Minangkabau serta sebagai program kerja yang harus mereka lakukan tahun 2010. Bagi pihak Gebu Minang, adapun landasan melaksanakan kegiatan ini yakni untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan "*Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah*", (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari–atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

4.2.2. Kelompok yang Menolak KKM Tahun 2010

1. LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)

LKAAM (singkatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau di Sumatra Barat. Salah satu lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatra Barat adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Organisasi ini idealnya merupakan wadah penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat, disamping, tentunya, dalam menjaga kepentingan komunitas adat itu sendiri. Namun dalam perjalanan sejarahnya ternyata fungsi itu kurang terlihat signifikan. Secara historis, struktur Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagai organisasi yang mewadahi ninikmamak dan pemuka adat, sebenarnya tidak terdapat dalam struktur kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini; tidak ada organisasi penghulu di atas penghulu-penghulu Nagari. Hubungan antar Nagari hanya ada bersifat kultural semata, yaitu adat Minangkabau. Bahkan tidak ada garis hirarkhi antara nagari-nagari itu sendiri dengan pusat kerajaan Pagaruyung sendiri.

Pembentukan wadah organisasi LKAAM bukanlah muncul dari masyarakat, akan tetapi merupakan inisiatif dari aparat pemerintah, yaitu berawal dari munculnya gagasan dari Panglima Komando Antar Daerah Letjen TNI Mokoginta dan Panglima Kodam III/17 Agustus. Pada awalnya masyarakat Sumatera Barat sangat optimis dengan dibentuknya wadah LKAAM ini, karena dengan demikian berbagai kepentingan komunitas adat akan terlindungi dari intervensi kepentingan-kepentingan di luarnya, yang dengan itu pula eksistensinya akan tetap terpelihara di tengah-tengah perubahan-perubahan politik di negara ini. Hal ini memang sejak lama diidamkan oleh masyarakat, khususnya sejak nagari-nagari tidak lagi memiliki otonomi atas wilayahnya oleh karena adanya struktur supra nagari yang memiliki otoritas yang lebih kuat.

Pada awal kemerdekaan kepentingan komunitas adat di daerah ini diwakili oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Majelis Kerapatan Adat ini telah memperlihatkan peranannya dalam mempertahankan kepentingan komunitas etnik pada waktu Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi dimasukkan menjadi bahagian dari kepemimpinan Nagari dalam Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946. Pada Pemilu pertama 1955, organisasi ini bahkan menjadi satu kekuatan politik di Sumatera Barat, yaitu : Partai Kerapatan Adat.

Prakarsa untuk mewadahi ninik mamak dan penghulu adat dalam organisasi LKAAM oleh kalangan militer di awal Orde Baru, sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk membersihkan para penghulu adat yang terlibat dengan kegiatan Partai Komunis. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kemudian organisasi ninik mamak ini sangat dekat dengan pemerintah dan kalangan ABRI. Ketua LKAAM sendiri dipegang oleh Baharuddin Dt Rangkayo Basa yang adalah juga Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Barat. Sedangkan Kapten Saafroeddin Bahar (perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golongan Karya juga duduk dalam sekretariat LKAAM sendiri. Dengan demikian organisasi ini sebenarnya lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan Golongan Karya. Sebagai penyangga kepentingan pemerintah,-menjelang Pemilu 1971-organisasi ini telah memperlihatkan peran aktifnya dalam mensosialisasikan kekuatan politik Orde Baru, dalam mencari dukungan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan hingga mengantarkan Golkar menjadi kekuatan mayoritas di daerah ini pada Pemilu 1971.

Dalam perihal dilakukannya kegiatan KKM Tahun 2010, LKAAM merupakan lembaga yang resmi menolak kegiatan tersebut. Alasannya adalah bahwa menurut LKAAM, kegiatan KKM Tahun 2010 akan membentuk Majelis Adat dan Syara' (MAS). Praktis, jika MAS terbentuk maka LKAAM akan tersingkir. Sebab menurut Gebu Minang sebagai penyelenggara KKM Tahun 2010, pembentukan MAS

disebabkan karena ketidakberdayaan lembaga adat yang ada seperti LKAAM dan MUI. Keberatan LKAAM tersebut kemudian dituangkan dalam sepucuk surat dan dialamatkan kepada Gebu Minang di Jakarta (*Singgalang*, Rabu 24 Maret 2010).

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat

Sejarah pembentukan MUI Sumatera Barat tidak terlepas dari keberadaan Majelis Ulama Indonesia. Pembentukan MUI tidak terlepas sebagai sebuah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Kemudian dengan hal tersebut maka dibentuklah MUI pada setiap propinsi diseluruh Indonesia. Salah-satunya adalah MUI Sumatera Barat. Dalam perihal dilakukanya kegiatan KKM Tahun 2010, argumentasi MUI Sumatera Barat dalam hal penolakan atas kegiatan tersebut hampir sama dasarnya apa yang dilakukan oleh LKAAM Sumatera Barat.

Alasannya adalah bahwa menurut LKAAM, kegiatan KKM Tahun 2010 akan membentuk Majelis Adat dan Syara' (MAS). Praktis, jika MAS terbentuk maka LKAAM akan tersingkir. Sebab menurut Gebu Minang sebagai penyelenggara KKM Tahun 2010, pembentukan MAS disebabkan karena ketidakberdayaan lembaga adat yang ada seperti LKAAM dan MUI. Keberatan LKAAM tersebut kemudian dituangkan dalam sepucuk surat dan dialamatkan kepada Gebu Minang di Jakarta (*Singgalang*, Rabu 24 Maret 2010). Pelontaran antara penolakan KKM tersebut sering dilakukan oleh ketua LKAAM sendiri yakni M. Sayuti Datuak Rajo Penghulu.

3. Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB)

Dewan kesenian yang tumbuh di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah lembaga kesenian yang tumbuh dari, dan dikelola oleh masyarakat, khususnya masyarakat kesenian. Dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, tugas dan fungsi dewan kesenian adalah membina, mengembangkan, menghidupkan, dan memajukan kesenian Indonesia, baik tradisi maupun modern. Meski tentu saja dewan kesenian menghadapi masalah berbeda beda sesuai masalah masing-masing daerah, secara umum masalah yang dihadapi dewan kesenian di tanah air adalah kurang erat dan harmonisnya hubungan dewan kesenian dengan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Langkah-langkah untuk mengharmoniskan hubungan dewan kesenian dengan Pemda dipandang perlu, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu dengan mengukuhkan dewan kesenian provinsi sebagai mitra gubernur dan tingkat kabupaten/kota sebagai mitra bupati/walikota yang memiliki kekuatan formal melalui Surat Keputusan gubernur, bupati/wali kota, tanpa mengurangi otonomi dan independensi dewan kesenian itu sendiri.

Dewan Kesenian adalah sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam usaha membina, mengembangkan, menghidupkan, dan memajukan kesenian Indonesia. Dengan

adanya otonomi daerah, masalah lain yang dihadapi dewan kesenian adalah tidak adanya dewan kesenian di tingkat nasional yang otonom dan independen sebagai mitra Presiden Republik Indonesia, yang berfungsi mengkoordinasi dewan-dewan kesenian di berbagai daerah dalam mengembangkan kesenian secara nasional dan memajukan kesenian Indonesia di dunia internasional. Berdasarkan hal itu, pembentukan Dewan Kesenian Indonesia sebagai mitra Presiden RI merupakan kebutuhan yang mendesak. Adanya Dewan Kesenian Indonesia niscaya akan memacu pengembangan kesenian Indonesia secara nasional, sekaligus memungkinkan dialog kesenian Indonesia yang berbasis dewan-dewan kesenian di Indonesia dengan manca negara.

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang kesenian ketika akan diselenggarakannya KKM Tahun 2010 DKSB merupakan salah-satu lembaga yang menentang KKM tersebut disamping LKAAM dan MUI. Tokoh yang menolak kegiatan KKM Tahun 2010 dari DKSB yakni Ketuanya Prof. Dr. Haris Effendi Tahar, Muhammad Ibrahim Ilyas dan lainnya. Adapun alasan penolakan terhadap kongres ini, dimana pertama KKM Tahun 2010 yang mengagendakan ikrar bersama di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau di hadapan siapa pun. Menurut mereka (kelompok yang menolak), ikrar bersama yang mengatasnamakan orang Minangkabau itu menyatakan 'akan' menjadikan 'Adat Basyandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai pandangan hidup dan filosofi orang Minangkabau. Disebutkan, ABS-SBK sudah menjadi pegangan orang Minangkabau sejak tahun 1403 M atau sejak Bai'ah Bukit Marapalam.

Kedua, menolak KKM Tahun 2010 yang mengagendakan pembentukan Forum Adat dan Syara' atau Forum Tungku Sajarangan atau lembaga apa pun yang potensial menciptakan konflik internal dan horizontal di wilayah kebudayaan Minangkabau. Ketiga, menolak KKM Tahun 2010 yang akan menyeragamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tanpa mempertimbangkan adat salingka nagari, pusako salingka kaum.

Keempat, penolakan berkaitan dengan penetapan Sumpah Satie Marapalam yang menurut panitia kongres ini terjadi pada tahun 1837. Penetapan tersebut terkait dengan pembohongan penulisan sejarah Perang Paderi yang lebih banyak versi Belanda. Bai'ah Marapalam telah menetapkan filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah-Syara' Mangato, Adat Memakai, Syara' Mandaki, Adat Manurun, sejak bulan Sya'ban 804 H/1403 M. Bukan pada zaman Perang Paderi. Kelima penolakan dinyatakan alasan menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 karena pesertanya tidak mencerminkan representasi ninik mamak dan perwakilan masyarakat adat dari nagari-nagari yang ada. Keenam, karena mencampurbaurkan antara wilayah adat atau kebudayaan Minangkabau dengan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat. Gerakan Menolak KKM dengan bahasan yang lebih tegas menyatakan, penolakan KKM dengan alasan Tahun 2010 konsepnya dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memahami Minangkabau secara utuh.²¹

4.2.3. Kelompok Netral KKM Tahun 2010

1. Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Kenetralan Pemerintah Daerah Sumatera Barat atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 ini tergambar dari penjelasan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dalam acara pembukaan Pra Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 di Auditorium Gubernuran Padang, 12 Oktober 2010 pagi. Pada acara tersebut, secara *gamblang* Gubernur mengatakan bahwa sebagai Gubernur tidak pro dan tidak kontra. Memang itulah sikap yang tepat, bukan hanya dari segi Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, tetapi juga berdasar ajaran adat Minangkabau (*basilang kayu dalam tunggu, disinan api makonyo hiduik*), dan ajaran agama Islam ("Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat").

²¹ Wawancara dengan Muhammad Ibrahim Ilyas tanggal 22 April 2011 di Kota Padang dan mengenai hal ini juga diungkapkan oleh Darman Moenir, wawancara tanggal 22 April 2011 di Kota Padang.

Namun kondisi dan ungkapan kenetralan dari Gubernur Sumatera Barat ditanggapi oleh Hawari Sidik-seorang yang menolak atas kegiatan KKM tersebut. Menurut dia bahwa itu sebagai *titian barakuak* bagi Gubernur Sumatera Barat sebagai pimpinan daerah Sumatera Barat. Namun kemudian penjelasan Hawari Siddik ditanggapi oleh pihak panitia-Gebu Minang dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang Sejarah dan Kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Lembaga ini awalnya bernama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang (BKSNT Padang) di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan BKSNT Padang ditetapkan berdasarkan Kepmen Depdikbud RI No. 305/0/1997 tanggal 27 November 1997. Tahun 2000 berada di Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya tahun 2001 berada di Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (BP Budpar) Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2003 BP Budpar dibubarkan dan dikembalikan ke Kemenneg Budpar di bawah Deputi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan yang membawahi beberapa Asisten Deputi (Asdep) antara lain Asdep Tradisi yang membawahi BKSNT. Tahun 2005 BKSNT Padang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Secara resmi tahun 2007 namanya menjadi BKSNT berubah menjadi BPSNT Padang dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang didirikan untuk kepentingan masyarakat, akademik, aplikasi, dan terapan, mengingat kebutuhan akan data dan informasi

maupun kebijaksanaan yang diperlukan oleh lembaga kebudayaan dan masyarakat di daerah yang pada umumnya disiapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelestarian kebudayaan yang memerlukan kepekaan sejarah dan budaya.

Dalam kegiatan KKM Tahun 2010 kantor ini bersifat netral. Walaupun dalam keanggotaan kepanitiaan KKM Tahun 2010 beberapa staf kantor yakni Nurnatias, Zusneli Zubir, Undri, dan Yoka ikut serta sebagai dalam kepanitiaan. Mereka sebagai anggota kepanitiaan mengatasnamakan pribadi bukan atas nama kantor tempat mereka bekerja.

Respon ketidaknetralan kantor inipun dalam kegiatan KKM Tahun 2010 tidak bisa dihindarkan. Ini terjadi ketika logo Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sebagai lembaga induk kantor BPSNT Padang dicantumkan pada beberapa bahan kelengkapan kegiatan seperti tas, ballpoint, spanduk dan lainnya.

Walaupun ada pemakaian logo lembaga atau kantor BPSNT Padang (walaupun sebetulnya ada kesalahan bahwa yang betul BPSNT Padang bukan BPSNT Sumbar –seperti yang tercantum pada tas KKM Tahun 2010, namun hal tersebut sudah dikofirmasi oleh pegawai BPSNT Padang itu sendiri kepada pihak penyelenggara (Gebu Minang) supaya tidak dipakai logo tersebut, namun perihal ini tidak digubris dan tetap dipasangkan logo lembaga oleh pihak Gebu Minang.

E. Hubungan Ranah dan Rantau Yang Tercermin dalam KM Tahun 2010

5.1. Orang Rantau Mengalah : Dari Kongres ke Seminar dan Dari Bukittinggi ke Kota Padang

Masalah KKM Tahun 2010 masih saja menjadi ajang kontroversi antara yang menghajatkan dengan berusaha yang menolaknya. Setelah rencana KKM Tahun 2010 ditunda beberapa kali, dan rencana tempatpun sudah beberapa kali pula diubah (dari Kota Bukittinggi ke Kota Padang). Berbagai lembaga masyarakat seperti LKAAM, MUI, DKSB Sumatera Barat dan lainnya menyarankan agar kongres diubah menjadi

seminar saja. Namun, ada dua hal yang menjadi penyebab sehingga gagasan tersebut muncul. *Pertama*, penggunaan istilah “kongres”, dan *kedua* menyangkut cara atau prosedur.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi Ketiga, Balai Pustaka (2005 : 587), kongres artinya “pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai pelbagai masalah”. Jadi ada dua kata kunci dari kongres ini, pertama “para wakil organisasi” dan “mengambil keputusan”. Hal ini menyiratkan, bahwa kongres mempunyai *stakeholder* (pemangku kepentingan), dalam hal kebudayaan Minangkabau tentulah kaum adat (ninikmamak), ulama, cerdik pandai, bundokanduang dan pemuda, dan tentu saja Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota hingga nagari-nagari se Propinsi Sumatera Barat. Para pemangku kepentingan ini adalah pihak yang akan terikat dengan keputusan yang dihasilkan oleh kongres. Jadi persoalan inilah yang paling mengemuka untuk mengubah kongres menjadi seminar.

Kedua, menyangkut cara. Cara yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara belum mengajak secara keseluruhan stakeholder yang ada untuk beriya-bertidak, mendiskusikan apa yang hendak dikongreskan-didiskusikan dan diputuskan. Termasuk juga menentukan materi, pembicara, dan batas-batas yang berkaitan atau dengan kata lain tata tertib kongres itu sendiri.

KKM Tahun 2010 ditolak untuk dilaksanakan oleh berbagai elemen di Minangkabau, karena Gebu Minang sebagai panitia penyelenggara “*mamanjek dari pucuk*” tidak dari pangkal. Karena itu disarankan, adakan saja seminar dengan meteri yang sama. Begitulah imbauan yang disampaikan berbagai tokoh masyarakat, Basril Djabar misalnya mengatakan “ Kita tidak menolak KKM Tahun 2010, tapi KKM harus diusung oleh semua elemen bukan oleh Gebu Minang saja. Ide ini dari Gebu Minang bagus tapi adakan seminar saja dulu. Lantas lembaga-lembaga lain di Sumatera

Barat, adakan pula seminar yang menjurus pada KKM” (*Singgalang*, Senin 6 Desember 2010).

Sabtu, 4 Desember 2010 di Taman Budaya diadakan rapat. Rapat tersebut kembali menegaskan untuk menolak KKM Tahun 2010. Dalam rapat itu hadir, Ketua Gebu Minang Jawa Timur, Firdaus HB, dan Lusi Bebasari Navis, parantau dari Jakarta. Kemudian Darman Moenir, Muhammad Ibrahim Ilyas, Zainuddin Datuak Rajo Lenggang, M. Sayuti Datuk Rajo Penghulu, Sutan Lukman, Musdaril Katik Jo Mangkuto, Alda Wimar, Rizal Tanjung, Muhammad Isa Gautama, Nina Rianti dan Yeyen Kiram. Rapat membahas KKM yang akan dilaksanakan di Padang oleh Gebu Minang. Mereka meminta walikota Padang, Fauzi Bahar menolaknya (*Singgalang*, Senin 6 Desember 2010).

Sudah berkeliling mencari solusi atas kebuntuan konflik pelaksanaan KKM Tahun 2010, akhirnya ditangan Walikota Padang-Fauzi Bahar, bisa ditemukan jalan keluarnya. Fauzi Bahar menyarankan agar pelaksanaan KKM Tahun 2010 dilaksanakan di Kota Padang tapi harus diganti menjadi seminar (*Haluan*, Senin 6 Desember 2010). Usulan perubahan nama kongres menjadi seminar merupakan solusi yang terbaik dan diharapkan bisa diterima berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra. Namanya menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM).

Perihal ini sebetulnya tidak terlepas dari adanya penolakan dari Pemerintah Kota Bukittinggi yang mengeluarkan *statement* Hari Jum’at tanggal 3 Desember 2010 menolak dengan tegas Kota Bukitinggi dijadikan tempat penyelenggaraan KKM Tahun 2010 tanggal 12-13 Desember 2010. Melihat situasi yang demikian Gebu Minang sebagai penyelenggara berencana memindahkan pelaksanaan KKM Tahun 2010 ke Kota Padang tersebut.

Respon dengan cepatpun dilakukan oleh Gerakan Menolak KKM Tahun 2010 yakni melakukan pertemuan pada Minggu sore, 5 Desember 2010 di Taman Budaya Padang Sumatera Barat dengan topik diskusi menyikapi dipilihnya Kota Padang sebagai tempat pelaksanaan KKM Tahun 2010.

Pertemuan yang dihadiri LKAAM, ninika Mamak VIII Suku Padang, Ikatan Keluarga Padang (IKP), Haris Effendi Thahar (Ketua DKSB), Hawari Siddik (tokoh masyarakat Kurai), M. Sayuti Datuk Rajo Penghulu (Ketua LKAAM Sumatera Barat), Sutan Lukman, Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto, Darman Moenir, Lusi Bebasari Navis (perantau Jakarta), Firdaus HB (Ketua GB Jawa Timur), Yayen Kiram, Muhammad Ibrahim Ilyas, dan Isa Gautama. Mereka meminta agar format diubah dari kongres menjadi seminar. Bahkan bagi pihak yang penolak KKM Tahun 2010, bila Gebu Minang bersikukuh tidak mau merubah format kegiatan apalagi dengan dialihkannya tempat penyelenggaraan KKM tersebut ke Kota Padang juga mersepon yakni akan melakukan perlawanan agar KKM Tahun 2010 tak digelar di Kota Padang (*Haluan*, Senin 6 Desember 2010).

Akhirnya pihak penyelenggara memutuskan untuk merubah kongres menjadi seminar. Hasil ini didapatkan setelah melakukan rapat intern antara panitia penyelenggara di Jakarta. Ini merupakan sebuah solusi dan jalan tengah. Sebab begitu banyak aksi penolakan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat yang ada di Sumatera Barat serta Badan Kordinasi Gebu Minang di daerah, seperti Gebu Minang Jawa Timur. Disebabkan adanya perubahan format kegiatan dari kongres menjadi seminar maka Gebu Minang Jawa Timur akhirnya mendukung perubahan dan kegiatan ini (*Haluan*, Sabtu 11 Desember 2010).

Sudah hampir bisa dipastikan Gebu Minang menerima tawaran jalan tengah yang diajukan Walikota Fauzi Bahar untuk mengganti Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM). Usaha ini merupakan untuk kedua kalinya Walikota Fauzi Bahar berkomunikasi dengan *Streering Committee* KKM, Saafroeddin Bahar. Tapi di kalangan panitia pelaksana sampai Magrib kemarin itu rupanya masih belum bulat benar untuk menerima perubahan format dari kongres ke seminar. Bahkan Ketua OC Gebu Minang Zulhendri Chaniago masih menyatakan tetap akan melaksanakan kongres di Padang

(Haluan, Kamis 9 Desember 2010). Mengenai tempat dilaksanakan di Kampus UPI, Lubuk Begalung Padang (*Posmetro Padang*, Kamis 9 Desember 2010). Untuk mensosialisasikan ini maka panitia membuat pengumuman di media cetak yang ada di Kota Padang. Hal ini dilakukan oleh pihak panitia untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa SKM Gebu Minang Tahun 2010 jadi dilaksanakan. Pengumuman tersebut berisi tentang tempat penyelenggaraan kegiatan, pokok bahasan dalam seminar, dan keynote speaker dalam kegiatan tersebut.

Pengumuman telah dibuat dengan mencantumkan tempat kegiatan SKM GB Tahun 2010, namun persoalan lain muncul yakni berkaitan dengan tempat penyelenggaraan SKM GB Tahun 2010. Pihak kampus UPI Lubuk Begalung tidak mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan di kampus tersebut. Pertimbangan keamanan lebih ditonjolkan sebab sebelumnya kegiatan ini mendapat respon ada yang pro dan kontra serta masalah administrasi yakni tempat tersebut harus dibayar 10 hari lebih awal sebelum acara tersebut dilaksanakan. Hal ini tidak dilakukan oleh pihak panitia yakni Gebu Minang.

Akhirnya, menyikapi situasi yang demikian pihak panitia penyelenggara memindahkan kegiatan ke Hotel Basko, Padang. Sebuah hotel yang berada di pusat Kota Padang. Sejalan dengan itu, untuk kedua kalinya pihak penyelenggara kegiatan membuat pengumuman di media cetak. Seperti pengumuman sebelumnya berisi tentang tempat penyelenggaraan kegiatan, pokok bahasan dalam seminar, dan keynote speaker dalam kegiatan tersebut. Terjadi perubahan yakni semula UPI Lubuk Begalung, pengumuman kedua ini yakni Hotel Basko, Padang.

5.2. Pelaksanaan Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang (SKM GM) Tahun 2010

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa gagasan dari kegiatan ini pada awalnya merupakan sebuah Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) Tahun 2010 yang

direncanakan di Kota Bukittinggi tanggal 7-8 Agustus 2010. Berbagai elemen masyarakat menentang untuk dilaksanakan KKM Tahun 2010 ini seperti dari unsur budayawan, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Bundokanduang dan lainnya. Berbagai alasan muncul sebagai aksi menolak KKM Tahun 2010 ini diantaranya adalah bahan sudah disiapkan oleh panitia (Gebu Minang) serta berdasarkan isu yang berkembang bahwa para budayawan ingin menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut.

Bagi pihak Gebu Minang, adapun landasan melaksanakan kegiatan ini yakni untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari–atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Berbagai solusi untuk memecahkan persoalan ini pun dilakukan oleh pihak Gebu Minang. Seperti melakukan kegiatan pertemuan dengan pihak pemerintah Sumatera Barat untuk dapat menengahnya. Pertemuan dilakukan pada 10 Oktober 2010 di Aula Gubernur. Namun pada saat tersebut pihak yang menentang kegiatan KKM Tahun 2010 tidak hadir. Namun oleh seluruh undangan yang hadir menyatakan pendapat bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan oleh Gebu Minang.

Sikap pro dan kontra tersebut maka Walikota Padang – Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si menjadi penengah dalam persoalan ini. Dengan mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak Walikota Padang menyarankan agar KKM Tahun 2010 diganti menjadi SKM GB 2010 (Seminar Kebudayaan Minangkabau

Gebu Minang Tahun 2010)²². Dengan sikap kearifan dari panitia dan mendengar masukan dari Walikota Padang maka diambil jalan tengah yakni Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 (KKM 2010) diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang 2010 (KKM GB 2010). Sebuah solusi terbaik untuk meredam antara yang pro dan kontra atas kegiatan ini.

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang memandang SKM GB Tahun 2010 dijadikan sebagai motivator karena ada beberapa hal yang penting yakni semangatnya untuk melakukan diskusi tentang kebudayaan Minangkabau dan perubahan serta dapat mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dan pariwisata di daerah Sumatera Barat.

Tepat pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 dilakukan pembukaan registrasi peserta mulai pukul 09.00-17.00. Seluruh peserta yang telah diregistrasi diinapkan di Hotel. Pukul 18.30-21.00 seluruh peserta SKM Tahun 2010 beserta panitia dijamu oleh Walikota Padang di Rumah Dinas Walikota Padang.

SKM GM Tahun 2010 yang diselenggarakan mulai dari Hari Sabtu, Minggu sampai Senin (11-13 Desember 2010) di Basko Hotel Padang –Sumatera Barat mulai dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Bahkan media massa terbitan Padang menyuguhkan berita *SKM Sukses Digelar* (Singgalang, 13 Desember 2010). Kegiatan SKM GB Tahun 2010 diikuti oleh seluruh walinagari yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dan para undangan yang berjumlah 532 walinagari dan undangan lainnya, semuanya berjumlah 1.100 orang peserta.

Sebelum dilakukan SKM GM Tahun 2010 telah dilakukan pula kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menjangkau aspirasi masyarakat dari beberapa lembaga seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), Universitas

²² Untuk selanjutnya Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang Tahun 2010 ditingkat menjadi SKM GB Tahun 2010.

Andalas, IAIN Imam Bonjol Padang, dan lain-lainnya. Setelah itu dilakukan kegiatan Pra Seminar Kebudayaan Minangkabau dengan tema : Revolusi Biru dan Penanggulangan Bencana di Halaman Mercusuar Distrik Navigasi KLS II Teluk Bayur Padang tanggal 7 Agustus 2010. Seminar ini telah berupaya menyajikan pandangan dari para pakar/pembicara dari beberapa sudut pandang, yaitu hubungan internasional-regional, sosio-kultural, sejarah, agama, pemerintahan dan generasi muda. Tema-tema yang berkaitan dengan pemaparan tersebut antara lain (1) Pengamanan Kawasan Pesisir Barat Sumatera Barat, (2) Menumbuhkan Kembali Semangat Bahari di ranah Minang, (3) Pememfaatan dan Konservasi Bahari Pesisir Barat Sumatera Barat, (4) Pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mendukung Revolusi Biru, (5) The Indonesian Tsunami Early Warning System (inaTEWS) dan Peringatan Dini Tsunami di Kota Padang, (6) Orang Minang Sebagai Bangsa Pelaut, dan (7) Masyarakat Pesisir dan Bencana Alam

Gagasan dari kegiatan ini pada awalnya merupakan sebuah KKM Tahun 2010 yang direncanakan di Kota Bukittinggi tanggal 7-8 Agustus 2010. Berbagai elemen masyarakat menentang untuk dilaksanakan KKM 2010 ini seperti dari unsur budayawan (Wisran Hadi dan Darman Moenir), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Bundo Kanduang dan lainnya. Berbagai alasan muncul sebagai aksi menolak KKM Tahun 2010 ini diantaranya adalah bahan sudah disiapkan oleh panitia (Gebu Minang) serta berdasarkan isu yang berkembang bahwa para budayawan ingin menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut.

Bagi pihak Gebu Minang, adapun landasan melaksanakan kegiatan ini yakni untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan "Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah ", (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4)

Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Berbagai solusi untuk memecahkan persoalan ini pun dilakukan oleh pihak Gebu Minang. Seperti melakukan kegiatan pertemuan dengan pihak pemerintah Sumatera Barat untuk dapat menengahnya. Pertemuan dilakukan pada 10 Oktober 2010 di Aula Gubernur. Namun pada saat tersebut pihak yang menentang kegiatan KKM 2010 tidak hadir. Namun oleh seluruh undangan yang hadir menyatakan pendapat bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan oleh Gebu Minang.

Dengan adanya sikap pro dan kontra tersebut maka Walikota Padang –Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si menjadi penengah dalam persoalan ini. Dengan mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak Walikota Padang menyarankan agar KKM Tahun 2010 diganti menjadi SKM GB Tahun 2010 (Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang 2010). Dengan sikap kearifan dari panitia dan mendengar masukan dari Walikota Padang (Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si) maka diambil jalan tengah yakni KKM Tahun 2010 diganti menjadi SKM GB Tahun 2010. Sebuah solusi terbaik untuk meredam antara yang pro dan kontra atas kegiatan ini.

Tepat pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 dilakukan pembukaan registrasi peserta mulai pukul 09.00-17.00. Seluruh peserta yang telah diregistrasi diinapkan di Hotel. Pukul 18.30-21.00 seluruh peserta SKM 2010 beserta panitia dijamu oleh Walikota Padang di Rumah Dinas Walikota Padang.

5.3. Jalannya SKM GM Tahun 2010

Kegiatan SKM GM Tahun 2010 pada hari kedua, yakni Minggu 12 Desember 2010 dilakukan acara pembukaan mulai pukul 08.30 10.45. Acara dimulai dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pembacaan Kalam Ilahi, Kata Sambutan Ketua Panitia (Ir. Erman Jamanin Dt. Tanmaliputi), Sambutan Ketua Gebu Minang (Mayjend TNI (Purn) H. Asril Tanjung

SIP), kemudian dilakukan pembukaan secara resmi oleh Walikota Padang (Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si).

Adapun isi kata sambutan Ketua Umum Penyelenggara bahwa panitia telah berusaha keras untuk menghimpun dan merumuskan berbagai rumusan awal dari bahan yang diperlukan untuk kelancaran seminar yang mempunyai lima tema. Sedangkan dari isi dari kata sambutan dari Ketua Gebu Minang bahwa kegiatan seminar ini merupakan suatu awal dimana sebagai titik tolak, Gebu Minang merujuk kepada ajaran yang sudah lama dianut oleh masyarakat Minang yaitu ajaran *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), oleh karenanya ABS-SBK ini telah menyatukan secara harmonis antara ajaran adat Minangkabau yang sudah ada selama ratusan tahun.

Setelah acara pembukaan dilakukan *keynote speech* oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA. Prof. Azyumardi Azra, MA memaparkan makalah tentang konsolidasi kultural suku bangsa Minangkabau dan aktualisasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di tengah tantangan lokal, nasional dan global. Adapun inti sari dari makalah Prof. Azyumardi Azra, MA adalah bahwa wacana tentang 'Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah' (ABS-SBK) yang beriringan dengan gagasan 'kembali ke nagari' dan sekaligus 'kembali ke surau' telah bergaung dalam beberapa tahun terakhir di kalangan para ulama, pemimpin Minang baik di Sumatera Barat maupun di rantau. Kemunculan wacana, gagasan dan bahkan juga konsep filosofis dan praksis seperti ditawarkan Naskah SKM GB Tahun 2010, tidak ragu lagi berkaitan dengan perkembangan politik masa pasca-Soeharto, ketika kebijakan desentralisasi dan otonomisasi daerah menemukan momentumnya dan memberikan peluang bagi konsolidasi atau rekonsolidasi kebudayaan Minangkabau dalam berbagai aspeknya. Meskipun demikian, masih jadi tanda tanya besar tentang seberapa jauh wacana ABS-SBK dan gerakan "kembali ke nagari" dan "kembali ke surau" tersebut bisa berhasil. Pengamatan selintas di lapangan menunjukkan, belum terlihat tanda-tanda meyakinkan bahwa

ketiga gagasan dan bahkan mungkin juga semacam gerakan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, wacana atau gagasan tentang ABS-SBK dan 'kembali ke nagari' dan 'kembali ke surau' pada satu segi boleh jadi masih mencerminkan 'romantisme' sejarah orang Minang sekarang tentang keunggulan dan distingsi kebudayaan Minangkabau di masa silam. Baik 'adat', 'nagari' dan 'surau' dipandang sebagai '*local genius*' dalam kehidupan adat, sosial-politik, dan keagamaan Minangkabau, sehingga menghantarkan suku bangsa ini ke dalam posisi terkemuka di antara suku-suku bangsa lain di Nusantara. Memandang perjalanan historis suku bangsa Minangkabau dan pengalaman pengumpulan adat dan Islam, kenestapaan pasca-PRRI, dan perubahan politik, agama, adat, dan sosial budaya, konsolidasi kultural suku bangsa ini masih terus menghadapi banyak tantangan dan kendala.²³

Setelah Prof. Azyumardi Azra menyampaikan materi makalahnya kemudian acara dilanjutkan dengan pengesahan susunan acara dan tata tertib serta penjelasan singkat tentang materi SKM GM Tahun 2010.

5.4. Materi SKM GM Tahun 2010

Ada lima materi dalam SKM GM Tahun 2010 yakni :

1. Menyepakati Pedoman Pengamalan “Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah”, (ABS SBK).

Pada dasarnya kita warga masyarakat Minangkabau sudah lama menerima ABS SBK. Walaupun demikian, ABS SBK ini belum pernah dirumuskan secara jelas sehingga terdapat berbagai-bagai macam faham tentangnya; belum pernah diajarkan secara mendalam sehingga tidak semua orang faham bagaimana melaksanakannya; belum ditindaklanjuti secara taat asas, dan telah terlihat mulai banyak

²³ Prof. Azyumardi Azra dengan Judul *Konsolidasi Kultural Suku Bangsa Minangkabau : Aktualisasi ABS-SBK di Tengah Tantangan Lokal, Nasional dan Global*, Makalah pada Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang 2010 Padang, 12-13 Desember 2010.

diabaikan dan dilanggar oleh karena itu SKM GM Tahun 2010 mengajak kita bersama untuk membahas bagaimana bentuk pelaksanaan ABS-SBK tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga suatu ketika di kemudian hari dapat ditemukan kesepakatan dan kersefahaman seluruh anak nagari Minangkabau dalam bentuk pelaksanaan ABS-SBK tersebut. Dalam rancangan kesepakatan ABS SBK ini secara tegas dinyatakan bahwa SKM GM Tahun 2010 tetap mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal.

2. Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani.

Walaupun sekarang ini nagari sudah diakui sebagai bentuk pemerintahan desa di Minangkabau, namun selain masih banyak yang harus kita lakukan agar supaya masyarakat nagari benar-benar dapat menikmati hidup yang lebih sejahtera, baik lahir maupun batin. Untuk maksud ini, SKM GM Tahun 2010 mengajak kita untuk membahas empat fungsi nagari, secara utuh, yaitu sebagai kesatuan adat dan budaya, kesatuan pemerintahan, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan.

3. Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

Pantai Barat ranah Minang yang terbentang dari Kecamatan Silapiang di ujung utara Kabupaten Pasaman Barat sampai ke Inderagiri di selatan Kabupaten Pesisir Selatan kurang lebih sepanjang 400 kilometer mengandung potensi sumber daya alam anak nagari Minangkabau yang belum tergarap dan belum termanfaatkan secara optimal. Adalah merupakan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir hidup dalam keadaan berkekurangan.

Boleh jadi kekayaan yang tersimpan dalam bentangan laut yang luas dan dalam tersebut jauh melebihi kekayaan yang ada di darat dipunggug-punggug bukit dan di lembah-lembah daratan propinsi Sumatera Barat. SKM GM Tahun

2010 mengajak kita semua untuk membahas bagaimana cara memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di lautan tersebut, sekaligus meletakkan dasar-dasar yang perlu untuk menyejahterakan masyarakat pesisir. Seluruhnya itu dilakukan dengan bekerjasama erat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

4. Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat.

Walaupun secara resmi kita masih mempunyai hak atas tanah ulayat, namun – berdasar berbagai peraturan perundang-undangan -- dalam kenyataannya sebagian besar hak atas tanah ulayat tersebut telah jatuh kepada pihak lain, dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat-hukum adat yang [pemerintah] memiliki hak atas tanah ulayat tersebut.

Untuk meletakkan landasan yang lebih kuat bagi kesejahteraan masyarakat nagari di masa depan, SKM GM Tahun 2010 mengajak kita bersama untuk merumuskan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kita – antara lain melalui program Baitul Mal wa Tamwil yang sudah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Agam – dan tentang cara-cara yang absah untuk memulihkan hak atas tanah ulayat

5. Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Adalah merupakan kenyataan bahwa ranah Minangkabau atau –daerah daratan–Propinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam daerah rawan bencana terutama bencana yang ditimbulkan oleh gempa tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami dan juga bencana berasal dari letusan gunung berapi.

Berbagai bentuk bencana tersebut senantiasa mendatangkan kerugian yang tidak kecil baik jiwa ataupun harta benda. padahal, bencana tersebut datangnya relatif sulit untuk diduga.

Oleh karena itu, SKM GM Tahun 2010 mengajak kita bersama untuk merumuskan usaha yang bersifat maksimal baik sebelum datangnya bencana ataupun setelah terjadinya bencana yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat luas. Seluruhnya ini perlu dilakukan di bawah koordinasi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

5.5. Komisi dan Hasil Kesimpulan Per Komisi

Dari kelima materi tersebut dibentuklah lima komisi dengan tema sesuai dengan materi tersebut. Adapun kelima komisi tersebut adalah (A) *Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah* (ABS SBK), (B) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani, (C) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, (D) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari–atas tanah ulayat, dan (E) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Komisi A dengan ketua H. Ahmad Syahrudji Tanjung, Sekretaris H. Muhardi Rajab, SH. MH, dan anggota Anggi, Erma Sumiarti, dan Fadhilah Dt. Sari Alam membuat kesimpulan hasil pembahasan yang berisi tentang perihal bahwa salah satu agenda penting dalam SKM GB Tahun 2010 adalah menyepakati pedoman pengamalan "*Adaik Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*". Dalam hal ini Panitia SKM-GM Tahun 2010 telah mempersiapkan dengan baik pedoman pengamalan *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*, *Syarak Mangato Adat Mamakai*. Dalam pembahasan di Komisi A, selain pedoman pengamalan ASB-SBK, yang menjadi rujukan pembahasan, tulisan (makalah) yang disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, dalam diskusi panel SKM GM Tahun 2010 berjudul Konsolidasi Kultural Suku Bangsa Minangkabau.

Aktualisasi ABS-SBK di tengah tantangan lokal, nasional dan global, dan tulisan (makalah) Dr. Mochtar Naim yang berjudul ABS-SBK, dijadikan pula sebagai masukan yang

sangat berguna dalam memperkaya dan melengkapi konsep yang telah dibuat oleh Panitia SKM-GM 2010, terutama betapa pentingnya melakukan konsolidasi kultural Suku Bangsa Minangkabau untuk mengaktualisasi ABS-SBK ditengah tantangan lokal, nasional, dan Global.

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, serius dan dinamis, telah disepakati kesimpulan dan hasil pembasahan Komisi A, meliputi 2 hal pokok, yaitu (1) Pandangan dan pendapat tentang buku pedoman pengamalan ABS-SBK, dan (2) Komentor, usul, saran, dan rekomendasi untuk memperkuat pengamalan ABS-SBK.

5.6. Pasca SKM GM Tahun 2010

Pada Hari Senin, 13 Desember 2010 acara SKM GM Tahun 2010 dilanjutkan dengan registrasi seluruh peserta. Setelah itu dilakukan sidang paripurna dan mendengarkan masukan atau pendapat dari setiap komisi. Setelah dilakukan kata mufakat maka diambil suatu kesimpulan dari SKM GM Tahun 2010 yakni :

1. Menyepakati Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Seminar Kebudayaan Minangkabau tetap mempertahankan kekerabatan matrilineal.
2. Pembangunan nagari dan kesejahteraan masyarakat petani. Nagari memiliki empat fungsi yaitu sebagai kesatuan, adat dan budaya, pemerintah, kesatuan ekonomi dan pertahanan keamanan.
3. Pemberdayaan potensi mariim dan kesejahteraan masyarakat Pesisir. Perlu diletakkan dasar-dasar mensejahterakan masyarakat pesisir.
4. Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari atas tanah ulayat. Maka, perlu dikembangkan program Baitul Mal wa Tamwil.
5. Perlunya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

6. Meminta Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melaksanakan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM).

Setelah itu acara dilanjutkan dengan acara penutupan. Diawali dengan kata sambutan dari ketua panitia dan kemudian dilanjutkan dengan penutupan oleh Ketua Gebu Minang Pusat.

VI. Kesimpulan

Hubungan ranah dan rantau yang tercermin dalam KKM Tahun 2010 tersebut sudah terlihat pada waktu pra kongres KKM Tahun 2010, aksi penolakan dari *ranah* atas kegiatan dari rantau yang berupa KKM. Tidak berhenti disitu saja upaya mendapat restu dai tokoh nasional pun dilakukan oleh Gebu Minang sebagai penyelenggara kegiatan KKM Tahun 2010 tersebut. Akhirnya dengan terjadi pro kontra atas kegiatan KKM Tahun 2010 tersebut pihak Gebu Minang mengalah terutama mengenai bentuk kegiatan dari kongres menjadi seminar dan tempat kegiatan dari Kota Bukittinggi ke Kota Padang. Sebuah bentuk keeleganan hubungan ranah dan rantau yang terpatrit atau tercermin dalam sebuah kegiatan yang bernama KKM Tahun 2010 tersebut.

Salah-satu kasus perdebatan intelektual dan konflik mutakhir yang menarik untuk dikaji adalah rangkaian persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) 2010. Kongres tersebut di gagas oleh orang rantau yakni organisasi Gebu Minang yang berkantor di Jakarta. Motivasi utama Gebu Minang, untuk melaksanakan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kebudayaan Minangkabau dengan (1) Menyepakati Pedoman Pengamalan "Adaik Basandi Syarak ~ Syarak Basandi Kitabullah", (ABS SBK). (2) Pembangunan Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat Petani. (3) Pemberdayaan Potensi Maritim dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. (4) Pembangunan nagari dan pemulihan hak anak nagari-atas

tanah ulayat. Serta (5) Mitigasi dan Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana.

Adanya berbagai tanggapan dari *ranah* tersebut tidak dapat dihindarkan, yang bermula dengan kritik dan memuncak pada aksi penolakan secara terorganisasi dan berkelanjutan terhadap KKM tersebut. Elemen-elemen masyarakat yang menentang dilaksanakannya kegiatan tersebut terdiri dari unsur budayawan perseorangan, dan organisasi-organisasi, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, dan Bundo Kandung.

Penolakan KKM Tahun 2010 juga muncul di 'Facebook' dengan judul akun 'Gerakan Menolak Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010'. Muhammad Ibrahim Ilyas, yang juga ikut gerakan ini, mengatakan, penolakan atas pelaksanaan KKM Tahun 2010 dimaksud sebagai antisipasi, atau 'maminteh'. "Karena, kita tidak ingin adat dan budaya Minangkabau mengalami 'jalan dialiah urang lalu, cupak dipapek urang panggaleh'. KKM Tahun 2010 digagas sejumlah tokoh tokoh Minang yang tinggal di Jakarta, di antaranya Mochtar Naim dan Saifuddin Bahar.

Adanya aksi penolakan dalam situasi yang kritis – Walikota Padang –Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si memegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya KKM ini. Setelah mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak – termasuk pihak yang melancarkan aksi menentang KKM – Walikota Padang menyarankan agar nama Kongres Kebudayaan Minangkabau diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau (SKM) Gebu Minang. Panitia Pengarah KKM menyetujui saran Walikota Padang tersebut, sehingga nama Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 secara resmi diganti menjadi Seminar Kebudayaan Minangkabau –Gebu Minang.(SKM GM 2010), yang ternyata memang merupakan solusi terbaik untuk meredam konflik yang sangat tajam antara pihak yang menyetujui dan pihak yang menolak kegiatan ini.

SKM GM Tahun 2010 yang diselenggarakan pada Hari Sabtu-Senin (11-13 Desember 2010) di Basko Hotel Padang – Sumatera Barat mulai dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Bahkan media massa terbitan Padang menyuguhkan berita *SKM Sukses Digelar* (Singgalang, 13 Desember 2010). Kegiatan SKM GB Tahun 2010 diikuti oleh seluruh walinagari yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dan para undangan yang berjumlah 532 walinagari dan undangan lainnya, semuanya berjumlah 1.100 orang peserta.

Pemetaan yang setuju, Menolak dan netral atas dilakukannya KKM Tahun 2010 yakni yang setuju yakni Gebu Minang sebagai lembaga penyelenggara, menolak yakni LKAAM Sumatera Barat, DKSB, Bundo Kanduang, dan MUI Sumatera Barat serta para seniman dan budayawan. Sedangkan yang netral yakni pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Kogres Kebudayaan Minangkabau 2010 07-08 Agustus 2010 diselenggarakan di Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi-Sumatera Barat. Sekretariat Gebu Minang di Jakarta.
- Arsip Gebu Minang Tahun 2010

Koran

Singgalang, Kamis 22 Februari 1990

Singgalang, Rabu 17 Oktober 1990

Tabloid

Minang News : Media Interaktif Ranah dan Rantau.
Edisi 10 Desember 2010.

Buku

- Abdullah, Taufik, *Studi Tentang Minangkabau*. Kertas Kerja Seminar Internasional mengenai Kesusasteraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau 4-6 September 1980 di Bukittinggi. 1980.
-, *Sekolah dan Politik : Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat (1927-1933)*. Terjemahan oleh Lindayanti dan A. Guntur. Padang-Sumatera Barat. 1988.
-, "Adat and Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia*, 2 October, 1966. pp. 1-23. 1966.
-, *Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies Social Development*. Cornell University. 1967
-, *Di Antara Harapan Masa Depan dan Harga Diri : Minangkabau Seratus Tahun Yang Lalu*. 2008

- Makalah disampaikan pada Seminar Seabad Kebangkitan Nasional: Perlawanan Anti Balasting dan Gerakan Kemajuan di Sumatera Barat 1908-2008. Bukittingi, 11 November 2008.
- Aboe Naim, Sjafnir, *Alih Tulis Naskah Faqih Saghir Edisi J.J. Holander, 1857*. Padang : Lembaga Kajian Gerakan
- Paderi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan BPSNT Padang
- Amran, Rusli, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan. 1981
-, *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan.1985
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indoneia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rineka Cipta.Arifin, Zainal dan kawan-kawan, 2007. *Pemusuhan dalam Persahabatan (Budaya Politik Masyarakat Minangkabau)*. Padang : Lembaga Kajian Sosial-Budaya. 1997
- Asnan, Gusti, *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM). 2003
-,(ed), *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah : Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an*. Padang : Citra Budaya. 2006
- Azra, Azyumardi, "Surau atau Pesantren ? Revitalisasi, Instutusionalisasi, Sosialisasi, Budaya dan Agama dalam Masyarakat Minang" dalam Gusnawirta Taib dan Abrar Yusra (Editor), 2001, *Tantangan Sumatera Barat (Mengembalikan Keunggulan Pendidikan Berbasiskan Budaya Minangkabau)*. Jakarta : Citra Pendidikan.

- Beckmann , Keebet von Benda, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta : Grasindo. 2002
- Biro Pusat Statistik (BPS), *Sumatera Barat dalam Angka 2010*. Padang : BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Biro Pusat Statistik (BPS), *Sumatera Barat dalam Angka 2004*. Padang : BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Booth Anne dan Peter Mc Cawley (Penyunting), *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta : LP3ES.1990
- Dobbin, Christine. 1992. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy : Central Sumatra, 1784-1847* (Monograph Series, Scandinavian Institute of Asian Studies, no 47).
- Edwar, *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*. Padang: Islamic Center Sumatera Barat. 1981
- Franz, Von Benda-Beckhman, *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta : Grasindo. 2000
- Fisher, Simon. dkk, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Bertindak*. Jakarta : The British Council. 2000
- Gebu Minang, *Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta : Gebu Minang. 2011
- Graves, Elizabeth, E. *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern : Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Edisi Terjemahan oleh Novi Andri, dkk. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007

- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1985
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Firma Tekad. 1963
-, *Ayahku, Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Jakarta: Umminda. 1982
- Hasanuddin. "Clean Tourism, Konflik dan Konformitas: Studi Kasus Kepariwisata Sumatera Barat". Denpasar: *Jurnal Internasional Dialog*, (volume 1 Nomor 1). Tahun 2000. 2000
- Hedler, Jeff, *Sengketa Tiada Putus : Matriakat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta : Freedom Institute. 2010
- Helmi, Surya, dkk, *Laporan Ekskavasi Kubu Rajo*. Batusangkar: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Propinsi Sumbar-Riau. 1991
- Imran. Amrin, *Menelusuri Sejarah Minangkabau*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia. 2002
- Drakard, Jande. A, *Kingdom of Words : Language and Power in Sumatra*. South-East Historical Monographs. Oxford University Press. 1999
- Kartodirjo, Sartono, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka. 1977
- Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1970

- Mansoer, M.D,dkk, *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta : Bhratara. 1970
- Martamin, Mardjani, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah (1900-1942)*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1977/1978.
- Muljana, Slamet, *Kuntala, Sriwijaya, dan Suwana Dwipa*. Jakarta: Idayu. 1981
- Naim, Muchtar, *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau* : Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1984
- Nasroen, Mhd. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Bulan Bintang. 1957
- Navis, A. A. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers. 1984
- *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei Ruang Pendidikan INS Kayutanam*. Yakarta : Grasindo. 1996
- Nazwar, Akhira, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuwan Islam di Permulaan Abad Ini*. Jakarta: Panjimas. 1983
- Nizar, Samsul, *Seabad Buaya Hamka Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran HAMKA tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES. 1996
- Nooteboom. *Sumatera dan Pelayaran di Samudera Hindia*. Jakarta: Bhratara. 1972

- Oki, Akira. "Social Change in the West Sumatran Village. 1908-1945". *Thesis Doctor*. Canberra : The Australian University. 1971
- Pangoeloe, Dt. Radjo, *Minangkabau : Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang : Sri Dharma. 1971
- Rahardjo, M. Dawan (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta : P3M. 1985
- Radjab, Mohamad. *Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka. 1964
- Sairin, Sjafri, "Minangkabau yang Gelisah : Sebuah Catatan Singkat" dalam Yeri.S Putra (ed), *Minangkabau di Persimpangan Generasi*. Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas. 2007
- Schrieke, B.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhratara. 1975
- Soekanto, Soejono dan Winamo Yudho, *Seri pengenalan sosiologi 5 (Lima). George Simmel beberapa teori sosiologi*. Jakarta : Raja Wali Press. 1986
-, *Sosiologi : Suatu pengantar*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2002
- Soekanto, Soejono dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan teori konflik*. Jakarta : Gunung Agung. 1988
- Undri, "Gebu Minang : "Gerakan Perantau Membangun Nagari" dalam Perspektif Sejarah". Dalam jurnal *Suluah : Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Volume 9, Nomor 10, Juni 2009. ISSN 1412-1689. Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. 2009
- Wiradi, Gunawan, *Catatan Ringkas Konflik Agraria : Topik Relevan Untuk Diteliti*. Butir-butir

ringkas sebagai bahan kuliah dalam salah satu acara pelatihan dan penelitian sejarah yang diselenggarakan oleh LIPI, tanggal 17 Oktober 2003 di Jakarta. 2003

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara. 1979

Zed, Mestika. *Perubahan di Minangkabau, Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat*. Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas. 1992

BENGKULU SELATAN
DALAM LINTASAN SEJARAH DAN BUDAYA
Oleh: Ajisman

A. Pendahuluan

Sejarah berisikan suatu peristiwa masa lalu yang memberi atau mempengaruhi masa-masa sesudahnya. Peristiwa sejarah meninggalkan bekas atau bukti-bukti materi maupun non materi dan pada masa selanjutnya menjadi objek penelitian khusus kesejarahan, guna menemukan titik padu dari suatu proses di awal sejarah dan proses masa selanjutnya.

Peninggalan masa lalu baik berupa materi, benda nyata atau benda yang tampak wujudnya seperti bangunan bersejarah adalah saksi sejarah. Dalam ilmu sejarah, peninggalan masa lalu yang berupa materi, maupun non materi seperti informasi lisan dari pelaku atau saksi sejarah, adalah bahan atau sumber data bagi penulisan sejarah. Penulisan sejarah tidak dapat dilakukan manakala kedua peninggalan tersebut tidak ada, karena keduanya adalah sumber primer dalam rangka mengungkap peristiwa sejarah yang pernah ada.

Peninggalan sejarah pada masa lalu berupa benda atau bangunan, yaitu bangunan berupa bekas benteng, Istana, gedung-gedung perkantoran, rumah ibadah, makam, tugu, dan monumen. Pada benda dan bangunan tersebut memiliki kisah atau peristiwa tersendiri yang menjadi latar belakang dibuat dan didirikan bangunan tersebut.

Disamping itu peninggalan sejarah dan budaya juga dapat dijadikan objek wisata budaya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlindungan dan pemeliharaan terhadap bangunan peninggalan sejarah perlu dilakukan. Perlindungan dan pemeliharaan peninggalan bersejarah sangat besar artinya untuk memupuk rasa

nasionalisme dan kesadaran sejarah bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Peninggalan sejarah juga menjadi daya tarik wisata yang dapat dijual. Upaya perlindungan yang dimaksud adalah mencegah dan menanggulangi gejala-gejala dan akibat yang ditimbulkan, baik oleh perbuatan manusia maupun karena proses alam yang dapat merugikan, sehingga menurunkan nilai, manfaat dan keutuhan bangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah upaya pelestarian bangunan peninggalan sejarah dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara melakukan perawatan.¹

Pemeliharaan dan perlindungan bangunan bersejarah bukan saja tugas pemerintah untuk melakukannya, melainkan juga setiap orang yang memiliki benda bersejarah dan instansi pemerintah serta yang mempunyai kepentingan yang sama, wajib memeliharanya.² Pemeliharaan bangunan bersejarah perlu terus dilakukan bukan saja untuk mengingat nilai kejuangan dan kepeloporannya serta untuk memupuk semangat cinta tanah air, akan tetapi juga sebagai daya tarik wisata yang dapat dikembangkan.

Mengingat pentingnya keberadaan bangunan peninggalan sejarah tersebut, maka segala upaya untuk menjaga, memelihara dan merawat untuk tujuan melestarikannya, hal ini perlu terus ditingkatkan agar salah satu aset budaya dan sumber penelusuran peristiwa sejarah tidak punah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata budaya.

Kabupaten Bengkulu Selatan banyak memiliki peninggalan bangunan bersejarah. Bangunan yang bernilai sejarah dan budaya tersebut berjumlah tidak kurang dari 23

¹ Keputusan Mendikbud RI Nomor 063/U/1995. Tentang *Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Peninggalan Sejarah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud, hlm. 23

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 pasal 13 ayat 1 mengenai benda peninggalan sejarah. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud, hlm. 16

buah dan tersebar di seluruh kecamatan.³ Keberadaan bangunan peninggalan sejarah di Bengkulu Selatan sangat penting dijadikan sebagai sumber sejarah untuk menggali dan mengetahui kembali sejarah Bengkulu Selatan di masa lampau. Keberadaannya juga akan memberikan kontribusi bagi identitas dan ciri khas Kabupaten Bengkulu Selatan yang membedakannya dengan kabupaten lain.

Bertolak dari pokok-pokok pikiran tersebut, maka keberadaan bangunan peninggalan sejarah yang ada di Bengkulu Selatan perlu diteliti, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat.

Sungguh menjadi keprihatinan bahwa banyak peninggalan sejarah yang terancam kelestariannya, baik oleh pertumbuhan kota maupun oleh aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila perlindungan bangunan peninggalan sejarah tidak ditangani secepatnya dikhawatirkan akan punah karena dimakan waktu, sehingga bisa hancur dengan sendirinya. Pada hal keberadaan bangunan peninggalan bersejarah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Bengkulu Selatan atau Kota Mana khususnya.

B. Bengkulu Selatan Selayang Pandang

1. Sejarah Pemekaran Bengkulu Selatan

Berlakukanya Undang-Undang otonomi di era reformasi negara Republik Indonesia ini, kebebasan berekpresi semakin nyata dalam berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah keinginan berbagai elit di daerah untuk memekarkan wilayah kabupaten dan kota untuk menjadi beberapa kabupaten dan kota. Hal itu dengan mudah dan gampang dapat diwujudkan asalkan sesuai dengan aturan

³ Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan menyebutkan salah satu dari peninggalan tersebut adalah *Meriam Honisuiik*. Meriam ini adalah buatan Inggris yang dibawa oleh Jepang dari Singapor dan masuk ke Indonesia, khususnya Bengkulu Selatan tahun 1942

tentang pemekaran wilayah, sehingga pada era reformasi ini, bermunculanlah wilayah-wilayah kabupaten baru, tumbuh dan berkembang dengan nama-nama identitas budaya daerah tersebut.

Maksud dan tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan otonomi daerah, mendukung dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan memiliki daya guna dan berhasil guna dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran wilayah yang dilakukan di Indonesia dalam dekade terakhir cukup signifikan dari segi jumlah. Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979 yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 141 tahun 1982, tanggal 1 Oktober 1982, menyebutkan sistem pemerintahan marga dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah. Pejabat camat, kepala desa dan lurah diangkat oleh Gubernur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140-670, tanggal 14 Oktober 1982, telah disahkan sebanyak 986 desa dan 79 kelurahan di Provinsi Bengkulu.⁴

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik melalui otonomi daerah memberi dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran wilayah di daerah.

Provinsi Bengkulu yang sebelumnya terdiri dari empat kabupaten/ kota, telah dimekarkan menjadi sepuluh daerah kabupaten/kota. Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan

⁴ Agus Setiyanto. "Bengkulu Dalam Lintasan Sejarah. Dari Sistem Pemerintahan Tradisional Hingga Birokrasi Kolonial", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu, hlm.4

menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah. Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.

Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan Nomor 50/Gb/1952 dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Sumatera Selatan yang kemudian didefinisikan pada tahun 1955 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dengan luas wilayah 5.949,14 Km². Kabupaten itu terdiri dari 18 kecamatan dan 397 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 389.899 jiwa.⁵

Luas wilayah Bengkulu Selatan adalah 5.949 Km², sekitar 68,78 persen merupakan lahan budidaya dan sebesar 31,22 persen lahan non budidaya dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah 287.150 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, kawasan lindung pantai, dan lindung setempat.⁶

Luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingkat laju pertumbuhan penduduk, maka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau jika tidak segera dilakukan pemekaran wilayah. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonomi baru.

Luasnya wilayah dan masih banyaknya wilayah yang terisolir mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintahan tidak

⁵ Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001, hlm.2

⁶ *Ibid*, hlm. 4

efektif dan tidak efisien. Agar berjalanya roda pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi yang baru diluar bekas Kewedanaan Manna, yaitu bekas Kewedanaan Seluma dan bekas Kewedanaan Kaur.

Kondisi ekonomi dan pembangunan wilayah ini sangat riskan karena pengalokasian dana pembangunan serta peningkatan ekonomi kerayatan terlalu rendah dibandingkan dengan laus wilayah yang ada. Hal ini menyebabkan rakyat di wilayah ini harus berkerja keras untuk membangun ekonominya secara swadaya. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya pemikiran para tokoh masyarakat untuk memikirkan solusi dalam strategi pembangunan kedepan Bengkulu Selatan.

Setelah melalui perdepatan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya tanggal 7 Juni 2005 seluruh elemen yang ada di Bengkulu Selatan sepakat untuk memekarkan Bengkulu Selatan. Kesepakatan ini diperkuat oleh Perda No. 20 tanggal 31 Desember 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 13 Tanggal 2 Januari 2006 Seri C maka tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pemekaran wilayah ini adalah berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Tujuan dan manfaat pemkaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi tiga kabupaten, selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pemerintah, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya (alam dan manusia) yang tersedia. Tujuan utama pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui 1) Optimalisasi penggalan dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia; 2) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat; 3) Menghidupkan sentral-sentral produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis; 4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban; 5) Meningkatkan jalinan hubungan antara kota dan desa maupun pusat dan daerah; dan 6) Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.⁷

Beberapa kepala daerah (termasuk wakilnya) yang pernah menjabat di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah: Bupati Bachsir (1949 – 1950), Bupati Abdul Wahid (1950 - 1952), Bupati Mas Agus Abdurahman (1952 - 1953), Bupati Muhpian (Gelara Tengku Bangsa Raja) (1953 - 1956), Bupati Mohamad Amin (1956 - 1957), Bupati Muhamad Umar Seregar (1957 - 1958), Bupati Rejamat (1958 - 1960), Bupati KDH Tk II Muhammad Adil (1960 - 1962), Bupati KDH Bahmada Rustam (1962 - 1967), Bupati KDH Sadjohan (1967 - 1972), Bupati KDH Buldani Masik (1972 - 1977), Bupati KDH Z.A. Syahril (1977 - 1983), Bupati KDH Murman Afandi (1983 - 1988), Bupati KDH Drs. H. Adjis Ahmad (1988 - 1993), Bupati KDH Drs. Salman Rupni (1993 - 1998), Bupati KDH Drs. Iskandar Dayok dan H. Hasmadi Hamid (1998 - 2003), Bupati H. Fauzan Djamil, SH dan Jani Hairin, SH (2004-sekarang).⁸

2. Bengkulu Selatan Setelah Dimekarkan

a. Letak Geografis dan Keadaan Alam

Secara geografis Kabupaten Bengkulu Selatan terletak antara 4°5' Lintang Selatan dan 102°10' Bujur Timur.⁹ Kabupaten Bengkulu Selatan berada di sebelah Barat Bukit Barisan dengan luas wilayah (setelah dimekarkan) menjadi lebih kurang 1.185, 70 Km persegi, dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma

⁷ Bustan A.Dali, *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun pembangunan Kabupaten Seluma, 3 Agustus 2005-3 Agustus 2007*.
Bungamas: Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, 2007.hlm.2-3

⁸<http://ragambengkulu.blogspot.com/2010/01/sejarah-bengkulu-selatan-ragam-budaya.html>

⁹Usulan Pemekaran Op, *Cit*, hlm.6

sepanjang lebih kurang 40 Km, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur lebih kurang 43 Km. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan kemudian sebelah Barat berbatasan dengan samudra Hindia lebih kurang 40 Km.

Sarana transportasi yang tersedia untuk menjangkau daerah lain seperti ke ibu kota kabupaten telah dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat ke kecamatan dan desa seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan. Angkutan darat yang dilayani oleh bus-bus umum telah dapat melayani rute ke Propinsi Bengkulu dan Propinsi Tetangga. Ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan juga telah memiliki satu terminal antar kota type B dan dua terminal kendaraan umum dalam kota.

Jarak antar kota Kabupaten dan dengan kota Provinsi: dari kota Manna ke Kota Bengkulu lebih kurang 142 Km, dari Manna ke Curup 226 Km, Manna ke Argamakmur 214 Km, Kota Manna – Padang 1.112 Km, Manna Tanjung Karang 972 K, sedangkan ke Jakarta berjarak 222 Km. Transportasi antar kota kabupaten cukup lancar, begitu juga dengan kota provinsi setiap hari ada mobil yang melewati kota Manna dari dan ke kota-kota lainnya di Sumatera.

b. Asal Usul Penduduk

Berdasarkan keterangan dari beberapa orang informan mengatakan bahwa asal mula daerah Bengkulu Selatan pertama kali adalah di daerah Pasar Bawah, namun tidak diketahui secara pasti tahun berapa orang mulai datang ke daerah Pasar Bawah yang diperkirakan asal mula tempat berkembangnya penduduk Bengkulu Selatan ini. Akan tetapi pada umumnya orang Bengkulu Selatan mengakui asal mula berkembang penduduk Bengkulu Selatan berawal dari Pasar Bawah (tempat asal mula penamaan Manna). Selanjutnya berkembang dan berkembang. Pada akhirnya menjadi sebuah kabupaten.

Hampir semua penduduk Bengkulu Selatan adalah bersuku bangsa Serawai sedangkan pendatang jumlahnya tidak banyak. Penduduk pendatang tersebut; Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Sunda dan lainnya. Menurut informasi yang didapat dari beberapa informan asal usul suku bangsa Serawai belum bisa dirumuskan atau ditemukan, baik berupa buku ataupun tulisan-tulisan yang bisa dijadikan bahan pembuktian sejarah. Untuk mengetahui asal usul suku bangsa Serawai perlu penelitian yang lebih mendalam.

Sepanjang penelitian yang dilakukan, hanya mendapat suatu keterangan dari cerita orang perorangan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, karena tidak ada barang bukti kecuali ada suatu tulisan yang berupa peninggalan zaman dulu. Tulisan tersebut hanya tulisan di atas kulit kayu. Tulisan tersebut terdapat di salah satu makam yaitu makam *Leluhur Semidang Empat* di dusun yang terletak di Maras Kabupaten Bengkulu Selatan, dan tulisan tersebut menyerupai tulisan arab kuno sampai saat ini belum ada ahli yang dapat membacanya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, sejarah suku bangsa Serawai ada dua versi. Versi pertama adalah berasal dari leluhur yang disebut *Serunting* (Sepahit Lidah). Konon kabarnya *Serunting* ini berasal dari Jazirah Arab. Dia datang ke daerah Serawai melalui kerajaan Majapahit. Kepada Raja Majapahit, dia minta daerah kerajaan. Berhubung di daerah Jawa tidak ada daerah kerajaan yang bisa diberikan oleh raja Majapahit, maka ia pergi ke Sumatera untuk memilih daerah kerajaan. Ternyata pilihannya adalah ke daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang. Namun di Bengkulu Selatan juga tidak ditemui kerajaan yang dimaksud. Walaupun ini hanya sebuah cerita dari orang perorangan, namun masyarakat Bengkulu Selatan sangat memercayainya.

Versi kedua mengatakan kata Serawai berasal dari kata "seran" yang artinya celaka (celako) ini dihubungkan dengan anak raja dari hulu, karena menderita penyakit menular lalu dibuang ke sungai dan terdampar di suatu tempat. Ia mendirikan kerajaan di sana. Kerajaan Serawai

terpisah dari kerajaan Bengkulu. Kerajaan ini dapat ditemui antara Daerah Sungai Jenggalu dan Muara Bengkenang. Kerajaan ini akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang disebut Margo (Marga). Namun mereka bersatu atas dasar satu kesatuan, satu keturunan dan satu rumpun bahasa.¹⁰

Pada masa lalu, perkampungan suku bangsa Serawai terletak di sepanjang pesisir pantai dan di tepi sungai-sungai yang dianggap besar. Hal ini dikarenakan pada zaman itu belum terdapatnya jalan raya yang menghubungkan antara satu perkampungan dengan perkampungan yang lain. Sebagai pengganti jalan raya dipergunakan lautan dan sungai-sungai yang dapat dilayari sampan. Perkampungan-perkampungan yang dianggap besar biasanya terletak di pinggir muara sungai, dan pada muara sungai itu sendiri bisa dilayari perahu. Suku bangsa Serawai menamakan perkampungan yang besar itu adalah *pasar*.

Pada waktu terakhir ini, pola perkampungan zaman dahulu telah banyak mengalami perubahan, apalagi setelah jalan raya dibangun sepanjang daerah administratif suku bangsa ini. Perkampungan-perkampungan yang terletak di muara sungai ataupun yang terletak jauh di hulu sungai, berangsur pindah ke tepi jalan raya, sehingga akibat dari perpindahan letak kampung ini, perkampungan-perkampungan yang dahulu jauh dengan jalan raya sebagian besar telah ditinggalkan oleh penghuninya. Adapun daerah yang didiami oleh suku bangsa Serawai sebelum dimekarkan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa Kecamatan, yaitu: Kecamatan Seluma Ibu Kecamatanya Tais, Kecamatan Talo Ibu Kecamatannya Masmabang, Kecamatan Pino Ibu Kecamatannya Masat, dan Kecamatan Manna Ibu Kecamatannya Manna. Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 suku bangsa di kabupaten Bengkulu Selatan adalah Serawai

¹⁰ <http://ragambengkulu.blogspot.com/2010/01/sejarah-bengkulu-selatan-ragam-budaya.html>

(76,87 %), Pasemah (13,39 %), Jawa (2,89 %), Minangkabau (2,21 %), Melayu (1,06 %), Sunda (0,95 %), Batak (0,73 %), dan lainnya (1,89 %).¹¹

Bahasa penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari dua bahasa asli, yaitu bahasa Pasemah dan bahasa Serawai. Bahasa Pasemah banyak dipakai dari Muara Sungai Kedurang sampai dengan perbatasan Kabupaten Kaur. Mayoritas penduduk Bengkulu Selatan menggunakan bahasa Serawai. Pada setiap kecamatan, logat ataupun dialek bahasanya berbeda-beda, tetapi disamping ada perbedaan, lebih banyak persamaannya. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kecamatan yang ada di Bengkulu Selatan selalu ada suku bangsa Serawai. Sampai saat ini khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan suku bangsa Serawai telah bercampur baul dengan penduduk suku bangsa lain, terutama di kota Manna. Bukan hanya suku bangsa Serawai yang mendiami Bengkulu Selatan, akan tetapi juga ada suku bangsa Minangkabau, Jawa, Batak, Sunda dan suku bangsa lainnya, mereka telah berbaul satu sama lain.

Berdasarkan hasil pencatatan sensus tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 142.722 jiwa terdiri dari 71.896 laki-laki dan 70.826 perempuan. Hasil sensus penduduk tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan masih bertumpuk pada kecamatan Manna yakni sebesar 18,87 persen. Kemudian diikuti oleh kecamatan Pino Raya 12,79 persen, kecamatan Pasar Manna sebesar 12,25 persen, kecamatan Segimin 10,46 persen, kecamatan Manna 9,16 persen sedangkan yang lainnya dibawah 8 persen.

Sementara kecamatan Ulu Manna, kecamatan Kedurang Ilir dan Bunga Mas adalah tiga kecamatan dengan urutan terbawah memiliki jumlah penduduk paling sedikit, masing-masing berjumlah 7.217 jiwa, 7.205 jiwa dan 5.806

¹¹ Thamrin Fajar, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Bengkulu. 1996, hlm. 168

jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 1.18,10 Km persegi, Kabupaten Bengkulu Selatan yang didiami oleh 142.722 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk bumi Sekudang adalah sebanyak 120 orang. Kecamatan Pasar Manna adalah yang terpadat yaitu 2.792 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Kota Manna 902 jiwa per kilometer persegi dan kecamatan Manna yaitu 358 jiwa per kilometer persegi. Berikut persebaran penduduk di per kecamatan di Bengkulu Selatan

Tabel 1 : Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan di Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1.	Manna	6.479	6.594	13.073
2.	Kota Manna	13.404	13.533	26.937
3.	Kedurang	5.254	5.031	10.285
4.	Bunga Mas	2.900	2.906	5.806
5.	Pasar Manna	8.680	8.799	17.382
6.	Kedurang Ilir	3.684	3.521	7.205
7.	Seginim	7.561	7.367	14.928
8.	Air Nipis	5.247	5.046	10.293
9.	Peno	5.634	5.607	11.166
10.	Peno Raya	9.322	8.936	18.258
11.	Ulu Manna	3.731	3.486	7.217
	Jumlah	71.896	70.826	142.722

Sumber: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan 2010

C. Sejarah Kota Manna

Sejarah perkembangan kota Manna cukup sulit untuk ditelusuri, karena arus sejarah bergerak secara terus menerus sulit untuk memberikan pijakan awal dimana pertumbuhan kota-kota dimulai. Akan tetapi sebelum itu, akan digambarkan sedikit mengenai asal usul penamaan 'Manna'.

Ada dua versi mengenai sejarah kota Manna. Versi pertama mengatakan bahwa ada seseorang (yang namanya

tidak diketahui) datang dari Sumatera Barat yang terdampar di daerah Pasar Bawah yang sekarang. Orang tersebut mencari anaknya yang sudah lama meninggalkan Padang dan tidak kembali, anaknya tersebut tidak diketahui keberadaannya. Karena sang ibu sudah sangat rindu dengan anaknya yang pergi tidak tahu rimbanya. Akhirnya dengan modal keberanian ibu atau orang ini berjalan menyusuri pantai arah selatan, karena anaknya pergi menuju arah selatan. Lama berjalan akhirnya sang ibu tiba di suatu tempat (sekarang tempat tersebut bernama pantai Pasar Bawah). Kemudian ia bertemu dengan penduduk setempat dan bertanya kepada penduduk di daerah pantai Pasar Bawah mana anaknya ? artinya dimana anaknya. Jadi kata "Mana" berasal dari "Mana anak". Namun lama kelamaan tempat/daerah sang ibu bertanya itu dinamakan oleh penduduk setempat dengan sebutan "Kota Manna".

Cerita ini memang sulit untuk dibuktikan, dimana tempat terjadinya peristiwa itu, kapan waktu terjadinya apalagi bukti sejarahnya secara nyata tidak dapat dibuktikan, dan hanya merupakan cerita dari orang perorangan yang berkembang di Bengkulu Selatan. Perkiraan cerita ini terjadi di daerah Pasar Bawah. Pasar Bawah dahulunya adalah daerah yang dinamakan kota Manna dan di daerah ini penduduk Bengkulu Selatan berkembang ke daerah di sekitarnya. Pasar Bawah berada di tepi pantai yang diperkirakan dari daerah ini persebaran penduduk di mulai.

Versi kedua mengatakan kata Manna berasal dari bahasa Arab yang artinya "harapan yang besar, harapan yang maju, suatu kota yang akan jaya, yang akan menang". Dimana harapan yang akan maju dan yang akan menang itu dibawah oleh pedagang Gujarat yang disetujui oleh kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Manna artinya Kota atau tempat harapan yang akan maju. Namun cerita ini juga sulit untuk dibuktikan, apalagi pembuktian melalui peninggalan masa lalunya.¹²

¹² Catatan Eris Harjohan " Sejarah Lahirnya Kota Manna Agustus 2003

Jika disimak beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, jika pusat keramaian pertama kalinya di daerah Bengkulu Selatan adalah daerah Pasar Bawah (yang sekarang menjadi kawasan objek wisata Pasar Bawah). Hal ini sangat memungkinkan, karena sampai sekarang di daerah ini ada dijumpai yang diperkirakan bekas kota yaitu peninggalan Belanda berupa bangunan/tempat penyimpanan uang. Bangunan ini berbentuk persegi empat tinggi lebih kurang tiga meter. Fungsi bangunan ini diperkirakan tempat penyimpanan uang oleh pembesar Belanda di Bengkulu Selatan.

Keberadaan bangunan ini membuktikan bahwa di daerah pantai Pasar Bawah ini pernah ada tempat aktivitas masyarakat. Namun bukti-bukti ke arah itu semakin sulit untuk ditemukan, yang ada hanyalah sebuah bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri tegak dengan kokoh. Berdasarkan pengamatan di lapangan daerah Pasar Bawah ini sepertinya semakin lama semakin terkikis oleh abrasi pantai.

Peninggalan lain yang dapat juga dijadikan sebagai petunjuk, yang membuktikan bahwa di daerah Pasar Bawah ini sebagai daerah yang pertama kali tempat berkembangnya penduduk di daerah Bengkulu Selatan adalah sebuah bangunan rumah ibadah. Jika kita perhatikan di daerah manapun di Indonesia ini, daerah yang paling berkembang pertama kalinya adalah daerah pesisir pantai, hal itu sangat memungkinkan, sebab zaman dahulu sarana transportasi adalah melalui sungai atau laut. Tidak heran jika daerah-daerah yang dilewati oleh kapal-kapal pedagang menjadi daerah yang ramai dikunjungi oleh para pedagang.

Sebagian dari para saudagar yang berkunjung ke Bengkulu Selatan, disamping berprofesi sebagai saudagar diperkirakan juga sebagai da'i atau penyebar agama Islam. Berdasarkan informasi dari penduduk setempat mengatakan bahwa masjid yang ada di daerah Pasar Bawah bernama masjid Al Manar adalah salah satu masjid yang tertua di Bengkulu Selatan. Diperkirakan masjid ini dibangun pertamakali oleh saudagar-saudagar yang berkunjung ke

daerah ini. Masjid Al Manar adalah Satu-satunya masjid yang ada di Pasar Bawah. Masjid ini didirikan oleh Syech Mohammad Amin. Ia adalah seorang tokoh yang semasa hidupnya menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Bengkulu Selatan. Setelah wafat ia dikuburkan di dekat masjid ini. Sampai saat ini makamnya banyak dikunjungi oleh para peziarah khususnya dari daerah Bengkulu.

Mengenai perkembangan kota Manna yang belokasi di Pasar Bawah ini tidak banyak diketahui. Berdasarkan catatan dari Erlis Harjohan mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan Belanda, Jepang sampai terbentuknya Kabupaten Bengkulu Selatan daerah Pasar Manna (sekarang Pasar Bawah) tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam sejarah. Berikut perkembangan Pasar Bawah dari zaman pemerintahan Belanda sampai awal kemerdekaan.

1. Penjajahan Belanda

Pada zaman penjajahan Belanda Pasar Manna (Pasar Bawah) diperintah oleh seorang *Controleur*. Pada tahun 1854 Pasar Manna mengalami perubahan, dimana Belanda mulai memberikan sistem pemerintahan pertama kali masih diangkat oleh Belanda dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan Belanda sebelumnya. Pada awalnya luas wilayah Pasar Manna hanya Pasar Bawah kemudian menjadi lebih luas, meliputi beberapa pemangku, hal ini disebabkan oleh adanya sistem pemerintahan Pesirah dan Marga.

Marga adalah pemegang pemerintah yang ada di Pasar Manna dengan gelar Datuk. Pesirah adalah gelar pemegang kekuasaan di pedesaan. Marga membawahi beberapa pemangku sedangkan Pesirah membawahi beberapa desa. Pesirah dan Marga dibentuk hampir bersamaan, sedangkan Datuk Kepala Marga Pasar Manna pertama kali diangkat pada tanggal 1 April 1854 yang bernama Jenu Alam seorang utusan yang berasal dari kerajaan Pagaruyung untuk menguasai Bengkulu Selatan. Ia mendapat gelar dari keturunan kerajaan Pagaruyung yang

bernama Rajo Bandaro. Setelah ia diangkat memimpin pemerintahan Kepala Marga di Pasar Manna dengan gelar Datuk, ia menjadi Rajo di Pasar Manna beliau disebut juga dengan sebutan Datuk Bunguak.

Setelah beberapa lama memimpin kepala Marga Pasar Manna beliau menunaikan ibadah Haji ke Mekkah, setelah pulang dari menunaikan ibadah Haji beliau mendapat gelar Sultan Badaruddin. Pada saa itu wilayah Marga Pasar Manna meliputi tujuh Pemangku, setiap Pemangku dipimpin oleh Depati Mangku. Tujuh Pemangku tersebut adalah: 1) Pemangku Pasar Bawah, 2) Pemangku Belakang Gedung, 3) Pemangku Ketapang Besar, 4) Pemangku Pasar Baru, 5) Pemangku Kampung Baru, 6) Pemangku Padang Sialang, 7) dan Pemangku Pasar Mulia.

Sedangkan yang pernah memegang Kepala Marga Pasar Manna yaitu:

- 1) Datuk Bunguak
- 2) Datuk M. Nazir
- 3) Datuk Bilal Salam
- 4) Datuk Merah Kawi
- 5) Datuk M. Nazir
- 6) Datuk Ma'arus.
- 7) Datuk Syamsudin Marasin.
- 8) Datuk Tajudin Kawi
- 9) Datuk H. Hamid Marasin.¹³

2. Pendudukan Jepang

Sama seperti daerah lain, pada zaman Jepang Manna tidak mengalami perubahan baik wilayah maupun sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada waktu itu tetap menggunakan sistem Marga, namun tidak berjalan dengan baik. Selama pendudukan Jepang masyarakat di kota Manna juga dikuasai oleh Jepang dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Kota Manna

¹³ Catatan Erlis Harjohan

juga dijadikan tempat pusat latihan para pejuang dan pemuda yang tergabung dalam Pembela Tanah Air. Zaman Pendudukan Jepang ini kota Manna tidak mengalami kemajuan.

3. Awal Kemerdekaan

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sistem Pesirah dan Marga masih berlaku di Pasar Manna. Namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada tahun 1981 Pemangku diganti menjadi kelurahan dan wilayah Pasar Manna tidak mengalami perubahan secara spesifik.

Adapun arti kelurahan menurut UU No. 15 tentang pemerintahan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Desa artinya suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Pada tahun 1981 kecamatan Manna terdiri dari dua kecamatan, kecamatan induk dengan ibu kota kecamatan di Desa Kayu Kuniyit pada tahun 2001 Desa Kayu Kuniyit menjadi kelurahan. Kecamatan induk wilayahnya: Ke selatan sampai Muara Kadurang berbatasan dengan kecamatan perwakilan Kedurang. Ke Utara sampai ke jembatan Air Manna berbatasan dengan kecamatan perwakilan Pasar Baru Manna. Sebelah barat dengan Lautan Hindia, Desa Trulung, ke timur sampai Air Delengau berbatasan dengan kecamatan perwakilan Sugimin. Pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan pada tahun 2001 kecamatan induk Manna dengan kedudukan ibu kota kecamatan di Kayu Kuniyit dengan luas wilayah sama dengan wilayah sebelumnya. Kecamatan kota Manna menjadi Kota Manna dengan wilayah meliputi: barat

sampai Lautan Hindia, timur sampai desa Gelumbang kecamatan Pino Masat, ke Utara sampai Jembatan Air Manna.

Wilayah kota Manna dengan 11 kelurahan 6 Desa yang terdiri dari: 1) Kelurahan Pasar Bawah 2) kelurahan Belakang Gedung, 3) kelurahan Ketapang Besar, 4) kelurahan Pasar Baru, 5) kelurahan Kampung Baru, 6) kelurahan Padang Sialang, 7) kelurahan Pasar Mulia, 8) kelurahan Tanjung Mulia, 9) kelurahan Kota Medan, 10) kelurahan Gunung Mesir, 11) dan kelurahan Gunung Ayu. Sedangkan Desa 1) Desa Tebat Kubu, 2) Desa Padang Niur, 3) Desa Gelumbang, 4) Desa Batu Lambung, 5) Desa Batu Kuning, 6) dan Desa Pagar Dewa.¹⁴

d. Berita Tentang Kemerdekaan di Bengkulu Selatan

Peranan masyarakat Bengkulu Selatan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia khususnya di daerah Bengkulu Selatan, tidak banyak diketahui, karena masih kurangnya literatur maupun informasi mengenai Bengkulu Selatan zaman penjajahan Inggris dan Belanda. Apalagi zaman penjajahan Inggris dan Belanda di daerah Bengkulu lebih banyak terpusat di kota Bngkulu, ditambah lagi akses informasi ke daerah zaman itu sangat sulit.

Berita tentang Proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Bengkulu, baik langsung maupun tidak langsung dan tidak serentak. Berita kemerdekaan itu diketahui oleh masyarakat Bengkulu ada yang melalui perantara orang perorangan dan ada juga yang didapat dari berita di koran. Antara lain pada tanggal 3 September 1945 salah seorang bekas pemimpin *Gyugun* bernama Rahim Damrah datang dari Kota Palembang dan menginap di rumah Hadis Lani di Bengkulu. Ia membawa dua lembar surat kabar "Palembang Simbun" yang terbit di Kota Palembang. Di dalam surat kabar itulah terdapat berita tentang proklamasi kemerdekaan

¹⁴ Catatan Erlis Harjohan

Indonesia, yang diucapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.¹⁵

Beberapa bulan setelah itu tepatnya tanggal 2 Oktober 1945 diterima kabar dari Bandung yang mengatakan bahwa di seluruh pulau Jawa merah putih telah berkibar baik di kantor-kantor pemerintah, swasta, maupun di rumah-rumah penduduk. Selanjutnya tanggal 3 Oktober 1945 diterima pula telegram dari M.T. Hasan, Gubernur Sumatera yang berisi selain dari pengangkatan Ir. Indera Caya sebagai Residen Bengkulu, juga perintah untuk mengibarkan bendera merah putih. Keesokan harinya tanggal 4 Oktober 1945, dimulai pukul 07.00 pagi bendera merah putih dikibarkan di Kota Bengkulu.¹⁶ Kemudian pengibaran bendera merah putih diikuti oleh daerah-daerah lain seperti di Kepahiang, Curup, Muara Aman, Manna, dan lain-lain.

Pada tanggal 3 Oktober 1945 jumlah bendera merah putih yang dipasang di rumah-rumah penduduk sudah semakin banyak di kota Curup. Pada tengahmalam keadaan agak memanas, karena dari pihak kepolisian Jepang melarang memasang bendera tersebut. Sementara di dalam kawat Gubernur Sumatera pada tanggal 3 Oktober 1945, diperintahkan agar bendera Merah Putih dikibarkan secara keseluruhan pada tanggal 4 Oktober 1945 dimulai pukul 7.00 pagi. Semua anggota PKR ditugaskan untuk menggerakkan dan melaksanakan perintah dari Gubernur tersebut. Secara serentak para pemuda, terutama yang tergabung di dalam PKR berpencah sampai ke pelosok-pelosok, dan menaiki satu persatu rumah-rumah penduduk dengan satu pesan agar besok pagi menaiki bendera Merah Putih di depan rumah, hal ini dilakukan sampai menjelang waktu subuh.¹⁷

¹⁵ M.Z. Rani, *"Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu"*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.48

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50

Keesokan harinya pimpinan PKR tertinggi, Nawawi Manaf berserta beberapa pejuang lainnya., mereka mendatangi rumah Syucokang Bengkulu, Z. Inomata di tempat kediamannya. Sesudah melakukan pembicaraan, setelah itu langsung menurunkan bendera Jepang yang masih terpasang di halaman gedung keresidenan, dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih

Berita kemerdekaan di Bengkulu Selatan sampai di kota Manna dibawah pertama kali oleh Buldani Masik, seorang bekas komandan regu Senapan Mesin di Markas Besar *Gyugun* di Pagar Alam, karena berita tentang kemerdekaan itu sudah sampai ke kota Manna, maka masyarakat sudah diperintahkan untuk mengibarkan bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing. Kemudian tanggal 30 Agustus 1945 diadakan musyawarah di Kota Manna dengan para bekas *Gyugun* dan *Heiho*. Hasil dari pertemuan itu terbentuklah suatu organisasi yang diberi nama Pembela Tanah Air (PTA). Susunan dan personalia dari organisasi ini adalah sebagai berikut:Ketua dipegang oleh Buldani Masik, Wakil ketua oleh Merahnuddin Taya, Bidang Politik oleh Haji Abdul Sahid Ismail Rahman, dan Barzian.

Sedangkan pembantu-pembantu terdiri dari M. Taha, Umar Gafur, Maskasa, Ubadi, Jahidin, Tajudin Sabri, Tahir Yahya, Jakfar Semau, Tukiran, Sulik, Chalik Bangsa, Zakaria Mahyat, Hamsan Juriya, Rani Tahir, Yusirana, Majid Padang Manis, Mustafa Padang Guci, dan Janusi Suul Senapan.¹⁸

Pada awal kemerdekaan di kota Manna banyak terjadi insiden dan perundingan dengan pihak tentara Jepang, karena Jepang masih belum mengakui Indonesia telah merdeka. Sebagian dari mereka masih merasa berkuasa. Pada tanggal 10 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pihak PKR dan tentara Jepang. Pertempuran ini dipimpin sendiri oleh PKR Manna, Rahim Damrah, Buldani Masik, Merahnuddin Taya, H. A. Said, Ismail Rahman, Berzian dan yang lainnya. Dalam pertempuran tersebut terdapat beberapa

¹⁸ *Ibid.*

tentara Jepang yang tewas, dan senjatanya dapat dirampas oleh anggota PKR Manna.

Sebagai kelanjutan dari pertempuran yang terjadi di Manna, pada tanggal 13 Oktober 1945 di kota Manna diadakan suatu perundingan antara anggota PKR Manna dan pihak Jepang. Perundingan tersebut dipimpin oleh Demang Merahmat dan Abdullah, Pasirah Kedurang. Namun perundingan itu berakhir dengan kegagalan. Untuk mengatur strategi dalam menghadapi Jepang pihak PKR Manna mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut dapat ditetapkan beberapa kesepakatan antara lain:

1. Anggota PKR yang telah diketahui oleh pihak Jepang, yang ikut dalam pertempuran pada tanggal 10 Oktober 1945, selanjutnya harus bergerak di bawah tanah, dengan arti kata bergerak terus melawan Jepang secara tidak resmi.
2. Supaya tidak diketahui Jepang anggota pengurus PKR, susunan pengurus anggota PKR harus dibentuk baru. Dalam keputusan rapat itu pengurus yang baru terpilih itu diketuai oleh Bahmadan Rustam dengan anggotanya: Jamaluddin, Z.A. Syahril, Rahim Harun, Alimudin, Aidin, Junusi, Suardi Naum, dan lain-lain.¹⁹

C. Potensi Wisata Sejarah dan Budaya

Dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 4 kepariwisataan antara lain disebutkan bahwa secara garis besar objek wisata dan daya tarik wisata terdiri atas: 1) Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, flora, dan fauna, 2) hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah dan purbakala atau benda cagar budaya, seni budaya, wisata argo, wisata buru pertualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60

²⁰ Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata. Jakarta 1990.

Berkaitan dengan objek dan daya tarik wisata yang berwujud budaya dan sejarah, Indonesia pada dasarnya memiliki kekayaan sumber budaya dan sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata. Sumber budaya tersebut tidak lain merupakan wujud dan isi kebudayaan, baik yang bersifat budaya dan non material maupun budaya material.

Menurut Koentjaraningrat, 1990 kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lebih lanjut kebudayaan tersebut dapat berwujud dalam tiga wujud, yaitu (1) Ide-ide, gagasan, nilai, norma dan sebagainya (2) kompleks aktifitas dan tindakan berpola: dan (3) benda-benda hasil karya manusia. Dari tiga wujud kebudayaan tersebut melahirkan tujuh unsur kebudayaan yang merupakan isi kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian.

Bedasarkan konsep kebudayaan tersebut, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan dari suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat menyaksikan dan menikmati objek-objek aktivitas budaya. Objek-objek aktivitas budaya tersebut bersifat empiris, sehingga dapat dinikmati melalui panca indra terutama indra penglihatan. Objek-objek budaya berupa benda merupakan hasil aktivitas manusia, baik dari masa lampau maupun masa sekarang yang memiliki daya tarik.(Ahimsa Putra, 1999:31).

Kebudayaan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Wisata budaya dapat dijadikan sebagai basis pengembangan budaya bendawi dari masa lampau. Budaya pisik di masa lampau, khususnya yang berupa benda cagar budaya, merupakan objek yang potensial untuk dijadikan sebagai objek dan daya tarik wisata. Lebih-lebih lagi benda cagar budaya tersebut

bersifat monumental, unik, khas dan langka, maka akan memiliki daya tarik wisata yang tinggi.²¹

Berbagai jenis dan bentuk benda cagar budaya yang berpotensi untuk dijadikan sebagai objek dan daya tarik wisata, secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu *relics* monument. Relics adalah benda buatan manusia yang relatif kecil dan dapat dipindah-pindah, misalnya arca, perhiasan, alat rumah tangga dan sebagainya. Monumen adalah benda buatan manusia yang tidak dapat dipindah dari kesatuan ruang atau tempatnya. Misalnya candi, masjid kuno, gereja kuno, benteng pertahanan, makam, rumah, dan berbagai bentuk bangunan kuno lainnya.

Potensi- potensi wisata di Indonesia ini disadari oleh pemerintah dan dijadikan sebagai dasar dan tujuan kepariwisataan nasional, yaitu terwujudnya kepariwisataan nasional yang: 1) Menjaga kebersamaan, kemandirian, keutuhan bangsa dan wilayah, 2) memupuk rasa cinta tanah air, persatuan, kebhinekaan dan multikultural, 3) pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 4) meningkatkan persahabatan antar suku bangsa dan perdamaian.²²

Bengkulu Selatan memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata, baik wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata alam. Dari sisi wisata sejarah, Bengkulu Selatan memiliki berbagai peninggalan sejarah. Peninggalan tersebut diantaranya peninggalan Situs, seperti Situs Pagar Dewa, Situs Sukarami, Situs Nagarantai, Situs Massat, Situs Kotabumi dan Situs Sabilo. Situs-situs ini tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

²¹ Marsis Sutopo, *Potensi Benda Cagar Budaya di Sumatera Barat dan Pemanfaatannya untuk Pariwisata*. Makalah disampaikan dalam Dialog Sejarah dan Budaya bagi Pariwisata di Padang, tanggal 10 Juni 2002, hlm 12

²² Teguh Hidayat. *Benda Cagar Budaya Untuk Pariwisata*. Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi Benda Cagar Budaya di Padang tanggal 28 Oktober 2010

Selain dari Situs, Bengkulu Selatan juga memiliki peninggalan sejarah lainnya diantaranya, Bunker Jepang, Mariam *Honisuit*, Mariam Anak Jina, Batu *Goment*, Makam Syech Muhammad Amin dan Masjid Al Manar. Begitu juga dengan potensi budaya non bendawi dapat dilihat di dalam bentuk upacara tradisional seperti yang selalu diadakan di Bengkulu Selatan, yaitu upacara Dundang Padi, dan tari-tarian seperti tari Seni Dendang, Tari *Andun* (*Gegerit*) dan Tari Persembahan. Bengkulu Selatan juga memiliki objek wisata alam yang bisa dikembangkan untuk tujuan wisata. Antara lain wisata alam yang sangat baik untuk dikembangkan adalah Pantai Pasar Bawah, Pantai Muara Kedurang, Pantai Ketaping, Pantai Bengkinang, Pantai Mengkudun, Pantai Pino Guntung, Pantai Selali, Air Terjun Geluguran, Danau Ulu Seginim, Tebat Rukis, Bendungan Air Nipis dan objek alam lainnya.

Seiring dengan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kaitanya dengan pengembangan sektor kepariwisataan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Bengkulu Selatan mempunyai banyak objek wisata sejarah dan budaya, jika hal ini dikelola secara baik akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

1. Wisata Sejarah

a. Meriam *Honisuit*

Mariam *Honisuit* terletak di bundaran kantor Bupati Bengkulu Selatan. Jika kita akan berkunjung ke kantor Bupati Bengkulu Selatan, maka kita akan menjumpai meriam *Honisuit*. Berdasarkan keterangan dari Kapala Dinas Persenibut Bengkulu Selatan Pada awalnya meriam ini di datangkan tentara Jepang melalui Tanjung Sakti, ditempatkan di kelurahan Belakang Gedung kecamatan Pasar Manna. Kemudian dengan alasan keselamatan dan kelestarian

meriam ini dipindahkan. Pemindahan meriam ini berkerjasama dengan BP3 Jambi dan dibantu oleh Kodim 0208 Manna, meriam tersebut di pindahkan ke bundaran kantor Bupati Bengkulu Selatan tahun 2008.

Meriam *Hunisuit* ini buatan Inggris yang dibawah oleh Jepang dari Singapur dan masuk ke Indonesia, khususnya Bengkulu pada tahun 1943. Meriam ini berangka tahun 1901 dan berjenis meriam Bumbung yang terbuat dari logam besi dengan panjang 7,11 meter. Diperkirakan meriam ini adalah meriam yang terbesar dan terpanjang di Asia. Jepang membawa meriam ini ke Bengkulu tahun 1942, adalah merupakan persenjataan yang dipakai tentara Jepang untuk mempertahankan daerah kekuasaannya di Bengkulu Selatan dari serangan musuh yang berfungsi menangkal serangan kapal perang dan mencegah pendaratan musuh melalui pantai Pasar Bawah. Berikut profil meriam *Honisuit*, yakni Buatan Inggris, Kaliber 19,01 cm, berat siklus: 2,2 ton, Nomor LarasB.L.O.IN.VIRE, dan Peninggalan zaman Jepang.

b. Makam Seych Muhammad Amin dan Masjid Al Mannar

Seych Muhammad Amin adalah seorang tokoh agama Islam di Bengkulu Selatan. Tidak diketahui secara pasti tahun berapa beliau datang ke Bengkulu Selatan dan dari mana daerah asal Sech Muhammad Amin. Di Bengkulu Selatan nama Seych Muhammad Amin tidak asing lagi masyarakat, karena tokoh ini semasa hidupnya menyebarkan ajaran Islam dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Bengkulu Selatan.

Sama halnya seperti daerah lainnya, biasanya daerah pesisir lebih maju dan berkembang bila dibandingkan dengan daerah pedalaman. Beberapa informasi yang didapatkan bahwa daerah pantai yang disebut dengan Pasar Bawah sekarang, adalah daerah yang mula-mula di masuki para saudagar melalui jalur laut, yang tentunya bagi sebagian ulama adalah tempat penyebaran agama Islam. Begitu juga halnya dengan Syech Muhammad Amin, pertama kali

menginjakan kakinya di daerah Bengkulu Selatan adalah di daerah pantai yang sekarang di sebut dengan Pasar Bawah.

Pada awal kedatangannya di kabupaten Bengkulu Selatan, Seych Muhammad Amin mendirikan pondok sebagai tempat menginap di sekitar Pasar Bawah Bengkulu Selatan. Pondok tempat tinggalnya sekaligus sebagai tempat anak muridnya mengaji dan juga mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya. Perkembangan selanjutnya Syech Muhammad Amin mendirikan dan membangun masjid yang diberi nama Masjid Al Mannar. Masyarakat di sekitar Pasar Bawah melaksanakan aktifitas beribadah. Setelah Syech Muhammad Amin wafat ia dimakamkan di komplek masjid Almanar. Saat ini makam tersebut banyak dikunjungi oleh para peziarah, baik dari masyarakat Bengkulu Selatan maupun dari daerah lain. Tujuan para peziarah adalah untuk mengenang jasa dan pengebdian Seych Muhammad Amin dalam menuntun masyarakat Bengkulu Selatan kepada jalan yang benar.

c. Meriam Kecepek

Dalam perang kemerdekaan para pejuang di Bengkulu, khususnya di Bengkulu Selatan telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai tahun 1950. Dimana pada masa perang kemerdekaan para pejuang di Bengkulu Selatan telah berferan aktif, bahkan dapat menciptakan berbagai senjata seperti *Landmijin*, Garanat Bulu Ayam, Bom Gantung dan lainnya. Senjata-senjata ini adalah rakitan para pemuda dan pejuang yang rata-rata mereka berumur antara 20-25 tahun. Mereka melawan serangan serdadu-serdadu Belanda dengan senjata yang serba otomatis dan modern pada saat itu. Antara lain senjata buatan para pemuda pejuang di Bengkulu Selatan adalah Meriam Kacepek

Ide atau inspirasi pembuatan Meriam Kecepek ini adalah dengan dilatar belakangi oleh sudah adanya senjata

sebelumnya dengan nama Senapang Lantak. Senapang Lantak diciptakan oleh nenek moyang pada ratusan tahun yang lalu. Dimana pada saat itu Senapang Lantak dipergunakan oleh nenek moyang atau masyarakat sampai hari ini sebagai penembak binatang-binatang liar di hutan-hutan seperti Harimau, Rusa, Beruang, Babi Hutan dan lain-lain. Namun setelah menghadapi penjajah senapang ini dimodifikasi yang akan digunakan untuk melawan penjajah. Pada umumnya jenis senjata ini dibuat di dusun-dusun yang ada tukang besinya di sekitar Bengkulu.

Keterangan pembuatan Meriam Kacepek:

1. Laras

Dibuat dari potongan tiang listrik dan telepon yang pada waktu itu karena tidak ada bahan baku untuk pembuatan senjata, maka tiang listrik yang dirobohkan dan diambil bagian ujungnya kira-kira satu setengah meter panjangnya.

2. Kaki

Untuk membuat kaki Meriam Kecepek, dibuat/ditempa sendiri dari besi oleh tukang-tukang besi dengan cara diklem kemudian dibautkan sekuat-kuatnya pada laras atau badanya (dua dipasang di depan satu di belakang) untuk dikuburkan ke dalam tanah pada saat ditembakkan.

3. Pelatuk

Pelatuk dibuat dari sepotong besi sebesar telunjuk jari. Lalu dibengkokan untuk dibautkan pada laras bagian belakang atau punggung, dengan dipasangkan sebuah per yang kencang ke punggung laras. Per ini juga berfungsi sebagai penarik platuk untuk memecahkan kep mesiu yang sudah diletakan di lobang sebesar lidi pada punggung laras.

4. Penyanggah

Penyanggah dibuat dari sepotong kayu untuk penunjang platuk dari atas bunggung laras dengan diikat tali sepanjang 30 dan 50 meter (tali dari ijuk atau kawat kecil), tali ditarik fungsinya untuk melepaskan penyangga pada waktu pelatuk memecahkan ke mesiu.

5. Kep Mesiu

Kep mesiu dibuat dari kertas timah tipis untuk pembungkus mesiu yang sudah dikeringkan, sehingga dapat dipecahkan dalam waktu seketika. Untuk membakar mesiu di dalam badan laras melalui lobang kecil yang sudah dibuatkan pada punggung laras.

6. Isi Mesiu

Mesiu dibuat dari kotoran atau tahi Kambing yang sudah dikeringkan, kemudian dicampur dengan alat-alat kimia tentu hal ini dikerjakan dan diolah sedemikian rupa oleh ahlinya. Sedangkan cara mengisinya ke dalam laras adalah dengan memasukkan dulu sabut-sabut kelapa kering dengan diiringi mesiu-mesiu yang sudah dicampur dengan baut-baut dan pecahan besi atau paku.

7. Daya Tembak /Jangkauan

Kekuatan mesiu dapat mendorong keluar peluru-pelurunya dari badan laras sejauh lebih kurang 1000-2000 meter, hal ini sudah pernah diuji cobakan di lapangan terbuka antara lain di Padang Panjang (bekas lapangan terbang buatan serdadu Jepang di Manna). Pernah pada suatu ketika karena kurangnya keseimbangan antara isi dengan badanya, sehingga badanya /laras terlepas dari kakinya dengan menendang sejauh lebih kurang 100 meter ke belakang.

8. Tempat Pembuatan

Meriam Kecepek dibuat di dusun-dusun, terutama dusun yang mempunyai *Pusin* atau tukang besi. Antara lain dusun yang mempunyai tukang besi adalah dusun Kayu Kunyit Manna, dusun Masmabang, Tais dan sekitarnya. Sedangkan pembuatan Mesiu dibuat dan di olah oleh seluruh lapisan masyarakat dari dusun-dusun yang ada di sekitar Bengkulu Selatan.²³

d. Situs-Situs/ Menhir

Keberadaan menhir di daerah Bengkulu tidak terlepas dari sejarah bangsa Melayu Bengkulu. Mengenai sejarah bangsa Melayu Bengkulu pada garis besarnya berhubungan erat dengan sejarah kedatangan (migrasi) Orang Melayu secara keseluruhan. Penghunian wilayah Bengkulu tentunya sudah terjadi pada masa prasejarah dengan berbagai bukti yang meyakinkan seperti alat batu beliung persegi dan peninggalan batu-batu besar (megalitik).

Khusus mengenai tradisi megalitik yang menghasilkan menhir (batu tegak), dolmen (meja batu), sarkofagus (kubur batu), dan sebagainya, diduga berkaitan erat dengan tradisi megalitik yang berkembang di Sumatera Bagian Selatan. Ada dugaan berkaitan dengan legenda Si Pahit Lidah atau disebut juga dengan Serunting Sakti. Tokoh ini disebut Si Pahit Lidah, karena ia memiliki kekuatan pada lidahnya. Semua yang terkena jilatan lidahnya atau kutukannya akan berubah menjadi batu. Sebagai contoh menurut kepercayaan masyarakat Pasemah, arca batu yang banyak dijumpai disana terjadi akibat kutukan Si Pahit Lidah. Sebuah patung di daerah Tinggi hari disebut oleh penduduk setempat sebagai "Batu Putri". Menurut kisahnya, sang putri merasa terhina sewaktu Pahit Lidah menanyakan padanya

²³ Sjamsoeddin Yauw. "*Meriam Kecepek. Khusus untuk Pejuang-Pejuang 45*" Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Bengkulu. Manna 1980, hlm 63-64

kemana ia akan pergi. Sang Putri tidak menjawab teguran tersebut, Pihit Lidah tersinggung oleh sikap seperti itu, maka dikutuklah sang Putri menjadi batu. Seenggok batu yang terletak di samping Batu Putri dipercaya sebagai keranjang yang dibawah sang Putri ketika itu.²⁴

Peninggalan “kutukan” si Pahit Lidah di daerah Bengkulu cukup banyak dijumpai, misalnya Pasar Karang Sabung (Padang Guci, Kaur Utara, Bengkulu Selatan); Perahu Batu (Seluma Bengkulu Selatan dan juga Arga Makmur, Bengkulu Utara); Batu Balai (Lubuk Mumpo, Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong); Batu Bertatah (Aur Gading, Kerkap, Bengkulu Utara; Kursi Batu Si Pahit Lidah (Talang Macang, Lebong Selatan, Rejang Lebong); Batu Sidang (Muara Sungai Ketam, Lebong Utara, Rejang Lebong); Batu Panco (Bermani Teluk Curup, Rejang Lebong; Lesung Batu (Padang Serunian, Talo Bengkulu Selatan) , dan masih banyak yang lainnya. Dari peninggalan-peninggalan tersebut dapat diketahui betapa Si Pahit Lidah dengan kesaktiannya “berkelana” di belantara Sumatera Bagian Selatan, khususnya wilayah Bengkulu sebelah timur dan selatan. Jejak-jejak sumpah itu agaknya sangat berkesan sehingga dapat disaksikan hingga sekarang. Entah kapan dan berapa lama “wisata” Si Pahit Lidah itu akan berlangsung dan entah berapa banyak “korban” sumpah Si Pahit Lidah itu.²⁵

Walaupun pendapat diatas mengatakan bawah tradisi megalitik yang menghasilkan menhir (batu tegak), dolmen (meja batu), sarkofagus (kubur batu), dan sebagainya, diduga ada kaitanya dengan tradisi megalitik yang berkembang di

²⁴ R.P. Soejono (editor), “*Jaman Prasejarah di Indonesia*” dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (editor umum) *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993, hlm. 121.

²⁵ R. Cecep Eka. Permana. “Peninggalan Sejarah Bengkulu: Imajenasi dan Kenyataan”. Makalah disampaikan pada Seminar Sejarah Bengkulu. Bengkulu, 14-18 Agustus 2002, dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. M. Ikram dkk. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2004, hlm. 300.

Sumatera Bagian Selatan, yaitu dengan legenda Si Pahit Lidah atau disebut juga dengan Serunting. Namun secara arkhologis peninggalan ini termasuk salah satu peninggalan sejarah nenik moyang tempu dulu yang perlu dilestarikan. Tinggalan situs-situs/ menhir di Bengkulu Selatan yang ada sekarang yang bisa dikembangkan menjadikan "Wisata Sumpah Si Pahit Lidah" adalah sebagai berikut:

1. Situs Massat

Situs Massat berada di kecamatan Pino, secara geografis Situs Massat berada sekitar titik koordiant 102 U.10'.06"BT dan 04U.33".06" LS, yang merupakan daerah perbukitan dekat dengan aliran Sungai Manna. Temuan arkeologis berupa 2 buah dolmen, 12 menhir, sebuah lumping batu, dan enam buah batu monolith.

2. Situs Kotabumi

Situs Kotabumi terletak di utara desa Sebito dan di sebelah timur Sungai Manna. Desa Sebito mempunyai topografi tanah yang berbukit dan berada disekitar titik koordinat 102U.58".15"BT dan 04U.13".05"LS, adapun temuan megalitiknya:

a) Dolmen berkaki empat.

Dolmen berkaki empat ini terletak di perkebunan kelapa penduduk yang berjarak sekitar 200 meter dari aliran sungai Manna. Dolmen berorientasi Utara-Selatan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 75 cm dan tebal 16 cm.

b) Batu tegak / nisan menhir

Batu nisan menhir terletak 26 meter di sebelah timur laut dolmen, terdiri dari 2 buah makam dengan nisan yang berupa batu tegak berukuran antara 30-40 cm, dengan orientasi Utara-Selatan

3. Lumpang Batu

Lumpang batu terletak sekitar 50 meter diselatan nisan menhir dan sekitar 100 meter dari aliran Air Manna

Secara keseluruhan lumpang batu ini berukuran panjang 49 cm, lebar 45 cm, tebal 45 cm diameter lubang 18 cm.

a) Dolmen berkaki empat

Dolmen berkaki empat dengan ukuran panjang 64 cm, lebar 57 cm, tebal 13 cm. Menurut cerita rakyat, dolmen ini merupakan tempat duduk Poyang Wajau.

b) Tempat Ketunggalan.

Tempat ketunggalan terletak 300 meter sebelah utara aliran sungai Manna. Areal ini merupakan bukit yang terdiri dari barisan batu-batu monolith berbagai ukuran yang berjajar rapi membentuk empat persegi panjang seluas 9,3 meter x 1,4 meter dengan orientasi tenggara-barat laut. Nisan-nisan ini merupakan nisan makam leluhur.

2. Situs Sabilo

Situs ini berada disekitar titik koordinat 102U.11'.06" BT dan 04U.35".11" LS, ditemukan sebuah dolmen berkaki tiga, dengan ukuran meja batunya panjang 120 cm, lebar 26 cm dan tebal 38 cm.²⁶

e. Bunker Jepang

Pasukan tentara Jepang hampir tidak memenuhi hambatan yang berarti ketika memasuki Hindia Belanda. Belanda sama sekali tidak mampu menahan gerak laju tentara Jepang, hingga kemudian harus menyerah tanpa syarat. Belanda kalah total dalam perang melawan Jepang. Hindia Belanda pun jatuh ke tangan Jepang. Demikian juga tanah Bengkulu Selatan harus diserahkan kepada Jepang pada tahun 1943, setelah dikuasai Belanda hampir satu abad.

²⁶ Kristantina Indriastuti, "Tradisi Megalitik Bengkulu". Dalam *Bengkulu Riwayatmulu: Menyikap Tabir MasaLalu mengenali Jatidiri*. Balai Arkeologi Palembang. 2009. hlm. 9

Ketika Jepang telah mendarat di ujung timur Sumatera, pertengahan Pebruari 1942 Residen Bengkulu mendesak kepada Gubernur Jenderal Carda van Stakenbourgh di Batavia, agar Sukarno segera dikembalikan ke Jawa, karena ia menguatirkan akan adanya hasil-hasil yang tidak akan menguntungkan dari perjumpaan Sukarno dengan Jepang. Sukarno sejak tahun 1929 telah menyatakan bahwa Perang Pasifik akan mempercepat kemerdekaan bagi Indonesia.²⁷ Di Bengkulu Sukarno dianggap telah melalui suatu kegiatan yang revolusioner terhadap Belanda, di mana ia telah banyak melakukan pembinaan kearah nasionalisme Indonesia dan sikap anti Belanda. Namun kemudian ia tidak dikembalikan ke Jawa, hanya dipindah ke Padang.²⁸

Setelah terjadi pengalihan kekuasaan, dalam melaksanakan pemerintahan pendudukannya, Jepang memanfaatkan lembaga-lembaga pemerintah yang telah ada, dan mengikuti pelaksanaan pemerintah sebelumnya seperti pada zaman pemerintah Belanda. Di Sumatera pemerintah dibagi menjadi daerah-daerah *shu* (keresidenan), *bunshu* (afdeling /kabupaten), *gun* (onderafdeling/kecamatan) dan *son* (desa). Sumatera di bagi menjadi 10 shu, yang masing-masing di pimpin oleh seorang Chokan (residen/gubernur) yaitu Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung.²⁹

Bertepatan dengan hari lahir Tenno (Kaisar Jepang), 29 April 1945 diumumkan sebuah kreasi buatan Jepang yang aneh, yaitu Gerakan Tiga A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Asia. Tujuan gerakan ini adalah menciptakan suatu Asia Raya dengan pusatnya adalah Jepang. Namun hal ini adalah semata-mata tipuan Jepang untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya, yakni

²⁷ Bmhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm 263

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Akira Oki, *Socisal Change In The West Sumatra Village 1908-1945*, Conberra: Canberra University, 1977, hlm. 209.

menguasai Asia sebagai wilayah pertahanan dan ekonomi mereka.

Pada bulan Agustus 1943 Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang di Tokyo mengeluarkan perintah untuk membentuk tentara sukarela pertahanan militer daerah Selatan. Untuk itu maka dibentuklah *Gyugun*, yang dimulai pertama kali di Sumatera Barat, November 1943.³⁰

Sementara untuk daerah Sumatera bagian Selatan *Gyugun* mulai dibentuk Desember 1943. Untuk keresidenan Bengkulu semua calon *Gyugun* dikumpulkan di Bengkulu, yang gelombang pertamanya, kemudian diberangkatkan 12 Desember 1943 ke pusat latihan di Pagar Alam. Daerah yang mengirim utusan untuk dilatih di Pagar Alam yang dari daerah Bengkulu seperti Kota Bengkulu, Curup, dan Bengkulu Selatan. Beberapa orang calon *Gyugun* itu yang kelak memiliki peranan, baik langsung maupun tidak langsung dalam perjuangan di daerahnya masing-masing.³¹

Setelah pendidikan *Gyugun* dilaksanakan di berbagai daerah, Jepang pada akhirnya juga akan mempersiapkan serangan Sekutu yang entah kapan akan datangnya. Dengan sendirinya anggota *Gyugun* yang telah dilatih, mereka untuk sementara ditugaskan oleh Jepang membuat banyak kubu-kubu pertahanan. Khususnya di Bengkulu, setelah para *Gyugun* mendapatkan pendidikan di Pagar Alam, sepanjang tahun 1944, mereka berkerja membuat kubu-kubu pertahanan dan juga membuat bunker-bunker bawah tanah disepanjang pantai.

Bengkulu Selatan yang sebagian wilayahnya berada di tepi pantai, juga banyak didapati kubu-kubu atau bunker-bunker Jepang yang digunakan sebagai tempat pertahanan. Memilih lokasi ditepi pantai sebagai tempat pertahanan,

³⁰ Audey Kahin, *Struggle for Independence : West Sumatra In the Indonesian Revolution 1945-1950*, Ph. D. Theesis, Cornell University, 1978, hlm.62

³¹ Berdasarkan munaskrip Zainal Arifin Jamil, bekas Letnan Muda *Gyugun*, 1942-1943. (tidak diterbitkan)

merupakan strategi Jepang untuk menghadang musuh yang datang dari laut. Tidak heran jika di Bengkulu Selatan kita dapat bunker- bunker pertahanan Jepang berada di kelurahan Belakang Gedung, Kota Manna. Ada sekitar 10 buah Bunker yang terdapat di kelurahan Belakang Gedung, namun sebagian sudah rusak oleh kondisi air laut.

Bunker-bunker Jepang yang berada di kelurahan Belakang Gedung Kota Manna sebagian sudah ada yang rusak, hal ini disebabkan oleh abrasi pantai yang semakin tidak terkendali, bahkan sudah ada diantaranya bunker yang terjatuh ke laut dan sulit untuk diselamatkan. Juru kunci Bunker Jepang yang berada di Kelurahan Belakang Gedung ini mengatakan bahwa di sekitar kelurahan Belakang Gedung ada lebih kurang 10 buah Bunker, namun tinggal beberapa buah saja lagi, yang lain sudah jatuh ke laut. Jarak antara Bunker dengan tepi pantai hanya lebih kurang 10 meter saja. Kemudian ditambah lagi dengan kondisi teping yang tinggi, membuat pemerintah kesulitan untuk membuat pengaman, agar bunker tidak jatuh ke laut.

f. Rumah Pangeran Melayu

Secara tradisional, masyarakat Bengkulu terbentuk dalam komunitas-komunitas yang berwilayah berdasarkan kekerabatan. Komunitas-komunitas yang bercirikan seperti ini umumnya merupakan konfederasi dari marga-marga ataupun suku-suku. Wilayah-wilayah komunitas di Bengkulu pada umumnya juga menggunakan istilah kerajaan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki adat-istiadat tersendiri, beberapa komunitas yang menggunakan kerajaan antara lain: Sungai Limau, Sungai Hitam, Selebar dan Muko-muko.³²

Para kepala wilayah yang mengepalai dari marga-marga atau suku-suku ini mempunyai sebutan atau gelar yang bervariasi. Sebutan untuk para kepala pribumi Bengkulu

³² *Bahoewa Inila Asal Oesoel*. Naskah Melayu. ML. 143, dalam Agus Setyanto. *"Orang-Orang Besar Bengkulu"*. Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm.55

antara lain adalah *pangeran*, *khalipa*, *pasira*, *pembarap*, *depati*, *mantri*, *pemangku*, dan *ginde*, kecuali gelar sultan untuk wilayah Muko-muko.³³

Bengkulu Selatan yang dulunya merupakan wilayah *Afdeeling* Manna, para kepalanya juga memakai gelar atau sebutan *pangeran* yang berkuasa atas margaya. Di bawah *pangeran* adalah *pemangku*, yang berfungsi sebagai wakil dari *pangeran*. Di bawah *pemangku* terdapat *pembarap*, yang mengepalai para depati (*peroatin*) sebagai kepala dusun. Disamping itu, masih ada dua jabatan lagi, yaitu *datuk* dan *sabendar*. Jabatan *datuk* secara otonomi mengepalai sebuah pasar, sedangkan *sabendar* dipilih oleh *pangeran* dengan kesepakatan *pemangku* dan *pembarap*, yang bertugas untuk melaksanakan dan menyebarkan semua perintah mereka.³⁴

Menurut William Marsden sebetulnya pada masa komponi *pangeran* tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak, kadangkala para *pangeran* menganggap dirinya boleh memerintah sekehendak hati. Akan tetapi, ia tidak dapat melaksanakan kehendaknya ia tidak memiliki tentara tersendiri. Jadi kekuasaannya terbatas. Seringkali mereka tidak mampu menghukum para pemberontak, kecoali dengan cara membunuh mereka. Dalam pengangkatan kepala dusun, *pangeran* tidak dapat berbuat sesuatu selain mengukuhkan pilihan penduduk. Bila sipengeran memutuskan untuk mengangkat kepala dusun dari suku lain atau tempat lain, ia tidak akan dipatuhi. Pangeran tidak memungut pajak dan juga tidak mendapatkan gaji (selain yang ia terima dari komponi) atau keuntungan lain dari penduduk.³⁵

³³ E.A.Francis, *Bengkoelen in 1833*. TIN, 4e Jaargang deel. I. (Batavia: Ter Lands-Drukkerij, 1842) dalam Agus Setyanto "Orang-Orang Besar Bengkulu". Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm.56

³⁴ J.R. Abegg, *Kort Overzicht van de Inrigting des Binnenlandschen Bestuurs, en van de Wetten, Gewoonten en Instellingen in de Afdeeling Ommelanden van berkoelen*. BKL, 4 (Batavia: G. Kholff & Co, 1862, dalam Agus Setyanto "Orang-Orang Besar Bengkulu". Yogyakarta: Ombak, 2006, hlm.66

³⁵ William Marsden. "Sejarah Sumatera". Jakarta: Komunitas Bambu. 2008, hlm. 198

Berdasarkan laporan Perancis, ketika berkunjung ke daerah Manna, ada empat orang pangeran dengan masing-masing marganya. Empat *pangeran* dan marganya itu adalah: 1) *Pangeran* Raja Penghoeloe, dengan marganya Toedjoeh Poedjoekan, 2) *Pangeran* Prabbo dengan marganya Godoun Angang; 3) *Pangeran* Ratoe dengan marganya Katjil, 4) *Pangeran* Nata Diraja dengan marganya Balle Toelang Bankanang. Mereka adalah empat kepala adat yang menjadi anggota dewan pengadilan adat di Manna, bersama para pemangku dan pembarapnya.³⁶

Sampai saat ini di Bengkulu Selatan rumah *Pangeran* masih dapat dijumpai di kota Manna. Berdasarkan keterangan dari salah seorang informan mengatakan bahwa rumah *Pangeran* yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No 45 Kota Manna adalah rumah *Pangeran* Marzuki. Marzuki menjabat sebagai *Pangeran* adalah sekitar tahun 1901-1930. Ia meninggal sekitar tahun 1970-an.³⁷ Rumah *Pangeran* ini adalah satu-satunya di Bengkulu Selatan yang ada sampai saat ini. Kondisi rumah masih baik dan ditempati oleh keluarga *Pangeran* Marzuki.

g. Tempat Pengibaran Bendera Merah Putih Pertama Kali di Kota Manna

Proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditanda tangani Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia, merupakan detik-detik yang mengubah jalannya roda sejarah bangsa Indonesia. Kalau bom atom yang dijatuhkan Jepang menghentikan perang di Pasifik, maka Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan lonceng kematian bagi penjajahan asing di Indonesia.

Berita tentang Proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Bengkulu, baik langsung maupun tidak langsung

³⁶ *Ibid*

³⁷ Wawancara dengan Erlis Harjoni, tanggal 11 Mei 2010 di Kota

tidak serentak dan dengan bermacam-macam cara. Antara lain pada tanggal 3 September 1945 salah seorang bekas pemimpin *Gyugun* bernama Rahim Damrah datang dari Kota Palembang dan menginap di rumah Hadis Lani di Bengkulu. Ia membawa dua lembar surat kabar "Palembang Simbun" yang terbit di Kota Palembang. Di dalam surat kabar itulah terdapat berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang diucapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.³⁸

Pada tanggal 2 Oktober 1945 diterima kabar dari Bandung yang mengatakan bahwa di seluruh pulau Jawa merah putih telah berkibar baik di kantor-kantor, maupun di rumah-rumah penduduk. Selanjutnya tanggal 3 Oktober 1945 diterima pula telegram dari M.T. Hasan, Gubernur Sumatera yang berisi selain dari pengangkatan Ir. Indera Caya sebagai Residen Bengkulu, juga perintah untuk mengibarkan bendera merah putih. Keesokan harinya tanggal 4 Oktober 1945, dimulai pukul 07.00 pagi bendera merah putih dikibarkan di Kota Bengkulu.³⁹ Kemudian pengibaran bendera merah putih diikuti oleh daerah-daerah lain seperti di Kepahiang, Curup, Muara Aman, Manna, dan lain-lain.

Berita kemerdekaan sampai di Kota Manna dibawah pertama kali oleh Buldani Masik, seorang bekas komandan regu Senapan Mesin di Markas Besar *Gyugun* di Pagar Alam. Pada tanggal 30 Agustus 1945 diadakan musyawarah di Kota Manna dengan para bekas *Gyugun* dan *Heiho*. Hasil dari pertemuan itu terbentuklah suatu organisasi yang diberi nama Pembela Tanah Air. Susunan dan personalia dari organisasi yang baru terbentuk ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Buldani Masik
Wakil ketua : Merahnuddin Taya
Bidang Politik : 1. Haji Abdul Sahid
: 2. Ismail Rahman

³⁸ M.Z. Rani, "Pertawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu", Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.48

³⁹ *Ibid*, 49

: 3 Barzian

Sedangkan pembantu-pembantu: M. Taha, Umar Gafur, Maskasa, Ubadi, Jahidin, Tajudin Sabri, Tahir Yahya, Jakfar Semau, Tukiran, Sulik, Chalik Bangsa, Zakaria Mahyat, Hamsan Juriya, Rani Tahir, Yusirana, Majid Padang Manis, Mustafa Padang Guci, dan Janusi Suul Senapan.⁴⁰

h. Peninggalan Belanda/ Tempat Penyimpanan Uang

Bangunan tempat penyimpanan uang Belanda ini terletak di dalam perkarangan rumah penduduk di daerah Pasar Bawah. Kondisi bangunan ini masih utuh, cuma saja kelihatannya kurang terawat dengan baik karena sudah di kelilingi semak-semak. Berdasarkan keterangan dari Erlis Harjohan, bahwa di daerah Pasar Bawah ini dahulunya adalah tempat pendaratan tentara Belanda pertama kalinya di Bengkulu Selatan. Sebetulnya bangunan Belanda yang lainnya masih ada di daerah Pasar Bawah, akan tetapi karena sudah dikikis oleh air laut sehingga bangunan yang lainnya sudah tidak kelihatan lagi. Daerah Pasar Bawah dahulunya ada juga benteng Belanda, tetapi karena abrasi pantai bangunan benteng itu sudah tidak tampak lagi.

i. *Hollandsch Inlandsch School* (HIS)

Seiring dengan derap langkah pergerakan kebangsaan yang dimulai sejak lahirnya Budi Utomo tahun 1908 hingga berkembangnya partai-partai politik, mendorong daerah Karesidenan Bengkulu bergerak lebih maju lagi. Cabang-cabang organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia baik sosial politik atau sosial keagamaan yang dimungkinkan. Sejak itu dimulailah berdirinya lembaga-lembaga pendidikan di daerah Bengkulu baik bersifat khusus maupun bersifat umum dan nasional. Lembaga seperti MULO, HIS dan Jamiatul Khair berdiri di kota Bengkulu. Pendirian

⁴⁰ *Ibid.*

lembaga-lembaga ini bukan saja di kota Bengkulu, akan tetapi juga di daerah-daerah.

Salah satu lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar di Bengkulu Selatan adalah *Hollandsch Inlandsch School* (HIS). Sekolah ini merupakan sekolah dasar yang khusus mengajarkan bahasa Belanda dengan tata cara kehidupan yang dikaitkan dengan kepentingan penjajah. Sekolah ini diperuntukan bagi anak-anak Indonesia peribumi yang orang tuanya dianggap mampu. Lama belajar di sekolah ini pun tujuh tahun. Guru-guru yang mengajar terdiri dari orang Indonesia yang berpendidikan HIS. Fasilitas utama untuk dapat masuk sekolah ini adalah anak-anak karyawan pemerintah dan karyawan perusahaan besar yang dianggap mampu mentaati ketentuan pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hasrat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke HIS untuk lebih terjamin kedudukan sosialnya di masa mendatang. Kedudukan sosial seorang pegawai pemerintah atau berkerja pada perusahaan asing terutama sekolah milik Belanda pada lahirnya lebih terjamin, maka menjadi cita-cita dan keinginan setiap orang tua yang punya anak terutama di kota, untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah *gubernemen*, dengan maksud agar anaknya kelak diterima menjadi pegawai pemerintah atau perusahaan asing yang dikuasai Belanda.

Satu-satunya *Hollandsch Inlandsch School* (HIS) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Bengkulu Selatan ialah yang berada di kota Manna. HIS ini lebih tua dari *Europeesche Lagere School* (ELS. HIS di kota Manna didirikan 1920 yang sekarang menjadi SD Negeri No 1 Bengkulu Selatan

j. Beberapa Peninggalan Sejarah lainnya

Beberapa peninggalan sejarah lainnya yang masih tersimpan dengan baik di Museum pribadi Erlis Harjohan. Museum ini terletak di Jl. Gama I No 30 Rt 10 Kelurahan Pasar Mulia Manna Bengkulu Selatan. Peninggalan sejarah

tersebut antara lain adalah 1) sebuah naskah kuno yang ditulis di sepotong bambu dengan panjang lebih kurang satu meter. Huruf naskah ini masih utuh dan dapat dibaca, namun sayangnya penulis tidak bisa membacanya, 2) Dua buah meriam yang diperkirakan adalah meriam peninggalan Jepang. Meriam ini sudah rusak.

Peninggalan-peninggalan sejarah ini, sebaiknya disimpan di museum, namun disayangkan di Bengkulu Selatan belum memiliki museum seperti di daerah lain. Diharapkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat membuat gedung museum di Bengkulu Selatan, sehingga peninggalan sejarah yang ada di Bengkulu Selatan dapat diselamatkan kelestariannya.

1. Wisata Budaya

a. Dundang Padi

Salah satu objek wisata budaya yang bisa ditonjolkan untuk daerah Bengkulu Selatan adalah acara Dundang Padi. Dundang Padi merupakan tradisi masyarakat Bengkulu Selatan tepatnya di Desa Selali Kecamatan Pino Raya. Dundang Padi biasanya dilaksanakan sebelum acara menebur benih padi, acara ini di dilaksanakan sebelum acara kesawah dimulai. Dundang Padi dilaksanakan selama tiga hari tiga malam.

Acara Dundang Padi diawali dengan mengarak *bai* padi atau Induk Padi, diteruskan dengan pemilihan dan penghitungan benih atau bibit padi. Bibit yang telah dipilih dimasukan ke dalam Dundang untuk diayun oleh anak-anak. Acara Dundang Padi ini adalah sebagai ungkapan bawa Dundang Padi harus dilakukan secara suci dan sakral, guna untuk mendapat restu dari Sang Pencipta. Kegiatan pada malam pertama diisi dengan pegelaran tari tradisi yaitu Tari Andun atau *Gegerit* dan diiringan dengan tari lainnya. Pada acara malam kedua menampilkan Seni Dendang Mutus Tari, dan pada malam ketiga diisi dengan acara Besurah yang

menampilkan sejarah asal usul Dundang Padi, biasanya sejarah asal usul Dundang Padi disampaikan oleh para raja.

b. Tari Andun

Dalam cara memilih jodoh suku bangsa Serawai lebih mengutamakan atas pilihan sendiri, acara ini adalah sangat disenangi dalam masyarakat Serawai terutama para muda mudi. Pada umumnya, warga suku bangsa ini tidak senang kalau jodoh itu ditentukan oleh orang tuanya atau orang lain. Mereka umunya bebas memilih siapa yang menjadi idamannya.

Pada waktu dilaksanakan *bimbang adat* (upacara perkawinan secara adat) tersedia waktu untuk bujang dan gadis saling berkenalan, bahkan pada saat itulah kesempatan yang paling baik untuk mengenal sesamanya. Dalam acara Bimbang pada masyarakat Serawai biasanya diadakan Tari Andun atau disebut juga dengan Tari *Gegerit*. Tari ini adalah salah satu tradisi pada masyarakat Bengkulu Selatan, tari ini dilakukan oleh bujang gadis secara berpasang-pasangan pada malam hari. Sebelum melaksanakan Tari Andun didahului oleh tari-tari kebanyakan yang dilakukan oleh orang laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan kaum perempuan yang didahului oleh penganten perempuan beserta kawan-kawanya dengan cara berputar membuat lingkaran sebanyak tujuh kali putaran, empat putaran kekanan dan tiga putaran ke kiri.

Selain pada waktu *Bimbang adat*, bujang-bujang atau jejak akan datang kerumah gadis pada hari-hari tertentu misalnya pada hari pecan setempat seperti pada hari minggu pada suatu tempat tertentu, yang biasanya pada setiap kelompok masyarakat atau tiap-tiap *marga* atau kelurahan ditetapkan *hari pekan* satu kali seminggu. Hari ini bisa juga disebut sebagai hari istirahat bagi kaum petani. Kalau mereka sudah ketemu dengan seorang gadis, maka mereka akan saling memperhatikan tingkah laku masing-masing. Andai antara mereka sudah saling menyetujui, maka mereka akan menyerahkan pada orang tuanya untuk menilai masing-masing pihak

Setelah mendapat kepastian bahwa dia mencintai seseorang untuk dijadikan istrinya, maka waktu itu dia meminta persetujuan dari orang tuanya. Sebelum memberikan persetujuan, terlebih dahulu orang tuanya menyelidiki siapa sebenarnya orang yang dicintai anaknya. Beberapa cara dilakukan untuk menyelidiki calon menantunya itu.

Sampai saat ini Tari Andun di dalam masyarakat suku bangsa Serawai di Bengkulu Selatan masih tetap dilaksanakan, Tari Andun dilaksanakan dalam upacara *bimbang adat*. Namun ada juga sebahagian dari masyarakat yang meragukan keberadaan Tari Andun untuk masa-masa mendatang. Karena jika kedua pasangan yang akan menikah tidak berasal dari daerah Bengkulu Selatan, dengan arti kata suku bangsa Serawai yang akan menikah dengan suku bangsa lain, maka acara *bimbang adat* kadangkala sudah di tiadakan.

c. Tari Persembahan

Tari persembahan merupakan salah satu budaya masyarakat Bengkulu Selatan yang juga merupakan objek wisata budaya yang bisa dinikmati jika berkunjung ke Bengkulu Selatan. Tari persembahan dilaksanakan pada acara penyambutan pengantin atau tamu kehormatan. Sebelum tari persembahan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan tari *tapa* yang dilakukan oleh dua orang penari laki-laki, tari ini diiringi oleh alat musik gendang dan serunai dengan mengikuti lantunan pantun. Setelah tari *tapa* selesai kemudian dilanjutkan dengan tari persembahan oleh para gadis yang biasanya berjumlah tujuh orang penari sambil menawarkan sekapur sirih kepada tamu yang diiringi musik tradisional dengan menggunakan *kulintang* dan *rebana*.

Tari persembahan ini masih tetap dilaksanakan pada masyarakat Bengkulu Selatan, tari persembahan ini biasanya dilakukan ketika ada tamu kehormatan atau pejabat yang berkunjung ke Bengkulu Selatan. Tari persembahan ini agak berbeda dengan tari persembahan di daerah lain, karena dalam tari persembahan di Bengkulu Selatan mempergunakan payung kuning, payung kuning melambangkan kebesaran.

2. Wisata Alam

Disamping potensi wisata sejarah dan budaya, Bengkulu Selatan juga memiliki wisata alam yang mempesona, dan mempunyai daya tarik yang luar biasa untuk dikunjungi, seperti pemandangan alam sebagai berikut:

a. Objek Wisata Air Terjun Geluguran

Salah satu di antara wisata alam yang ada di Bengkulu Selatan adalah Air Terjun Geluguran. Air terjun ini berlokasi di Desa Batu Aji kecamatan Ulu Manna. Untuk mencapai air terjun Gelugur ini memakan waktu lebih kurang satu jam dengan kendaraan roda empat, dengan jarak tempuh dari kota Manna lebih kurang 54 km menuju arah Tanjung Sakti Pagar Alam Sumatera Selatan.

Air terjun ini memberikan pesona keindahan pemandangan alam yang masih asri dengan udaranya yang sejuk dikelilingi oleh hutan alam yang masih asli dan airnya yang bening. Pengunjung lokasi air terjun ini dapat menikmati keindahan dan kesejukan air terjun. Pada umumnya tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan.

b. Objek Wisata Pantai Bengkenang

Pantai Bengkenang terletak di Kecamatan Manna dan berlokasi di pinggir jalan raya yang menghubungkan Manna-Bintuhan dengan jarak tempuh lebih kurang 8 km dari kota Manna. Pantai berpasir halus dengan keindahan laut dan deburan ombak yang besar serta dikelilingi dengan tumbuhan pohon kelapa menjadikan pantai Bengkenang salah satu tempat tujuan wisata yang menarik di kabupaten Bengkulu Selatan.

Selain itu dengan ombaknya yang besar juga berpotensi dan cocok untuk berolah raga berselancar, bagi yang berminat mungkin bisa untuk mencobanya. Disamping itu di Pantai Bengkenang ini karena pasirnya yang halus juga bisa dijadikan sebagai nilai tambah bagi kehidupan masyarakat setempat. Banyak masyarakat yang mengambil pasir untuk dijadikan bahan bangunan, sehingga dapat

menambah penghasilan mereka untuk menutupi kebutuhan hidup para penduduk setempat.

c. Objek Wisata Pantai Pasar Bawah

Pantai Pasar Bawah bukan saja sebagai tempat wisata, akan tetapi juga sebagai tempat pemancingan ikan yang biasanya dilakukan pada musim penghujung tahun antara bulan Juni sampai Desember. Pantai Pasar Bawah ini terletak lebih kurang 1,5 km dari pusat kota Manna dengan panorama alam yang indah, hamparan pemandangan laut dengan ombaknya mempesona membuat wisatawan sering berkunjung ke sana. Objek wisata Pasar Bawah juga dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti Hotel "Duta Beach", Lapangan Tenis, Kolam Renang, Restoran, tempat bermain anak-anak, dan sebagainya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wisatawan banyak berkunjung ke Pasar Bawah. Disamping letaknya yang strategis, juga Pantai Pasar Bawah mempunyai latar belakang sejarah yang menarik disimak. Konon dulunya Pasar Bawah adalah tempat pertama kalinya masyarakat Bengkulu Selatan berkembang, yang sekaligus menjadi pusat kota pada zaman Belanda. Jadi tidak heran jika orang datang ke Bengkulu Selatan, jika tidak mengunjungi ke Pantai Pasar Bawah rasanya belum lengkap. Segala daya tariknya menjadikan Pantai Pasar Bawah sebagai pusat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah terutama pada hari libur atau sore hari.

d. Objek Wisata Danau Ulu Segimin

Salah satu objek wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi di Bengkulu Selatan adalah Danau Ulu Segimin. Danau ini terletak di kecamatan Air Nipis dan lebih kurang 14 km dari kota Manna. Objek wisata Danau Ulu Segimin ini luasnya lebih kurang 12 hektar. Danau ini dihiasi oleh tumbuhan anggrek air, pada waktu tertentu anggrek ini akan mekar dengan bunga-bunga yang indah.

Pada pagi atau sore hari pengunjung akan menikmati pemandangan aktivitas warga setempat dengan mendayung

rakit menuju ladang dan sawah mereka yang berada di seberang danau. Sekeliling danau juga ditumbuhi oleh berbagai pohon yang lindung. Suasana ini akan lebih menarik jika musim durian datang, karena di sekitar danau banyak dijumpai pohon durian.

e. Rumah Makan Tradisional Air Nelengau

Objek wisata lain yang juga menarik untuk dikunjungi di Bengkulu Selatan khususnya di kota Manna adalah wisata kuliner. Tempat wisata yang satu ini menawarkan menu utamanya gulai santan ikan air tawar dan nasi hangat yang dikemas dalam bungkus daun pisang. Konon menurut ceritanya ikan yang dimasak ditempat iri adalah ikan lepas yang berada di sungai sekitar itu. Rumah makan tradisional ini sangat sederhana, bangunannya terbuat dari bambu dan atap rumbia. Sambil menikmati makanan pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam terbuka dan beristirahat dengan santai. Jenis gulai ikan yang ditawarkan di sini antara lain adalah: ikan Gabus, nila, lele, dan ikan emas.

Rumah makan tradisional Air Nelengau ini berlokasi di Desa Muara Palutan Kecamatan Segimin dan berjarak lebih kurang 10 km dari pusat kota Manna, tepatnya di pinggir jalan yang menghubungkan kota Manna dengan Kecamatan Segimin.

f. Arung Jeram dan Rally Rakit

Bengkulu Selatan memiliki banyak sungai, antara lain sungai Manna. Objek wisata yang berkaitan dengan sungai Manna adalah Rally Rakit dan Arung Jeram. Objek wisata Arung Jeram berada di Desa Air Tenam kecamatan Ulu Manna, berbatasan dengan Tanjung Sakti kabupaten Lahat. Pada tahun 2006 lokasi Arung Jeram di sungai Manna ini pernah dijadikan sebagai tempat latihan Arung Jeram bersekala nasional yang melibatkan Mapala serta Mapetala se Sumatera dan Jawa.

Lokasi Arung Jeram ini sangat layak untuk dijadikan tempat even nasional Arung Jeram. Disamping itu bagi yang berminat bias menyusuri sungai Manna melewati berbagai

rintangan alam dengan bebatuan curam, sehingga memunculkan Arung Jeram yang menantang. Ditambah lagi pemandangan hutan di tepi sungai yang masih terlindung. Untuk menuju ketempat tersebut cukup menempuh perjalanan lebih kurang 40 Km dari kota Manna dengan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang bisa langsung menuju lokasi.

Selain Arung Jeram di Bengkulu Selatan juga ada objek wisata Rally Rakit. Rally Rakit ini dilaksanakan sepanjang alur sungai Manna. Acara Rally Rakit sudah dimasukkan ke acara ritun kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan. Acara ini biasanya dilakukan pada minggu ke dua bulan Agustus setiap tahunnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat agar memelihara kebersihan lingkungan aliran sungai Manna dan sarana olahraga tradisional dan sekaligus hiburan rakyat.

D. Kesimpulan

Perawatan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan budaya di Bengkulu Selatan sangat perlu ditingkatkan. Hal itu perlu diperhatikan, baik dari kalangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Pemerintah daerah dalam hal ini tentunya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah satu peninggalan sejarah yang terancam dari kelestariannya adalah Bunker Jepang yang terletak di Kelurahan Belakang Gedung Kota Manna. Akibat dari abrasi pantai sebagian dari Bunker Jepang sudah ada yang jatuh ke dalam laut. Diharapkan untuk masa mendatang hal itu tidak akan terjadi lagi.

Peninggalan sejarah Meriam *Honisuit* yang ditempatkan di bundaran kantor Bupati Bengkulu Selatan lama kelamaan akan rusak keasliannya, karena meriam ini diletakan di alam terbuka yang tidak ada pelindungnya. Pemda perlu membuatkan tempat yang parmanen beratap, sehingga

meriam terlindung dari sengatan cahaya matahari dan hujan,
dan keasliannya tetap terjaga.

DAFTAR KEPUSTAKA

Buku

- A. Dali. Bustan. *Daerah Seluma di Rembang Fajar Refleksi 2 Tahun Pembangunan Kabupaten Seluma 3 Agustus 2005 3 Agustus 2007*. Bungamas: Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, 2007
- Achmad, Ramli et al. 1991. *Koleksi Senjata Tradisional Museum Negeri Provinsi Bengkulu*, Bengkulu : Depdikbud
- A. Yoety, Oka. 1994. *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata*. Bandung Angkasa Bandung.
- Dalip Achmaddin dkk. 1984. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional.
- Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, Jakarta 1990
- Fajar, Thamrin. 1996. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Bengkulu.
- Lapian, A.B, dkk. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional.
- Sidik Abdullah. 1992. *Sejarah Bengkulu 1500-1990*. Jakarta: Balai Pustaka.
-1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka

- Herlina, Muria, et al, 1997. *Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Melayu Bengkulu*.:Laporan Penelitian, Bengkulu: FISIP Universitas Bengkulu
- Kemterian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. *Konsepsi Pemngembangan kepariwisataan Indonesia*. 2003
- Keputusan Mendikbud RI Nomor 063/U/1995. Tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Peninggalan Sejarah. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud.
- Fajar Thamrin dkk. 1996. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Garraghan, Gilbert, 1984. *A. Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press.
- Sarwono, Sarwit. 2004. *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- Rani. M.Z. 1990. *Perlawanan Terhadap Penjajahan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2001.
- Yauw, Sjamsoeddin. 1980 "*Meriam Kecepek*" Khusus untuk Pejuang-Pejuang 45" Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Bengkulu,

Makalah

- Marsis Sutopo, "Potensi Benda Cagar Budaya di Sumatera Barat dan Pemanfaatannya untuk Pariwisata". Makalah disampaikan dalam Dialog Sejarah dan Budaya bagi Pariwisata di Padang, taggal 10 Juni 2002.

Tegu Hidayat, "Benda CagarBudaya Untuk Pariwisata". Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi benda CagarBudaya di Padang, tanggal 28 Oktober 2010

Heddy Shri Ahimsa Putra. "Perencanaan Wisata Budaya". Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisata kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II. Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dan Puspar UGM Yogyakarta, tanggal 25-29 Oktober 1999

Agus Setiyanto. "Bengkulu Dalam Lintasan Sejarah. Dari Sistem Pemerintahan Tradisional Hingga Biograsi Kolonial". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah di Provinsi Bengkulu, tanggal 5-6 Agustus 2008 di Bengkulu.

Catatan : Erlis Harjohan " Sejarah Lahirnya Kota Manna Agustus 2003

Wawancara

Wawancara dengan Resmen Asnawi, tanggal 9 Mei 2010 di Bengkulu Selatan

Wawancara dengan Erlis Harjohan, tanggal 9 Mei 2010 di Bengkulu Selatan

Wawancara dengan Sulaiman Saleh, tanggal 9 Mei 2010 di Bengkulu Selatan

HUBUNGAN SOSIAL ANTARA MASYARAKAT NIAS DAN MASYARAKAT NAGARI SUNGAI BULUH KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh: Rois Leonard Arios

Pendahuluan

Jalur perdagangan dan kebutuhan budak pada masa sebelum abad ke-20 telah menyebabkan terjadinya migrasi suku-suku bangsa tertentu ke beberapa daerah di Nusantara (Hindia Belanda) dan beberapa negara lainnya. Keperluan akan tenaga kerja yang murah telah meramaikan perdagangan budak dari beberapa negara. Perdagangan ini ada yang terorganisir secara baik (legal), tidak resmi (ilegal), maupun melalui pemberian pekerjaan yang lebih terhormat.¹ Salah satu suku bangsa diperdagangkan sebagai budak adalah suku bangsa Nias sehingga persebaran etnis Nias cukup luas hingga ke berbagai negara termasuk Penang Malaysia.²

¹ Tentang perdagangan budak ini dapat dibaca pada tulisan Anatona. "Perdagangan Perempuan Indonesia Ke Malaysia Dalam Dokumen India Office Records Seri R/9". *Kertas Kerja* pada Seminar 50 Tahun Merdeka – Hubungan Malaysia dan Indonesia. Kuala Lumpur, Universiti Malaya, 17 – 21 Juli 2007. dan Abdur-Razzaq Lubis. "Orang-Orang Indonesia di Pulau Pinang". *Makalah* ini dibentangkan di Pengkisahan Melayu Pulau Pinang, anjuran Persatuan Warisan Pulau Pinang (Penang Heritage Trust) dan akhbar berbahasa Inggeris, The Star, hari Sabtu, 25 Ogos 2001, di Hotel City Bayview, Lebuh

² Abdur-Razzaq Lubis. 2001; Gusti Asnan. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: PPIM. Baca juga Freek Colombijn. 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah sebuah kota di Indonesia Pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.

Suku bangsa Nias³ (selanjutnya disebut Orang Nias) adalah suku bangsa yang memiliki wilayah kebudayaan di Kepulauan Nias dan pulau-pulau kecil lainnya di bagian barat Pulau Sumatera. Secara administratif pemerintahan suku bangsa ini berada di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kepulauan Nias sejajar dengan Kepulauan Mentawai (di Provinsi Sumatera Barat) yang dihuni oleh suku bangsa Mentawai, Pulau Enggano (di Provinsi Bengkulu) yang dihuni oleh suku bangsa Enggano, dan Pulau Semelue (di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam).

Hubungan antara orang Minangkabau dan Nias sudah berlangsung cukup lama. Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah berlangsung kontak dagang antara orang Minangkabau dengan Nias yang dilakukan oleh Mohammad Saleh Datoek Orang Kaya Besar.⁴ Orang Nias juga ada yang didatangkan dari Nias untuk membuka hutan seperti yang dilakukan oleh Rangkayo Rajo Sampono di Nagari Ketaping.⁵ Orang Nias juga sudah ada di Padang sejak tahun 1860 ketika E.L. Denninger seorang tenaga RMG dari Bremen tiba di Padang.⁶ Sumber lainnya juga menyebutkan bahwa hubungan dengan Nias telah berkembang sejak awal abad ke-17. Hubungan antara Minangkabau dan Nias dimulai oleh para saudagar Aceh yang mengunjungi Nias untuk mendapatkan budak. Budak-budak dari Nias tetap tercatat sebagai mata dagangan di pantai barat Sumatra hingga dekade ke-3 abad ke-19. Hubungan dagang dengan Nias semakin berkembang sejak masa VOC dan mencapai puncaknya setelah pemerintah

³ Orang Minangkabau menyebut dengan Orang Nieh.

⁴ S.M Latif. 1975. *Moehammad Saleh Datoek Orang Kaya Besar: Riwayat Hidup dan Peraisaan Saya*. Bogor: SM Latif.

⁵ Rois Leonard Arios dan Jumhari. 2004. "Dampak Pembangunan Bandar Udara Ketaping Bagi Masyarakat Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". *Laporan Penelitian BKSNT Padang*.

⁶ "Pekabaran Injil dan Gereja di Nias dan Pulau-pulau Lain Lepas Pantai Sumatera (1865-sekarang)": <http://www.niasbangkit.com/>

Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan di Minangkabau. Berbagai hasil pertanian, hutan, dan laut Nias dibawa dan dipasarkan di kota-kota pantai Minangkabau. Pada masa itu pulalah sesungguhnya migrasi orang Nias dalam jumlah yang besar ke kawasan pantai Minangkabau berlangsung. Budak-budak yang tidak mampu membayar hutang akhirnya bekerja pada majikan yang telah menebusnya dan sebagian besar menjadi warga Padang setelah masa kerjanya berakhir.⁷

Orang Nias ini merupakan salah satu suku bangsa yang cukup lama bermukim di Kota Padang. Bahkan dianggap sebagai suku bangsa yang kedua setelah Orang Minangkabau yang menetap di Padang.⁸ Beberapa nama jalan atau tempat di Kota Padang justru berasal dari bahasa Nias seperti Holigoo (bahasa Nias yang berarti daerah berbukit), Puruih (bahasa Nias yang berarti ombak atau gelombang), Siteba (yang berarti daerah terlarang) dan beberapa tempat lainnya.⁹

Pada perkembangan selanjutnya Kota Padang semakin ramai dikunjungi oleh berbagai suku bangsa dan daerah di Indonesia. Hingga tahun 2007 walaupun tidak terdapat data statistik jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa, penduduk Kota Padang sudah sangat multikultural termasuk diantaranya orang Nias.

Perkembangan Kota Padang memaksa orang Nias membuka daerah-daerah baru sebagai tempat tinggal dan tempat berladang. Sebagai petani atau peladang, orang Nias selalu mencari areal baru yang belum didiami orang sehingga mereka selalu bermigrasi ketika daerah yang mereka buka sudah mulai ramai dan tempat berladang mereka sudah semakin sempit.¹⁰ Hal ini pulalah yang memungkinkan orang

⁷ Gusti Asnan. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: PPIM. Hal. 202 – 203; Freek Colombijn. 2006. *op.cit.* hal. 74

⁸ Freek Colombijn. 2006. *op.cit.* hal. 74

⁹ Tulisan tentang nama-nama ini dapat dibaca pada tulisan Anatona. [2006]. "Dinamika Pemukiman Orang Nias di Kota Padang Sebelum dan Setelah Kemerdekaan"

¹⁰ Wawancara dengan Dr. Anatona, Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang. Januari 2008.

Nias sampai ke wilayah Nagari Sungai Buluh khususnya di Korong Tanjung Basung dan Pasar Usang.¹¹

Orang Nias yang bermukim di wilayah Sungai Buluh tetap memegang teguh tradisi dan karakter mereka. Khususnya di Tanjung Basung, mereka sudah memiliki dua gereja yaitu BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) dan gereja Katolik. Simbol-simbol budaya tetap mereka tampilkan dalam berinteraksi dengan sesama dan bahkan dengan suku bangsa lainnya. Tradisi mereka memelihara ternak babi masih tetap mereka pertahankan sebagai mata pencaharian utama disamping mengolah ladang. Pola hidup dan interaksi ini kemungkinan besar berkaitan dengan karakter orang Nias itu sendiri yang masih terpelihara.

Pada salah satu tulisan menyatakan bahwa masyarakat Nias pada umumnya mempunyai sifat atau karakter yang sangat ulet, cerdas dan pintar serta bermental bagaikan baja (pantang menyerah) dan inilah nilai positif yang dimilikinya. Sifat atau karakter tersebut muncul tanpa disadari mengingat garis keturunan masyarakat Nias itu pada umumnya adalah keturunan Raja (*Razo Nidada Moroi Yawa*). Sifat atau karakter lain yang dimiliki oleh Orang Nias adalah, selalu mau menang dan benar sendiri dan inilah nilai negative yang dimilikinya, dan inipun tanpa disadarinya atau dengan kata lain dibawah alam kesadarannya. Orang-orang Nias yang berada diperantauan dan mereka tinggal di suatu daerah tertentu. Orang Nias yang tinggal di daerah tersebut selalu maunya itu harus dihormati dan bukan menghormati, dan yang sangat heboh lagi jika orang lain atau suku lain tinggal di daerahnya, maka dengan tanpa syarat orang lain tersebut harus lebih dulu menghargai dan menghormatinya. Apabila hal itu tidak dilakukan maka orang lain tersebut dipukuli habis-habisan jika tidak menghormatinya dengan alasan

¹¹ Belum dapat dipastikan apakah asal mereka dari Padang atau dari Ketaping yang dibawa oleh Rangkayo Rajo Sampono. Keberadaan Orang Nias di Pasar Usang dan Tanjung Basung pernah ditulis pada <http://peduli.muslim-nias.org>

melecehkan martabat dan kehormatannya sebagai sesepuh (Ono Zalawa).¹²

Karakter orang Nias dalam berinteraksi dapat menjadi sumber konflik. Namun belum ditemukan data yang menunjukkan adanya konflik terbuka menyangkut SARA antara masyarakat Nias dengan penduduk di sekitar tempat tinggal mereka. Suryanef dan Syamsir¹³ menulis bahwa pada era tahun 1970-an di Padang pernah terjadi konflik laten antara orang Nias dengan orang Minangkabau yang dipicu oleh saling ejek tentang stereotipe masing-masing. Hal ini juga didorong adanya kebiasaan orang Nias yang menggunakan bahasa Nias dalam berinteraksi di lingkungan Minangkabau. Perbedaan agama turut memicu munculnya konflik antara orang Nias dan orang Minangkabau. Dalam pandangan orang Minangkabau orang Nias sudah menjadi bagian dari orang Minangkabau sendiri, apalagi telah terjadi perkawinan campur antara orang Minangkabau dan orang Nias sehingga pada umumnya mereka dianggap sebagai keluarga sendiri.

Secara khusus kasus konflik terbuka antara orang Nias dan Orang Minangkabau di Nagari Sungai Buluh belum ditemukan. Kalaupun pernah terjadi karena kesalahan paham, namun tidak sampai terjadinya pengusiran orang Nias karena mereka adalah bagian dari penduduk Sungai Buluh. Ada hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh antara karakter dan latar belakang budaya dan agama yang berbeda antara kedua belah pihak, yang selama ini masih terjaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Kebiasaan orang Nias memelihara ternak babi di sekitar pemukiman mereka, pendirian gereja, pemukiman yang segregatif (terpisah dari pemukiman masyarakat umumnya), dan karakter orang Nias yang kemungkinan besar seperti yang disebutkan di atas merupakan potensi yang dapat menimbulkan konflik terbuka. Padahal dalam pandangan masyarakat Minangkabau apabila ada orang yang tidak menganut agama Islam maka

¹² <http://niasbarat.wordpress.com/2007/04/10/karakter-orang-nias-menjadi-power-kesuksesan/>

¹³ <http://www.ireyogya.org/>

hal itu merupakan suatu kejanggalan termasuk adanya peternakan babi. Namun orang Minangkabau menyadari bahwa Nias tetap Nias, bukan suku bangsa Minangkabau. Penduduk pesisir Minangkabau sejak dulu telah terbuka bagi kedatangan orang luar, sehingga kedatangan orang Nias pun bukanlah peristiwa asing bagi mereka. Peran orang Nias dalam membukan hutan belantara juga tidak bisa dilupakan oleh penduduk pesisir Minangkabau.

Preventif potensi-potensi konflik merupakan tema sentral tulisan ini. Bagaimana sebuah daerah yang didiami lebih dari satu suku bangsa dengan karakter dan latar belakang sosial budaya yang berbeda dapat berinteraksi dengan baik tanpa menimbulkan konflik terbuka.

Hubungan Sosial dan Konflik: Sebuah Konsep

Masyarakat yang multikultural akan lebih cenderung mengalami konflik terbuka atau disintegrasi dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Pierre L. van de Berghe memberikan beberapa karakteristik masyarakat multikultural:¹⁴

1. masyarakat terbagi dalam segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok budaya, subbudaya yang berbeda;
2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer;
3. kurang adanya kemauan untuk mengembangkan konsensus antara anggota masyarakatnya tentang nilai-nilai sosial yang fundamental;
4. kurangnya kesadaran mengembangkan consensus relative yang sering menumbuhkan konflik antarkelompok sub-budaya tersebut;
5. konflik bisa dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi, tetapi dengan jalan secara relative menggunakan paksaan ditambah adanya ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi;

¹⁴ Ma'mun I.R., dkk. 2006. *Politik Perkotaan Berbasis multikultural*. Jakarta: Pustaka Cerdasindo YMC. Hal. 26

6. adanya dominasi politik kelompok satu atas kelompok yang lain.

Ahmad Habib¹⁵ menulis tentang kajian teoritis hubungan antar suku bangsa. Pemikirannya disarikan dalam tulisan berikut. Pertanyaan yang sering diajukan oleh para peneliti sosial dalam mengkaji hubungan antar etnik biasanya berkenaan dengan persoalan apa yang terjadi ketika penduduk dengan berbagai latar belakang saling kontak. Memang, secara teoretik bisa terjadi begitu banyak akibat. Namun demikian, untuk memudahkan penelaahan, lazim dibagi menjadi dua pola akibat, yaitu: pola asimilasi dan pola konflik. Menurut Shepard (1987:256), asimilasi dapat diartikan sebagai proses dimana kelompok-kelompok dengan identitas yang berlainan menjadi bersatu padu secara budaya dan sosial. Penekanan pada asimilasi didasarkan pada pandangan egalitarian yang menempatkan kelompok etnik sebagai pemilik kedudukan yang setara dan berintegrasi dalam masyarakat, serta menerima untuk berpartisipasi secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karya klasik tentang studi asimilasi ditulis oleh Gordon (1978) yang mengemukakan adanya tiga model asimilasi dasar dalam masyarakat Amerika, yaitu: konformitas (*conformity*), persenyawaan (*melting pot*), dan kemajemukan budaya (*cultural pluralism*). Konformitas merupakan istilah umum yang menunjuk pada suatu jenis asimilasi dimana tidak ada oposisi terhadap pendatang sepanjang kelompok pendatang berupaya menyeragamkan diri dengan standar-standar yang secara umum diterima masyarakat setempat. Pandangan ini menyiratkan bahwa kelompok pendatang dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai sosial umum, dan karena itu harus melepaskan nilai-nilai sosialnya sendiri. Pola kedua asimilasi adalah persenyawaan. Dalam model ini semua kelompok etnik bercampur-campur menjadi satu sehingga membentuk budaya dan masyarakat baru yang didasarkan pada prinsip persaudaraan manusia. Dalam

¹⁵ Achmad Habib. "Dinamika Hubungan Antar Etnik Cina dan Jawa di Pedesaan". <http://elka.umm.ac.id/artikel6.htm>. 12 april 2008 pukul 10.00

kenyataannya, teori persenyawaan antar etnik ini sulit dicari kasus empiriknya. Amerika, misalnya walaupun dipandang memiliki sejumlah prasyarat yang memungkinkan terjadinya persenyawaan, ternyata juga tidak bisa menghasilkan suatu bentuk masyarakat baru. Hal ini berarti pula bahwa masing-masing kelompok etnik masih mempertahankan identitas kultural serta “kemurnian” biologiknya. Pola ketiga asimilasi adalah kemajemukan budaya. Pola ini terjadi apabila nilai-nilai kelompok-kelompok baik mayoritas maupun minoritas tetap menjunjung tinggi identitas budaya mereka yang berlainan, tetapi berupaya mencapai kesatuan ekonomi dan politik. Tidak seperti penggambaran masyarakat dan kebudayaan tunggal yang tersirat dalam model konformitas dan pola persenyawaan, kemajemukan budaya mengakui dan menerima kenyataan akan tradisi yang dibawa oleh setiap kelompok etnik, walaupun boleh jadi secara bersamaan kelompok pendatang juga mempelajari nilai-nilai dan norma-norma penduduk asli.

Konsep multikultural ternyata harus hati-hati memahaminya. Dalam salah satu tulisan di situs *wordpress*¹⁶ menggambarkan bagaimana sejarah dan konsep multikultural. Berikut ringkasan tulisan tersebut. Konsep multikultural awalnya muncul pada negara-negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, budaya dan agama, seperti misalnya di Amerika Serikat dan Eropa. Sebelum muncul multikulturalisme, di Amerika Serikat pernah dikembangkan teori “melting-pot” (“tempat melebur”) dan teori *salad-bowl* (tempat salad). Tapi, kedua-duanya mempunyai kelemahan dan mengalami kegagalan. Dengan teori melting-pot diupayakan untuk menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya asal masing-masing. Dengan teori *salad bowl*, masing-masing budaya asal tidak dihilangkan melainkan diakomodir dan memberikan kontribusi

¹⁶ “Rangkuman Hasil Penelitian Multikulturalisme Dan Kehidupan Beragama”
<http://marzaniarwar.wordpress.com/2008/03/12/rangkuman-hasil-penelitian-multikulturalisme-dan-kehidupan-beragama/>

bagi budaya bangsa, namun interaksi kultural belum berkembang dengan baik. Semua gagasan di atas tidak berjalan optimal, maka muncullah kemudian multikulturalisme untuk memperbaiki kelemahan gagasan-gagasan sebelumnya. Multikulturalisme muncul sebagai sebuah gerakan dimulai dengan gerakan menuntut hak-hak sipil dari masyarakat kulit hitam Amerika tahun 1960, hak-hak perempuan masyarakat Meksiko, Hispanik dan masyarakat asli Amerika tahun 1970, dan gerakan multikultur untuk reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan tahun 1980.

Dalam kehidupan sosial, konflik adalah suatu hal yang melekat dan tak dapat dihindarkan dalam masyarakat bahkan pada masyarakat yang homogen sekalipun. Konflik merupakan suatu keadaan pertentangan karena adanya ketidak-harmonisan hubungan sosial di antara anggota kelompok maupun antar kelompok dalam suatu masyarakat.

Gejala etnosentrisme, prasangka negatif dan perilaku diskriminatif antar etnik baik yang menyangkut agama maupun adat budaya bisa menjadi penghambat dalam interaksi serta pergaulan antarsuku. Gejala ini tidak hanya dalam masyarakat tradisional tetapi juga dalam masyarakat modern sekalipun. Akibatnya bisa menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan. Hal ini ditegaskan oleh Koentjaningrat yang menyatakan bahwa hubungan dan interaksi antara para penganut agama dan atau etnik yang berbeda bisa menimbulkan masalah potensi konflik. Hubungan antara warga umat agama yang berbeda biasanya juga dilatarbelakangi oleh sikap prasangka etnik. Selain itu, setiap etnik biasanya sangat terikat pada folkways masing-masing dan cenderung memegang kuat identitas diri mereka. Keterikatan etnik atas nilai-nilai budayanya berakibat semakin kuatnya rasa "in-group" dan cenderung meremehkan kelompok luar. Mereka merasa yakin bahwa keyakinan yang dimilikinya yang paling baik. Sikap ini pada akhirnya akan menimbulkan chauvinisme, intoleransi, oposisi terhadap

folkways lain, penghinaan, prasangka, penafsiran sepihak dan sebagainya.¹⁷

Penilaian bahwa stereotipe etnik yang negatif akan menghambat interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang multi etnik, yang pada gilirannya akan dapat pula menyebabkan terhambatnya proses menuju integrasi nasional. Untuk memahami bagaimanakah posisi dan hubungan seorang individu dalam konteks kelompoknya, Herbert M. Blalock (1976:2)¹⁸ pernah mengusulkan dua model pendekatan, ialah secara mikro dan makro. Secara mikro, individu dipakai sebagai pusat penelitian terutama yang berkaitan dengan berbagai hal latar belakang timbulnya bentuk-bentuk *prejudice* (prasangka) maupun stereotipe etnik. Selanjutnya dalam pendekatan secara makro, lebih dipusatkan terhadap studi mengenai masalah diskriminasi dan kepemimpinan.

Ralf Dahrendorf pernah berpendapat bahwa setiap elemen atau setiap institusi dalam masyarakat, dalam setiap hal dan karena berbagai sebab, memberikan kontribusi terhadap disintegrasi (perpecahan) sosial. Perbedaan posisi dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat bisa menjadi faktor yang akan menimbulkan konflik, termasuk dalam hal ini perbedaan jumlah (*size*) atau kuantitas masyarakat dalam bentuk pola mayoritas-minoritas.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Ikut sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik

¹⁷ Suryanef dan Syamsir. "Potensi Konflik Sosial Berbasis Agama di Minangkabau". <http://www.ireyogya.org/>

¹⁸ Dalam Hari Poerwanto. "Hubungan Antar Suku-Bangsa Dan Golongan Serta Masalah Integrasi Nasional" *Makalah* dibawakan dalam Focus Group Discussion (FGD) "Identifikasi Isu-isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa", dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2006.

merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.¹⁹

Jadi, konflik bisa muncul karena perbedaan-perbedaan identitas yang muncul dalam perjumpaan. Semakin banyak perbedaan, kemungkinan konfliknya tinggi. Semakin sering perbedaan itu berjumpa, semakin besar pula potensi konfliknya. Teknik menghindari konflik bisa dengan memperkecil perbedaan dan saling menghormati sebagai sesama warga tanpa pemaksaan-pemaksaan terhadap keinginan sesuatu kelompok.

Berkaitan dengan status dan ciri-ciri yang berbeda-beda tersebut, Irwan Abdullah berpendapat bahwa dalam lingkungan yang multietnis yang memiliki ekspresi etnisitas yang berbeda-beda dengan asal usul yang berbeda pasti memiliki suatu simbol universal yang dapat dikode atau dibaca oleh hampir semua etnis yang dengan simbol inilah mereka dapat memelihara sistem sosial yang terintegrasi.²⁰ Simbol-simbol universal ini kemungkinan yang menjadi acuan sehingga konflik terbuka tidak terjadi di Nagari Sungai Buluh.

Mengenai konsep manajemen (baca: pengelolaan) konflik, Professor Burton membedakan antara resolusi konflik, manajemen, dan penyelesaian ('settlement'). Manajemen adalah 'dengan kecakapan resolusi perselisihan alternatif' (by alternative dispute resolution skills) dan dapat menampung atau membatasi konflik; 'settlement' adalah 'dengan proses wewenang dan hukum' (by authoritative and legal processes) dan dapat dipaksakan oleh kelompok elit. Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar 'manajemen' atau 'settlement', mengacu

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

²⁰ Irwan Abdullah. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 83.

pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.²¹ Dalam hal ini, peneliti tetap menggunakan konsep manajemen konflik (dalam judul disebutkan pengelolaan) karena peneliti belum menemukan data tentang konflik yang pernah terjadi atau sedang terjadi, namun hanya sebatas data atau ciri-ciri masyarakat yang potensial menimbulkan konflik terbuka. Dari pendapat Burton tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah bagaimana masing-masing pihak dapat mengendalikan perbedaan-perbedaan diantara mereka sehingga tidak menimbulkan *prejudice* secara terbuka yang pada akhirnya menimbulkan konflik terbuka.

Profil Nagari Sungai Buluh

Nagari Sungai Buluh merupakan salah satu tempat tinggal komunitas suku bangsa Nias disamping daerah lain seperti Nagari Ketaping dan Nagari Kasang. Ketiga nagari ini berada di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Secara astronomis posisi Kecamatan Batang Anai berada pada 0°07'00" LS dan 98°36' – 100°28' BT dengan luas 180,39 km² dan panjang garis pantai 20 km.

Luas wilayah Nagari Sungai Buluh lebih kurang 19.250 Ha yang secara administratif memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Lubuk Alung; sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Kasang; sebelah timur berbatasan dengan Nagari Talao Mundam dan Kabupaten Solok; dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Ketaping.

Letak Nagari Sungai Buluh cukup strategis karena sebagian besar wilayahnya merupakan jalur lintas Sumatra yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukittinggi sehingga mobilitas masyarakat yang melalui nagari ini cukup tinggi. Hampir selama 24 jam nagari ini dilalui berbagai jenis

²¹ El Fatih A. Abdel Salam "Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik" Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia

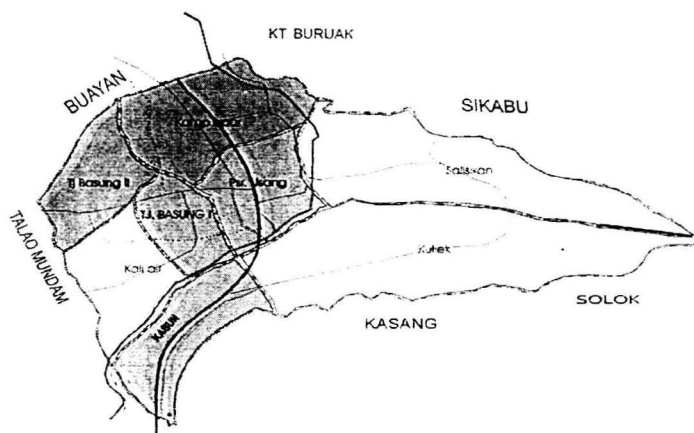
kendaraan bermotor. Di sisi lain, status Nagari Sungai Buluh sebagai ibukota Kecamatan Batang Anai menambah semarak aktivitas masyarakat di bidang pemerintahan maupun perekonomian dengan adanya pasar yang terletak di Korong Pasar Usang.

Wilayah bagian timur nagari ini pada umumnya merupakan basis pertanian khususnya di Korong Kuliek dan Korong Salisikan. Kedua korong ini berada di dataran tinggi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Di antara delapan korong yang ada di Nagari Sungai Buluh, kedua korong ini merupakan yang terluas dan berada di perbukitan relatif jauh dari jalan raya. Topografi Nagari Sungai Buluh sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 7 meter hingga 25 meter. Topografi umumnya datar seperti pada Korong Pasar Usang, Korong Kabun, Korong Kali Air, Korong Tanjung Basung 1, Korong Tanjung Basung 2, dan Korong Kampung Apar. Sedangkan daerah yang berbukit-bukit dengan ketinggian hingga 25 meter dari permukaan laut adalah Korong Kuliek dan Korong Salisikan. Kecendrungan arah kemiringan lahan menuju timur artinya semakin ke timur, maka wilayah Nagari Sungai Buluh semakin tinggi. Kondisi ini mempengaruhi pemanfaatan areal. Daerah dataran yang lebih tinggi dimanfaatkan sebagai areal pertanian seperti tanaman keras.

Luas Nagari Sungai Buluh adalah 19.250 Ha. Penggunaan lahan di daerah terdapat 8 jenis penggunaan lahan, yaitu: pekarangan, tegalan, kolam, tanah yang diolah, tanah ukut (tanah adat), kayu-kayuan, perkebunan, dan pertanian sawah. Untuk pertanian sawah, perkebunan, tanah diolah, dan tanah ukut dapat ditemukan di Korong Silisikan dan Kuliek. Tegalan dan kolam penggunaan lahannya banyak di Korong Tanjung Basung I dan II. Sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti pemerintahan, perdagangan, dan lainnya dipusatkan di Korong Pasar Usang sebagai ibukota nagari dan kecamatan.

Sesuai dengan aktivitas penduduknya dalam bidang pertanian yang lebih dominan, membuat lahan untuk sawah lebih luas. Penggunaan lahan tersebut yang terbesar adalah untuk penggunaan lainnya seperti pemukiman, perkantoran, perindustrian, dan perdagangan seluas 10.438,06 Ha atau 54,2%. Sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah untuk areal kolam 14,66 atau 0,1 %. Kecilnya lahan yang dipergunakan penduduk untuk usaha kolam karena penduduk Nagari Sungai Buluh tidak mempunyai keahlian dan minat untuk bertenak ikan. Hanya beberapa penduduk yang memiliki kolam seperti Orang Nias yang di Korong Tanjung Basung yang memelihara ikan mas.

Jenis tanah di Nagari Sungai Buluh termasuk jenis tanah yang memiliki sifat organosol saprik, gleisol distrik, kambisol eutrik, dan kambisol oksik yang memiliki kehumusan yang tinggi sehingga umumnya tanah di nagari ini sangat subur. Secara khusus di Korong Salisikan dan Kuliek yang merupakan basis pertanian dan perkebunan. Namun untuk korong-korong lainnya seperti Pasar usang, Kampung Apar, Kali Air, dan Tanjung Basung I dan II juga memiliki tingkat kesuburan di bawah dua korong tersebut.



Peta Nagari Sungai
Buluh

Sejarah Nagari

Kabupaten Padang Pariaman dibentuk sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan. Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Namun rencana pembentukan kabupaten itu tidak terealisasi. Kemudian Kabupaten Padang Pariaman baru dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Propinsi Sumatera Tengah terdiri dari 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman.

Batas-batas Kabupaten Padang Pariaman sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad²²

Sebelum berlakunya sistem pemerintahan formal, Pariaman merupakan daerah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah Pariaman secara tradisional awalnya terdiri dari *sakarekhulu* dan *sakarekhilia*. *Sakarekhulu* terdiri dari Nagari Mangguang, III Koto Nareh, Tungka, Sikapak, dan Cubadak Aia.

²² <http://www.pariaman.go.id/selayangpandang/index.php?id=0>

Sedangkan *sakarekhilia* meliputi Pasa Pariaman, V Koto Aiapampam, IV Koto Sungairotan, dan Angkek Padusunan. Nagari di *sakarekhulu* masing-masing memiliki pasar. Sedangkan *sakarekhilia* hanya memiliki pasar di Pariaman. Pasar di Pariaman awalnya dibangun oleh orang dari empat nagari di *sakarekhilia*. Keempat nagari itu menguasai Pasar Pariaman²³. Ketika VOC berkuasa, Pariaman merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh saudagar Inggris dan Cina. Bahkan sejak tahun 1630-an orang Cina telah bermukim di kota ini. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Pariaman dijadikan sebagai satu *Regentschap* yang terbagi dalam dua *hoofdafdeelingen* yaitu Pariaman Sakarek di Hilir (Pariaman dewasa ini) dan Sakarek di Mudik (Manggung). Kedua *hoofdafdeelingen* ini dipimpin oleh seorang Tuanku. Pada masing-masing Tuanku ada 6 penghulu. Kedua tuanku dan 12 penghulu ini membentuk suatu rapat yang dinamakan Rapat Pariaman yang dipimpin oleh Regen yang dijabat oleh Tuanku Pariaman.²⁴

Sedangkan Nagari Sungai Buluh baru terbentuk kembali sebagai daerah otonom pada tahun 2004. Awalnya nagari ini merupakan bagian (*korong*) dari Nagari Lubuk Alung dengan sebutan Korong Sungai Buluh. Pada tahun 1981 sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dipertegas dengan keluarnya Perda No. 7 tahun 1981, Korong Sungai Buluh diubah menjadi desa dengan sebutan Desa Pasar Usang hingga tahun 2000. Keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dengan keluarnya Perda No. 6 tahun 2000, maka status Desa Pasar Usang dan desa-desa lainnya dikembalikan statusnya menjadi Korong Sungai Buluh. Sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengingat luasnya wilayah Nagari

²³ Bagindo Armaid Tanjung. 2006. *Kota Pariaman, dulu, kini, dan masa depan*. Pariaman: Pustaka Artaz kerja sama Bappeda Kota Pariaman. Hal. 87.

²⁴ Gusti Asnan. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: PPIM. Hal. 216.

Lubuk Alung, maka Sungai Buluh menjadi daerah otonom dengan status nagari dengan ibukota Pasar Usang pada tahun 2004.

Sebagaimana nagari lainnya di Minangkabau, nagari Sungai Buluh sudah ada sejak sebelum tahun 1950. , Pada mulanya wilayah Nagari Sungai Buluh merupakan daerah hutan dan belum ada penduduknya. Penduduk yang membuka daerah ini diyakini berasal dari daerah Selayo Kabupaten Solok yang dipimpin oleh Datuk Rajo Batuah sekitar abad ke-17 atau 18 yang mencari tanah ulayat baru. Selanjutnya datang pula rombongan Datuk Lembang Bukiek melalui perbukitan dan pada salah satu dataran tinggi Datuk Lembang Bukiek melihat ternyata sudah ada penghuni daerah Sungai Buluh (sekarang) sehingga Datuk Lembang Bukiek *manyalisik* (menyusuri) kaki bukit menghindari agar tidak terlihat oleh Datuk Rajo Batuah. Datuk Lembang Bukiek malu karena menganggap dirinyalah yang pertama tiba di daerah yang kosong ternyata Datuk Rajo Batuah sudah membuka perkampungan baru. Bukit tempat Datuk Lembang Bukiek memandang tadi selanjutnya diberi nama Kuliek (kini Korong Kuliek) yang berasal dari kata *kuliek* (bahasa Minangkabau yang berarti saya lihat). Sedangkan daerah kaki bukit tempat Datuk Lembang Bukiek *manyalisik* disebut Salisikan (kini Korong Salisikan) yang berasal dari kata *manyalisik* (bahasa Minangkabau yang berarti menyusuri untuk menghindari). Selanjutnya datang pula rombongan Datuk Tampang Hulu, sehingga *ninik mamak* yang membuka daerah Sungai Buluh terdiri dari Datuk Rajo Batuah, Datuk Lembang Bukiek, dan Datuk Tampang Hulu. Datuk-datuk lainnya yang datang kemudian di Sungai Buluh adalah pendatang yang telah membayar adat (adat diisi limbago dituang).²⁵

Struktur masyarakat Sungai Buluh sudah terbentuk sebelum abad ke-19. Wali Nagari sebagai pemimpin, kerapatan adat, bundo kanduang, sudah tertata termasuk juga

²⁵ Wawancara dengan HK. Dt. Tampang Hulu, Walinagari Sungai Buluh di Pasar Usang 6 Mei 2008.

aturan-aturan tentang pemanfaatan hutan dan tanah. Hal ini bisa terlihat dari surat yang ditanda tangani oleh ninik mamak Sungai Buluh pada tahun 1818 tentang pembagian dan pemanfaatan hutan dan tanah.

Pada tahun 1950-an ketika terjadi peristiwa PRRI, Nagari Sungai Buluh dipimpin oleh walinagari Luik Datuk Malano Basa dari tahun 1954 -1957. Pada masa PRRI ini, sebagian besar penduduk Nagari Sungai Buluh mengungsi sehingga pemerintahan kosong. Akibatnya pemerintahan Nagari Sungai Buluh diambil alih oleh Nagari Lubuk Alung. Pada tahun 1961, ketika suasana sudah aman, perangkat Nagari dan ninik mamak Sungai Buluh meminta ke Lubuk Alung agar wilayah mereka dikembalikan untuk menjadi nagari otonom kembali. Namun permintaan mereka tersebut tidak dipenuhi sehingga Sungai Buluh menjadi salah satu Korong di Nagari Lubuk Alung.

Walaupun Sungai Buluh merupakan bagian dari Nagari Lubuk Alung, namun secara adat dan hak ulayat tetap menjadi milik masyarakat Sungai Buluh. Dalam adat sendiri terdapat perbedaan yaitu di Sungai Buluh adat yang dipakai adalah Lareh Bodi Caniago sedangkan di Lubuk Alung Lareh Koto Piliang.

Pemimpin nagari (istilah dahulu disebut *angku palo*) Lubuk Alung yang pertama adalah Sutan Muaro Panjang Sunguik gelar Bajak Bunju pada masa kolonial Belanda, lalu diganti dengan Zakaria Datuk Bungsu pada masa revolusi²⁶. Pada masa *angku palo* Sutan Muaro Panjang Sunguik, orang Nias yang bernama Gapuk masih bekerja sebagai kuli pembangunan rel kereta api. Baru pada masa Zakaria Datuk Bungsu, tahun 1927 Gapuk diangkat sebagai penghulu orang Nias (*tuhonori*) dan mendapat tanah ulayat di Sungai Buluh.

²⁶ Zakaria awalnya tidak dapat diangkat sebagai *angku palo* karena bukan seorang penghulu, jadi oleh Belanda ketika itu, Zakaria difasilitasi untuk mendapat gelar penghulu dengan membayar adat kepada ninik mamak Sungai Buluh sehingga diberi gelar Datuk Bungsu.

Selanjutnya Zakaria Datuk Bungsu diganti oleh Zohar sebagai wali nagari Sungai Buluh pada masa perang kemerdekaan. Selanjutnya pada tahun 1954, di Nagari Sungai Buluh diangkat seorang Wali Nagari yaitu Luwik Datuk Malano Baso. Namun karena peristiwa PRRI, seluruh orang *cadik pandai* mengungsi. Akibatnya Nagari Sungai Buluh dijadikan korong dari Nagari Lubuk Alung pada tahun 1957. Pada tahun 1958 - 1960 Wali Korong Sungai Buluh dipegang oleh Buyung Adai. Pada masa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965, Buyung Adai merupakan salah seorang yang terlibat. Buyung Adai diganti dengan Syamsudin Datuk Sati Kampung Ampar. Lalu diganti Djosen namun tidak lama lalu diganti oleh M. Nur sebagai wali korong Pasar Usang. M. Nur diganti oleh Bagindo Jafar, lalu diganti oleh Basri Datuk Kando Marajo. Basri Datuk Kando Marajo diganti oleh Bagindo Jafar.

Pada tahun 1981, Korong Sungai Buluh diubah menjadi Desa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979. Wali Korong Sungai Buluh diubah menjadi Desa Pasar Usang dengan kepala desa pertama Bagindo Jafar. Bagindo Jafar diganti oleh Naharuddin pada tahun 1987 hingga 1993 dan dari tahun 1993 hingga 1998 selama dua periode. Pada tahun 1998 hingga 2004 kepala desa Pasar Usang dijabat oleh HK. Dt. Tampang Hulu. Pada Desember Tahun 2004 hingga sekarang Desa Pasar Usang berubah menjadi Nagari Sungai Buluh dengan Wali Nagari pertama HK. Dt. Tampang Hulu. Nama Nagari Sungai Buluh berasal dari banyaknya *buluh* (bambu) di sepanjang sungai Batang Anai yang masuk wilayah Nagari Sungai Buluh.

Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk menurut korong di Nagari Sungai Buluh yang terbanyak yaitu terdapat di Korong Kabun dengan jumlah 4.524 jiwa, sedangkan korong dengan jumlah penduduk terkecil terdapat di Korong Kali Air dengan jumlah 747 jiwa.

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan pada setiap korong tidak terlalu mencolok. Secara rata-rata untuk Nagari Sungai Buluh penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Namun ada juga beberapa korong yang justru penduduk perempuan lebih banyak. Perbedaan jenis kelamin dalam suatu daerah akan mempengaruhi produktivas pertanian sebagai sumber tenaga kerja. Karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan kasar hanya dapat dilakukan oleh pria seperti bekerja di kebun karet atau gambir, mengolah sawah, bengkel, dan lain-lain.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Di Nagari Sungai Buluh

No.	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	2.677	2.392	5.069
		2.826	2.512	5.338
2.	5 – 9	2.911	2.659	5.570
3.	10 – 14	2.304	2.316	4.620
4.	15 – 19	1.310	1.448	2.758
5.	20 – 24	1.214	1.380	2.594
6.	25 – 29	1.195	1.281	2.476
7.	30 – 34	1.272	1.409	2.681
8.	35 – 39	1.212	1.322	2.534
9.	40 – 44	1.112	1.159	2.271
10.	45 – 49	897	916	1.813
11.	50 – 54	656	744	1.400
12.	55 – 59	723	818	1.541
13.	60 – 64	487	625	1.112
14.	65 – 69	436	543	979
15.	70 – 74	323	541	864
16.	75 +			
	Jumlah:			
	2006	21.556	22.065	43.620
	2005	21.432	21.920	43.352
	2004	21.432	21.920	43.352
	2003	21.262	20.531	41.793
	2002	21.046	20.317	41.363

Sumber: Kecamatan Batang Anai Dalam Angka 2007

POTENSI PEREKONOMIAN

Nagari Sungai Buluh yang sebagian wilayahnya berada di daerah dataran tinggi, dan sebagian berada di dataran rendah serta berada di jalur lintas utama Padang – Bukittinggi. Letak daerah ini sangat strategis baik dilihat dari segi transportasi, potensi alam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan dan jasa, dan industri.

Sektor pertanian yang dominan adalah padi sawah, jagung, ubi kayu, dan durian. Daerah-daerah yang potensial bidang ini adalah Korong Kuliek dan Korong Salisikan karena berada di dataran tinggi. Daerah lainnya adalah Korong Tanjung Basung I dan Tanjung Basung II. Hampir 50% penduduk di daerah ini bekerja sebagai petani dan menggantungkan penghasilannya dari hasil pertanian.

Tanaman perkebunan yang masih tetap bertahap adalah tanaman kelapa dan gambir karena biaya produksi dan harga jual masih sebanding. Sebelumnya masyarakat masih menanam pohon karet di Korong Kuliek dan Salisikan, namun karena biaya produksi dengan harga jual tidak sebanding, maka tanaman ini ditinggalkan.

Komoditas utama di sektor perikanan adalah peternakan ikan gurami dan ikan nila. Namun peternakan ikan ini belum menjadi pilihan utama masyarakat karena harga jual yang relatif masih murah sehingga pekerjaan ini hanya sebagai sambilan di sekitar pekarangan rumah atau di ladang-ladang atau sawah yang belum ditanami. Kolam ikan dapat kita temui di Korong Tanjung Basung I dan II yang dikelola oleh sebagian orang Nias.

Sektor peternakan yang banyak diusahakan oleh masyarakat Sungai Buluh adalah peternakan ayam kampung, ayam petelur, dan itik (bebek). Di samping itu ada juga peternakan babi yang dikelola oleh keluarga-keluarga dari suku bangsa Nias di Korong Tanjung Basung I

Sektor perdagangan dan jasa di Nagari Sungai Buluh masih terbatas pada pedagang di pasar tradisional, warung-warung, sebagian kecil ruko, dan bengkel. Jenis dagangan

yang dijual masih terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari (sembako), peralatan bangunan, bengkel dan alat-alat kendaraan, perabotan, foto copy di Pasar Usang, tukang jahit, pedagang buah, dan koperasi.

Sektor industri masih sangat terbatas industri kecil di Korong Kabun. Industri yang ada masih terbatas pada usaha pengolahan kayu manis, usaha genteng, mie, dan obat-obatan yang umumnya masih berskala lokal kecuali industri obat. Potensi-potensi tersebut, seluruh masyarakat Nagari Sungai Buluh terserap pada usaha-usaha tersebut kecuali sebagian kecil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, militer/polisi, pegawai di kantor wali nagari, dan pegawai swasta.

Sosial Budaya

Kecamatan Batang Anai merupakan daerah yang multi etnik dan unik. Dikatakan multi etnik karena di daerah ini didiami oleh berbagai suku bangsa seperti Minangkabau, Nias, Jawa, dan Batak Mandailing. Dikatakan unik karena lebih banyak etnis luar dari pada Minangkabau sendiri, seperti etnis Batak di Desa Buayan²⁷ dan etnis Nias di Nagari Sungai Buluh yang memiliki penghulu dan ulayat sendiri.

Khusus di Nagari Sungai Buluh, etnis dominan adalah Minangkabau dan Nias. Etnis Nias memiliki keistimewaan karena memiliki tanah ulayat, memiliki penghulu sendiri (*tuhenön*) yang diangkat berdasarkan adat budaya Minangkabau, memiliki kebebasan beragama kristen, dan memelihara ternak babi sebagai mata pencaharian mereka.

Suku bangsa Minangkabau sebagai penduduk asal (asli) Nagari Sungai Buluh dibuka oleh 3 orang *ninik mamak* yang berasal dari Solok secara bergelombang. Ketiga *ninik mamak* ini datang ke daerah ini untuk mencari tanah ulayat

²⁷ Barangkali hanya Desa Buayan yang pemerintahannya berbentuk desa di seluruh kabupaten se Provinsi Sumatra Barat di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bentuk desa diterapkan karena penduduknya adalah etnis Batak Mandailing yang telah beradaptasi dengan budaya Minangkabau.

baru. Ketiga *ninik mamak* tersebut adalah Datuk Rajo Batuah dari *suku* Panyalai, Datuk Lembang dari *suku* Jambak, dan Datuk Tampang Ulu dari *suku* Tanjung. Setelah daerah ini terbuka, lalu datang beberapa *suku* lainnya dengan membayar adat untuk dapat tinggal dan memperoleh hak ulayat disamping ada juga pembelahan suku dari *suku-suku* yang ada. Hingga saat ini sudah terdapat 16 penghulu dari 5 suku di nagari Sungai Buluh.

Dalam struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Buluh hanya 16 datuk yang menjadi anggota KAN Sungai Buluh. Ketua KAN Sungai Buluh saat ini dipimpin oleh Datuk Putih. Sedangkan penghulu Nias tidak masuk dalam anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh. Namun menurut Penghulu Nias, ketika Nagari Sungai Buluh masih tergabung dalam Nagari Lubuk Alung, penghulu Nias masuk dalam anggota KAN Lubuk Alung dan mereka selalu diikuti bila membicarakan menyangkut adat. Enam belas *suku* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2: Datuk dan Suku di Nagari Sungai Buluh Tahun 2010

No.	Gelar Penghulu	Suku
1.	Datuk Rajo Batuah	Panyalai
2.	Datuk Lembang	Jambak
3.	Datuk Tampang Hulu	Tanjung
4.	Datuk Putih	Tanjung
5.	Datuk Bagindo Marah Banso	Tanjung
6.	Datuk Tanjung Basa	Tanjung
7.	Datuk Kando Marajo	Panyalai
8.	Datuk Mangkudum	Panyalai
9.	Datuk Panghulu Basa	Panyalai
10.	Datuk Bungsu	Panyalai
11.	Datuk Itam	Guci
12.	Datuk Mangkuto Sati	Koto
13.	Datuk Talanai	Jambak
14.	Datuk Sati Kampung Apar	Jambak
15.	Datuk Sati Kapalo Bandar	Jambak
16.	Datuk Tumanggung Sati	Koto
17.	Tuhenöri (penghulu Nias)	Nias
18.	Datuk Malano Basa (<i>panunggek</i> / wakil Datuk Lembang)	Jambak

Pada bidang agama, penduduk Nagari Sungai Buluh mayoritas beragama Islam. Namun demikian terdapat juga penduduk yang beragama Kristen Protestan dan Katolik. Penduduk Kristen protestan dan katolik ini merupakan komunitas suku bangsa Nias yang tinggal di Korong Tanjung Basung 1 dan Tanjung Basung 2. Kedua korong ini juga sudah berdiri sebuah gereja protestan milik suku bangsa Nias yaitu BNKP (Banua Niha Keriso Protestan), dan sebuah gereja katolik.

Sejarah Umum Keberadaan Orang Nias Di Sumatra Barat

Orang Nias merupakan sebuah suku bangsa yang daerah kebudayaannya berada di Kepulauan Nias yang berada Samudra Hindia sebelah barat Pulau Sumatra. Secara administratif wilayah kebudayaan tersebut berada di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara. Pada pertengahan abad ke-19 saat Pemerintahan Kolonial Belanda berkuasa di Nusantara, Pulau Nias berstatus sebagai *afdeeling* (daerah setingkat kabupaten). Bersama-sama dengan beberapa daerah lainnya yang terletak di Pesisir Barat Sumatra seperti Singkil, Barus, Sibolga, Natal, Angkola, dan Mandailing, secara administratif Nias masuk ke dalam wilayah Residensi Tapanuli yang kala itu masih bergabung dengan Pemerintahan Sumatra Barat (Sumatra Westkust). Setelah Indonesia merdeka, Nias bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara.²⁸

Suku bangsa Nias merupakan salah satu suku bangsa yang *mobile*. Secara hitungan kasar, orang Nias merantau ke berbagai daerah baik secara spontan maupun yang dikordinir

²⁸ Anatona Gulö, "Aspek-Aspek Historis Dalam Sistem Adat Nias di Kota Padang". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Universitas Andalas, 19 Agustus 2008. Hal. 2; baca juga Gusti Asnan. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak. Hal. 31.

oleh pihak ketiga.²⁹ Daerah perantauan orang Nias tidak hanya di Pulau Sumatra tetapi sudah menempati berbagai pulau di Indonesia maupun negara lain. Faktor adat perkawinan diperkirakan sebagai penyebab banyaknya perantau Nias di samping tekanan ekonomi di daerah asal yang kurang mendukung. Pola migrasi orang Nias sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesempatan yang dimiliki migran. Sehingga terlihat ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan proses, daerah tujuan, dan pekerjaan di daerah tujuan. Artinya semakin baik tingkat pendidikan seorang migran Nias maka semakin baik pula tingkat penghasilan migran tersebut.³⁰

Secara tradisional suku bangsa Nias mengenal empat strata yaitu :

1. Golongan bangsawan, di Selatan disebut *Siulu* terdiri dari dua golongan :
 - a. Golongan *Balösiulu* yang memerintah dan
 - b. *Siulu*
2. Rakyat jelata yang disebut *Sifagölötö* atau *Satou* terbagi atas empat golongan yaitu:
 - a. Rakyat biasa
 - b. Bangsawan, pemuka agama
 - c. Pemuka agama
 - d. *Binu* (budak akibat kalah perang atau diculik) *sondra hate* (yang menjadi budak oleh karena ditebus kerabatnya setelah dijatuhi hukuman mati sebagai sanksi terhadap pelanggaran adat). Dahulu golongan *binu*-lah yang paling buruk nasibnya

²⁹ Pihak ketiga maksudnya disini adalah orang atau kelompok tertentu yang mengorganisir keberangkatan orang Nias menuju suatu tempat tertentu untuk kepentingan tertentu seperti yang dilakukan oleh Portugis yang membawa orang Nias dari Pulau Nias untuk dipekerjakan atau diperjualbelikan sebagai budak pada abad ke-16.

³⁰ Sebagai gambaran tentang migrasi Orang Nias dapat dibaca pada Rois Leonard Arios. 1995. "Pola Migrasi Orang Nias". *Skripsi Sarjana Antropologi FISIP USU Medan*

karena diantara mereka dipilih kurban-kurban yang membutuhkan kurban manusia.

3. Pemuka agama pelbegu yang disebut *Are*
4. Budak yang disebut *Sawuyu*.

Mobilitas lapisan masyarakat itu hanya terdapat dalam golongannya saja, misalnya Golongan *Sato* dapat menjadi *Si'ila* (hanya satu generasi saja) atau Golongan *Sato* dapat memperoleh gelar karena sanggup membuat pesta besar (*owasa*) dengan memotong babi banyak dan menjamu orang banyak. Hal ini pun hanya satu generasi saja. Untuk menjadi *Balösiulu*, anggota *Siulu* harus sanggup untuk mengadakan pesta besar dengan memotong beratus-ratus ekor babi. Yang berhak menjadi *Tuhenöri* adalah anggota dari *Siulu* (*salawa* saja) dengan demikian stratifikasinya merupakan stratifikasi yang tertutup. Latar belakang terjadinya stratifikasi sosial di Nias adalah sebagai berikut : Lapisan Golongan *Bangsawan* maupun *Rakyat Jelata* serta *Are* terjadi berdasarkan keturunan. Lapisan golongan budak terjadi karena berdasarkan perang, diculik atau tak sanggup membayar hutang atau melanggar hukum adat dimana ditetapkan sanksinya hukuman mati.

Strata sosial Orang Nias tersebut sangat mempengaruhi mobilitas seseorang. Umumnya golongan budak menjadi komoditas yang paling murah untuk diperdagangkan. Ketika bangsa Portugis membutuhkan budak-budak untuk bekerja di kapalnya, maka orang Nias merupakan tenaga kerja yang murah.³¹ Faktor itu pula salah satu sebab terdapat orang Nias di berbagai tempat walaupun terkadang tidak lagi memunculkan identitasnya.

Salah satu daerah tujuan perantauan orang Nias adalah Padang. Padang merupakan salah satu daerah tujuan utama bagi perantau dari berbagai etnis di Nusantara pada abad ke-19. Pesatnya perkembangan Kota Padang ketika itu

³¹ Wawancara dengan Pak Kris di Jondul Rawang, Mei 2008.

terutama setelah beroperasinya Pelabuhan Teluk Bayur³² sehingga akses menjadi lebih terbuka. Berbagai etnis yang datang ke kota Padang ketika itu seperti Cina, India (Orang Keling)³³, Jawa, Batak, dan orang Minangkabau dari daerah lainnya. Para pendatang itulah yang menjadi penduduk asli Kota Padang, karena Kota Padang terbentuk dari komunitas suku bangsa yang datang ke daerah ini ketika itu.

Anatona Gulö menyatakan bahwa di antara para pendatang yang bukan Minangkabau tersebut, suku bangsa Nias termasuk suku bangsa yang pertama sekali datang ke Padang walaupun belum dapat dipastikan kapan persisnya Orang Nias tiba di Padang. Akan tetapi salah satu bukti yang dapat dijadikan rujukan adalah catatan-catatan yang terdapat dalam sejumlah dokumen arsip milik bangsa Eropa yang pernah datang dan berkuasa di Sumatra Barat (dahulu disebut Sumatra Westkust) pada masa dahulu. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diperkirakan bahwa orang Nias sudah ada di Padang sejak 300 tahun yang lalu (sekitar abad ke-18). Sebuah dokumen milik VOC (perusahaan dagang Belanda) pada abad ke-18 melaporkan bahwa pada tahun 1701 sudah ada orang Nias yang sampai di salah satu bandar niaga terkemuka di Pesisir Pantai Barat Sumatra, yaitu Padang. Sebagai bandar niaga, peranan Padang cukup menentukan untuk berbagai aktivitas terutama di bidang perdagangan dan pelayaran.³⁴

Selain catatan VOC (perusahaan dagang Belanda), juga ditemukan dalam catatan milik perusahaan dagang Inggris (EIC, *East India Company*) yang berkedudukan di *Fort Marlborough* Bengkulu³⁵. Dalam catatan tersebut disebutkan

³² Sekitar abad ke-14, Padang cuma sebuah kampung nelayan yang tak terkenal, dan baru di akhir 1790-an menjadi pelabuhan yang banyak dikunjungi kapal pedagang dari Inggris, Perancis, Portugis, dan Cina.

³³ Komunitasnya masih dapat kita temui di daerah Pasar Mudik Padang

³⁴ Anatona Gulö, *loc. cit.* Hal. 2 – 3

³⁵ Tentang keberadaan VOC dan IEC di Bengkulu dapat dibaca Abdullah Siddik. 1996. *Sejarah Bengkulu: 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka

bahwa pada tahun 1781, orang Nias di Padang terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok yang merdeka dan yang tidak merdeka. Sayangnya tidak ada penjelasan tentang jumlah orang Nias pada saat itu kecuali hanya jumlah orang Nias kelompok yang merdeka yang dicatat yaitu sebanyak 15 orang. Komunitas Orang Nias di Padang ketika itu sudah dipimpin oleh seorang kepala suku bangsa Nias dengan gelar Kapitan.

Pada tahun 1819 berdasarkan data susunan suku di Padang tahun 1879 – 1980, orang Nias merupakan pendatang terbanyak dengan jumlah 18 jiwa, penduduk asli 94 jiwa, Orang Cina 2 orang, Tamil 2 orang, dan Eropa 2 orang. Data ini berubah pada tahun 1874 yaitu pendatang Minangkabau berjumlah 68, Nias 11, Jawa 4, penduduk asli 84, Cina 10, Tamil 2, dan Eropa 3.³⁶

Pada masa itu pula orang Minangkabau, Cina, Nias, dan Tamil telah memiliki kelab dan perkumpulan masing-masing.³⁷ Adanya pengelompokan terhadap orang eropa asli sebagai kelas atas memunculkan sebuah aturan dalam berinteraksi dengan orang-orang pribumi. Colombijn juga mencatat bahwa orang eropa totok yang menikah dengan orang Nias akan dikucilkan dari masyarakat eropa totok dan dikelompokkan sebagai golongan masyarakat Indo-Eropa.³⁸ Hal ini disebabkan status orang Nias ketika itu yang umumnya sebagai pekerja kasar, pembantu rumah tangga, pekerja kebun yang memetik buah kelapa dengan menggunakan monyet yang terlatih.³⁹ Namun tidak sedikit pria eropa yang tertarik dengan wanita Nias yang umumnya cantik-cantik.

Orang Nias merupakan kelompok asli yang kedua datang ke Padang setelah orang Minangkabau. Mereka

³⁶ Freek Colombijn. 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah sebuah kota di Indonesia Pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak. hal. 68 – 69. Colombijn meragukan data statistik yang disebutkan di atas karena perubahan angka yang signifikan.

³⁷ *Ibid.* Hal. 100-101.

³⁸ *Ibid.* Hal. 101.

³⁹ *Ibid.* Hal. 107.

adalah suku minoritas yang berperan pada abad ke-19. Orang Nias dibawa oleh VOC ke daratan Sumatra sebagai budak sejak awal abad ke-17. Selama paruh pertama abad ke-19, orang Nias yang tidak mampu membayar hutangnya masih terus dibawa ke Sumatra sebagai budak hutang (*credit bondsmen*). Budak hutang ini dipekerjakan oleh majikan mereka, yang menebuskan utangnya sebagai imbalan, untuk beberapa tahun. Setelah masa kerja berakhir, mereka bebas kembali dan umumnya kembali menetap di Padang. Pada tahun 1854 sistem budak hutang ini dihapus oleh Pengadilan Negeri Padang. Pemukiman mula-mula orang Nias diperkirakan di Kampung Nias, tetapi kebanyakan tinggal di Gunung Padang sejak abad ke-19. Sejak masa itu orang Nias terus berdatangan ke daratan.⁴⁰

Menilik kehadiran bangsa Portugis ke Padang sebagai pedagang, maka bersamaan itu pula berdatangan penduduk imigran dari pulau Nias untuk bekerja sebagai buruh atau pembantu di pelabuhan bagi bangsa Portugis. Kedatangan orang Nias dibawa oleh para pedagang China yang datang ke Sumatra Barat dari pulau Nias pada awal abad ke-16. Mereka ditempatkan di berbagai daerah antara lain di Padang (terutama di daerah Muara), di daerah Pariaman dan Pasar Usang dan sebagian lain di daerah Muara Sakai Pesisir Selatan. Akan tetapi dari jumlah keseluruhan orang Nias tersebut lebih banyak ditempatkan di Padang.⁴¹ Daerah Seberang Palinggam merupakan kawasan mayoritas suku Nias di Kota Padang, yang merupakan daerah asal pendaratan masyarakat Nias di Kota Padang dari kepulauan Nias. Hal ini dimungkinkan karena daerah Seberang Palinggam merupakan kawasan yang berada dalam wilayah pinggiran sungai Batang Arau.

⁴⁰ *Ibid.* Hal. Hal 74 – 75.

⁴¹ Dikutip dari Sejarah Tari Balanse Madam (Balanse Madam Dance Of History) <http://indrayuda.blogspot.com/2008/01/sejarah-tari-balanse-madam-balanse.html>

Gusti Asnan⁴² juga mencatat bahwa sumber-sumber sejarah tertua mengatakan hubungan Minangkabau dengan Nias telah berkembang sejak awal abad ke-17. hubungan itu dirintis oleh para saudagar Aceh yang mengunjungi daerah itu untuk mendapatkan budak. Budak-budak dari Nias tetap tercatat sebagai mata dagangan di pantai barat Sumatera hingga dekade ke-3 abad ke-19. hubungan dagang dengan Nias semakin berkembang sejak masa VOC dan mencapai puncaknya setelah pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan di Sumatera Barat. Pada masa itulah Nias merupakan salah satu daerah yang menjadi bagian dari keresidenan pantai barat Sumatra. Berbagai hasil pertanian, hutan, dan laut Nias dibawa dan dipasarkan di kota-kota pantai Sumatra Barat. Pada masa itu pulalah sesungguhnya migrasi orang Nias dalam jumlah yang besar ke kawasan pantai Minangkabau berlangsung. Suku bangsa Nias dapat dikatakan sebagai suku bangsa selain Minangkabau yang paling banyak memukimi kawasan pesisir. Berbagai lapangan kerja mereka geluti, ada yang bekerja di pelabuhan, membantu orang Minangkabau dalam membuka tanah (hutan nipah) di kawasan pantai sehingga dari mereka ada yang memiliki tanah atau mendapat hak penguasaan tanah di kawasan itu serta tidak sedikit pula yang berusaha sendiri seperti dalam kegiatan pertanian, perdagangan, dan pengolahan minyak goreng. Sejak tahun 1907, orang Nias yang tinggal di daerah ini mulai menjadi sasaran kristenisasi. Kegiatan inilah yang menyebabkan banyak dari mereka yang menganut agama Kristen.

Orang Nias lebih berbaur dengan suku bangsa lain jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya pada awal abad ke-20, seperti halnya suku bangsa Jawa, Batak, dan Cina. Orang Nias diikat dengan adanya gereja suku yaitu BNKP (*Banua Niha Keriso Protestan*) bagi orang Nias yang telah masuk agama Kristen Protestan.

⁴² Gusti Asnan. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: PPIM. Hal. 202 – 203.

Upaya kristenisasi orang-orang Nias di Pulau Nias maupun di Kota Padang berasal dari datangnya beberapa tenaga RMG (*Reinische Mission Gesselchaft*) ke Nias. Akibat perang, sekitar tahun 1860 beberapa tenaga RMG kehilangan tempat kerja. Salah seorang di antara mereka bernama E.L. Denninger. Sebelum diutus ke Kalimantan ia pun telah menjadi tukang sapu cerobong asap rumah-rumah di Berlin. Pengurus RMG di Barmen, Denninger disuruh pergi ke tanah Batak, tetapi karena istrinya sakit ia terpaksa tinggal di Padang. Ia menjalin hubungan dengan orang-orang Nias di perantaraan sana. Namun, ia berpendapat bahwa lebih bermanfaat kiranya kalau pergi ke Nias sendiri. Pada tanggal 27 September 1865 Denninger mendarat di Gunung Sitoli. Sebelumnya dua Misionaris (Katolik) bangsa Perancis pernah bekerja di Nias (1832-1835), namun karya mereka tidak meninggalkan hasil yang nyata.⁴³ Ada kemungkinan bahwa orang Nias yang menganut agama kristen yang pertama justru di Padang dan menurut informasi lisan yang diperoleh disebutkan bahwa berdirinya Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) tahun 1936 di Pulau Nias banyak didukung oleh orang Nias yang ada di Padang.⁴⁴

Berkurangnya porsi orang Nias dalam populasi Kota Padang terjadi karena dua proses. Pertama, banyak yang telah menganut kebiasaan Minangkabau dan menolak warisan budaya mereka sendiri. Saat ini banyak orang Nias yang malu dengan asal usul mereka dan kurang percaya diri dibanding sewaktu penjajahan, di mana kelompok penari Nias mempertunjukkan tarian tradisional mereka di atas panggung. Kedua, orang Nias sudah mencair karena perkawinan campuran. Kaum wanita Nias sangat disenangi oleh bangsa penjajah Belanda dan Cina yang jumlah kaum lelaki

⁴³ "Pekabaran Injil dan Gereja di Nias dan Pulau-pulau Lain Lepas Pantai Sumatera (1865-sekarang)", diunduh dari www.sabda.org. Bagaimana strategi Zending RMG mengkristenkan orang Nias di Pulau Nias dapat di baca pada Rois Leonard Arios. 1995. *Loc. Cit.* Hal. 59.

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Kris (Pak Janggut) tanggal 12 Mei 2008 di Padang.

berlebih. Lebih dari itu, kaum wanita Nias terkenal karena kecantikannya dan banyak orang yang telah membuat lagu puji-pujiannya.⁴⁵ Alasan agama dan budaya, wanita Nias lebih cenderung memilih menikah dengan pria Cina atau sebaliknya karena tidak akan menimbulkan masalah terutama karena keduanya beragama kristen dan tidak ada pantangan memakan daging babi.⁴⁶

Berdasarkan beberapa informasi lisan, di Kota Pariaman saat ini banyak terdapat keturunan orang Nias yang tidak lagi menunjukkan identitasnya sebagai orang Nias. Nama dan marga (bahasa Nias: *mado*) Nias tidak dipakai lagi dan sudah diganti dengan nama-nama yang mengacu pada agama Islam atau budaya Minangkabau.⁴⁷ Hal ini terjadi sebagai sebuah strategi adaptasi mereka terhadap lingkungan sosial dan budaya setempat. Pariaman sebagai sebuah bandar dagang⁴⁸ ketika masa VOC merupakan tempat tinggal pertama orang Nias sebelum sebagian diantaranya menyebar hingga ke Padang terutama ketika Pelabuhan Teluk Bayur dibuka. Alasan strategi adaptasi, tidak sedikit juga orang Nias yang menetap di Padang mengaburkan identitasnya sebagai orang Nias termasuk dengan meninggalkan kepercayaan tradisional mereka⁴⁹ dan menganut agama Islam setelah

⁴⁵ Freek Colombijn. 2006. *op.cit.* hal. 75.

⁴⁶ Dalam adat Nias terutama adat Nias yang masih asli, keberadaan daging babi merupakan keharusan baik dalam seluruh upacara lingkaran hidup (*life cycle rites*) maupun dalam upacara-upacara lainnya. (Baca Rois Leonard Arios. 1995. *Loc. Cit.* Hal. 66-71; Baca juga BamBöwö Laiya, 1983. *Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias*. Yogyakarta: UGM Press.)

⁴⁷ Nama seperti Abdullah merupakan salah seorang Nias dengan ibu orang Minangkabau tinggal di Pariaman dan mengaku sebagai orang Minangkabau (sumber informasi tidak bisa disebutkan penulis).

⁴⁸ Sejarah Pariaman sebagai bandar dagang dapat dibaca pada Erniwati, dkk. 2007. "Kota Pariaman Dari Bandar Dagang Menuju Kota Administrasi". *Laporan Penelitian* Direktorat Nilai Sejarah Depbudpar Jakarta.

⁴⁹ Agama tradisional orang Nias disebut *molehe' adu* (oleh orang Nias Padang disebut *adu-adu*) yaitu kepercayaan terhadap kekuatan roh nenek moyang yang personifikasikan dalam bentuk patung-patung kayu menyerupai manusia. Patung-patung ini disimpan pada tempat-tempat tertentu dan pada saat-saat tertentu diberi "makan". Patung yang ditempati oleh roh tersebut disebut dengan *adu satua* yang harus dihormati dan dirawat. (Tentang agama tradisional orang Nias baca Rois Leonard Arios. 1995. *Loc. Cit.* Hal. 58-60; Baca juga BamBöwö Laiya, 1983. *Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias*. Yogyakarta: UGM Press.)

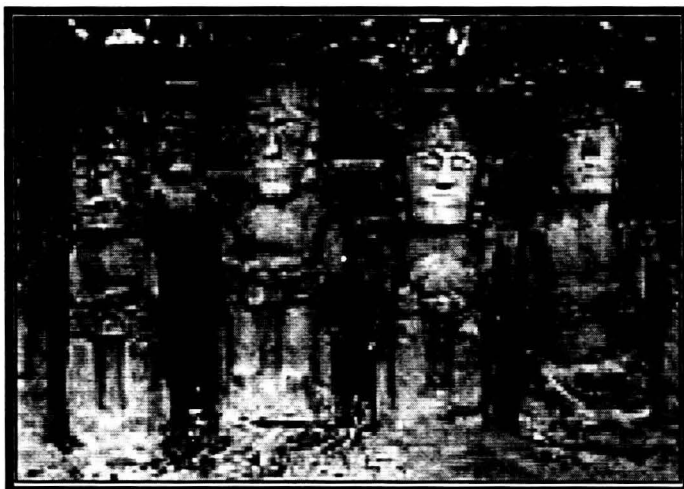
menikah dengan perempuan Minangkabau atau sebaliknya. Sedangkan yang masih mempertahankan identitasnya adalah orang Nias yang masih menganut kepercayaan *adu-adu* atau yang menganut agama Kristen (protestan atau katolik) dan menikah dengan sesama orang Nias atau suku bangsa lain. Akibatnya hingga saat ini tidak dapat lagi didata berapa jumlah orang Nias di Kota Padang.⁵⁰ Pendataan yang mungkin dapat dilakukan hanya terbatas pada orang-orang Nias yang tergabung dalam organisasi IKMN (Ikatan Keluarga Masyarakat Nias), Lekanis (Lembaga Kerapatan Adat Nias), dan data anggota jemaat gereja BNKP di Kota Padang ataupun gereja BNKP dan gereja Katolik di Nagari Sungai Buluh.

Pengaburan identitas orang Nias melalui perkawinan juga dicatat oleh Colombijn.⁵¹ Wanita Nias yang begitu cantik akan dikejar oleh orang Cina sedangkan pria Nias yang jumlah berlebihan akan mencari pasangan wanita Minangkabau. Resiko yang diambil oleh pria Nias yang menikahi wanita Minangkabau adalah harus masuk agama Islam. Hal ini mengakibatkan kaum kerabatnya akan marah demikian pula orang Nias lainnya yang masih memegang prinsip adat dan agama Kristen. Anak-anak hasil perkawinan campuran wanita Nias dan pria Cina akan mewarisi garis keturunan ayahnya dan menjadi orang Cina. Sedangkan anak-anak dari pria Nias dan wanita Minangkabau akan mewarisi garis keturunan

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Kress alias Pak Janggut Zaluku tanggal 12 Mei 2008 di Jondul Rawang Padang dan wawancara via telepon dan surat dengan Bapak M. Yusuf Sisus Lömbu di Jakarta. Khusus Pak Kress hingga saat ini masih tetap menganut kepercayaan *adu-adu* walaupun beliau sudah menganut agama Katolik. Sedangkan orang tua dari Bapak M. Yusuf Sisus Lömbu merupakan penganut terakhir kepercayaan *adu-adu* di Kota Padang sebelum memilih masuk Kristen dan sebagian masuk Islam.

⁵¹ Freek Colombijn. 2006. *op.cit.* 217 – 218.

ibunya dan menjadi orang Minangkabau. Akibatnya orang Nias (pria dan wanita) akan melepaskan identitas asalnya dan masuk dalam golongan atau suku bangsa yang baru.



Gambar Patung (*adu-adu*) Orang Nias dahulu

Sejarah Orang Nias di Tanjung Basung⁵²

Sampai akhir tahun 1800-an keberadaan orang Nias di Sumatra Barat termasuk di Kabupaten Padang Pariaman tidak lepas dari peran mereka sebagai tenaga kerja. Sejarah keberadaan orang Nias di Tanjung Basung terkait erat dengan proyek pembangunan di Sumatra Barat yang dikenal dengan istilah tiga serangkai yaitu pembangunan batubara ombilin,

⁵² Bahan yang dipakai tentang sejarah orang Nias di Tanjung Basung merupakan makalah Bapak Antony Zebua dan atas izin beliau disadur seluruhnya dengan penambahan dari hasil konfirmasi dan analisa dari sumber-sumber lainnya. Tony Zebua. "Sejarah Orang Nias di Tanjung Basung Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman: Sebuah Pengantar Diskusi". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Universitas Andalas, 19 Agustus 2008.

pembangunan pelabuhan *Emmahaven* (Teluk Bayur), dan pengerjaan jalan kereta api yang menghubungkan Ombilin dengan Teluk Bayur.

Pemasangan jalur rel kereta api Ombilin menuju Teluk Bayur bertujuan untuk mengangkat batu bara, melewati Sungai Buluh Pasar Usang yang waktu itu berada dalam lingkup Kenagarian Lubuk Alung. Untuk membangun jalur rel ini, pemerintah Belanda menggunakan banyak tenaga kerja di antaranya termasuk Orang Nias.⁵³ Waktu itu pekerjaan sangat sulit karena harus menebang hutan lebat, menimbun rawa, dan lain-lain. Tidak banyak orang yang sanggup mengerjakan pekerjaan seperti itu. Orang Nias ternyata termasuk yang bersedia mengerjakan proyek tersebut.

Menyaksikan keuletan Orang Nias ketika mengerjakan proyek pembuatan jalan kereta api tersebut, masyarakat Sungai Buluh yang tinggal di sekitar jalur rel merasa simpati. Tidak hanya sampai di situ, masyarakat melalui Dt. Rajo Batuah dan Wali Nagari Lubuk Alung menawarkan dan mengajak orang Nias yang telah selesai mengerjakan rel agar mau bekerja di tanah mereka untuk merambah dan membersihkan hutan (*manaruko*) di wilayah Sungai Buluh.

Tanpa menunggu waktu, tawaran penduduk asli untuk mengerjakan lahan kepada orang Nias dapat diterima oleh Orang Nias. Siguna Maraja Jagö akhirnya memimpin orang Nias untuk merambah hutan di sana pada penghujung abad ke-19. Sebelum hutan dirambah terlebih dahulu dibuat sebuah perjanjian. Bila hutan yang dirambah nantinya bisa menjadi kampung tempat tinggal (hunian), maka akan diberikan

⁵³ Tenaga kerja lain diantaranya berasal dari suku bangsa Batak Mandailing yang pada akhirnya menetap di Desa Buayan Kecamatan Batang Anai dan berbatasan langsung dengan Nagari Sungai Buluh. Baca Adri Febrianto, Etmi Hardi, dan Bustaman. 2003. "Integrasi Warga Berbeda Suku Bangsa Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". *Laporan Penelitian* Jurusan Sejarah FIS UNP Padang; baca juga Dessia Roza. 2001. "Tinjauan Historis Tentang Perubahan Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat Buayan di Kabupaten Padang Pariaman". *Skripsi Sarjana* Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP Padang.

kepada orang Nias dan dapat dimiliki. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Selain bersedia membersihkan hutan tersebut, orang Nias juga diwajibkan mengisi syarat menurut sepanjang adat di Minangkabau khususnya adat masyarakat yang berlaku di Nagari Sungai Buluh – Lubuk Alung. Beberapa lama setelah itu, daerah yang semula terdiri dari hutan lebat, sekarang sudah berhasil dibersihkan sehingga dapat dihuni. Lalu terbentuklah perkampungan. Masyarakat di sana langsung mendiami untuk didiami dan berladang.

Lama kelamaan setelah jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di Sungai Buluh semakin banyak, para pemuka masyarakat dan wali nagari kemudian menepati perjanjian yang telah disepakati. Masyarakat Nias yang bermukim di sana kalau ingin tetap tinggal wajib memenuhi syarat "isi adat" seperti yang dijanjikan dan disepakati sebelumnya. Syarat itu disetujui. Pada tanggal 10 Desember 1927, Orang Nias mengisi adat kepada Nagari Lubuk Alung Sungai Buluh dalam sebuah upacara yang disebut *manjamu nagari*. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 10 Februari 1928 dilanjutkan dengan memberi hak penuh kepada masyarakat Nias yaitu hak memiliki tanah hutan dan kampung. Selain hak-hak atas tanah dan hutan, orang Nias juga mendapatkan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri di bawah kepemimpinan suku bangsa Nias, termasuk dalam hal kebebasan menganut agama. Untuk itu diperlukan sekali standar kepemimpinan adat suku Nias dalam perjanjian nagari tanggal 10 Desember 1927 tersebut dengan segala adat yang telah diisi dan dijamukan Orang Nias dibenarkan memakai perangkat adat yang disesuaikan di dalam upacara adat Nias.

Dalam perjanjian nagari tersebut juga diatur batas-batas tanah ulayat Orang Nias di Nagari Lubuk Alung Sungai Buluh. Dalam kesepakatan tersebut batas-batas ulayat orang Nias meliputi hampir seluruh wilayah Nagari Sungai Buluh yaitu berbatasan dengan wilayah Nagari Ketaping di sebelah barat, wilayah korong Tanjung Basung II, wilayah Korong Pasar Usang, wilayah Korong Tanjung Basung I, dan wilayah

Korong Kabun. Bahkan dahulu pernah disarankan untuk menguasai wilayah bandara Ketaping (sekarang) ketika masih hutan belantara namun tidak kerjakan karena terlalu luas.⁵⁴

Waktu itu juga disusun struktur kepemimpinan masyarakat Nias di Nagari Sungai Buluh di bawah kepemimpinan seorang penghulu, bernama Gapuk Zebua. Selain itu dibawahnya masih ada tiga orang lagi petua adat yaitu:

1. Gera Era Harefa;
2. Ensan Jagö;
3. Jumahat Zai.

Suku Nias di dalam Nagari Sungai Buluh berstatus sama dengan masyarakat Minangkabau di nagari tersebut yaitu duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Segala adat yang telah diisikan kepada nagari menjadikan pusaka kepada anak cucu sampai di kemudian hari. Mungkin kalau melihat dan mendalami keberadaan suku Nias yang berada di Tanjung Basung Nagari Sungai Buluh Pasar Usang adalah suku Nias yang merantau di tanah Minangkabau yang melaksanakan pepatah "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung" dalam masyarakat Minangkabau bila merantau ke negeri orang.

Selanjutnya di bidang agama juga terjadi perkembangan. Orang-orang Nias yang sebelumnya menganut kepercayaan *adu-adu* mulai meninggalkan kepercayaan tersebut dan menganut agama Kristen. Hal ini sebagai hasil dari upaya RMG (Reinische Mission Gesselchaft) yaitu misionir Protestan dari Jerman di Padang dan Pasar Usang sejak akhir abad ke 19. Pada awal abad ke-20 Dorsaf bertugas di Pasar Usang yang membina orang-orang Nias agar masuk agama Kristen. Pada tahun 1907 berhasil membaptis beberapa orang Nias hingga pada tahun 1922 berdiri 2 buah gereja BNKP (Banua Niha Keriso

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Agustinus Zebua, *tuhenöri* Orang Nias di Sungai Buluh, di Tanjung Basung.

Protestan) di Tanjung Basung. Namun pada agresi pertama Belanda, gereja tersebut dibakar oleh masyarakat setempat karena dianggap lebih mendukung penjajah Belanda sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat.⁵⁵

Pemilikan Lahan

Colombijn⁵⁶ mencatat bahwa pada abad ke-18 dan 19 pendatang Cina, Eropa, dan Nias cukup sulit mendapatkan sebidang tanah. Mereka hanya bisa mendapatkan tanah itu dalam bentuk pegang-gadai, dan kemudian menunggu apakah si penggadai dapat menebus hutangnya. Tanah tersebut hanya menjadi kepemilikan secara *de facto*, namun pendatang tidak akan pernah mendapatkan kepemilikan penuh atas tanah tersebut, karena hal tersebut memberikan kesempatan kepada si penggadai untuk menuntut kembali tanah mereka setelah berpuluh tahun ditempati. Tahun 1819 menjadi tahun penting bagi orang Cina dan Nias ketika Belanda kembali ke Padang dan menjual tanah yang mereka tempati sebagai benteng ke orang Cina dan Nias. Dikeluarkannya sertifikat hak milik menjadikan orang Cina dan Nias memiliki tanah dengan sertifikat hak milik.⁵⁷

Orang Nias di Tanjung Basung memperoleh tanah sebagai hibah dari hasil perjanjian tanggal 10 November 1972 ketika pengangkatan Penghulu Nias pertama kalinya. Tanah yang diberikan merupakan tanah tempat tinggal bagi masyarakat Nias yang berarti orang Nias berhak memanfaatkan, menjual, dan mewariskan ke anak-anaknya dengan seizin penghulu Nias. Wilayah pemukiman orang Nias ini hampir setengah dari luas wilayah Nagari Sungai Buluh. Namun saat ini, orang Nias hanya menempati beberapa areal

⁵⁵ Bakhtiar, Nurman Agus, dan Murisal. 2005. *Ranah Minang Ditengah Cengkraman Kristenisasi*. Jakarta: Bumi Aksara: baca juga Gusti Asnan. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: PPIM

⁵⁶ Seperti yang dikutip Freek Colombijn. 2006. *op.cit.* Hal. 273 dari De stuers, Nota over het regt op het land 21-5-1829, Arsip Nasional Jakarta (ARNAS), Sumatra's Westkust 147/25.

⁵⁷ Freek Colombijn. 2006. *op.cit.* Hal. 273.

saja sebagai pemukiman maupun sebagai lahan pertanian. Kondisi ini diakibatkan banyaknya tanah yang dijual kepada orang-orang yang bukan Nias.

Pembagian Wilayah Adat

Untuk memimpin, terutama pada pelaksanaan upacara adat Nias di Padang dan Sumatra Barat ada yang disebut Penghulu Adat. Di Kota Padang dan di Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di Nagari Sungai Buluh Pasar Usang Kecamatan Batang Anai (bahasa Nias, *Tuhenön*) dan ada yang disebut Kepala Kampung, dan ada yang disebut Pucuk Adat.

Dulunya di Padang ada 8 Kepala Kampung Adat Nias yang disebut 8 wek (berasal dari bahasa Belanda, *wijk*), yaitu:

1. wilayah wijk satu : wilayah Tabing dan sekitarnya
2. wilayah wijk dua : wilayah Purus/Ulak Karang dan sekitarnya
3. wilayah wijk tiga : Kampung Jawa dan sekitarnya
4. wilayah wijk empat : Kampung Nias dan sekitarnya;
5. wilayah wijk lima : Palinggam dan sekitarnya;
6. wilayah wijk enam : Simpang Enam dan sekitarnya;
7. wilayah wijk tujuh : Seberang Muara dan sekitarnya
8. wilayah wijk delapan : wilayah Teluk Bayur dan sekitarnya

Pembagian wilayah tersebut dilakukan untuk pertama kalinya yang mengacu pada jumlah kedatukan di Kota Padang pada awal abad ke-19. Saat ini wilayah adat orang Nias sudah dibagi menjadi 12 wilayah termasuk 4 wilayah di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Salah satunya adalah wilayah Tanjung Basung. Setiap wijk (wilayah) dipimpin oleh seorang *tua kafo* dan dibantu beberapa perangkat lainnya.

Fungsi dari pembagian wilayah ini adalah untuk memudahkan pengendalian masyarakat baik di bidang sosial dan pelaksanaan adat. Setiap orang Nias yang baru tiba di Sumatra Barat wajib melaporkan dirinya kepada *tua kafo*.

Adat Nias Padang

Disebut sebagai adat Nias Padang karena aturan yang disusun oleh tokoh-tokoh adat Nias pada masa lalu terdiri dari bermacam-macam *mado*⁵⁸ dan kampung asal dari Pulau Nias. Selain adat yang berasal dari Nias, mereka juga mengadopsi adat yang ada di sekitar tempat tinggal di Padang. Penggabungan tata cara inilah yang disebut dengan istilah Adat Nias Padang (*nias wada* atau *ono Niha wada*, bahasa Nias). Dalam adat Nias Padang tidak ditemui lagi adat asli dari satu kampung yang ada di Pulau Nias. Hal ini terlihat pada kombinasi atau campuran bermacam-macam tata cara seperti pakaian pengantin dan perhiasan rumah (ala minang), makanan ayam *bulek* (ala China), dan lain-lain.⁵⁹

Martini SY dalam wawancaranya dengan Harun al Rasyid pada tanggal 22 Juli 1999 mengungkapkan bahwa pusat pemerintahan suku bangsa Minangkabau yang ada di Kota Padang yakni di Alang Lawas mengakui bahwa pada masa lalu adat suku Nias diterima oleh masyarakat Minangkabau dengan syarat mengisi adat berupa satu ekor kerbau, enam belas keping perak, delapan *carano* berisi sirih lengkap. Orang Nias sudah melakukan dan memenuhi persyaratan tersebut. Cara yang demikian membuat suku bangsa Nias yang bermukim di Kota Padang diizinkan memakai satu perangkat pakaian pengantin, sunting, dan perhiasan rumah berupa langit-langit berwarna kuning, pada saat berlangsungnya sebuah pesta perkawinan. Sudah lazim dalam adat Nias di Kota Padang dan Sumatra Barat memakai pakaian pengantin ala Minang.⁶⁰

⁵⁸ Istilah yang dipakai untuk menyebut klen secara patrilineal

⁵⁹ Tawanto Lawolo. "Beberapa Permasalahan Adat Nias di Sumatera Barat dan Upaya Pemecahannya". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Universitas Andalas, 19 Agustus 2008. Hal. 2.

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 2.



Salah satu bagian Upacara Adat Perkawinan Nias yang telah menggunakan pakaian Minangkabau

Adat perkawinan suku bangsa Nias di Padang merupakan modifikasi antara adat Nias dari Kepulauan Nias dengan budaya suku bangsa Minangkabau. Berbagai perubahan dilakukan mulai dari pertunangan hingga upacara perkawinan itu sendiri. Satu hal yang paling mendasar berubah adalah dalam hal mas kawin (*jujuran*). Berikut diuraikan ringkasan perbandingan adat perkawinan Nias di Kepulauan Nias dengan adat perkawinan Nias di Padang (disebut adat Nias Padang).⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Nichamö Daeli (Pak Nico) di Padang agustus 2008. Hasil wawancara ini juga terdapat pada Nichamö Daeli. "Perbandingan Adat Perkawinan Nias di Pulau Nias dan di Padang". *Makalah Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat universitas Andalas, 19 Agustus 2008

1. Proses Awal Pertunangan/Lamaran:
 Pulau Nias : Ditunjuk seorang Perantara (*Si'o*) Untuk menyampaikan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan
 Padang : sama dengan di atas
2. Pertunangan (*Afo si sara*)
 Pulau Nias : Setelah ada kecocokan kedua belah pihak, ditentukan waktu pelaksanaan pertunangan (*Femanga Afo Si sara*)
 Padang : Sama dengan di atas, hanya saja nama yang berbeda yaitu *Famaigi Bungo*.
3. *Famaigi Böwö* (kunjungan pihak perempuan kepada pihak laki-laki)
 Pulau Nias : Pihak perempuan memperhatikan dengan cermat keluarga calon laki-laki
 Padang : Adat Nias di Padang tidak lagi melaksanakan hal ini, karena sudah disepakati sejak dilaksanakan *Famaigi Bungo*
4. *Fangai Böwö* dan *Folau Bawi*
 Pulau Nias : Mengantar semua kebutuhan yang telah ditapkan menurut adat Nias, sekaligus pada saat itu mengadakan *Famee'e Ni'owalu* yaitu oleh pihak keluarga, paman dan famili terdekat memberikan tuntunan hidup berumah tangga.
 Padang : Istilah Nias Padang *Feme Kolambu* dan *fasömba* (sungkem kepada kedua orang tua dan pihak paman serta sanak saudara).
5. *Fangowalu* (Pesta Pernikahan)
 Pulau Nias : Puncak acara pada saat itu adalah *feme'e afo* (pemberian sirih sesuai dengan ditentukan sebelumnya, *fangerai Böwö* (menghitung jujuran) dan setelah itu dilaksanakan *Fanika Gera-Era MBöwö* (oleh Kepala Adat memberikan nasehat-nasehat kepada

penganten Laki-laki) dan kemudian ditentukan hari pelaksanaan *Famasao Ni'owalu*.

Padang : Mendudukan Kepala Adat (*Kafalo Kafo*) kemudian *Fafaego ndra Ama, Fama'oli Tawuo, Famatöörö Töi Ni'owali* (Mengganti nama Penganten Perempuan sesuai kedudukan *Bosi* pihak laki-laki).

6. *Famasao Ni'owalu*

Pulau Nias : Mengantar Penganten Perempuan ke Rumah Pihak Laki-laki sesuai hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh seluruh warga kampung pihak perempuan, pada saat itu juga dilaksanakan *famolayan* (penghormatan) kepada Kedua orang tua (*Ama/Ina*), Paman (*Sibaya/Fo'omo Zibaya*) dan lain-lain. Setelah selesai semua dilaksanakan *Famotu* (nasehat) kepada kedua orang penganten.

Padang : Nias Padang tidak ada istilah *Famasao*, langsung setelah selesai pesta perkawinan di rumah pihak perempuan dibawa langsung oleh pihak laki-laki kerumahnya dengan diantara oleh beberapa orang sanak saudara.

7. *Famasao Gö* (mengantar makanan perempuan)

Pulau Nias : Setelah dilaksanakan pesta perkawinan, oleh pihak penganten perempuan mengantar seperangkat makanan yang enak kepada penganten perempuan.

Padang : Sama dengan di atas.

8. *Femanga Gahe/Fangasiwai Halöwö* (Penyelesaian Pekerjaan Menurut Adat).

Pulau Nias : Kunjungan perdana Penganten Laki-laki dan Perempuan ke rumah orang tua Perempuan, dengan membawa

makanan dalam satu tempat yang disebut *So'u-so'u* beserta nasi yang dibungkus, serta membawa perlengkapan yang dipinjam selama pelaksanaan pesta perkawinan, dan kembali ke rumah pihak laki-laki dengan membawa kembali *So'u-so'u* yang diisi makanan serta membawa semua hadiah yang diberikan oleh orang tua pihak perempuan, biasanya berupa seperangkat alat-alat kebutuhan sehari-hari serta induk dari binatang peliharaan seperti, ayam betina dan jantan, anak babi betina dan jantan dll.

Padang : Nias Padang hampir sama, hanya saja istilahnya berbeda yaitu *Fangasiwai Halöwö*, dan pada saat ini baru dilaksanakan *famotu* (pemberian nasehat kepada kedua mempelai).

Nasehat yang diberikan kepada pengantin laki-laki dan perempuan oleh orang tua, paman, dan kerabat dekat lainnya umumnya berisi tentang bagaimana berinteraksi dengan mertua, kerabat perempuan, kerabat laki-laki dan harapan-harapan agar memperoleh anak laki-laki dan perempuan serta kekayaan. Berikut contoh nasehat-nasehat (*Fanika Gera-Era MBöwö*) dalam perkawinan.

1. *Onoma andre tuho dödö, ba saohagölöma ia, böi bözi ba zi Löbörö, böi fofanö lö awö, böi khokhoi mbolania ba böitabambu. Na ösawö goroisama andre ba nifatö ömö ndra'ugö, asoso gömöu sadaha-daha, sara gana'a ba sageu mbawi.*
2. *Na mofönu ndra'ugö khönia, ba na molo'i ia ira'u daru-taru nawu, ba böi bözi ia ba da'ö, me salah'i zatuania daru-taru nawu andrö. Na öfalua asoso gömöu sadaha-daha sara gana'a ba sageu mbawi.*
3. *Na mofanö ami ba lala, ba böi be'e furi ia, faböi lawa'ö niha, te sawuyunia. Na'ölau da'ö ba nihuku ndra'ugö,*

asoso gömöu sadaha-daha, sara gana'a ba sageu mbawi.

4. *Na lö muhede ndra'ugö khöma ya'aga fala'osau, he khö ndra sibayau awö nuwu si sagötö, na ö'osilö mangilagö gofu heza falukha ami, ba tehuku ndra'ugö, ba hörömö tefatö lada simatonga ahurö gömöu sadaha-daha, sara gana'a ba sageu mbawi.*
5. *Na lö öbe'e roko ma na lö öfaolagö walö roko ba mbola mbagou, ba ma lö ö'owai, ba nitegu ndra'ugö, asoso gömöu sadaha-daha, sara gana'a ba sageu mbawi.*
6. *Na öböda ndra'ugö yomo ba mbagi nora ma ba mbawa duwu-tuwu na ö'ila ndra'aga ba golayama ba nitegu ndra'ugö sara gana'a ba sageu mbawi.*
7. *Ero na'alua ndröfi na mamasi ndra'ugö ba ö'ohe ö ndra amau matuau. Na lö öfalua da'ö ba nifatö ömö ndra'ugö, sara gana'a ba sageu mbawi.*
8. *Na mofua ndra'ugö ma ahulu'ö, ba öfalua duria khöndra amau matuau, na lö öfalua da'ö ba nifatö ömö ndra'ugö, sara gana'a ba sageu mbawi.*
9. *Ma öfahö ni'owuru ma ösöbi mbawi ömöu ba zitenga bö'ö, ba öfalua nikhu-ikhu khö ndra amau matuau. Na lö öfalua da'ö ba asoso gömöu sadaha-daha, sara gana'a ba sageu mbawi.*

Beberapa Permasalahan dalam perkawinan Orang Nias di Padang dan di Pulau Nias dapat dilihat pada uraian berikut. Pelaksanaan adat di Pulau Nias sangat banyak persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi dan telalu banyak hari yang dipergunakan untuk melaksanakan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan perkawinan. Sedangkan Adat Nias di Padang sangat singkat dan tidak terlalu banyak memakan waktu serta persyaratannya tidak terlalu ruwet. Masalah *Böwö* (Mahar/Jujuran). Adat di Pulau Nias, sangat besar biaya *böwö* yang harus dilaksanakan karena semua dijadikan ukuran pada babi seperti uraian di atas walaupun sudah dilaksanakan perubahan *böwö* melalui *Fondrakö* tetapi masih juga belum bisa dijangkau oleh orang-orang biasa, namun belakangan ini *böwö* di atas hanya *bosi* si 10 atau *bosi* si 9 yang masih melaksanakan hal ini, sedangkan

kenyataannya sekarang sudah mulai melaksanakan perkawinan dengan jujuran 31 x 4 alisi atau dengan uang sebesar ± Rp.25.000.000,- Sedangkan Adat Nias di Padang biaya *böwö* tidak terlalu besar dan sangat ringan serta dapat terjangkau oleh semua lapisan, pada umumnya *böwö* Adat Nias di Padang hanya untuk kebutuhan pelaksanaan pesta perkawinan, bahkan orang tua pihak perempuanlah yang lebih besar mengalami kerugiannya. Famasao Ni'owalu (Mengantar Penganten Perempuan ke Rumah Penganten Laki-laki). Di Pulau Nias terdapat istilah *Famasao Ni'owalu*, yaitu setelah dilaksanakan Pesta Perkawinan di Rumah Penganten Perempuan, maka ditentukan waktu untuk kapan Penganten Perempuan diantar ke tempat penganten laki-laki, namun itu semua setelah selesai semua *Böwö* lunas sesuai yang ditetapkan pada waktu Fangerai *Böwö*, baru boleh dilaksanakan Famasao Ni'owalu ke tempat penganten laki-laki, dan di rumah penganten laki-laki juga dilaksanakan pesta besar-besaran dengan melaksanakan Famolaya (penghormatan) kepada kedua orang tua, anak sulung dan anak bungsu, serta paman dan istrinya masing-masing 2 ekor babi di ikat di halaman penganten laki-laki. Sedangkan Adat Nias di Padang disebut Turun Anak Daro, yaitu setelah selesai pelaksanaan pesta adat perkawinan di rumah penganten perempuan, maka anak daro langsung dibawa ke rumah penganten laki-laki dengan diantar oleh keluarga perempuan dan disana juga dilaksanakan acara penyambutan anak daro.

Sistem Adat Perkawinan Nias di Pulau Nias merupakan salah faktor penyebab kemiskinan masyarakat Nias karena *böwö* yang sangat besar karena pihak laki-laki (*Soroi Tou*) sangat lemah mengikuti semua permintaan pihak perempuan yang disebut *Soboto* bahkan akibat besarnya *böwö* ini banyak jatuh miskin karena selama melaksanakan perkawinan semua *böwö* yang diberikan adalah dari pinjaman kepada orang lain bahkan kepada rentenir-rentenis di kampung. Oleh sebab itu banyak pemuda-pemudi Nias yang pergi merantau dan mencari jodoh orang Nias diperantauan atau suku lain, karena kalau di rantau pelaksanaan pernikahan

hanya secara pesta saja walaupun nantinya akan diresmikan pula di kampung. Adat Nias di Padang adalah merupakan solusi utama bagi perantau untuk melaksanakan pernikahan karena böwö Adat Nias Padang tidak terlalu besar dan dapat dijangkau, karena hanya biaya kebutuhan pelaksanaan pesta adat yang dilaksanakan di rumah penganten perempuan dan biaya biaya lainnya yang tidak terduga.⁶²

Asosiasi Kesukuan

1. Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Sumatra Barat

Untuk mempersatukan seluruh masyarakat Nias di Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Juli 2000 dibentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Sumatra Barat yang berkedudukan di Kota Padang. Organisasi ini berfungsi sebagai forum silaturahmi, komunikasi sosial, budaya, ekonomi, dan saluran aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Disamping itu juga untuk menjaga dan meningkatkan kecintaan terhadap daerah asal dan budaya Nias.

Pembentukan organisasi ini diprakarsai oleh Bapak Tawanto Lawolo sekaligus sebagai ketua IKMN Sumatra Barat yang pertama. Sedangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terakhir disusun adalah pada tanggal 20 September 2003 berdasarkan sidang tim panitia yang terdiri dari Hayudin Iwanda Zamili, S.Pd (ketua), Foarota Zalukhu, SE (wakil ketua), Tahuaro Zebua (sekretaris), Dalizatulö Harefa, SE (anggota), dan Lisanto Zalukhu, SH (anggota).

Pada saat ini organisasi ini dapat dikatakan tidak aktif lagi (vacum) setelah terjadinya pergantian kepengurusan. IKMN Sumatera Barat saat ini dipimpin oleh Bapak Faigiasa (mantan anggota DPRD Kota Padang). Akibat kesibukannya banyak program yang tidak terlaksana.

⁶² Nichamö Daeli. *Loc. Cit.* Hal. 9

2. Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatra Barat

Setelah IKMN Sumatera Barat berdiri, kembali pada tahun 2008 Bapak Tawanto Lawolo memperkrasai terbentuk Lembaga Kerapatan Adat Nias (LEKANIS) Sumatra Barat yang sekaligus sebagai ketua Lekanis Sumatra Barat. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga, melestarikan, dan memodifikasi adat Nias di Sumatra Barat.

Sebagai sebuah lembaga adat, lebih fokus pada penanganan persoalan adat istiadat Nias sehingga terkesan sebagai organisasi tandingan dari IKMN Sumatra Barat. Kondisi ini terlihat bila Lekanis membuat sebuah pertemuan, pengurus IKMN Sumatra Barat tidak diundang atau kalaupun diundang tidak akan datang.⁶³ Sebuah seminar adat Nias yang pernah dilaksanakan oleh Lekanis Sumatera Barat tidak dihadiri oleh IKMN Sumatera Barat.

Beberapa warga Nias menganggap apa yang dikerjakan oleh Lekanis Sumatra Barat adalah "merusak" adat Nias karena memodifikasi budaya asli Nias dengan mencampurkan dengan budaya Minangkabau. Akibatnya tidak semua orang Nias dapat menerima apa yang dikerjakan oleh Lekanis Sumatra Barat terutama masyarakat Nias yang baru beberapa tahun menetap di Padang. Sementara yang mendukung Lekanis Sumatera Barat menganggap bahwa adat asli Nias tidak dapat lagi diterapkan di daerah Sumatra Barat karena budaya Minangkabau tidak memungkinkan untuk diterapkan sehingga adat Nias harus dimodifikasi dengan melahirkan konsep Adat Nias Padang.⁶⁴ Modifikasi budaya Nias dengan mengambil unsur budaya Minangkabau terutama dalam upacara perkawinan sangat diterima oleh masyarakat Nias yang bertempat tinggal di Tanjung Basung Nagari Sungai Buluh. Hal ini sangat beralasan karena hanya merekalah satu-satu komunitas suku bangsa pendatang yang memiliki tanah pemukiman dan keberadaan mereka diakui secara adat

⁶³ Wawancara dengan Bapak Tawanto Lowolo di Padang, 19 Agustus 2008.

⁶⁴ Pada saat pengumpulan data, konsep adat Nias Padang masih pada tahap penyempurnaan.

Minangkabau. Penggunaan salah satu unsur budaya Minangkabau dalam upacara perkawinan merupakan kebanggaan bagi mereka.

Penyempurnaan konsep adat Nias Padang ini dilakukan melalui rapat-rapat yang disebut Rafe Perangkat Hade Ono Niha tanggal 16 Maret 2008, 13 April 2008, 22 Juni 2008 di sekretariat Lekanis Sumatra Barat Jl. Koto Kaciak No. 62 Mata Air Padang. Hasil rapat (lihat lampiran) tersebut selanjutnya dibagi kepada setiap *tua kafo* di 12 wilayah (*wijk*) termasuk Tanjung Basung.

Pemimpin Komunitas Nias di Tanjung Basung

Berdasarkan sejarah kedatangan orang Nias di Tanjung Basung di atas, posisi kepenghuluan Nias di Tanjung Basung sekitar 17 tahun kosong setelah meninggalnya anak dari Penghulu (*Tuhenöri*) Gapuk Zebua bernama Kicok Zebua sebagai pewaris kepenghuluan. Jabatan penghulu Nias hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki sulung penghulu artinya diwariskan langsung berdasarkan patrilineal (*ono faugaki berzesi*, bahasa Nias yang berarti anak yang mewarisi jabatan orang tuanya) bukan matrilineal seperti umumnya pada budaya Minangkabau.

Pada masa dahulu jabatan *Tuhenöri* terdiri 3 jenis yaitu:⁶⁵

1. Tuhenöri Wondrakö (penghulu sumpah), penghulu ini sudah tidak ada lagi di Padang maupun di Nias seiring dengan hilangnya agama *adu-adu*;
2. Tuhenöri Hada (penghulu adat), penghulu yang mengurus masalah adat;
3. Tuhenöri famarenta (pemerintahan), penghulu yang mengurus urusan pemerintahan seperti kepala desa (*salawa*).

Jadi jabatan penghulu yang terdapat pada masyarakat Nias di Tanjung Basung adalah Tuhenöri Hada (penghulu

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Kress di Jondul Rawang, Mei 2008.

adat) namun tidak lagi murni seperti pada masyarakat Nias di Kepulauan Nias.

Penghulu Kicok Zebua memiliki dua orang anak laki-laki yaitu Anthony Zebua (sulung) dan Agustinus Zebua sebagai anak kedua. Berdasarkan budaya Nias, jabatan penghulu harusnya diberikan kepada Anthony Zebua, namun pada kenyataannya dipegang oleh Agustinus Zebua. Berbagai pendapat menyebut bahwa jabatan penghulu diberikan kepada Agustinus Zebua karena Anthony Zebua terlibat PKI ketika wilayah Nagari Sungai Buluh dikuasai PKI. Pendapat lain menyebut karena adanya ambisi Agustinus Zebua untuk menguasai tanah-tanah milik penghulu. Ada juga yang berpendapat Agustinus Zebua diangkat jadi penghulu berdasarkan dukungan dari orang-orang Minangkabau di Pasar Usang agar dapat memiliki tanah dari Agustinus Zebua. Mereka melihat karakter Agustinus Zebua lebih lunak daripada Anthony Zebua sehingga lebih mudah untuk dikendalikan.⁶⁶

Terlepas dari berbagai alasan tersebut, pada hari sabtu tanggal 9 November 1996 dilangsungkan acara pengukuhan sekaligus pelantikan penghulu Nias (*tuhenöri*) di Desa Pasar Usang (sekarang Korong Pasar Usang Nagari Sungai Buluh). Penghulu yang dilantik adalah Agustinus A Zebua beserta 5 orang *pertua adat* yang merupakan bagian dari struktur kepenghuluan. Lima orang *pertua adat* tersebut terdiri dari 3 orang *datuk*, 1 orang tua kampung (*tua kafo*), dan 1 orang *kapalo urang mudo*.

Datuk-datuk berfungsi mengurus persoalan adat seperti menerima pengaduan masyarakat tentang persoalan adat, memberikan nasehat atau solusi terhadap permasalahan, dan tempat melapor bila ada warga yang ingin melaksanakan acara adat. Segala persoalan dan laporan warga selanjutnya akan dilaporkan kepada penghulu sebagai pengambil keputusan akhir. *Tua kafo* bertugas mengkordinir seluruh warga di wilayahnya seperti orang yang pindah, yang

⁶⁶ Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di Kota Padang dan Nagari Sungai Buluh.

baru datang, dan sebagai penghubung dengan penghulu di bidang urusan sosial. Sedangkan Kapalo Urang Mudo bertugas mengkoordinir segala aktivitas muda-mudi di Tanjung Basung.

Pelantikan pengukuhan tersebut dilakukan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh, B. Dt. Rajo Putih dan dihadiri oleh unsur muspika Kecamatan Batang Anai (Camat, Danramil, dan Kapolsek), *ninik mamak*, *cadiak pandai*, alim ulama, dan Kepala Desa Pasar Usang. Dari organisasi masyarakat Nias dihadiri oleh Bapak Tawanto Lawölö ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Sumatera Barat, para kepala kampung (*tua kafo*), dan masyarakat Nias yang ada di Tanjung Basung, Tabing, dan Padang.

Pada saat pelantikan tersebut struktur jabatan penghulu dan perangkatnya masing-masing diisi oleh:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Penghulu | : Agustinus A Zebua |
| 2. 3 orang Datuk | : Jamalus Zebua gelar Datuk Rajo Kaciak |
| | : Dalinaso Harefa gelar Datuk Rajo Mudo |
| | : Tiru Zalukhu gelar Datuk Rajo Bungsu |
| 3. Tua Kampung | : Tomo Gulö |
| 4. Kapalo urang mudo | : Lötebulö Lawölö. |



Gambar Penghulu dan Perangkatnya saat dikukuhkan tahun 1996 (kiri-kanan: Lötebulö Lawölö, Tiru Zalukhu gelar Datuk Rajo Bungsu, Dalinaso Harefa gelar Datuk Rajo Mudo, Agustinus A Zebua, Jamalus Zebua gelar Datuk Rajo Kaciak, Tomo Gulö, *Sumber: Gema Turia: Media Informasi Masyarakat Nias Padang dan Sekitarnya* Tahun I No. 01 Desember 1996)

Saat ini beberapa perangkat penghulu sudah berganti dengan susunan sebagai berikut:⁶⁷

1. Penghulu : Agustinus A Zebua
2. 3 orang Datuk : Adrianus Zalukhu gelar Datuk Rajo Kaciak
: Fatoosa Gulö gelar Datuk Rajo Mudo
: Tiru Zalukhu gelar Datuk Rajo Bungsu (tetap namun non aktif)
3. Tua Kampung : Ponaho Gulö
4. Kapalo urang mudo : Zinus Dohare

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Agustinus A Zebua (Penghulu Nias) di Tanjung Basung 1, Mei 2008.

Kesimpulan

Suku bangsa Nias merupakan salah satu etnis yang memiliki mobilitas tinggi. Keberadaan orang Nias di Kota Padang sudah ada dalam catatan VOC pada abad ke-18. Keberadaan orang Nias ini pada awalnya umumnya dibawa oleh bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda sebagai budak hutang (*credit bondsman*) dan dipekerjakan sebagai budak di kapal untuk mengangkat barang-barang. Pelabuhan Pariaman (lebih dikenal sebagai Bandar Pariaman) pada masa dahulu merupakan tempat pendaratan orang Nias pertama dan tidak sedikit diantara mereka yang menetap di Pariaman dan sebagian pindah ke Padang terutama dengan dibukanya pelabuhan Teluk Bayur (*emmahaven*). Orang Nias yang menetap di Pariaman menghilangkan identitas mereka sebagai orang Nias dan berbaur dengan penduduk setempat dengan melakukan perkawinan dengan orang Minangkabau. Demikian juga di Padang sebagian diantara mereka melakukan hal yang sama. Faktor ini merupakan strategi adaptasi mereka agar dapat diterima di lingkungan suku bangsa Minangkabau dan memperoleh tanah. Strategi ini berhasil sehingga orang-orang Nias sebagai pendatang terbesar ketika itu telah memiliki tanah yang cukup luas dan mereka berhak memberi nama pada tempat-tempat yang mereka diami. Faktor itulah menyebabkan beberapa nama tempat di Kota Padang menggunakan bahasa Nias.

Modifikasi hukum adat Nias dengan sebutan Adat Nias Padang merupakan sebuah keberhasilan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan baik internal orang Nias maupun dalam hubungan eksternal dengan orang Minangkabau maupun suku bangsa lainnya. Penggunaan pakaian pengantin Minangkabau pada adat perkawinan Nias merupakan sebuah prestasi dan prestise bagi orang Nias. Bagi orang Minangkabau sendiri penggunaan pakaian pengantin Minangkabau tersebut juga sebuah kebanggaan dan sebagai bukti bahwa orang Nias menghargai orang Minangkabau sebagai penduduk asli. Kepentingan internal orang Nias juga terbantu dengan Adat Nias Padang ini. Adat

Nias asli yang harus menyediakan berpuluh-puluh ekor babi atau uang ratusan juta dalam perkawinan sudah tidak dipakai diganti dengan hanya beberapa ratus ribu atau puluhan ribu rupiah sudah cukup untuk melamar seorang gadis. Hal ini membantu orang Nias agar tetap menjaga perkawinan antarsuku bangsanya karena sebelumnya adat perkawinan dianggap sebagai pemicu banyaknya perkawinan dengan suku bangsa lain.

Orang Nias juga menjadi tenaga kerja murah dalam pembangunan rel kereta api dari Padang hingga ke Sawahlunto. Sebagian dari tenaga kerja tersebut menetap di Nagari Lubuk Alung Sungai Buluh (sekarang Nagari Sungai Buluh setelah dimekarkan). Setelah mengisi adat akhimya mereka diberikan tanah dan hak kepenghuluan yang mengatur kelompoknya. Dari sini terlihat bahwa orang Nias merupakan suku bangsa yang adaptif. Mereka dapat berbaur dengan siapa saja yang mereka anggap menguntungkan. Mereka juga relatif tidak terlalu kokoh mempertahankan adat istiadatnya di daerah perantauan agar dapat diterima di daerah baru.

Keberadaan orang Nias di Tanjung Basung merupakan hasil interaksi antara orang Nias pertama (Gapuk) dengan penduduk setempat yang meminta orang Nias untuk membuka hutan di daerah Sungai Buluh. Dengan interaksi ini mereka diberi hak ulayat dan hak kepenghuluan untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Diberi kebebasan melaksanakan adatnya, kebebasan beribadah sesuai agama Kristen Protestan dan Katolik. Demikian juga diberi kebebasan untuk memelihara temak babi.

Eksistensi orang Nias di Tanjung Basung dapat dikatakan sudah mulai terganggu. Banyaknya tanah ulayat mereka yang dijual kepada orang Minangkabau semakin mempersempit ruang gerak mereka sehingga berbagai tekanan mulai muncul dari masyarakat Minangkabau di sekitar tempat tinggal mereka. Adanya protes terhadap pemeliharaan temak babi, protes terhadap pengembangan dan pembangunan gedung serba guna di areal gereja Katolik, dan adanya upaya untuk mempertanyakan kepemilikan tanah

orang Nias dari orang-orang Minangkabau. Kondisi ini juga ditambah dengan tidak kompaknya keluarga penghulu Nias.

Keistimewaan Nagari Sungai Buluh dikhawatirkan tidak akan berlangsung lama seiring semakin berkurangnya eksistensi orang Nias di daerah tersebut. Hal ini merupakan sebuah persoalan yang perlu disikapi oleh seluruh lapisan masyarakat agar tercipta suasana kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan Penelitian

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Rofiq. (ed). 1997. *Budaya Kepeloporan Dalam Mobilitas Penduduk*. Jakarta: Puspa Swara.
- Arios, Rois Leonard. 1995. "Pola Migrasi Orang Nias". *Skripsi Sarjana Antropologi FISIP USU Medan*
- Arios, Rois Leonard dan Jumhari. 2004. "Dampak Pembangunan Bandar Udara Ketaping Bagi Masyarakat Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". *Laporan Penelitian BKSNT Padang*
- Asnan, Gusti. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: PPIM
- . 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Bakhtiar, Nurman Agus, dan Murisal. 2005. *Ranah Minang di Tengah Cengkraman Kristenisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- BPS, 2005. *Kecamatan Batanganai Dalam Angka 2005*. Pariaman: BPS dan BAPPEDA Kabupaten Padang Pariaman.
- BPS, 2007. *Kecamatan Batanganai Dalam Angka 2007*. Pariaman: BPS dan BAPPEDA Kabupaten Padang Pariaman.
- Colombijn, Freek. 2006. *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah sebuah kota di Indonesia Pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Erniwati, dkk. 2007. "Kota Pariaman Dari Bandar Dagang Menuju Kota Administrasi". *Laporan Penelitian Direktorat Nilai Sejarah Depbudpar Jakarta*.

- Febrianto, Adri., Etmi Hardi, dan Bustaman. 2003. "Integrasi Warga Berbeda Suku Bangsa Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". *Laporan Penelitian* Jurusan Sejarah FIS UNP Padang.
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: LkiS.
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- I.R, Ma'mun., dkk. 2006. *Politik Perkotaan Berbasis multikultural*. Jakarta: Pustaka Cerdasindo YMC.
- Inglehart, Ronald. 2006. "Budaya dan Demokrasi" dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (ed). 2006. *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kuper, Adam. dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Laiya, Bamböwö. 1983. *Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias*. Yogyakarta: UGM Press.
- Latif, S.M. 1975. *Moehammad Saleh Datoek Orang Kaya Besar: Riwayat Hidup dan Perasaan Saya*. Bogor: SM Latif.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Roza, Dessia. 2001. "Tinjauan Historis Tentang Perubahan Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat Buayan di Kabupaten Padang Pariaman". *Skripsi Sarjana*

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP
Padang.

- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siddik, Abdullah. 1996. *Sejarah Bengkulu: 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sztompka, Piötr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Tanjung, Bagindo Armaidi. 2006. *Kota Pariaman, dulu, kini, dan masa depan*. Pariaman: Pustaka Artaz kerja sama Bappeda Kota Pariaman.

Makalah/artikel:

- Abdullah, Irwan. "Globalisasi, Gaya Hidup Kota, dan Relokasi Kebudayaan", Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001.
- Abna, Bachtar. "Kedudukan dan Fungsi Hukum Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Suku (etnik) dan Negara". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat universitas Andalas, 19 Agustus 2008.
- Anatona. "Dinamika Pemukiman Orang Nias di Kota Padang Sebelum dan Setelah Kemerdekaan" *makalah* [2006].
- "Perdagangan Perempuan Indonesia Ke Malaysia Dalam Dokumen India Office Records Seri R/9". *Kertas Kerja* pada Seminar 50 Tahun Merdeka

- Hubungan Malaysia dan Indonesia. Kuala Lumpur, Universiti Malaya, 17 – 21 Juli 2007.
- Daeli, Nichamö. "Perbandingan Adat Perkawinan Nias di Pulau Nias dan Padang". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat universitas Andalas, 19 Agustus 2008.
- Fatrina, Novina Yeni. "Tradisi Kesenian Nias-Padang: Struktur dan Perkembangan Tari Balanse Madam di STSI Padang Panjang". ". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat universitas Andalas, 19 Agustus 2008.
- Gulö, Anatona, "Aspek-Aspek Historis Dalam Sistem Adat Nias di Kota Padang". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat universitas Andalas, 19 Agustus 2008.
- Lawolo, Tawanto. "Beberapa Permasalahan Adat Nias di Sumatera Barat dan Upaya Pemecahannya". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat universitas Andalas, 19 Agustus 2008.
- Lubis, Abdur-Razzaq. "Orang-Orang Indonesia di Pulau Pinang". *Makalah* Pada Pengkisahan Melayu Pulau

Pinang, anjuran Persatuan Warisan Pulau Pinang (Penang Heritage Trust) dan akhbar berbahasa Inggeris, The Star, hari Sabtu, 25 Ogos 2001, di Hotel City Bayview, Lebu.

Pelly, Usman. *Masalah Batas-Batas Bangsa*, Makalah pada Widiyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan, Hotel Indonesia 26-28 Agustus 1997, Jakarta.

Poerwanto, Hari. "Hubungan Antar Suku-Bangsa dan Golongan Serta Masalah Integrasi Nasional" *Makalah* dibawakan dalam Focus Group Discussion (FGD) "Identifikasi Isu-isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa", dilaksanakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2006.

Suparlan, Parsudi. *Keyakinan Keagamaan dalam Konflik Antarsuku bangsa*, Makalah pada Simposium Internasional Journal Antropologi ke-2, Universitas Andalas Padang 18 – 21 Juli 2001.

Universitas Bung Hatta. 2004. "Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang.

Zebua, Toni "Sejarah Orang Nias di Tanjung Basung Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman: Sebuah Pengantar Diskusi". *Makalah* pada Seminar Sejarah dan Adat Nias di Sumatra Barat dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-63. Diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat universitas Andalas, 19 Agustus 2008.

Sumber Situs Internet:

:Habib, Achmad. "Dinamika Hubungan Antar Etnik Cina dan Jawa di Pedesaan".

<http://elka.umm.ac.id/artikel6.htm>.

"Karakter Orang Nias Menjadi Power Kesuksesan".

<http://niasbarat.wordpress.com/2007/04/10/>

"Konflik" <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

"Manajemen Konflik: Perspektif Kehidupan Sosial Sehari-hari di Indonesia" http://neonovan.topcities.com/manajemen_konflik.htm

Marbun, Julkifli. "Sejarah Nias di Abad ke-9 M".

<http://humbahas.blogspot.com/2007/01/nias-abad-ke-9-m.html>

"Muhammad Yusuf Sisus Lõmbu: Terobat Rindu Bila Bertemu Ononiha". <http://peduli.muslim-nias.org>

"Pekabaran Injil dan Gereja di Nias dan Pulau-Pulau Lain Lepas Pantai Sumatera (1865 – sekarang)", www.sabda.org

Salam, El Fatih A. Abdel. "Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik". Materi Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia

Suryanef dan Syamsir. "Potensi Konflik Sosial Berbasis Agama di Minangkabau" artikel dalam situs: www.ireyogya.org

Bullettin/arsip:

Gema Turia: Media Informasi Masyarakat Nias Padang dan Sekitarnya Tahun I No. 1 Desember 1996. Yayasan Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Padang

Gema Turia: Media Informasi Masyarakat Nias Padang dan Sekitarnya Tahun I No. 2 Januari 1997. Yayasan Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Padang

- Gema Turia: Media Informasi Masyarakat Nias Padang dan Sekitarnya Tahun I No. 3 Februari 1997. Yayasan Ikatan Keluarga Masyarakat Nias Padang
- Gulo, Arozanolo. "Adat Orang Nias Dalam Kehidupan Sehari-hari". Media Warisan Edisi No. 23 Tahun II Desember 2001
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

PERAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI AISIYAH DI KOTA PALEMBANG

Oleh : Seno

A. Pendahuluan

Perkembangan agama Islam begitu pesat kemajuannya melalui bermacam-macam organisasi keagamaan. Mereka berupaya membangun umat dalam segala bidangnya, termasuk Muhammadiyah di Indonesia.¹ Kebangkitan umat Islam memunculkan beberapa tokoh pembaharuan yang menginginkan kemajuan Islam, antara lain Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Syah Ahmad Khan, Muhammad Iqbal dan di Indonesia sendiri yaitu K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923).²

Ide pembaharuan yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan ini dapat direalisasikan dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912,³ dan organisasi ini untuk pertama kalinya dilahirkan di desa Kauman, Yogyakarta.⁴

Ada beberapa penulis yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar yang berada di Indonesia dan pertumbuhannya sangat pesat. Seiring dengan waktu yang berjalan, Muhammadiyah dapat tersebar tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan meluas sampai ke seluruh pelosok Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Keberadaan Muhammadiyah bukan hal yang asing bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan Muhammadiyah

¹Taufik Abdullah, *Islam di Indonesia*, (Jakarta : Tintamas, 1991), hal. 3-8.

²Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia : 1900-1942*. (Jakarta : LP3ES, 1995), hal. 84.

³MT. Arifin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Bandung : Pustaka Jaya, 1987), hal. 14.

⁴G.F. Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, (Jakarta : UIP, 1984), hal. 65.

dikenal di dunia internasional. Sejak berdirinya hingga sekarang telah banyak memberikan sumbangan bagi bangsa dan negara. Sepanjang perjalanan sejarah Muhammadiyah sejak lahir sampai Indonesia merdeka penuh diwarnai oleh kegiatan positif, sehingga kepeloporannya diakui oleh kawan maupun lawan dan manfaat kehadirannya dirasakan oleh masyarakat luas.⁵

Muhammadiyah untuk pertama kalinya tersebar di Pulau Sumatra, tepatnya di Minangkabau dimana pada waktu itu ulama-ulama Sumatra Barat sedang giat-giatnya memberantas taklid, memerangi *bid'ah* dan *khurafat*. Inisiatif untuk mendirikan Muhammadiyah di Sumatra Barat memang bermula dari beberapa orang Minangkabau yang menetap di Pekalongan dan Yogyakarta. Mereka bergaul dengan orang-orang Muhammadiyah kedua kota itu dan masuk dalam persyarikatan itu.⁶

Mereka berusaha mengembangkan ide-ide yang mereka peroleh dari persyarikatan tersebut di daerah asalnya. Pada waktu kongres Muhammadiyah ke-18 pada tahun 1929 di Solo, utusan dari Minangkabau sudah mencapai tidak kurang dari 40 orang. Kemudian perkembangannya menjalar sampai ke Bengkulu dan Palembang yang dibawa oleh orang-orang Minangkabau.⁷ Tepatnya pada tahun 1928 sebagai ketua konsulnya dipilih Zainal Abiddin Djambek.⁸

Adapun tokoh-tokoh Muhammadiyah yang masuk ke Palembang antara lain : H. Ridwan yang berasal dari Kota Gede Yogyakarta, Rusli dari Padang, Raden Sutono Poerwowijoto dari Semarang dan Zainal Abiddin Djambek

⁵ Solihin Salam, "Muhammadiyah Lampau, Kini dan Mendatang", dalam Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*, (Jakarta : Rajawali, 1987), hal. 91.

⁶ Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1989), hal. 84.

⁷ *Ibid.*, hal. 87.

⁸ D.K.D., *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, (Sumatera Selatan : Dep. P & K, 1980), hal. 55.

yang berasal dari Padang.⁹ Sedangkan ranting Muhammadiyah yang pertama berdiri di Palembang adalah Ranting Talang Jawa, Seberang Ulu dan Ranting 24 Ilir. Ketiga ranting inilah yang kemudian menjadi cabang Muhammadiyah Palembang yang selanjutnya diresmikan tahun 1930. Satu tahun kemudian (1931) di Plaju berdiri pula cabang Muhammadiyah dengan ketuanya yang pertama adalah Abdul Malik Sidik.¹⁰

Kehadiran Muhammadiyah di Palembang tersebut dari tahun ke tahun terus berkembang. Demikian juga organisasi yang bernaung di bawah payung Muhammadiyah juga ikut berkembang pula. Salah satu organisasi di bawah naungan payung Muhammadiyah yang juga sangat besar andilnya dalam kiprahnya memajukan umat adalah Organisasi Aisyiyah Palembang.

Aisyiyah sebagai organisasi Islam, merupakan "*angin surga*" yang terus eksis hingga sekarang. Kiprahnya dalam perjuangan dakwah Islam terus berjalan. Jika menelusuri sejarah terbukti bahwa Ausyiyah merupakan organisasi wanita tertua di Indonesia yang diprakarsai oleh Ahmad Dahlan dan istrinya Nyai Ahmad Dahlan. Berdirinya Aisyiyah telah memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut catatan sejarah Aisyiyah berdiri seiring dengan berdirinya organisasi Muhammadiyah, khususnya Aisyiyah kota Palembang.¹¹

Aisyiyah sebagai wadah persyarikatan Muhammadiyah dalam mencermati situasi sosial yang berhubungan dengan perkembangan peran kaum wanita memberi perhatian yang besar pada kiprah wanita Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Mengingat keadaan wanita Islam Indonesia pada awal abad XX sangat memprehatinkan, pengaruh budaya yang bertentangan dengan Islam masih begitu kental

⁹ *Ibid.*, hal. 56.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 57.

¹¹ PWM. Sum-Sel, *Sejarah Muhammadiyah Kota Palembang*, (Palembang : 2005), hal. 6.

di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam mencicipi pendidikan wanita selalu terbelakang. Di samping itu masih kurangnya pemahaman akan ajaran Islam menjadi faktor utama.

Perlu diketahui bahwa jauh sebelum agama Islam berkembang di Nusantara, umumnya masyarakat Indonesia telah mengenal animisme dan dinamisme serta ajaran Sinkritisme Hindu/Budha. Dalam melakukan ajaran tersebut masyarakat tidak menggunakan pemikiran kritis sehingga tidak mengherankan jika menjadi tersesat. Didorong pula oleh penjajahan di Indonesia selama ratusan tahun yang mengakibatkan kemunduran ummat Islam dalam bidang sosial, ekonomi dan kultural.

Penjajahan Belanda telah membuat bodoh bangsa Indonesia dengan jalan mempersempit kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah, lebih-lebih kaum wanita jarang sekali yang dapat mengikuti pendidikan di sekolah menengah apalagi perguruan tinggi. Di samping itu kepentingan perempuan masih terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil untuk mendapatkan hak-hak politik, akses untuk menikmati pembangunan ekonomi, sosial dan hukum. Bahkan perempuan masih menjadi korban kekerasan ketidakadilan dan komoditi dalam proses pembangunan baik dalam tatanan ekonomi nasional, regional maupun global.

Berbagai kondisi memprehatinkan yang menimpa kaum perempuan dan anak-anak telah mendorong berbagai pihak, baik secara personal maupun berkelompok dari kaum perempuan dalam hal ini Aisyiyah tergerak untuk melakukan perjuangan agar perempuan keluar dari ketertinggalan maupun ketidakadilan, sehingga kaum perempuan benar-benar mempunyai martabat kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

¹² PPA., *Rancangan Program Aisyiyah*, (Yogyakarta : 2005), hal. 19.

Bagi Aisyiyah berbagai kenyataan sosial dan latar belakang sejarah yang begitu melekat dengan semangat dan pesan keagamaan sebagai ruh gerakan. Bahwa Islam secara normatif membawa dan mengajarkan nilai-nilai keadilan serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dan secara implementatif telah diteladankan dalam kehidupan pada zaman Rasulullah Saw.¹³ Sejak awal berdirinya Aisyiyah telah memfokuskan dirinya kepada permasalahan sosial kemasyarakatan terutama wanita dan anak-anak. Tujuannya adalah menciptakan *Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur*, suatu kehidupan bahagia dan sejahtera, penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT di dunia dan akhirat. Di samping itu, juga membantu program Pemerintah yang berkenaan dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Bercermin dari itu semua Aisyiyah berusaha untuk membangkitkan kembali potensi-potensi yang ada dalam diri wanita dan sekaligus merasa terpanggil untuk mencermati perannya di dalam masyarakat. Aisyiyah merasa bahwa pemberdayaan perempuan, meningkatkan harkat dan martabat wanita serta peningkatan kualitas peran perempuan perlu menjadi program utamanya,¹⁴ khususnya Aisyiyah di kota Palembang. Jelasnya, Aisyiyah adalah organisasi wanita yang selalu berusaha meningkatkan kualitas peran wanita karena kaum wanita pada hakikatnya merupakan aset penting yang fungsional dan potensial bagi terciptanya Indonesia baru.

B. Makna Organisasi

Sebelum membahas organisasi Aisyiyah, tidak ada salahnya jika terlebih dahulu diuraikan serba sedikit tentang

¹³ *Ibid.*, hal. 21.

¹⁴ Seminar Sehari, *Wacana Gerakan Perempuan Kontemporer*, Hasil Seminar, 29 April 2000, PPA, (Yogyakarta : 2000), hal. 55.

arti dan makna organisasi. Menurut bahasa kata organisasi berasal dari kata organ yang artinya tubuh atau badan, seperti tubuh manusia yang terdiri dari beberapa anggota badan di mana masing-masing mempunyai tugas tertentu. Organisasi dapat diartikan tersusun dan teratur.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi berarti kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶

Menurut istilah, "organisasi" adalah berkumpulnya sekelompok manusia yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sama disertai aturan-aturan yang tersusun rapi. Gambaran lain tentang organisasi adalah "Rantai Komando" (*Chain of Command*) dan menggunakan disiplin, aturan dan dengan sistem *super vise* yang kaku. Sedangkan organisasi kontemporer dilandasi oleh ketergantungan (*dependency*) dan keperkiraan (*Proximity*) sebagai akibat kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam suatu organisasi akan didapati beberapa unsur di mana unsur satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi adalah : Dasar organisasi, Tujuan organisasi, Pimpinan organisasi, anggota dan kerja sama. Selain itu organisasi dapat memberikan manfaat yang nyata.

Bentuk organisasi bisa formal dan non formal cara terbentuknya spontan, perpecahan organisasi yang telah ada, penggabungan beberapa organisasi yang telah ada. Struktur

¹⁵ Abu Su'ud, dkk., *Kemuhammadiyah* 3, (Yogyakarta : Rusta SM, 1996), hal. 1.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal. 803.

¹⁷ Suharsimi Ari Kunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan; Teknologi dan Kejuruan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 14.

organisasi disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kedayagunaan dan ketepatangunaan dalam mencapai tujuan. Disiplin organisasi ada yang bersifat longgar (misalnya pada organisasi arisan, sepak bola, seni dan lain-lain) dan ada yang ketat (misal pada organisasi politik dan keagamaan).

Jadi teori-teori tentang organisasi berkembang mengikuti interaksi antara sistem formal dengan komponen-komponen manusia dan dalam tinjauan aspek sosial, individu maupun variabel lain, organisasi itu adalah suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara bersama.
2. Individu yang terkait dalam organisasi tersebut mempunyai kemauan dan kemampuan untuk saling bekerja sama.
3. Terjadi komunikasi antara individu yang terkait dalam kerja sama.¹⁸

Organisasi itu suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi tertentu terdapat individu yang bekerja sama, tanpa adanya individu maka organisasi tidak mungkin ada dan begitu sebaliknya, tanpa adanya organisasi, individu akan sulit untuk dapat mencapai tujuan.

Organisasi keagamaan benar-benar menjadi tempat merumuskan pemikiran dan menggariskan pola gerakan, aksi tempat mensosialisasikan gagasan dan ajaran agama Islam kepada masyarakat dan sekaligus menjadi wadah kaderisasi.¹⁹ Karena kebanyakan mereka aktif dalam organisasi, maka merekapun digolongkan, baik sebagai pemimpin formal atau sebagai politisi. Sedangkan ulama murni yang tidak memiliki wawasan politik dan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 17.

¹⁹ M. Amien Rais, ed., *Islam di Indonesia; Statu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta : Raja Wali, 1986), hal. 240.

kemasyarakatan hanya berpengaruh dalam lingkungan terbatas.

Organisasi menjadi media yang penting, dalam rangka syiar Islam dan menegakkan ajaran Islam di bumi Allah ini. Tujuan atau target yang diinginkan organisasi dapat tercapai. Organisasi Islam jelas bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang ingin bekerja sama dengan orang lain, bantu membantu dan tolong menolong kepada sesama dalam mencapai kelangsungan hidup. Jadi menurut fitrahnya manusia itu suka akan kehidupan berjama'ah dan bersyarikat, maka berorganisasi itu merupakan perintah Agama, sebagai firman Allah SWT dalam Surat Ali Imron; 104, yang artinya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebijakan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar mereka itulah orang-orang yang beruntung.*²⁰

Tujuan hidup Muslim adalah untuk berbakti kepada Allah agar memperoleh keridhohan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'am : 162 yang artinya : *Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.*²¹

Pemahaman ayat-ayat di atas jelas menyatakan bahwa tujuan hidup manusia dengan segala aktifitasnya sebagai hamba Allah SWT adalah untuk mencari keridhoan-Nya. Organisasi hanya mampu eksis, bermanfaat dan turut berperan dalam percaturan yang bersifat intern, lokal, nasional, bahkan internasional, manakala didukung oleh pengurus yang piawai, dewan penasehat yang bijaksana dan staf yang handal, profesional dan proaktif, untuk menuju ke

²⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Mahkota Surabaya, 1989), hal. 93.

²¹ *Ibid.*, hal. 216.

arah itu. maka organisasi perlu mempunyai sumber keuangan yang jelas, transparan dan berkesinambungan.

C. Perkembangan Aisyiyah Palembang

Latar belakang masuk dan berdirinya Aisyiyah di Palembang pada umumnya sama seperti masuk dan berdirinya Aisyiyah di Indonesia. Saat itu masyarakat kota Palembang yang tingkat pemahaman akan ajaran Islam sangat kurang. Mereka banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, baik dalam beribadah dan beramal. Apa yang telah mereka lakukan sangat jauh berbeda dengan apa yang telah dituliskan dan diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²²

Seorang pedagang barang-barang kerajinan perak asal kota Gede Yogyakarta yang bernama H. Ridwan merasa prihatin. Untuk meluruskan akidah masyarakat kota Palembang sesuai dengan ajaran agama Islam, maka ia melakukan dakwah lewat pengajian-pengajian yang dilakukan di rumahnya. Lama-kelamaan masyarakat merespon dengan baik apa yang telah dilakukan oleh H. Ridwan, anggotanyapun semakin lama semakin bertambah banyak, baik laki-laki maupun perempuan.²³

Pada tahun 1928 para anggota pengajian H. Ridwan melakukan pertemuan secara rutin, meskipun belum dalam bentuk organisasi. Adapun tema pengajian yang ia sampaikan adalah agar ummat Islam beramal secara murni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Gerakan dakwah yang disampaikan oleh para pelopor Muhammadiyah (Dahulu Aisyiyah hanya bagian dari Muhammadiyah belum berdiri sendiri) di kota Palembang, walaupun menghadapi beragam tantangan dari berbagai pihak, terutama mereka yang menganggap bahwa Muhammadiyah sebagai faham

²² Rotasmi, PWA Sum-Sel, *Wawancara*, Palembang, tanggal 19 Maret 2007.

²³ Ngatimah, Ketua Bidang Sosial, PDA PLG, *Wawancara*, Palembang tanggal 19 Maret 2007.

baru (Kaum Mudo), tetapi secara berangsur-angsur gerakan Muhammadiyah dan Aisiyah mendapat respon dari umat Islam. Pengajian yang semula dilakukan dari rumah ke rumah (Usroh), mulai dilaksanakan di mesjid atau langgar.

H. Ridwan mendapat dukungan dari beberapa tokoh agama di Palembang, di antaranya yaitu Soebono Poerwowijoto, seorang pegawai pindahan dari Jawa Tengah dan bertugas di CKC Palembang. Sebelum pindah, Soebono adalah anggota Muhammadiyah Brebes. Kemudian bergabung pula dalam pengajian Zainal Abiddin Djambek, seorang intelektual pendidikan agama yang luas. Ia adalah pegawai BPM (*Baatafsche Petroleum Maatchappaay*) Plaju. Zainal Abiddin Djambek juga sudah jadi anggota Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ia dengan gigih memelopori, mengajak umat sekitar Plaju untuk melaksanakan shalat berjama'ah di sebuah mushollah di pintu Besi Plaju. Pengajian tersebut kemudian berkembang ke Ladang Plaju dan sekitarnya. Bahkan beberapa tempat walau hanya bertempat di rumah-rumah penduduk, pengajian terus berlangsung seperti di 3 – 4 Ulu, dan Talang Jawa.²⁴

Setelah mendapat respon yang baik kelompok-kelompok pengajian tersebut mengadakan pertemuan bersama. Pada waktu itulah H. Ridwan menyampaikan niatnya untuk mendirikan grup-grup yang diberi nama Muhammadiyah dan secara tak langsung Aisiyah pun berdiri, namun tidak secara otonom. Akhirnya niat H. Ridwan tersebut mendapat dukungan dari anggota pengajian.

Pada tahun 1929, berdiri dua grup sekaligus, yaitu grup Muhammadiyah Talang Jawa dan grup 3 – 4 Ulu. Satu tahun kemudian (1930) di Palembang secara resmi berdiri cabang Muhammadiyah yang pada waktu itu disebut Cabang Palembang. Meski berdiri tahun 1930, namun Besluitnya (SK-nya) baru turun pada tahun 1932 dengan SK Hoofd Bestuur

²⁴ Tim Kota Palembang, *Sejarah Muhammadiyah Kota Palembang*, PWM Sum-Sel, 18 Juni 2005, hal. 2.

Muhammadiyah No. 358 tertanggal 11 Jumadilakhir 1352 H (1932 M.). Setelah Cabang Palembang berdiri, kemudian disusul berdirinya cabang Plaju. Sebagian dari pengurus adalah pegawai BPM (*Baatafsche Petroleum Maatchappaay*). Mereka berdakwah sambil bertugas. Muhammadiyah Cabang Plaju ini membawahi grup Ladang Plaju, Sungai Batang, Mariana, Bajubang (wilayah Jambi sekarang), Prabumulih, dan Suban Jerji.²⁵

Pada tahun 1931 diadakan Konferensi Muhammadiyah daerah yang menghasilkan keputusan sebagai berikut Zainal Abiddin Djambek sebagai Konsul Muhammadiyah Daerah Palembang/Bangka periode 1931-1932. Djamilah Djambek sebagai pimpinan Aisiyyah. Selanjutnya pada tahun 1932, diadakan pertemuan dan Konferensi Muhammadiyah pertama yang diikuti oleh Karesidenan Palembang, Bangka dan Lampung. Pada waktu itu struktur pemerintahan terdiri dari karesidenan-karesidenan, maka Muhammadiyah mengikuti struktur itu. Majelis ini tetap diketuai oleh Zainal Abiddin Djambek dan Djamilah Djambek sebagai pimpinan Aisiyyah.²⁶

Berikut adalah tokoh-tokoh Aisiyyah Palembang tahun 1931-1974 :Ibu Djamilah Djambek (1931-1934), Ibu Fatimah Djambek (1934-1938), Ibu Robiah R.Z. Fanani (1938-1942), Ibu Romlah Hasan (1947-1962), Ibu Djawanis Umar (1962-1967), dan Ibu Rohana Rasyid (1974-1980).²⁷ Setelah pimpinan pusat Muhammadiyah mencabut kembali keputusan No. 2/1961 tanggal 5 Juli 1961 tentang kaidah Aisiyyah dan menetapkan kedudukan Aisiyyah sebagai organisasi otonom (Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah No. 1/1966 tentang organisasi Aisiyyah).²⁸ Barulah Aisiyyah berdiri sendiri dan dapat mengatur rumah tangganya.

²⁵ *Ibid.*, hal. 5.

²⁶ PWM Sum-Sel., *Peta Wilayah Muhammadiyah Sum-Sel*, 1985, hal. 9.

²⁷ *Ibid.*, hal. 3-4.

²⁸ AD/ART Aisiyyah, Periode 1985-1990.

Aisiyyah wilayah Sumatra Selatan SK-nya dikeluarkan pada tahun 1969, sedangkan Aisiyyah Daerah mulai dipisah dari Aisiyyah wilayah pada tahun 1975, namun AD, ART-nya masih tetap sama dengan Aisiyyah pusat.²⁹ Keberadaan Aisiyyah di kota Palembang yang selama ini di dalam perserikatan menjadi penting jika diingat bahwa perserikatan Muhammadiyah merupakan satu organisasi massa.

Potensi, peran dan fungsi Aisiyyah Kota Palembang untuk mencapai tujuan perjuangan perserikatan Muhammadiyah termanifestasikan pada berbagai macam kegiatan amal usaha yang diselenggarakan. Aisiyyah selaku salah satu komponen perserikatan merupakan satu bentuk perwujudan kiprah kaum perempuan Muhammadiyah dalam perjuangan menciptakan masyarakat idaman.

Dalam kancah perjuangan bangsa keberadaan Aisiyyah dengan kegiatan dan amal usahanya senantiasa memperoleh perhatian dan diperhitungkan. Keberadaan Aisiyyah dalam kiprah pembangunan bangsa menjadi penting dan diperlukan. Kondisi bangsa dan masyarakat berkembang bertepatan dengan keberadaan bangsa yang sedang dalam pembangunan. Dalam era pembangunan ini segenap rakyat khususnya masyarakat Palembang berkiprah untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan bangsa. Gerak dan langkah Aisiyyah dalam mensukseskan pembangunan bangsa selalu didasarkan pada ajaran Islam dan kegiatannya berorientasi pada potensi wanita. Pada era pembangunan kiprah Aisiyyah semakin dirasakan dan ini merupakan bukti nyata bahwa Aisiyyah masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat kota Palembang.

Pimpinan wilayah Aisiyyah membawahi 9 Kabupaten, sedangkan Pimpinan Daerah Aisiyyah kota Palembang membawahi 5 cabang yang tiap-tiap cabangnya sudah

²⁹ Akbar Oemar, Informan Aisiyyah, *Wawancara*, Palembang tanggal 24 Maret 2007.

otonom.³⁰ Pimpinan Daerah Aisyiyah Palembang hanya sebagai koordinator dari tiap-tiap cabang. Adapun Cabang-cabang tersebut adalah sebagai berikut :

1. PCA (Pimpinan Cabang Aisyiyah) Ilir Timur 1 (Balayudha) Palembang berdasarkan surat pengesahan dari PDA Kodya Palembang No. 25/PDA/A/XI/1996.
2. PCA (Pimpinan Cabang Aisyiyah) Ilir Timur 2 (Sekojo) Palembang berdasarkan surat pengesahan dari PDA Kodya Palembang Nomor 24/PDA/A/XI/1996.
3. PCA (Pimpinan Cabang Aisyiyah) Ilir Barat 1 (Bukit Kecil) Palembang berdasarkan surat pengesahan dari PDA Kodya Palembang Nomor 23/PDA/A/XI/1996.
4. PCA (Pimpinan Cabang Aisyiyah) Seberang Ulu 1 (Kertapati) Palembang berdasarkan surat pengesahan dari PDA Kodya Palembang Nomor 22/PDA/A/XI/1996.
5. PCA (Pimpinan Cabang Aisyiyah) Seberang Ulu 2 (Plaju) Palembang berdasarkan surat pengesahan dari PDA Kodya Palembang Nomor 21/PDA/A/XI/1996.³¹

Jumlah pimpinan Ranting Aisyiyah Kota Palembang sebanyak 30 PRA, yaitu :

1. Di Cabang Ilir Timur 1 sebanyak 9 Ranting.
2. Di Cabang Ilir Timur 2 sebanyak 6 Ranting.
3. Di Cabang Ilir Barat 1 sebanyak 6 Ranting.
4. Di Cabang Seberang Ulu 1 sebanyak 7 Ranting.
5. di Cabang Seberang Ulu 2 sebanyak 2 Ranting.³²

Semua ranting mempunyai program kerja sendiri-sendiri, namun ada kalanya ranting-ranting tersebut melakukan kerja sama dengan ranting-ranting yang lain. Semua ranting lebih

³⁰ Daminawati Ketua PDA kota Palembang, *Wawancara, Palembang tanggal 24 Maret 2007.*

³¹ Djumiati, *Laporan Pertanggung Jawaban PDA Kota Palembang, Periode 1995-2005.*

³² Djumiati, Sekretaris PDA Kodya Palembang, *Wawancara, Palembang tanggal 23 Maret 2007*

mengutamakan dalam mendidik pengkaderan karena dari rantinglah yang akan melahirkan cikal-bakal kader yang aktif.

Kegiatan yang dilaksanakan Aisyiyah selama ini di samping pengembangan organisasi, juga telah ditingkatkan pula pembinaan anggota antara lain berupa pengajian, bimbingan membaca Al-Qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Sejak dilahirkan sampai sekarang Aisyiyah tetap merupakan organisasi yang bersifat sosial, muslim edukatif dan dakwah Islamiyah.³³ Tidak hanya itu saja Aisyiyah juga tidak menutup diri dari kegiatan di luar keagamaan, Aisyiyah juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan olah raga dan kesenian.

Pertumbuhan jaringan organisasi sosial dan dakwah Islamiyah yang dimotori oleh putera-puteri bangsa Indonesia ini setidaknya telah membuktikan, bahwa kehadiran dan kiprahnya telah memperoleh sambutan positif, baik oleh masyarakat Palembang, maupun Indonesia pada umumnya. Ini bukti bahwa Aisyiyah telah berjalan dalam koridor hukum yang benar, setidaknya Aisyiyah bisa dijadikan tolok ukur atas sukses perannya sebagai salah satu pembangun *integrasi* bangsa.

Aisyiyah tidak mungkin berkembang dengan subur seandainya Pemerintah, organisasi-organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan di sekitarnya, khususnya di Palembang menolak kehadiran mereka. Alhamdulillah, Aisyiyah telah memperoleh pengakuan formal dan non formal. Kehadirannya dirasakan membawa andil yang positif komponen berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang sangat menggembirakan dan menjadi modal utama yang harus tetap dipelihara sepanjang masa.

Dalam keorganisasian Aisyiyah, khususnya Aisyiyah kota Palembang mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan yang cukup baik. Gunanya agar tiap-tiap kapid-kapid berjalan dengan terarah. Secara garis besar struktur

³³ *Ibid.*

organisasi Aisyiyah sama seperti struktur organisasi Muhammadiyah. Di samping itu, di sini akan dipaparkan pula mengenai bagaimana perkembangan Aisyiyah kota Palembang dalam dua masa kepemimpinan sekaligus mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bagi perkembangan Aisyiyah selama 10 tahun belakangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Struktur Organisasi Aisyiyah

Aisyiyah sebagai organisasi formal memerlukan adanya struktur organisasi yang sehat dan efisien. Dalam membentuk struktur organisasi, diperlukan berbagai azas organisasi yang sehat dan efisien dan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan organisasi agar dapat berjalan lancar. Adapun azas/landasan struktur Aisyiyah adalah : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berupa kaidah-kaidah tentang organisasi; AD dan ART Muhammadiyah; AD dan ART Aisyiyah.³⁴

Struktur organisasi Aisyiyah mempunyai dua macam struktur organisasi, yaitu : struktur organisasi secara vertikal dan struktur organisasi secara horizontal yang terdiri atas bidang kegiatan amal usaha Aisyiyah. Secara vertikal pimpinan ranting Aisyiyah merupakan kesatuan anggota dalam satu tempat di kelurahan atau desa. Urutan struktur organisasi mulai dari atas adalah pimpinan Wilayah Aisyiyah pusat yang merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi secara keseluruhan; pimpinan Daerah Aisyiyah, yang merupakan kesatuan Daerah-daerah dalam satu propinsi; pimpinan Daerah Aisyiyah, yaitu kesatuan cabang-cabang dalam satu kotamadya/kabupaten; dan pimpinan cabang Aisyiyah yang merupakan kesatuan ranting-ranting dalam satu kecamatan.

³⁴ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, (Yogyakarta, tt), hal. 42.

Dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) dijelaskan bahwa PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) merupakan :

1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan organisasi tertinggi dalam daerahnya.
2. Pimpinan Daerah bertugas memimpin organisasi dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
3. Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.
4. Jumlah anggota pimpinan daerah sekurang-kurangnya sebelas orang yang dipilih dalam musyawarah daerah dan ditetapkan oleh pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan.
5. Ketua pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah Daerah dan atas usul anggota pimpinan Daerah yang terpilih.
6. Jika dipandang perlu, pimpinan daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Kerja Daerah.³⁵

2. Periode Kepemimpinan Aisyiyah Daerah Kota Palembang (1995-2005)

a. Periode Kepemimpinan Ibu Djumiati (1995-2000)

Ibu Djumiati adalah salah satu dari sekian banyak aktivis Aisyiyah yang selalu berusaha untuk memajukan Aisyiyah baik dalam bentuk apapun. Pada masa kepemimpinannya ini banyak hal yang telah ia lakukan salah satunya adalah usaha dalam pembangunan mushallah yang terletak di Jalan Sosial Km. 5 Palembang. Dalam penyusunan program kerja Ibu Djumiati selalu berpatokan pada : Program kerja Aisyiyah Daerah dilakukan penyusunannya dalam musyawarah menurut tingkat (Muktamar s.d Musran) dan pelaksanaannya bertahap selama lima tahun diatur sesuai

³⁵ AD/ART Aisyiyah, Periode 2000-2005.

dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan Aisyiyah periode 1995-2000 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu : keluarga sakinah sendiri sebagai sendi utama bagi masyarakat utama, masyarakat yang menjadi idaman Aisyiyah, Muhammadiyah dan masyarakat, serta bangsa Indonesia. Pada periodenya Aisyiyah Daerah menetapkan program "memasyarakatkan keluarga sakinah". Tujuannya adalah ikut mengembangkan tugas pembangunan yang selaras dengan gerak Aisyiyah di bidang wanita sebagai subyek dalam menata masyarakat keluarga sejahtera berdasarkan ajaran agama Islam.

Adapun susunan kepengurusan PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) Kota Palembang periode 1995-2000 berdasarkan surat pengesahan dari PWA (Pimpinan Wilayah Aisyiyah) Sumatea Selatan No. 013/PWA.SS/A/VII/1996 tanggal 23 Muharram 1417 H (10 Juni 1996 M) sebagai berikut : Bertindak sebagai Ketua Djumiati; Wakil ketua I Z.Hj. Zuriyah Harun; Sekretaris I Dra. Darminawati SA; Sekretaris II Dra. Mardiyah; Bendahara I Marhamah; Bendahara II Hj. Mahmudah. Sedangkan yang menjadi anggotanya adalah Siti Fatihakimah, S.Ag., Hj. Zuammah Syaeb, Hj. Rokayah.

Pada masa kepemimpinannya, PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) membawahi lima cabang, tiap-tiap cabang mempunyai ranting-ranting PRA (Pimpinan Ranting Aisyiyah) yang semuanya berjumlah 27 ranting. Aisyiyah Daerah selain melaksanakan tugas-tugas intern juga melakukan kegiatan ekstern yang merupakan hubungan kerja sama yaitu :

1. Menjadi anggota GOW dan aktif mengikuti pertemuan rutin GOW.
2. Mengikuti pertemuan yang diundang oleh Wali Kota.
3. Mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Wali Kota setiap hari Ibu atau hari besar lainnya.
4. Menghadiri undangan hari besar yang diselenggarakan GOW/Wali Kota.
5. Mengikuti kegiatan BKOW.

6. Menjadi penyaji materi dalam mukerda PDNA Kota Palembang.
7. Menyampaikan sambutan dalam manasik haji TK ABA se-Kota Palembang.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap bagian dalam struktur kepengurusan Aisyiyah Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tabligh. Ada beberapa kegiatan yang telah diprogramkan yang dilaksanakan oleh bagian tabligh, yaitu kunjungan/pengajian ke beberapa tempat seperti ke Lembaga permasyarakatan Wanita Pakjo, kunjungan tabligh ke cabang-cabang seperti Ke PCA Ilir Timur II, PCA Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, PCA Ilir Timur II, PCA Ilir Barat I. Melaksanakan kegiatan/kerja sama yang berhubungan dengan masalah tabligh/masalah dakwah, meningkatkan pengetahuan tentang metode, strategi dan taktik dalam melaksanakan dakwah dan pelaksanaan tabligh dan melaksanakan konsolidasi organisasi.
2. Bagian Ekonomi. Usaha-usaha yang dilakukan PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) pada bidang ekonomi adalah : usaha konpeksi berupa pembuatan telekung, sprej aplikasi, memasarkan pakaian-pakaian jadi, menerima pesanan kue-kue dan katering serta menjual barang-barang perhiasan, barang-barang elektronik. Semua usaha yang dilaksanakan dalam pengawasan BUEKA. Terkadang dalam pelaksanaannya BUEKA sering mengalami hambatan, namun dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bagian Kaderisasi. Perkaderan dalam Aisyiyah lahir seiring dengan proses pembinaan anggota dan calon anggota Aisyiyah untuk menghasilkan tenaga-tenaga inti misi dan gerakan Aisyiyah yang dilaksanakan melalui berbagai upaya dan media, baik langsung maupun tidak langsung. Kader Aisyiyah adalah anggota Aisyiyah yang terlatih dan terdidik dan

merupakan tulang punggung gerakan Aisiyyah. Tugasnya sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha.

4. Bagian pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : (a). Pengarahan/pembinaan kepada guru-guru TK ABA sekodya Palembang; (b). Memberikan bantuan uang kepada TK; (c). Mengadakan berbagai lomba dalam menyemarakkan HUT Aisiyyah se kota Palembang; (d). Menyelenggarakan manasik haji anak-anak TK se kota Palembang.

Tabel 1: Nama TK se kota Palembang di bawah pengawasan PDA (Pimpinan Daerah Aisiyyah) tahun 1995-2000

No.	Nama TK	Alamat	Jumlah
1.	TK ABA 1	Mayor Ruslan	64
2.	TK ABA 2	Plaju	76
3.	TK ABA 3	3 Ulu Laut	86
4.	TK ABA 4	Balayudha	337
5.	TK ABA 5	Lemabang	78
6.	TK ABA 6	Bukit Kecil	115
7.	TK ABA 7	7 Ulu	105
8.	TK ABA 8	Mata Merah	45
9.	TK ABA 9	Sungai Baung	49
10.	TK ABA 10	Sekojo	66
11.	TK ABA 11	Seb Ulu 1	115
12.	TK ABA12	Kertapati	26
13.	TK ABA13	Pembangunan 1 Ulu	13
14.	TK ABA 14	Pakjo	67
15.	TK ABA 15	Suka Maju Kenten	30
16.	TK ABA 16	Kebun Duku	38
17.	TK ABA 17	Bukit Lama	30

Sumber : Laporan Pertanggung jawaban PDA³⁶

³⁶ Djumiati, *Op.cit.*, Periode 1995-2005

5. Bagian PKS. Amal usaha yang dilaksanakan adalah : (a). Pembinaan terhadap yatim-piatu; (b). Pembinaan terhadap fakir miskin dan pengangguran melalui latihan kerja, peminjaman modal kerja dan zakat produktif; (c). Pembinaan anak asuh, dengan meningkatkan amal usaha anak asuh dengan jalan mengadakan pertemuan rutin antar pengelola tingkat wilayah dan meningkatkan kegiatan sosial anak asuh; (d). Pembinaan santunan keluarga dan asuhan keluarga; (e). Memberikan pengarahan dalam perawatan jenazah.
6. Bagian Pembinaan Kesehatan (Binkes). telah dilakukan adalah : (a). Meningkatkan peran, fungsi dan kualitas BKIA di tengah-tengah masyarakat; (b). Mengadakan kerja sama dengan Muhammadiyah dalam rangka koordinasi pendidikan tenaga kesehatan yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah; (c). Meningkatkan hubungan dengan instansi terkait; (d). Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Aisyiyah.

b. Periode Kepemimpinan Ibu Darminawati (2000-2005).

Setelah masa kepemimpinan Ibu Djumiati berakhir PDA Kota Palembang seterusnya dipimpin oleh Ibu Darminawati. Di masa kepemimpinan sebelumnya Ibu Darminawati menjabat sebagai sekretaris, dan di masa kepemimpinannya Ibu Djumiati menjabat sebagai sekretaris. Pada masa ini PDA kota Palembang mengalami kemajuan, di antaranya adanya penambahan PRA menjadi 30 ranting dan jumlah TK menjadi 19 TK.

Meskipun mengalami kemajuan namun tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang terjadi. PDA Kota Palembang mempunyai 6 bagian, tiap-tiap bagian memiliki peran dan fungsi masing-masing. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh keenam bagian tersebut dalam membantu pengembangan program kerja Aisyiyah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tabligh. Bagian tabligh ini diketuai oleh Hj. Yunizar Abdullah dan kegiatan yang dilakukan yaitu : (a). Mengadakan pengajian anggota Aisyiyah di mushollah PDA kota Palembang; (b). Menghadiri rapat yang diadakan oleh PDA yang dilaksanakan setiap bulan; (c). Menghadiri Musykerwil I pimpinan wilayah Aisyiyah Sum-Sel pada tanggal 26-27 Dzulhijah 1422 H.; (d). Memberikan penyuluhan di Balayudha dalam rangka Milad Aisyiyah ke-87; (e). Ikut serta khitanan massal dengan PKS dalam rangka milad Aisyiyah ke-87 tanggal 21 Oktober 2001; (f). Mengisi ceramah agama pada bulan puasa Ramadhan 1425 H di mesjid Al Furqon Plaju.
2. Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagian ini diketuai oleh Ibu Marhamah kegiatan yang dilaksanakan adalah : (a). Mengadakan lomba dram band anak-anak TK ABA 4 dalam rangka menyambut muktamar; (b) Mengadakan studi banding guru-guru TK se kota Palembang di tingkat Yogyakarta; (c). Menyelenggarakan penataan guru-guru TK dan pengurus sekolah Palembang.

**Tabel 2 : Nama sekolah TK di bawah pengawasan
PDA Kota Palembang tahun 2000-2005.**

No.	TK	Jumlah Siswa
1.	TK Aisyiyah 1	48
2.	TK Aisyiyah 2	47
3.	TK Aisyiyah 3	70
4.	TK Aisyiyah 4	383
5.	TK Aisyiyah 5	118
6.	TK Aisyiyah 6	130
7.	TK Aisyiyah 7	20
8.	TK Aisyiyah 8	60
9.	TK Aisyiyah 9	34
10.	TK Aisyiyah 10	100
11.	TK Aisyiyah 11	145

12.	TK Aisyiyah 12	70
13.	TK Aisyiyah 13	10
14.	TK Aisyiyah 14	72
15.	TK Aisyiyah 15	45
16.	TK Aisyiyah 16	42
17.	TK Aisyiyah 17	37
18.	TK Aisyiyah 18	28
19.	TK Aisyiyah 19	25

3. Bagian Ekonomi. Amal usaha yang dilakukan yaitu :
 (a) Mengaktifkan BUEKA; (b). Membuat baju seragam TK ABA se kota Palembang; (c). Menyediakan baju seragam Hizbul Wathan (HW) bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah; (d). Mendirikan warung ATK; (e). Membuka jasa usaha foto copy; (f). Membuka usaha wartel.
4. Bagian Pembinaan Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Amal usaha yang dilakukan adalah : (a). Meningkatkan pelayanan posyandu di setiap cabang dan ranting Aisyiyah; (b). Meningkatkan penyuluhan kesehatan masyarakat seperti HIV/AIDS, bahaya merokok, pemberantasan Narkoba di sekolah-sekolah Muhammadiyah/Aisyiyah yang bekerja sama dengan kepolisian dan Dikdasmen. (c). Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas gizi; (d). Memasyarakatkan gerakan hidup sehat dan sadar lingkungan.
5. Bagian Kaderisasi dan Pengembangan Sumber daya Insani. Usaha yang dilakukan yaitu : (a). Meningkatkan pembinaan murid TK ABA dan guru terutama masalah ibadah shalat; (b). Menyelenggarakan penataran, pelatihan dan pengajian di lingkungan organisasi; (c). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan fasilitas yang lengkap; (d)Menguatkan sistem pengkaderan Aisyiyah yang mampu menghasilkan sumber daya kader yang berkualitas.

6. Bagian PKS. Kegiatan yang dilakukan adalah : (a). 30 September-6 Oktober 2001 mengikuti Rakernas bagian PKS dan pengembangan masyarakat yang diadakan oleh pimpinan Pusat Aisyiyah; (b). September 2001, pembagian beras ke cabang-cabang Aisyiyah kota Palembang; (c) Melakukan sunatan massal yang diadakan oleh PDA setiap tahun; (d). Mengikuti Riyadlah pembimbing panti asuhan Muhammadiyah di Pusdiklat Depsos Jakarta tanggal 14 Juli 2002.

Dua periode kepemimpinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap kepemimpinan Aisyiyah Daerah Palembang mengalami kemajuan. Ini terlihat dari program kerja yang dimiliki dan bagian-bagian yang telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik.

Organisasi Aisyiyah adalah organisasi yang telah menjadi satu organ dalam tubuh masyarakat dan bangsa Indonesia yang peranannya terbukti fungsional dan potensial bagi usaha pembangun bangsa. Keberadaan Aisyiyah dipandang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiadaan Aisyiyah dicari dan diupayakan kiprah Aisyiyah ditunggu dan diidamkan oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat Aisyiyah sendiri.

1. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Aisyiyah di Palembang

Secara garis besar ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pendukung dan penghambat dalam pengembangan Aisyiyah di Palembang secara umum, yaitu :

1. Faktor pendukung :

- a. Anggotanya adalah warga masyarakat yang wanita, berdasarkan sensus warga masyarakat yang berjenis perempuan senantiasa memperlihatkan jumlah yang lebih besar sehingga dalam mencari kader Aisyiyah tidak sulit.

- b. Gerakannya berdasarkan ajaran Islam yang merupakan pemeluk mayoritas di Palembang. Keberadaannya yang mayoritas menjadi modal dasar bagi Aisyiyah.
- c. Modal dasar yang terakngkat dari aspek agama Islam selanjutnya menjadi modal dasar pula bagi tingginya tingkat dedikasi para warganya. Kondisi demikian mampu mencetak jiwa kerja ibadah semangat beramal demi kehidupan di masa mendatang yang dilahirkan oleh jiwa kerja ibadah merupakan potensi yang besar bagi kelancaran organisasi.
- d. Jiwa organisasi yang merupakan garis perjuangan di dalam Aisyiyah membawa sikap tertib kerja dan gigih berjuang.
- e. Dari sumber daya manusianya, Aisyiyah memiliki sumber daya manusia yang banyak, merata dan meluas.
- f. Amal usaha Aisyiyah mencakup segenap aspek kehidupan, luasnya aspek kehidupan yang dijangkau oleh amal usaha Aisyiyah membuat Aisyiyah dituntut untuk berperan secara efektif dalam segenap sisi kehidupan.

2. Faktor Penghambat :

- a. Kurang optimalnya perhatian khusus dalam pengembangan dan pembinaan terhadap kader karena jumlah yang terlalu banyak.
- b. Kurang efisien dalam melaksanakan tugas keorganisasian di beberapa bagian.
- c. Keterbatasan waktu yang dimiliki pengurus dalam mengelola SDM sehingga hasilnya kurang optimal.
- d. Kurangnya kerja sama yang dilakukan organisasi di semua tingkatan.

D. Peran Aisyiyah Palembang

Organisasi Aisyiyah adalah suatu komponen persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di kalangan wanita persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyampaikan visi, misi, tujuan dan amal usaha yang sama. Aisyiyah merupakan organisasi dakwah Islam *amar makruf Nahi munkar* dan bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam rangka ikut serta mewujudkan masyarakat utama adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Selaku organisasi massa, aspek gerak Aisyiyah adalah keagamaan Islam, kemasyarakatan dan kewanitaan. Dalam ketiga aspek itulah Aisyiyah mencermati dan senantiasa tanggap pada tuntutan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Aisyiyah dalam merealisasikan tujuan dakwahnya menggunakan beberapa media, yaitu media lisan, perbuatan (*bil'hal*), cetak, dan elektronika. Dengan demikian Aisyiyah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM.

Aisyiyah kota Palembang juga berkisah dalam bidang kesosialan, banyak hal yang telah dilakukan, berupa pemeliharaan dan pembinaan anak-anak yatim dan miskin, pembinaan kesejahteraan sosial dan pengembangan sumber daya insani. Dengan memperlihatkan kiprahnya di tengah masyarakat kota Palembang, Aisyiyah telah membantu dalam meningkatkan potensi, peran, fungsi dan kedudukan wanita dalam masyarakat serta memotivasi langkah kerja yang efektif dan intensif.

Sebagai organisasi, Aisyiyah dalam gerak dan kegiatannya didasarkan pada kedudukan Aisyiyah sebagai salah satu komponen dalam persyarikatan Muhammadiyah dan komponen dalam kesatuan bangsa Indonesia.³⁷ Jadi segenap langkah geraknya dijiwai prinsip dasar ke-Muhammadiyah dan kebangsaan. Ada tiga landasan yaitu :

³⁷ Djumiati, Sekretaris PDA PLG, *Wawancara*, tanggal 21 Maret 2007.

1. Landasan sebagai komponen persyarikatan Muhammadiyah, yaitu : (a). Al Qur'an dan sunnah Rasul; (b). Khittah Muhammadiyah, Muqaddimah AD, AD, ART dan kepribadian Muhammadiyah; (c). Ketentuan lain dalam persyarikatan yang berlaku bagi Aisyiyah.
2. Landasan Organisasi Aisyiyah, meliputi : (a). Muqadimah AD, AD dan ART Aisyiyah; (c). Keputusan musyawarah Aisyiyah.
3. Landasan sebagai komponen bangsa, yaitu (a). Pancasila dan UUD 1945; (b). GBHN dan tata pelaksanaannya; (c) Peraturan Pemerintah untuk Ormas.³⁸

Terdapatnya tiga landasan yang menjadi gerak Aisyiyah, maka Aisyiyah dituntut untuk memiliki 6 hal, yaitu semangat juang tinggi didasari oleh sikap beribadah, kesadaran akan potensi yang dimiliki, daya tanggap yang tinggi, gerak yang lincah dan dinamis, daya pikir yang inovatif dan kreatif, dan kepekaan yang tinggi pada kebutuhan lingkungan.³⁹ Aisyiyah terus berkembang dan semakin diterima di tengah masyarakat serta memberikan bukti nyata dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Aisyiyah.⁴⁰

Masalah pendidikan juga mendapat perhatian Aisyiyah kota Palembang. Untuk itu, Aisyiyah melaksanakan beberapa kebijakan di antaranya yaitu :

- a. Membuka beberapa jenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan dengan wanita dan perjuangan wanita seperti kursus keterampilan, kursus kesehatan, kursus pemeliharaan dan perawatan.

³⁸ *Rancangan Program Kerja*, PDA Kota Palembang, periode 1995-2000.

³⁹ Darminawati, Ketua Umum PDA Palembang, *Wawancara*, Palembang tanggal 24 Maret 2007.

⁴⁰ Marhamah, Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, PDA Palembang, *Wawancara*, Palembang tanggal 24 Maret 2007.

- b. Mengusahakan adanya sekolah percontohan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- c. Menertibkan pengelolaan sekolah-sekolah Aisyiyah.⁴¹

Pendidikan merupakan langkah awal dalam melangkah dan meraih kesuksesan. Pendidikan tidak diperuntukkan bagi kaum elit saja, namun masyarakat rendahpun dapat merasakannya. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Aisyiyah akan banyak membantu masyarakat untuk menghantarkan generasi muda dalam mencapai cita-citanya.

Pada prinsipnya pendidikan dalam Aisyiyah sama dengan prinsip pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan formal sekolah umum kurikulumnya disamakan dengan kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditambah dengan pelajaran agama. Kurikulum agama diatur oleh Muhammadiyah, untuk mencapai hasil yang optimal, Aisyiyah telah berusaha secara profesional melalui berbagai kegiatan, antara lain lokakarya, penataran, pelatihan dan musyawarah kerja bagian P dan K.

Kegiatan di bidang pendidikan dilembagakan dalam suatu wadah yang pada awalnya disebut urusan madrasah, karena adanya perkembangan kegiatan pendidikan serta ada perkembangan struktur organisasi, maka wadah atau lembaga tersebut banyak pula mengalami perubahan nama.⁴² Dari urusan madrasah kemudian menjadi urusan pendidikan, selanjutnya berganti nama menjadi Majelis pengajaran dan bagian pendidikan dan kebudayaan dan sekarang bagian pendidikan dasar dan menengah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi dan peranan organisasi Aisyiyah di Palembang dalam meningkatkan amal usaha di berbagai bidang, maka uraian berikut ini merupakan gambaran tentang Aisyiyah di Palembang.

⁴¹ PDA Kota Palembang, *Op.cit.*

⁴² PPA, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, (Yogyakarta : tt.), hal. 61.

1. Bidang Sosial

Kegiatan Aisyiyah kota Palembang dalam bidang sosial diawali sejak mulai berdiri, terutama berupa penyantunan anak yatim dan piatu. Kegiatan ini diperluas hingga meliputi sub bidang perlindungan dan kesejahteraan keluarga serta sub bidang bantuan korban bencana alam.

Santunan kepada anak yatim dan piatu merupakan salah satu bidang kegiatan Aisyiyah Daerah kota Palembang dalam sub bidang perlindungan dan kesejahteraan keluarga. Santunan ini tidak hanya dilakukan terhadap anak yatim-piatu saja, tetapi juga terhadap anak miskin. Untuk memberikan santunan terhadap anak yatim dan anak miskin, Aisyiyah mendirikan Panti Asuhan.

Panti Asuhan ini merupakan satu sistem yang sudah lama digunakan Aisyiyah untuk memberikan bantuan sosial terhadap mereka. Panti Asuhan yang dikelola ini khusus untuk anak puteri. Kegiatan kesejahteraan sosial ini pada awalnya ditangani oleh bagian PKU (penolong kesengsaraan umum). Bagian kesejahteraan ummat ini juga mempunyai asrama puteri, maksudnya adalah untuk menghimpun puteri-puteri warga Aisyiyah dan muslimah pada umumnya agar dapat terjaga lingkungannya. Tempat ini untuk membina akhlak dan peribadatan, bahkan diharapkan puteri-puteri ini dapat dididik menjadi kader Aisyiyah.

Panti Asuhan yang telah didirikan oleh Aisyiyah Daerah Kota Palembang berdiri pada tanggal 18 November 1982 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Km 4,5 Kompleks Perguruan Muhammadiyah Balayudha. Panti Asuhan ini diberi nama Panti Asuhan Humairah. Pada awal penerimaan anak asuh berjumlah 10 orang, kemudian bertambah banyak.⁴³ Jumlah maksimal penerimaan anak asuh dalam satu tahun sebanyak 60 anak, yang berasal dari berbagai daerah.

⁴³ Syariah Djaka, Ketua Panti Asuhan Humairah Palembang, Wawancara tanggal 3 Maret 2007.

Bagi Aisyiyah Daerah, tujuan didirikannya Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang adalah dalam rangka mengamalkan ajaran Islam dengan berupaya memelihara, mengasuh dan membina anak yatim-piatu dan anak-anak terlantar (Dhu'afa), sehingga mereka dapat mandiri dan berguna bagi agama, bangsa dan negara pada umumnya dan bagi pengembangan persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah pada khususnya. Sejak awal berdirinya telah ditetapkan bahwa yang diterima menjadi anak asuh Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang harus memenuhi syarat sebagai berikut : (a). Maksimal usia Sekolah Dasar; (b). Status anak adalah yatim, piatu atau yatim-piatu dari keluarga tidak mampu; (c). Membawa surat keterangan dari pejabat setempat (RT/RW/Lurah).⁴⁴

Untuk tercapainya maksud dan tujuan pendirian panti asuhan sebagaimana di atas, maka perlu diselenggarakan sistem pembinaan terpadu. Semua anak diwajibkan mengikuti pendidikan formal sesuai jenjang usianya mulai dari SD sampai dengan SLTA. Baik umum maupun kejuruan di sekolah-sekolah yang ada di kota Palembang dan di sela-sela waktu di luar jam sekolah anak asuh mendapatkan pendidikan kepatihan yang dibina langsung oleh Ibu asuh maupun pengurus panti.

Seorang anak asuh hanya dapat tinggal di Panti Asuhan Humairah Palembang sampai saatnya yang bersangkutan menamatkan pendidikan formalnya setingkat SLTA dan belum diserahkan kembali kepada keluarganya. Anak asuh mendapat pembekalan akhir dengan mengikuti kursus ketrampilan yang diminatinya selama 6 bulan. Khusus bagi mereka yang berprestasi, pengurus akan mempertimbangkan untuk meneruskan pengasuhan dengan mendanai kuliah sampai ke Perguruan Tinggi hingga tamat.

⁴⁴ Laporan Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang tahun 2005.

Pernah dialami seorang anak asuh bernama Ainisiyiah yang berhasil menamatkan kuliahnya di IAIN Raden Fatah Palembang tahun 1998 dan kini telah menjadi PNS.⁴⁵ Di samping itu, secara khusus panti juga memberikan sertifikat yang mendokumentasikan nilai prestasi penguasaan anak asuh akan materi pembinaan yang didapatnya selama tinggal di panti dan sekaligus menjadi legalitas bahwa yang bersangkutan adalah alumni Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang.

Dalam pembiayaan operasional Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang tidak terlepas dari kepedulian dan peran para donatur yang memberikan secara tetap maupun tidak tetap (insidental). Para donatur tetap adalah dermawan atau lembaga yang menyumbang secara rutin, seperti : (a). Kanwil Departemen Sosial Sumatera Selatan; (b). Yayasan Darmais Jakarta; (c). Bapak Haji Abdul Rozak; (d). Bapak H. Abdul Halim; (e). Bapak Dindin Suddin; (f). Rizky dan Dilla; (g). Bapak Hasby Uzair; (h). BRI Sum-Sel; (i). RS POLRI Bhayangkara Palembang.

Sedangkan para donatur tidak tetap adalah para dermawan yang secara pribadi maupun institusi memberikan sumbangannya. Para donatur tidak tetap tersebut di antaranya yaitu : (a). PT PUSRI Palembang; (b). Pertamina; (c). Kanwil Departemen Koperasi Sum-Sel; (d). Organisasi-organisasi; (e). PTS (Muhammadiyah) maupun Pemerintah; (f). TNI dan POLRI; (g). Kanwil Departemen Perindustrian Sum-Sel.⁴⁶

Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang membina anak asuh berasal dari berbagai daerah, di antaranya yaitu dari Ambon (korban kerusuhan), Aceh (korban gempa tsunami 2004), dan dari daerah Sum-Sel sendiri. Sejak masuk dan keluar jumlah anak asuh setiap tahun tidak sama. Pada tahun 2005, awal penerimaan berjumlah 60 orang anak, dan

⁴⁵ Syaria Djaka, Ketua Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang, *Wawancara*, tanggal 3 Maret 2007.

⁴⁶ Laporan Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang tahun 2005.

akhirnya berjumlah 45 anak. Sejak berdiri Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang telah berhasil menghantarkan 84 anak asuh menamatkan perguruan tinggi di IAIN Raden Fatah Palembang dan PLDTK Aisyiyah Palembang. Saat ini mereka ada yang kembali kepada keluarga asalnya dan ada juga yang bekerja dengan menjadi guru, pegawai pabrik sepatu di Tangerang dan Pabrik Mie Instant di Palembang, PNS dan ada juga yang berdagang.⁴⁷

Dalam waktu 10 tahun ini Aisyiyah Daerah kota Palembang hanya memiliki satu Panti Asuhan yang sekarang ini sedang direnovasi untuk penambahan bangunan. Sedangkan sistem manajemen pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh Aisyiyah Daerah yang masuk ke dalam bidang dan kegiatan bagian PKS. Usaha yang telah dilakukan Aisyiyah terhadap bidang kemasyarakatan ini juga diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan amal sosial lainnya, yaitu melakukan pembentukan amil yang khusus menangani masalah zakat fitrah, mengadakan khitanan massal dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dari pemaparan di atas dapat ditarik garis besar bahwa usaha yang dilakukan oleh Aisyiyah Daerah Palembang secara terperinci dalam memajukan masyarakat miskin tersebut untuk mendorong :

1. Menggerakkan para anggota Aisyiyah agar aktif dalam hal tolong-menolong bagi kesejahteraan masyarakat Muslim Palembang dan juga terhadap warga Aisyiyah dalam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan cita-cita Aisyiyah.
2. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial dan memulihkan semangat terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
3. Menyelenggarakan kegiatan tolong-menolong dan memelihara anak yatim-piatu agar diperhatikan dan diberi santunan oleh pribadi warga Aisyiyah atau oleh

⁴⁷ *Ibid.*

perserikatan sehingga mereka tidak kehilangan semangat dan arah.

4. Mendidik anak yatim piatu Aisyiyah di panti-panti asuhan dan menyelenggarakan asrama penampungan agar mereka terpelihara dan terdidik sesuai dengan cita-cita perserikatan.
5. Mendorong warga Aisyiyah agar selalu mengingat dan menolong para *masakin* serta para *dhu'afa* lainnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Aisyiyah.
6. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan zakat, sehingga hak-hak *du'afa* dapat tersalurkan pada sasaran yang tepat, efektif dan efisien sehingga dapat berdaya guna yang langsung dapat dinikmati oleh orang-orang yang berhak.
7. Penyelenggaraan semua amal sosial dan kesejahteraan sosial wajib disesuaikan dengan tuntunan dari majelis dan selalu berpedoman pada etika Islam dan sunnah Nabi Muhammad Saw.

Partisipasi yang telah dilaksanakan oleh Aisyiyah membuktikan bahwa Aisyiyah merupakan gerakan yang bermotto "*Amar Makruf Nahi Munkar*" yang mempunyai kecintaan mendalam terhadap masyarakat Indonesia dan masyarakat kota Palembang khususnya.

Pada saat itu Aisyiyah telah memainkan peran sebagai agen perubahan sosial, sebagai bukti telah berperan dalam akulturasi budaya dan ikut menyumbang dalam proses tersebut dengan menggunakan nilai-nilai Islam di Palembang.

2. Bidang Agama/Tabligh

Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam Aisyiyah Kota Palembang merealisasikan prinsip dan tujuan dakwahnya melalui bagian tabligh. Terutama sekali dalam meningkatkan iman dan takwa, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk kalangan luar. Kegiatan dakwah Aisyiyah diarahkan untuk meningkatkan kehidupan wanita muslim Indonesia pada umumnya dan kota Palembang pada khususnya.

Dalam upaya itu, Aisyiyah kota Palembang mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat. Adapun isi dakwah yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu ibadah warga Aisyiyah kota Palembang, mempertinggi akhlak dalam hubungan dengan sesama manusia yang direalisasikan oleh Aisyiyah Daerah Kota Palembang dengan mengadakan kunjungan dakwah ke LP (Lembaga Pemasyarakatan) Pakjo setiap seminggu sekali.
2. Menggembirakan kehidupan beramal ibadah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dalam hal ini Aisyiyah Daerah Kota Palembang melakukan iuran wajib bagi anggota dan pengurus sebagai dana tambahan untuk keperluan keuangan dalam melakukan kegiatan amal.
3. Memberikan tuntunan Islam terutama dalam bidang tauhid, ibadah dan mu'amalah, yang direalisasikan oleh Aisyiyah Daerah Kota Palembang dalam pertemuan kajian bulanan yang dilakukan oleh bagian PKU bertempat di Panti Asuhan Aisyiyah Humairah yang diikuti oleh anggota Aisyiyah Daerah Kota Palembang dan pengurus.

Usaha yang dirintis dan dilaksanakan menunjukkan bahwa Aisyiyah selalu berusaha memperbaharui dan meningkatkan pemahaman Islam secara rasional sehingga Islam lebih mudah diterima dan dihayati oleh segenap lapisan masyarakat kota Palembang. Selain itu, Aisyiyah Kota Palembang telah mendirikan mushallah pada tahun 1997 yang terletak di Jalan Sosial Km. 5 Palembang. Hadirnya musholla tersebut menambah kelancaran bagi Aisyiyah untuk berdakwah.

Kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan dan secara rutin dilakukan di mushallah tersebut Ibu Djumiaty sebagai ketua pengurus Mushallah adalah diadakannya pengajian anak-anak TK/TPA, pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan satu kali satu bulan yaitu pada minggu ketiga

setiap bulan, melakukan kegiatan tabligh akbar dalam perayaan hari-hari besar Islam dan khitanan massal.⁴⁸ Pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri juga dibentuk amil zakat fitrah dan pada hari raya Idul Adha pengurus juga mengkoordinir penyembelihan hewan kurban.⁴⁹

Kegiatan Aisyiyah Kota Palembang dalam bentuk dakwah juga tercermin pada pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah adalah kegiatan dakwah yang ditekankan pada usaha tercapainya tingkat keluarga sakinah pada keluarga muslim. Pada pembinaan ini Aisyiyah mempunyai lima komitmen dalam membangun keluarga sakinah, yaitu :

1. Aspek kehidupan beragama dalam keluarga yang menekankan kepada nilai-nilai agama dan diterapkan ke dalam perbuatan.
2. Pendidikan dalam keluarga yang lebih menjurus kepada pendidikan agama.
3. Kesehatan keluarga yang harus diperhatikan dalam tiap-tiap anggota keluarga, seperti sering berkonsultasi dengan dokter keluarga.
4. Ekonomi yang stabil bagi keluarga yang menjadi motor penggerak untuk menjamin kebutuhan keluarga, seperti berwiraswasta.
5. Hubungan sosial yang harmonis inter dan antar bangsa.⁵⁰

Bagi Aisyiyah, pembinaan keluarga sakinah lebih diarahkan untuk membina keluarga sebagai suatu satuan unit. Untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan keluarga sakinah, Aisyiyah memberikan pelatihan yang dipersiapkan khusus bagi Mubalighat keluarga sakinah.

Adapun keluarga sakinah yang dicita-citakan Aisyiyah adalah keluarga Muslim yang memenuhi syarat sebagai

⁴⁸ Djumiati, Ketua Pengurus Mushallah, *Wawancara* Palembang tanggal 21 Maret 2007.

⁴⁹ Warta Dakwah No. 12, hal. 15/th.v/Nop-Des 2005.

⁵⁰ PPA., *Op. Cit.*, hal. 56.

berikut, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., mempunyai prinsip hidup untuk ibadah, mempunyai sifat *tawadlu' tadalarru'* dan kasih sayang yang terpancar dari perbuatan, mempunyai perhiasan diri (tabah, sabar dan qona'ah yang tercermin lewat kehidupan).⁵¹ Keluarga sakinah adalah keluarga sejahtera, bahagia lahir dan batin. Ke dalam terbentuk suasana yang akrab antara ayah, ibu dan anak-anak. Dalam keluarga terjalin komunikasi yang harmonis secara horizontal dengan orang dan keluarga lain di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan alamnya serta secara vertikal hari-hari yang dilaluinya sebagai gerakan *taqarruf* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, menyembah-Nya dan meminta pertolongan-Nya serta rahmat-Nya.

3. Bidang Pendidikan

Tujuan dakwah Aisyiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Salah satu usaha Aisyiyah untuk mencapai tujuan itu adalah melalui kegiatan pendidikan yang ditangani oleh bagian pendidikan.

Sekitar tahun 1950-an Aisyiyah di Palembang mendirikan TK di Bukit Kecil, Kertapati dan 3-4 Ulu, yang dikenal dengan nama TK Bustanul Atfal. Sekarang ini (1977) jumlah TK Aisyiyah di Kota Palembang berjumlah 19 TK. TK-TK tersebut dalam pengawasan PDA Kota Palembang. Adapun tujuan didirikannya TK-TK ini adalah untuk memberikan pendidikan sejak dini yang berguna untuk menanamkan keimanan dan akhlak budi pekerti sejak anak-anak. Kemudian Aisyiyah juga memberikan pendidikan ketrampilan bagi para wanita, terutama dalam bidang menjahit, menyulam dan memasak yang dilakukan di Panti Asuhan Aisyiyah Humairah.⁵²

⁵¹ Abu Su'ud, dkk., *Kemuhammadiyah* 3, (Yogyakarta : PPM, 1996), hal. 56.

⁵² Marhamah, *Wawancara*, Palembang tanggal 26 Maret 2007.

Dalam rangka pembinaan iman dan akhlak serta pemahaman pada tujuan Aisyiyah, bagian pendidikan juga mengkoordinir guru TK dalam suatu wadah yang disebut IGABA. Wadah ini juga merupakan tempat kegiatan para guru kanak-kanak dalam menambah wawasan pendidikan. Selain itu, guru-guru TK diambil dari kader-kader Aisyiyah itu sendiri. Meskipun demikian, ada juga guru TK yang bukan berasal dari kader Aisyiyah. Untuk memajukan dan meningkatkan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut ajaran Islam, Aisyiyah Kota Palembang melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu :

1. Memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Aisyiyah di seluruh jenjang melalui perencanaan strategis yang dapat mencapai tujuan pendidikan Aisyiyah. Untuk saat ini Aisyiyah Daerah hanya memprioritaskan jenjang TK dengan selektif mungkin.
2. Meningkatkan kualitas kesejahteraan guru dan karyawan di lembaga-lembaga pendidikan Aisyiyah. Yang dilakukan Aisyiyah Daerah Palembang dengan cara memberikan pelatihan pengajaran gratis kepada guru-guru TK ABA dan memberikan imbalan (gaji) setiap bulannya.
3. Meningkatkan peran sumber daya manusia pada semua amal usaha pendidikan dalam berpartisipasi pada amal-amal usaha organisasi.
4. Menyiapkan pendidikan Aisyiyah pada seluruh jenjang dari TK sampai ke perguruan tinggi, untuk memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan agama Islam yang menjadi model keunggulan di masa depan. Sekarang ini Aisyiyah mempunyai jenjang pendidikan TK dan Perguruan Tinggi.
5. Mengembangkan dan menerapkan sistem rekrutmen tenaga pengajar dan karyawan berdasarkan pada keterpaduan faktor-faktor obyektif, profesional,

komitmen, keislaman, pengalaman dan kepemihakan pada pengembangan misi Aisyiyah serta faktor-faktor yang mendukung kepentingan pengembangan amal usaha.

Adapun sistem pengajaran yang dilaksanakan di TK-TK Aisyiyah sama seperti TK-TK Swasta dan Pemerintah lainnya, hanya saja pelajaran agama lebih ditekankan sejak dini. Hal ini ditekankan dengan maksud untuk mendidik tunas-tunas bangsa ini menjadi generasi yang Islami, beramal shaleh, cerdas, berilmu tinggi dan berakhlak mulia serta bertaqwa kepada Allah SWT.

E. Kesimpulan

Munculnya Aisyiyah Palembang seiring dengan diresmikannya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1929 di Palembang. Kehadirannya berperan penting dalam memberantas kebodohan, ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat, khususnya kaum wanita. Waktu itu ada perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan, sehingga peran kaum perempuan kurang diperhatikan. Perempuan hanya sebagai *konco wingking*, hanya sebagai ibu rumah tangga yang bertugas *macak, masak dan manak*. Masih anak-anak tidak disekolahkan, dan setelah perawan, harus *dipingit*, tidak boleh keluar rumah, sampai saatnya ia dilamar atau dijodohkan. Tidak ada pendidikan formal untuk wanita, sehingga mereka buta huruf, buta aksara, buta ilmu pengetahuan. Dampaknya tentu mereka kaum wanita ini tidak mempunyai peran apa-apa dalam masyarakat.

Untuk memberantas kebodohan, ketertinggalan dan meningkatkan peran kaum wanita dalam berbagai aspek kehidupan, mengangkat harkat dan derajat kaum wanita sejajar dengan kaum laki-laki, maka organisasi Aisyiyah muncul untuk berkiprah memainkan perannya sebagai pelopor kemajuan, mendobrak ketidakadilan. Pada awal kehadirannya, meski tidak secara otonom Aisyiyah telah menunjukkan kiprahnya di tengah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan perubahan yang

ada pada saat itu, maka pada tahun 1966 Aisyiyah pusat secara resmi menjadi otonom, dan kemudian diikuti di daerah-daerah lain, termasuk di Palembang.

Kegiatan yang dilaksanakan Aisyiyah meliputi bidang tabligh, pendidikan dasar dan menengah, ekonomi, kaderisasi, pembinaan kesejahteraan sosial (PKS), pembinaan kesehatan (Binkes) dan lingkungan hidup, pendidikan dan kebudayaan.

Pada bidang agama/tabligh, Aisyiyah berusaha menegakkan dan menjunjung tinggi doktrin Islam. Merealisasikan prinsip dan tujuan dakwahnya melalui tabligh yang diselenggarakan secara rutin pada hari-hari besar Islam, minggu ketiga tiap bulan, pertemuan-pertemuan resmi/tidak resmi, kegiatan pada pengajian mingguan dan pengajian bulan ramadhan. Kegiatan dakwah Aisyiyah diarahkan untuk meningkatkan iman dan takwa wanita Indonesia pada umumnya dan Palembang pada khususnya. Untuk membangun masyarakat yang Islami, mawadah wa rahmah, Aisyiyah selalu berjuang dengan motto "*Amar Makruf Nahi Munkar*". Untuk membina akhlak, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para narapidana wanita, Aisyiyah secara berkala melakukan kunjungan pengajian ke lembaga pemasyarakatan wanita Pakjo Palembang. Hasilnya mereka banyak yang menjadi muslimah yang pantas diteladani, karena setelah keluar dari LP, di antara mereka ada yang menjadi juru dakwah dan wiraswastawan yang sukses.

Pada bidang Sosial, Aisyiyah Palembang berupaya menyantuni anak-anak yatim-piatu dan anak-anak terlantar lainnya yang diasuh di Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang yang dibangun pada tanggal 18 November 1982. Anak-anak panti asuhan ini diasramakan untuk dibina, dididik dan disekolahkan. Mereka yang diasuh di Panti Asuhan tersebut, banyak yang telah berhasil terjun di masyarakat sebagai PNS, guru, karyawan dan wiraswastawan.

Bidang kaderisasi, Aisyiyah melakukan kegiatan pembinaan terhadap kader-kader Aisyiyah melalui penataran anggota pimpinan. Di samping itu juga melakukan pelatihan kepemimpinan dan menyiapkan calon pimpinan organisasi,

latihan kerja bagi pengelola amal usaha Aisyiyah, dan pengajian khusus untuk kajian-kajian masalah khusus yang ditinjau dari perspektif Islam. Pada bidang pendidikan, Aisyiyah Daerah Palembang ikut serta berpartisipasi dengan membangun 19 TK (Taman Kanak-Kanak) yang tersebar di seluruh kota Palembang. Tujuan dibangun TK untuk memberikan pendidikan sejak awal, gunanya untuk menanamkan keimanan dan akhlak budi pekerti sejak anak-anak.

Peran Aisyiyah lainnya yaitu memberikan pendidikan ketrampilan kepada para wanita sebagai bekal berwiraswasta. Adapun ketrampilan yang diberikan meliputi menjahit, menyulam, memasak dan beberapa jenis ketrampilan lainnya. Dalam rangka pembinaan iman dan akhlak serta pemahaman pada tujuan Aisyiyah, bagian pendidikan juga mengkoordinir guru TK dalam wadah IGABA sebagai wahana untuk menambah wawasan pendidikan.

Dalam bidang ekonomi, Aisyiyah melakukan usaha konpeksi berupa pembuatan telekung, spreng aplikasi, memasarkan pakaian jadi, menerima pesanan kue dan katering, membuat baju seragam TK ABA se kota Palembang dan seragam Hizbul Wathan bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, membuka warung ATK, membuka usaha wartel, foto copy dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Wardini, *Orasi Ilmiah Muhammadiyah di Sumatera Selatan Dakwah Sepanjang Masa Tugas yang Harus di Galakkan*.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- APU, suratmin, *Nyai Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangannya*, Yogyakarta : PPA, 1982.
- AD/ART Aisyiyah, Periode 2002.
-, Periode 1985-1990.
- Darminawati, *Laporan Pertanggung Jawaban PDA Kota Palembang*, Periode 2000-2005.
- Djumiati, *Laporan Pertanggung Jawaban PDA Kota Palembang*, Periode 1995-2000.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Mahkota Surabaya, 1989.
- Fatah, H. Rohadi Abdul, *Sosiologi Agama*, Jakarta : Kencana Mas, 2004.
- Gunawan, Ari H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995.
- Itr. Nuruddin, *Ada Apa Dengan Wanita*, Yogyakarta : Riara Wacana Yogya, 1994.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997.
- Laporan Panti Asuhan Aisyiyah Humairah Palembang Tahun 2005*.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Muktamar Mandiri Aisyiyah ke-45 di Malang*, 2005.
-, *Rancangan Program Aisyiyah Periode 2005-2010*. Yogyakarta : tp, 2005.

-, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, Yogyakarta : tp, tth.
-, *Tanfidz Mukhtar Aisyiyah ke-45 di Malang*, Yogyakarta : PPA, 2005.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, *Sejarah Muhammadiyah Kota Palembang*, 2005.
-, *Peta Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan*, Palembang : tp. 1985.
- PDA Palembang, *Rancangan Program Kerja Periode 1995-2000*.
- Rais, Amien, ed., *Islam di Indonesia : Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Su'ud, Abu, dkk., *Kemuhammadiyah 3*, Yogyakarta : Pustaka SM, 1996.
-, *Kemuhammadiyah 1*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2003.
- Suara Aisyiyah, No. 6 th. Ke-82 Juni 2005.
-, No. 11 th. Ke-81 November 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Seminar Sehari, *Wacana Gerakan Perempuan Kontemporer, Hasil Seminar 29 April 2000*, Yogyakarta : PPA, 2000.
- Warta Dakwah No. 12, th. v/Nop-Des 2005.

KERAJINAN “RENDU BANGKU” KOTO GADANG¹

Oleh ; Refisrul²

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara penghasil seni tenun yang terbesar di dunia, sejak dahulu hingga sekarang. Kreasi para penenun dahulu banyak dipengaruhi unsur-unsur budaya asing akibat pengaruh hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga yang telah berlangsung sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Kondisi tersebut memberikan sumbangan cukup besar bagi kekayaan keanekaragaman jenis tenun bangsa Indonesia. Awalnya, para penenun generasi dahulu hanya mengenal benang kapas sebagai bahan baku tenunannya. Namun setelah adanya pengaruh hubungan perdagangan dengan Cina, India, Arab dan Eropa tampaknya telah mempengaruhi pula hasil tenunan bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil-hasil tenun sebelumnya terkesan sederhana, berkembang menjadi tenunan yang kompleks, rumit dan indah dengan kemilau benang emas dan warna warni yang diperoleh dari benang sutera. Hal ini seakan-akan memberikan wajah baru, baik dari segi teknik tenunannya maupun warna dan ragam hiasnya. Sehingga tenunan yang semula hanya menggunakan benang kapas dengan warna suram dan samar, menjadi berwarna, memiliki dinamika hidup, bergairah dan agung.

Salah satu daerah yang kaya dengan produk kain tradisional adalah Provinsi Sumatera Barat (baca; Minangkabau), yang telah lama dikenal sebagai salah satu penghasil kain songket, sulaman, renda dan lainnya. Beberapa daerah yang cukup dikenal sebagai sentra

¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

² Peneliti Madya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang.

produksinya adalah Silungkang, Pandai Sikek, Pariaman, Bukittinggi dan sekitarnya. Kain tradisional masyarakat bersangkutan telah dikenal sampai ke manca negara karena kehalusan dan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Semua itu merupakan kekayaan budaya masyarakat Minangkabau yang perlu tetap dijaga dan diupayakan selalu kelestariannya.

Budaya sulaman berkembang di Minangkabau semenjak adanya sekolah yang didirikan oleh Rohanah Kudus pada tahun 1911 (seabad yang silam) yang bernama Kerajinan Amai Setia. Pada sekolah tersebut diajarkan bermacam-macam keterampilan untuk kaum perempuan seperti tenun, sulaman, bordir dan jahit menjahit. Setelah itu, diketahui bahwa hampir setiap daerah di Minangkabau mempunyai jenis kerajinan tenun. Fungsi atau kegunaan kain bagi masyarakat Minangkabau, sebagai penutup badan (aurat) agar tidak terlihat oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari muncullah aneka macam jenis pakaian dan bahan kain yang digunakan yang diwarisi turun temurun. Demikian juga, berkembang keahlian atau kerajinan membuat pakaian dan hiasannya, agar menarik atau sedap dipandang mata. Sehingga, timbullah kerajinan menenun, menyulam, merenda, dan sebagainya.

Pekerjaan menenun, menyulam dan merenda umumnya dilakukan oleh kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki melakukan pekerjaan lain yang sifatnya memerlukan tenaga fisik seperti bertani, tukang dan lainnya. Para kaum perempuan dari setiap daerah berlomba-lomba belajar tenun, sulaman dan renda, dan menjadikan pekerjaan itu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal itulah yang menyebabkan kegiatan menyulam atau menenun berkembang di Minangkabau seperti, kain songket di Pandai Sikek (Tanah Datar) dan Silungkang (Sawahlunto), sulaman di Bukittinggi dan sekitarnya (Koto Gadang, Ampek Angkek, Biaro dan lain-lain), Naras (Pariaman), batik di Pariaman (Naras), Tanjung Sungayang dan lain-lain. Dari berbagai daerah tersebut, selain songket Silungkang dan Pandai Sikek, yang

cukup terkenal adalah sulaman Koto Gadang, sedangkan bordir yang terkenal adalah di Bukittinggi, Naras, dan lainnya.

Kepandaian menenun itu dibawa oleh nenek moyang orang Minangkabau ketika terjadi migrasi besar-besaran penduduk dari daratan Asia ke arah selatan dan timur beberapa tahun yang lalu, bersamaan dengan segala kepandaian membuat dan menggunakan alat-alat pertanian dan pertukangan dan senjata. Sebagaimana telah diutarakan, persebaran kain tenun di Minangkabau tidak luput dari adanya pengaruh daerah luar seperti Cina, Arab, India dan lain-lain. Tradisi membuat kain di Minangkabau diperkenalkan oleh pedagang Arab, India dan Cina yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Kehadiran para pedagang yang masuk melalui Selat Malaka ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan pantai utara Jawa dengan membawa benang emas dan perak, mempengaruhi kain tenunan Minangkabau.³ Sehingga dikenallah kain songket, kain sulam atau kain bordir sebagai jenis hasil kerajinan khas Minangkabau. Hampir seluruh pelosok Minangkabau, dari luhak ke rantau, mempunyai pusat kerajinan tenun dan sulaman, masing-masing mengembangkan corak dan ciri khas sendiri.

Beberapa nagari yang terkenal sekali dengan kain tenunannya dan sangat produktif Koto Gadang, Pandai Sikek, dan Silungkang yang sudah dikenal sampai ke mancanegara. Dalam lingkup Minangkabau, daerah yang dianggap mula-mula sebagai sentra tenun adalah nagari Koto Gadang di Kabupaten Agam. Dari daerah inilah, produksi kain tenun atau sulaman berkembang ke seantero Minangkabau. Kain sulaman yang dibuat oleh masyarakat (pengrajin) Kotogadang lazim disebut dengan sulaman Koto Gadang, sedangkan hasil kerajinan rendanya lazim disebut dengan *rendo bangku* (renda bangku). Sentra kerajinan kain tradisional selain Koto Gadang di Kabupaten Agam adalah Balai Gurah (selendang suji), Panampuang (selendang terawang), Padang Tarok dan Bukittinggi. Kerajinan renda bangku sudah dikenal luas

³ Kain Tradisional Minangkabau, dalam Travel Club Mei 2008, hlm. 34.

sampai mancanegara dan mencerminkan perpaduan budaya antara budaya Minangkabau, Cina dan Eropa. Renda baku merupakan pelengkap sulaman/selendang Koto Gadang, tanpa adanya renda sebagai hiasannya maka sebuah sulaman atau selendang dirasakan kurang lengkap dan indah. Pengetahuan tentang bahan, cara membuat, motif, persebaran dan fungsinya bagi masyarakat, akan dapat diketahui keberadaan renda bangku pada masyarakatnya. Sekaligus ketinggian budaya masyarakat setempat yang patut tetap dijaga dan dilestarikan.

B. Nagari Koto Gadang: Alam dan Masyarakat

Koto Gadang adalah salah satu nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dan terletak di barat daya kota Bukittinggi, yang dipisahkan oleh Ngarai Sianok. Nagari Koto Gadang, dapat ditempuh dengan sekitar 2 jam perjalanan lewat darat (90 km) dari Kota Padang dengan angkutan terbilang lancar. Secara administratif, Nagari Koto Gadang merupakan bagian dari Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Nagari Koto Gadang terdiri dari 3 buah jorong⁴ yakni Jorong Koto Gadang, Jorong Gantiang dan Jorong Sutijo (Subarang Tigo Jorong). Diantara ketiga Jorong itu, jorong Sutijo merupakan Jorong terluas yakni 325 Ha, disusul jorong Koto Gadang seluas 292 Ha dan Jorong Gantiang 23 Ha.

Nagari Koto Gadang dicirikan dengan suasana pedesaan yang asri, alam yang indah dan kehidupan masyarakat yang masih kuat dengan kebiasaan tradisional. Ketika memasuki Koto Gadang dari arah Padang Luar akan terlihat hamparan sawah kiri kanan serta Gunung Singgalang yang biasanya cerah dan indah pada pagi hari. Rumah penduduk yang umumnya kebanyakan semi pemanen

⁴ Jorong adalah wilayah bagian dari sebuah nagari di Minangkabau, yang dipimpin oleh seorang wali jorong yang berperan sebagai pembantu dari walinagari (pemimpin nagari). Pada masa pemerintahan desa dahulunya, jorong inilah yang menjadi unit pemerintahan terendah dengan nama desa..

menghadap ke jalan dengan beberapa rumah gadang diantaranya, menggambarkan pemukiman yang telah tertata rapi. Beberapa rumah terlihat sepi karena ditinggalkan penghuninya yang merantau ke daerah lain.

Penduduk Nagari Koto Gadang, sebagaimana sebagian besar penduduk Sumatera Barat, adalah etnis Minangkabau yang telah mendiami daerah tersebut secara turun temurun. Mata pencaharian penduduk yang utama adalah sebagai petani dengan mengolah lahan pertanian yang ada di Koto Gadang berupa sawah dan ladang (kebun). Disamping bekerja sebagai petani dan pengrajin yang merupakan mata pencaharian tradisional, jenis pekerjaan lain penduduk Koto Gadang adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), pegawai swasta, pedagang, pensiunan dan lain-lain. Pekerjaan bertani umumnya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan kaum perempuan kebanyakan bertenun atau menyulam. Namun demikian, pada kenyataannya masyarakat setempat tidak terfokus pada satu usaha saja melainkan mempunyai memiliki usaha sampingan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para petani yang mengolah sawah ladang, umumnya juga memiliki pekerjaan sebagai pengrajin di rumahnya, dengan jenis kerajinan yang digeluti yakni;

B. Aneka Kerajinan Kota Gadang

1. Kerajinan Perak

Kerajinan perak adalah kerajinan yang menggunakan bahan perak dengan jenis barang yang dihasilkan berupa souvenir perak dan miniatur rumah adat Minangkabau, jam gadang, mesjid, lumbung, pedati, aksesoris wanita dan pria berupa cincin, gelang, kalung, liontin, bros, jepitan dasi, dan lain-lain. Pengrajin perak tidak hanya membuat perhiasan tradisional saja, tapi mereka juga menciptakan disain-disain baru, seperti semat hias, kalung, gelang, dan miniatur rumah-rumah adat.

2. Kerajinan Sulaman/Selendang

Kerajinan sulaman yang dibuat oleh sebagian besar ibu-ibu dan remaja putri Koto Gadang adalah selendang. Selendang menjadi hasil utama sari kerajinan sulaman yang

terdiri dari selendang *suji caie* (cair), *kapalo samek* (kepala peniti), terawang yang terdiri dari terawang kumbang, terawang *kasiak*, terawang filet/papan, dan lain-lain, serta selendang kalengkang. Selendang *suji caie* dan *kapalo samek* dicirikan dengan adanya hiasan renda pada kedua ujung dan sisi kirinya, selendang terawang dihiasi dengan jambul-jambul (*jambue*), sedangkan kalengkang tidak dihiasi dengan renda dan jambul. Salah satu dari selendang produksi Koto Gadang yakni selendang *kapalo samek* telah dipatenkan tahun 1990 sebagai milik masyarakat Koto Gadang, sedangkan selendang *suji* masih diupayakan untuk dipatenkan.

3. Kerajinan Renda

Renda adalah hiasan yang dipasang pada kedua ujung dan sisi kiri kanan selendang dengan bahan utamanya dari benang emas. Kerajinan renda ini lazim juga disebut dengan *rendo* (renda) bangku Koto Gadang. Renda bangku adalah istilah atau sebutan umum terhadap renda yang dihasilkan pengrajin Koto Gadang karena bangku merupakan alat yang digunakan untuk membuat renda. Kerajinan yang tak kalah uniknya ini dibuat untuk hiasan selendang, taplak meja makan, loper, krah baju, renda untuk keliling selendang sulaman Koto Gadang, dan lain-lain.⁵ Renda bangku sebagai kerajinan khas Koto Gadang, apabila dilihat dari motif-motif yang digunakan memperlihatkan keterpaduan tradisional dan modern, sehingga bernilai tinggi.

Usaha atau kerajinan tangan tersebut diatas, pada dasarnya dikelola bersama satu keluarga tetapi pengerjaannya bisa saja terpisah yakni kerajinan perak oleh kaum laki-laki, sedangkan kerajinan sulam dan renda oleh perempuan. Pada masa sekarang, kedua jenis kerajinan itu dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, karena sudah banyak kaum laki-laki yang bisa menyulam dan sebaliknya juga sudah banyak perempuan yang bisa membuat aneka perhiasan dari perak.

Walaupun sektor pertanian menjadi pekerjaan pokok oleh masyarakat, sebagaimana telah diungkapkan diatas,

⁵ <http://www.kotogadang-pusako.com/?pilih=hal&id=33>

usaha kerajinan tangan tidak dikesampingkan. Apabila pagi hari mereka ke sawah, maka sore dan malamnya mengerjakan sulaman atau perak. Demikian juga, bagi penduduk yang bekerja di bidang jasa, memanfaatkan waktu luangnya untuk membuat sulaman, renda, perak dan lain-lain. Dengan kata lain, usaha kerajinan menjadi usaha sampingan disamping bertani dan hasil yang didapatkan dari pekerjaan sampingan itu cukup lumayan. Hampir setiap keluarga boleh dikatakan punya usaha membuat kerajinan tangan (sulaman, renda atau perak).

Penduduk Nagari Koto Gadang, sebagaimana masyarakat Minangkabau umumnya, menganut sistem matrilineal (nasab ibu) dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan hal itu, keturunan diatur berdasarkan garis keibuan (perempuan) dimana seseorang akan masuk pada lingkungan kerabat (*suku*) ibunya, bukan kerabat ayahnya. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan maka mengindikasikan keluarga itu terancam punah atau terputus garis keturunannya. Ikatan geneologis berdasarkan garis keibuan itu dengan sendirinya berpengaruh pada bentuk pengelompokan kekerabatan yang berputar pada lingkaran seorang ibu (perempuan). Pengelompokan itu mulai dari unit *samande*, *sajurai*, *saparuik*, dan *sasuku*⁶.

Di Koto Gadang, pada awalnya terdiri dari 4 suku dengan 24 orang penghulu, dan dalam perkembangan kemudian suku-suku itu berkembang sesuai dengan perkembangan penduduknya hingga 48 suku dengan gelar masing-masing penghulunya. Suku awal yang 4 suku itu adalah suku Sikumbang, Koto, Guci/Piliang dan Caniago. Suku Sikumbang mekar menjadi dua yakni suku Sikumbang Mudik (Sungai Tanur) dan suku Sikumbang Hilir (Sarik), suku Koto terbagi dua pula yaitu Koto nan Ampek Buah Paruik dan Koto nan Tigo Buah Paruik,

⁶ *Samande* artinya satu ibu, *saparuik* artinya satu nenek/ninik (kumpulan dari beberapa orang *samande/ibu*), *sajurai* artinya satu buyut (kumpulan dari beberapa *ninik*) dan *sasuku* artinya kumpulan dari beberapa *jurai*.

sedangkan suku Guci/Piliang dan Caniago tidak mengalami pemekaran. Suku Guci/Piliang merupakan penggabungan dari suku Guci dan suku Piliang dahulunya. Disamping itu, nagari Koto Gadang dikenal juga terbagi atas tiga jurai yakni jurai Mudiak, jurai Tengah, dan jurai Hilir. Itulah sebabnya dikatakan *Koto Gadang nan tigo jurai nan ampek suku*⁷.

Sistem pemerintahan tradisional di nagari Koto Gadang, pada hakikatnya sama dengan masyarakat Minangkabau umumnya, yang menentukan nagari sebagai unit pemerintahan terendah dan dipimpin oleh walinagari. Bagian dari nagari adalah jorong yang dipimpin oleh wali jorong dan statusnya adalah pembantu wali nagari di jorongnya.⁸ Pada tingkat keluarga atau kaum, dipimpin oleh penghulu bergelar datuk yang pewarisannya adalah dari *mamak* ke *kamanakan*⁹. Sedangkan pemimpin nagari dan jorong dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Dari dahulu masyarakat (baca; orang) Koto Gadang, sebagaimana orang Minangkabau, dikenal sebagai perantau. Perantauan itu dilakukan oleh kaum laki-laknya dengan meninggalkan anak dan isteri di kampung untuk waktu beberapa lama. Para perantau Koto Gadang itu banyak yang menjadi tokoh nasional seperti Haji Agus Salim, Rohanah Kudus, Emil Salim dan lain-lain. Dalam konteks nasional dan Sumatera Barat, Nagari Koto Gadang dikenal juga dengan kerajinan tradisionalnya yakni perak, sulaman dan renda bangku yang masih eksis hingga sekarang. Sulaman dan renda hasil kerajinan masyarakat Kotogadang menjadi bagian

⁷ <http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/16/sejarah-nagari-koto-gadang/>

⁸ Pada masa sistem pemerintahan desa diterapkan di seluruh Indonesia. Di Minangkabau, wilayah jorong inilah yang dijadikan sebagai desa (unit pemerintahan terendah), sedangkan nagari tetap menjadi kesatuan masyarakat adat. Setelah otonomi daerah, masyarakat Minangkabau mengikrarkan kembali ke nagari dimana nagari kembali sebagai unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan. Masa pemerintahan desa telah menimbulkan erosi nilai-nilai sosial Minangkabau.

⁹ *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu, sedangkan *kamanakan* adalah anak dari saudara perempuan.

dari jenis kain tradisional Minangkabau, disamping songket Silungkang, Pandai Sikek dan lainnya.

D. Kerajinan Renda Bangku

Renda bangku, sebagaimana telah diungkapkan, merupakan salah satu kerajinan khas Koto Gadang yang telah dikenal sampai mancanegara. Renda bangku adalah kerajinan membuat renda dengan menggunakan bangku sebagai salah satu alatnya. Hasil kerajinan renda ini oleh masyarakat luas disebut dengan *rendo bangku* (renda bangku). Namun, ada pula yang menyebutnya dengan *renda makau* (renda makau) karena dibuat dari benang makau¹⁰. Benang makau adalah benang yang biasa digunakan untuk membuat renda di Koto Gadang dan terdiri dari dua warna yakni warna emas dan warna perak. Disamping itu, ada pula sebutan renda putih yang merupakan renda untuk hiasan perlengkapan rumah tangga dan aksesoris dari benang putih (bordir). Kadangkala renda sebagai hiasan pinggiran selendang lazim juga disebut dengan renda pinggir.

Sejatinya kerajinan renda bangku menghasilkan aneka hiasan dari benang yang dibentuk sedemikian rupa, dengan motif yang menambah keindahan dari hiasan itu. Hiasan renda bangku Koto Gadang pada awalnya lebih dikenal sebagai hiasan untuk selendang, padahal juga dibuat sebagai hiasan untuk perlengkapan rumah tangga dan aksesoris. Pembuatan renda untuk hiasan perlengkapan rumah tangga seperti, taplak meja, sandaran kursi, alas baki, sandaran kursi, dan lain-lain, sedangkan untuk aksesoris seperti dompet, tempat *handphone* (HP), kerah baju, dan sebagainya.

Untuk sebuah selendang, bagian yang dihiasi atau dilengkapi dengan renda adalah kedua ujungnya dan kedua sisinya. Hiasan renda pada kedua ujung selendang itu lazim disebut dengan *rendo ujuang* (renda ujung), sedangkan pada

¹⁰ Benang makau adalah jenis benang lama, yang apabila dilihat dari namanya diduga berasal dari Makao, sebuah daerah jajahan Portugis di daratan Cina.

kedua sisinya dengan renda yang disebut dengan *rendo tapi* (renda tepi). Berdasarkan perbedaan itu, renda bangku Koto Gadang terdiri dari 2 (dua) jenis yakni *rendo ujuang* (renda ujung) dan *rendo tapi* (renda tepi). Pembagian renda bangku atas renda ujung dan tepi merupakan pembagian berdasarkan letak renda itu pada selendang. Renda tepi dan ujung merupakan bagian terpenting dari sebuah selendang karena berfungsi sebagai aksesoris atau hiasan sehingga selendang menjadi lengkap dan terlihat indah atau menarik. Artinya, agar sebuah selendang enak dipandang mesti diberi hiasan renda ataupun jambul pada pinggirnya. Jambul, adalah, jenis hiasan selain renda yang dipasangkan dengan selendang di Koto Gadang.

Dilihat dari lebar atau besar rendanya, maka renda ujung lebih lebar (besar) daripada renda tepi, namun dari segi panjang maka renda tepi lebih panjang dari daripada renda ujung. Hal itu disebabkan karena renda ujung terletak pada bagian ujung selendang yang merupakan bagian lebar dari selendang yang biasanya berukuran segi empat (persegi panjang), sedangkan renda tepi pada sisi atau bagian panjang dari sebuah selendang. Ukuran renda ujung adalah panjang 60 cm, sesuai lebar selendang dengan lebar 10 – 15 cm, sedangkan renda tepi panjangnya adalah sepanjang selendang dengan lebar rata-rata 1 cm. Panjang sebuah selendang berkisar antara 160 cm sampai 180 cm, dengan lebar 60 cm. Perbedaan ukuran antara renda ujung dengan renda tepi menyebabkan dalam proses pembuatannya, renda ujung lebih lama dan rumit pengerjaannya dari pada renda tepi. Renda tepi pada selendang Koto Gadang lazim pula disebut dengan jahit *kuku balam* (*peston*) (Ematip; 2005).

Selendang Koto Gadang yang memiliki renda sebagai hiasan pada bagian pinggirnya (ujung dan tepi) adalah selendang suji *caie* (*cair*), *kapalo samek* (kepala peniti). Selendang jenis itu biasanya diperuntukkan bagi wanita muda (baru menikah). Jika selendang tersebut untuk orang yang sudah berumur (setengah baya) ukuran rendanya lebih kecil, sedangkan untuk wanita yang baru menikah ukuran rendanya

agak besar kira-kira 10-15 cm. Dapat dikatakan, keutuhan atau kelengkapan selendang itu adalah dengan adanya renda atau hiasan pada pinggirnya. Kedua jenis selendang itu (*suji caie* dan *kapalo samek*) tanpa adanya hiasan renda, menjadi belum lengkap untuk disebut sebagai selendang, kecuali selendang terawang dan kalengkang yang memang tidak menggunakan renda untuk hiasan ujung dan sisinya. Hiasan pada selendang tarewang berupa jambul, sedangkan selendang kalengkang hiasannya berupa jahitan langsung pada ujung selendang berbentuk renda. Besar kecil ukuran renda tergantung pada orang yang akan memakai dan bisa dipesan pada pembuatnya.

Keberadaan kerajinan renda bangku dalam kehidupan masyarakat Koto Gadang boleh dikatakan telah cukup lama, kira-kira beberapa abad silam. Sedangkan keahlian membuat renda (tanpa menggunakan bangku) telah ada semenjak orang Koto Gadang mengenal cara menyulam. Dari informasi yang diperoleh, kerajinan renda (menggunakan) bangku dikenal pada masa penjajahan Belanda¹¹ sekitar awal abad ke 19 dan disebutkan berasal dari Belgia, sebuah negara di Eropa yang bertetangga dengan Belanda. Dalam hal ini, menurut seorang informan, teknis pembuatannya yang berasal dari Belgia, sedangkan motifnya adalah murni buatan orang Koto Gadang sendiri. Diduga pengaruh itu muncul ketika ada orang Belgia yang ahli membuat renda datang bersama Belanda dan kemudian mengenalkan kerajinan renda bangku pada masyarakat Koto Gadang. Pengaruh Belgia itu berupa teknis pembuatan dan penggunaan bangku sebagai alat untuk membuatnya, dengan hasilnya lebih halus dan indah. Seorang pakar kain tradisional Indonesia yakni Ratna Panggabean¹², disitulah keunikan dan kelebihan renda khas Koto Gadang dibanding renda daerah lain. Renda bangku

¹¹ Belanda datang ke Koto Gadang (Sumatera Barat) setelah dapat mengalahkan kaum adat pada Perang paderi yang berlangsung awal abad ke 19 .

¹² Disampaikan pada waktu Bimbingan Teknis Inventarisasi Kain Tradisional di Jakarta bulan Maret 2010.

Koto Gadang mengandung motif beragam dari perpaduan antara berbagai budaya Eropa (Belgia), Cina dan Minangkabau. Sehingga, dengan mengkaji renda bangku akan tergambar kekayaan budaya Koto Gadang sebagai buah persentuhan budaya Minangkabau, Cina dan Eropa.

Keahlian menenun dan merenda pada masyarakat Koto Gadang, sejak dahulu hanya diperuntukkan bagi pada anak atau keluarga sendiri, tidak untuk orang lain. Setiap anak, baik perempuan maupun laki-laki sejak kecil sudah diajar atau dikenalkan dengan keahlian menenun/merenda. Sehingga, seorang anak yang sudah duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) biasanya sudah bisa membuat renda (bangku), dan baru kemudian menyulam selendang. Tujuan lain dari pengajaran hal itu adalah agar mereka memiliki bekal pengetahuan atau keahlian yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupannya kelak jika sudah dewasa. Jika mereka tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih baik, minimal mereka menggunakan keahlian menyulam atau merenda sebagai alternatif, atau sebagai mata pencaharian tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejak dahulu, masyarakat Koto Gadang mentabukan atau tidak mengizinkan orang luar Koto Gadang mempelajari kerajinan sulaman dan renda tersebut. Bahkan, masa dulu keahlian itu sangat dirahasiakan, sehingga orang luar itu tidak bisa mengetahui cara membuat sulaman tersebut, apalagi mempelajarinya. Biasanya dahulu, pembuatan selendang dan renda itu dilakukan di dalam kamar agar tidak terlihat oleh orang lain/luar. Jika ada orang luar Koto Gadang datang disaat dia sedang bekerja, langsung disimpan. Dapat dikatakan, hal itu didasari oleh pemikiran bahwa pekerjaan itu merupakan kerajinan khas Koto Gadang, dan jika diketahui oleh orang lain akan berakibat kepada hilangnya kekhasan itu. Dalam lingkup lebih luas, secara ekonomis akan menyebabkan adanya persaingan dan luntur kebanggaan pada produksi sulaman Koto Gadang oleh masyarakat luar.

Kerajinan renda dan sulaman telah menjadi kebanggaan masyarakat Koto Gadang sejak dahulu hingga sekarang. Kerajinan itu telah menjadi “trade mark” Nagari Koto Gadang dan menjadi identitas yang membedakannya dengan daerah lain di Minangkabau. Ditambah pula, dengan kerajinan renda bangku yang dipercaya kehalusan dan mutunya oleh masyarakat luas, tidak saja di Indonesia tetapi sampai ke mancanegara. Beberapa daerah lain di Kabupaten Agam juga membuat renda seperti yang dibuat oleh perempuan Koto gadang seperti Padang Tarok, Panampuang, Biaro, Padang Laweh dan lain-lain. Pekerjaan itu juga dilakukan oleh kaum perempuan dengan teknik pembuatan yang hampir sama dengan Koto gadang. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti bagaimana proses adanya kerajinan renda di daerah tersebut. Namun demikian, di Nagari Padang Tarok ditemui adanya pengrajin yang bisa membuat renda dengan jalan belajar sendiri (otodidak)¹³. Dalam hal ini, renda buatan pengrajin Koto Gadang dibuka sendiri dan kemudian direnda kembali dengan seksama. Cara demikianlah yang dilakukan berulang-ulang dan pada akhirnya dia bisa membuat renda, seperti halnya renda Koto Gadang.



Salah satu bentuk Selendang *Suji Caie*,
dengan hiasan renda di pinggirnya

¹³ Pengrajin ini pernah belajar ke Koto Gadang, tetapi tidak mendapat tanggapan. Oleh mertuanya diberikan renda untuk dipelajari sendiri, dan kemudian dia mengajarkan perempuan-perempuan di sekitar tempat tinggalnya bagaimana membuat renda. Hasil kerjaan pengrajin tersebut banyak diminati oleh masyarakat sekitarnya, termasuk wisatawan.

1. Produksi

a. Bahan

Renda, pada hakikatnya merupakan jenis kerajinan yang terbentuk dari jalinan benang yang dibentuk sedemikian rupa dan menjadi hiasan selendang, perlengkapan rumah tangga dan lainnya. Jalinan itu melalui proses yang memerlukan keterampilan, kesabaran, ketelitian dan ketenangan, serta didukung dengan peralatan yang lengkap sehingga menghasilkan renda yang baik. Pembuatan sebuah renda, apakah itu untuk hiasan selendang ataupun hiasan perlengkapan rumah tangga mengandalkan benang sebagai bahannya. Oleh karenanya, dapat dikatakan, bahwa benang merupakan bahan dasar dan utama dari pembuatan renda, dan agar renda yang dihasilkan itu berkualitas maka benang yang dipakai juga yang berkualitas pula. Benang yang digunakan harus yang tahan lama karena renda merupakan hiasan yang keberadaannya bisa bertahun-tahun atau bahkan melewati beberapa generasi manusia.

Benang yang biasa digunakan dalam pembuatan renda adalah benang sulam (rajut), benang makau dan benang bordir (mesin). Benang bordir lebih halus daripada benang sulam dan makau. Namun, benang yang lazim dipakai untuk membuat renda adalah benang makau yang terdiri dari 2 warna yakni warna emas dan perak. Benang makau berwarna emas dan perak biasanya untuk hiasan selendang pada ujung dan pinggirnya, sedangkan untuk hiasan kelengkapan rumah tangga seperti taplak meja, sandaran kursi dan lain-lain menggunakan benang putih (dari benang bordir). Renda yang menggunakan benang makau berwarna emas dan perak lazim juga disebut dengan *rendo makau* (renda makau), sedangkan yang menggunakan benang putih disebut *rendo putih* (renda putih). Penamaan tersebut berdasarkan jenis dan warna benang yang dipakai, sedangkan sebutan renda bangku merupakan sebutan secara umum produksi renda Koto Gadang.

Benang makau sebagai bahan utama pembuatan renda, apabila ditelusuri dari namanya diduga berasal dari

Cina. Sebagaimana diketahui, di daratan Cina ada nama sebuah daerah yang dahulunya merupakan jajahan Portugis yakni Macao. Kemiripan nama benang (makau) dengan nama daerah (Macao) itu mengindikasikan bahwa benang makau berhubungan erat dengan daerah Macao tersebut. Artinya, benang makau yang digunakan untuk membuat renda sesungguhnya berasal dari daerah Macao tersebut, yang kemudian oleh masyarakat Koto Gadang dan Minangkabau umumnya disebut dengan benang makau. Hal itu didukung pula dari asal benang makau yang dibeli oleh pengrajin renda berasal dari Singapura. Singapura merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah etnis Cina, dan asal-usul penduduknya berasal dari Cina. Hal lain yang memperkuat dugaan ini adalah faktor historis bahwa perkembangan kain tradisional di Indonesia, khususnya Minangkabau tidak luput dari adanya pengaruh Cina pada masa dahulu.

Para pengrajin Koto Gadang membeli benang makau tersebut di Pertokoan Pasar Atas Bukittinggi yang juga menjadi tempat penjualan aneka sulaman yang dibuat oleh pengrajin sulaman di Bukittinggi dan sekitarnya, serta di Pasar Padang Luar. Kain sulaman yang dijual di Pasar Atas Bukittinggi, tidak saja dari Koto Gadang melainkan juga dari daerah lain seperti Padang Tarok, Panampuang, Ampek Angkek, Pandai Sikek dan lain-lain. Benang makau sebagai bahan pembuatan renda itu umumnya tersedia pada banyak toko dan mencukupi untuk keperluan pengrajin membuat renda dan lainnya.

Benang makau dikenal kuat dan sangat cocok untuk pembuatan renda, telah digunakan oleh pengrajin Koto Gadang sejak dahulu hingga sekarang. Benang makau tersebut tersedia dalam bentuk kemasan (pak) yang isinya setiap pak adalah 5 buah. Harga benang makau berwarna kuning berkisar antara Rp.120.000,- sampai dengan Rp. 130.000,-, sedangkan benang makau putih sekitar Rp. 160.000,-. Benang untuk pembuatan renda dibeli sendiri oleh

pengrajin dengan mendatangi pasar Bukittinggi, Pasar Padang Luar ataupun membeli pada Yayasan Kerajinan Amai Setia.¹³

Banyaknya benang yang dibutuhkan untuk pembuatan renda tergantung pada jenis renda yang dibuat. Biasanya renda ujung memerlukan lebih banyak benang daripada renda tepi, karena bagian ujung selendang diikuti dengan motif yang pembuatannya memerlukan benang yang banyak. Lain halnya dengan renda tepi yang tidak memerlukan motif khusus. Untuk membuat renda diperlukan benang sekitar 20 kelos (besar), 14 kelos (sedang) dan 10 kelos (kecil). Ukuran besar, sedang dan kecil itu sesuai dengan jenis renda yang dibuat. Pada dasarnya pilihan benang itu tergantung pada permintaan pemesan (konsumen) dan disesuaikan dengan warna selendang. Kedua jenis (warna) benang itu cocok dengan bermacam-macam warna selendang Koto Gadang yang umumnya berwarna norak (meriah). Benang renda untuk selendang wanita yang baru menikah adalah warna kuning emas dan warna perak untuk wanita yang sudah lama menikah. Sedangkan untuk hiasan perlengkapan rumah tangga, sebagaimana telah diungkapkan, dari benang biasa berwarna putih.

2. Peralatan

Renda sebagai jenis kerajinan tradisional masyarakat Koto Gadang memiliki beberapa peralatan dalam pembuatannya. Peralatan utama yang digunakan adalah bangku yang terdiri dari kaki bangku dan bantalan kayu, dan kedua alat itu secara umum disebut dengan bangku. Penggunaan bangku itulah yang menjadi dasar renda produksi Koto Gadang disebut dengan renda bangku. Peralatan lainnya adalah penggulung renda, kelos (penggulung benang), pola motif, jarum pentul, pengait dan gunting. Semua jenis peralatan mesti disediakan selengkapnyanya sebelum pekerjaan membuat renda dimulai agar memudahkan pengrajin bekerja. Jelasnya, peralatan yang digunakan dalam pembuatan renda oleh pengrajin Koto

¹³ Yayasan Amai Setia adalah yayasan yang mengelola dan mengembangkan sulaman Koto Gadang yang didirikan oleh Rohana Kusus tahun 1911 di Koto Gadang

Gadang, adalah 1). Kaki Bangku, 2). Bantalan Kayu. 3). Kain Penutup, 4). Penggulung Renda (kumparan), 5). Kelos, 6). Pola (rancangan motif), 7). Jarum Pentul, 8). Pengait, dan 9). Gunting.

- Kaki Bangku

Kaki bangku merupakan peralatan penting dalam pembuatan renda dan terbuat dari bahan kayu. Kaki bangku ini lazim juga disebut *leha* oleh masyarakat Minangkabau dan biasanya digunakan tempat meletakkan Al-Qur'an pada waktu mengaji. Dalam proses membuat renda, kaki bangku ini digunakan atau berfungsi sebagai penyangga bantalan kayu. Bantalan kayu adalah merupakan peralatan lain pembuatan renda. Dengan kata lain, kaki bangku merupakan alat untuk meninggikan bantalan kayu dari lantai supaya pengrajin dalam bekerja membuat renda tidak mesti membungkuk, namun bisa dengan punggung tegak. Andaikata tidak diletakkan diatas kaki bangku atau *leha* menggunakan bangku biasa maka posisi pengrajin terlalu menunduk, mudah capek (lelah) apalagi punggung terasa sakit karena lama menunduk.

Bangku itu biasanya dibuat sendiri oleh pengrajin karena membuatnya tidak terlalu sulit, ataupun dipesan pada tukang kayu. Papan yang diperlukan kira-kira berukuran 30 cm x 40 cm diletakkan sebagai dasar atau alas (kaki bangku). Kaki bangku itu terdiri dari sebilah papan berukuran kira 30 cm x 15 cm, yang diletakkan pada dua buah bilah papan yang berukuran sekitar 5 cm sampai 10 cm. Papan berukuran kira 30 cm x 15 cm tersebut dipakukan dua buah papan berukuran sekitar 5 cm sampai 10 cm yang dipasang tegak diatas lantai. Kadangkala, kaki bangku (*leha*) yang lazim disebut bangku juga bisa digunakan sebagai tempat duduk pada waktu memasak dan lainnya.

- Bantalan Kayu

Bantalan kayu adalah peralatan membuat renda yang dibentuk sedemikian rupa dan berbentuk bantal, dari bahan papan, triplek, paku, bubuk gergaji serta kain sebagai penutupnya. Bantalan inilah bersama kaki bangku yang

disebut dengan bangku yang sekaligus berfungsi sebagai bantalan ketika membuat renda. Bantalan kayu merupakan peralatan utama dalam membuat renda karena pada bantalan inilah dikerjakan perajutan benang menjadi sebuah hiasan renda. Berdasarkan bentuk dan penggunaannya, bangku itu terdiri dari 2 (dua) macam bentuknya yakni 1) Bangku berbentuk bulat, dan 2) Bangku berbentuk petak (persegi panjang). Bangku yang bentuknya bulat biasanya disebut dengan bangku *bulek* (bulat), sedangkan bangku berbentuk persegi lazim disebut dengan bangku *petak* atau panjang. Fungsi kedua alat tersebut secara umum sama yakni untuk membuat renda. Bangku berbentuk petak hanya bisa digunakan untuk keperluan membuat renda tepi, sedangkan bangku bulat untuk membuat renda ujung dan hiasan perlengkapan rumah tangga seperti taplak meja, alas gelas, alas baki dan lain-lain.

Pembuatan bantalan kayu atau bangku ini dengan menggunakan bahan kayu (papan), triplek, paku, rotan, bubuk gergaji serta kain sebagai penutupnya. Cara membuat bantalan kayu ini adalah dengan memotong papan yang dibentuk bulat dengan diameter ± 50 cm, kemudian diberi kain penutup dengan penahan isi lingkaran berupa rotan yang kemudian dipaku agar kuat. Sedangkan triplek yang diperlukan berukuran kira-kira 30 cm x 60 cm sebagai tempat membuat atau merajut renda. Setelah kerangka terpasang baru dipasang triplek sebagai penutup pada kerangka tersebut sehingga bentuk jadinya berbentuk melengkung. Sisi kiri dan kanan tertutup rapat oleh triplek yang dibentuk melengkung, tetapi sisi atas dan bawah terbuka.

Pembuatan bangku petak berbeda dengan bangku bulat. Pada bangku petak diperlukan papan, triplek, kayu balok penyangga dan paku, sedangkan bangku yang berbentuk bulat dapat dibuat sendiri dan bahan yang diperlukan adalah papan biasa, kain penutup bangku, rotan, serbuk gergaji dan paku. Kayu balok penyangga diperlukan sebanyak 4 batang, dimana dua batang kayu balok penyangga diperlukan ± 15 cm dipasang pada papan dasar dan dipasang pada bagian tengah

jarak keduanya ± 10 cm. Kemudian dua batang kayu balok penyangga lagi dipasang pada bagian tepi papan dasar sejajar dengan balok penyangga di tengah. Kegunaan balok penyangga ini untuk menahan triplek yang terpasang di atasnya sehingga ketika membuat renda, triplek tersebut tidak lentur bila tertekan oleh tangan pengrajin. Pada bangku petak, bagian atasnya dipasang dengan alat penggulung renda yang sudah jadi agar tidak berserakkan di lantai dan gampang digulung. Oleh karena adanya alat penggulung itu maka triplek pada bagian tengah tersebut dipotong sedikit membentuk segi empat.

Bantalan kayu ini juga dilengkapi dengan serbuk gergaji agar bantalan tidak keras ketika dijadikan landasan untuk mengikatkan pola dan tidak goyang ketika di renda. Serbuk gergaji itu diisikan pada kain penutup bantalan dan sampai penuh sehingga menyerupai bantal. Oleh masyarakat setempat, gergaji besi lazim juga disebut dengan *busa* karena fungsinya seperti busa yang bisa ditanam dengan jarum pentul.

Alat pembuat renda berupa bangku yang terbuat dari papan dan peralatan lainnya perlu dipelihara dengan baik agar tahan lama. Peralatan tersebut bila tidak dipakai harus disimpan pada tempat yang tidak kena hujan atau lembab, supaya tidak cepat rusak. Pada hakikatnya, satu unit peralatan tersebut pembuatan renda itu bisa tahan bertahun-tahun, sebagaimana halnya *pemidangan* yang merupakan alat untuk menyulam selendang yang bahannya juga dari kayu tapi ukurannya lebih besar.

- Kain Penutup

Kain penutup bantalan kayu berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pengrajin dalam membuat renda, dan terbuat dari bahan kain biasa yang biasanya dari kain-kain yang tidak terpakai lagi. Kain itu diletakkan di atas pola yang sudah terpasang pada bantalan kayu dan pada bagian tengah kain itu dilubangi, bisa berbentuk persegi ataupun bulat. dan lobang kain itu diletakkan persis di atas renda yang akan atau sedang dikerjakan. Fungsi dari lobang itu adalah untuk

memudahkan pengrajin membuat renda. Dengan adanya kain itu maka jalinan renda tidak menyangkut dengan yang lainnya seperti jarum pentul, dan renda yang dihasilkan tidak cepat kotor atau kena debu bila sedang tidak dikerjakan.

- Penggulung Renda (Kumparan)

Penggulung renda (kumparan) adalah alat untuk menggulung renda tepi yang sudah selesai dibuat pada bangku petak, agar tergulung rapi atau tidak berserakan. Penggulung renda yang biasa disebut dengan kumparan kayu terbuat dari bahan kayu yang dibentangkan longgar antara dua lingkaran dan berdiameter 10 cm dengan panjang sekitar 20 cm. Kayu itu dibentuk longgar agar bisa berputar untuk menggulung renda yang telah selesai dibuat. Kumparan ini letaknya pada bagian samping atas bantalan kayu bangku petak dan dipakukan agar tidak mudah lepas atau terpisah. Setiap renda yang sudah selesai dibentuk langsung menggulung pada kumparan tersebut, dan ketika renda itu sudah selesai seluruhnya barulah ditarik atau diangkat dari kumparan benang tersebut.

- Kelos

Kelos adalah peralatan yang digunakan untuk tempat menggulung benang sebelum renda mulai dan panjangnya antara 10-15 cm dengan diameter antara 1-2 cm. Kelos ini dibentuk sedemikian rupa sehingga ada tempat penggulangan benang dan pegangan tangan. Kelos itu pada dasarnya bisa dibuat sendiri oleh pengrajin dan bisa juga dibeli atau diupahkan membuatnya pada orang lain. Kelos yang sudah jadi atau siap pakai bisa dibeli seharga Rp. 2000,- perbuah. Setiap kelos akan menjadi tempat penggulangan satu benang, dan jika benangnya banyak maka akan banyak pula kelosnya. Satu kelos bisa menggulung benang mencapai 10 meter. Untuk membuat sebuah renda tepi diperlukan kelos sebanyak 4-14 buah sesuai dengan bentuk motif yang akan dibuat, sedangkan untuk renda ujung lebih banyak lagi. Semakin besar motif yang dipakai, maka banyak pula kelos yang diperlukan.

- Pola

Pola adalah rancangan motif renda yang dibuat dengan menggunakan bahan dari kertas dan biasanya dibuat langsung oleh pengrajin. Motif yang ditentukan akan dibuat, oleh pengrajin dilukis pada kertas karton (manila), kalender bekas atau kertas minyak dengan menggunakan pensil atau pulpen (pena). Karton manila ataupun kalender bekas sangat efektif untuk pola karena dapat digunakan berulang-ulang, sedangkan apabila menggunakan kertas minyak hanya mampu untuk sekali pakai saja sehingga tidak efektif. Pola atau rancangan itu bisa disiapkan per motif dan bisa langsung sepanjang ujung selenda untuk renda ujung. Biasanya para pengrajin lebih suka membuatnya pada kertas manila karena bisa dipakai berulang kali dan juga bisa disimpan dalam waktu lama. Namun demikian, renda tepi biasanya tidak perlu pola atau rancangan motifnya sebagaimana renda ujung. Hanya saja, renda tepi mesti digulung pada kumparan kayu setelah dibentuk, agar tetap tersusun rapi.

- Jarum Pentul

Jarum pentul adalah alat yang digunakan untuk menahan ujung-ujung motif yang sudah dijalin pada bantalan kayu. Ketika sebuah motif sudah terjalin, agar jangan longgar atau lepas maka ditanamkan pentul untuk menjepit ujung motif pada bagian atas bantalan kayu. Fungsi dari jarum pentul ini pada dasarnya adalah sebagai penguat atau pengikat renda yang telah dibuat agar tetap tersusun rapi ketika direnda itu diangkat dari bantalan dan alat penggulung. Jarum pentul yang digunakan untuk pembuatan renda adalah jarum yang tidak memiliki kepala, bukan jarum yang biasa dipakai untuk baju muslim (jilbab) yang biasa dipakai oleh wanita muslim¹⁴.

- Gunting

Gunting adalah peralatan yang digunakan untuk memotong benang dan pola motif renda yang dibuat dari kertas. Benang yang dipotong dengan gunting adalah benang

¹⁴ Jilbab adalah pakaian jenis kerudung yang lazim dipakai oleh perempuan Muslim

yang dirasakan tidak perlu dan mengganggu kerapian motif yang dibuat, sedangkan pola yang digunting adalah untuk dipisahkan dari rancangan motif. Gunting yang digunakan biasanya gunting kecil atau menengah, dan bisa juga gunting lipat.

- Pengait

Pengait adalah peralatan yang digunakan untuk mengunci motif yang telah selesai dibuat. Pengait mempunyai fungsi yang hampir sama dengan jarum pentul yakni mengunci renda yang telah dibuat agar tidak menjadi kacau atau tidak rapi. Pengait yang biasa dipakai oleh pengrajin *hak pen*.

3. Proses Pembuatan

Pembuatan renda bangku Koto Gadang sepenuhnya mengandalkan tangan, atau tanpa menggunakan peralatan mesin. Sekilas tentang pembuatan renda terkesan mudah, tetapi bila dikerjakan baru terasa sulit karena memerlukan ketekunan, kesabaran dan ketelitian. Setiap tahapan pembuatan renda biasanya langsung dilakukan oleh si pembuat renda itu sendiri. Lama pembuatan sebuah renda memerlukan waktu sekitar 4 hari, dimana 2 hari untuk salah satu ujung renda dan 2 hari pula untuk ujung yang lain. Pembuatan renda biasanya dilakukan dari pagi sampai malam dengan istirahat hanya pada waktu-waktu tertentu seperti makan, sholat ataupun istirahat, dan menjelang tidur akan disambung sambil nonton televisi dan lainnya..

Proses pembuatan renda oleh pengrajin Koto Gadang adalah melalui beberapa tahapan yakni, 1). Membuat pola, 2). Menggulung benang, 3). Memindahkan pola, 4). Pembuatan renda, dan 5). Memasang renda pada selendang.

- Membuat Pola

Membuat pola merupakan langkah awal dari pembuatan renda, baik renda tepi maupun ujung. Untuk membuat pola tersebut diperlukan waktu khusus karena pekerjaan merancang pola berbeda dengan menyulam yang

hanya tinggal mengisi ruang-ruang kosong. Pada dasarnya membuat pola itu tidak terlalu sulit, tetapi untuk memulainya yang sangat sulit, karena motif-motif yang akan dituangkan sudah tergambar dalam pikiran si pengrajin. Untuk membuat pola diperlukan daya imajinasi yang tinggi agar pola yang dibuat sesuai dengan diharapkan dan tidak kaku. Motif-motif tersebut dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya tidak jauh berbeda, kecuali kepandaian pembuat pola memodifikasi dengan hiasan lain sehingga tampak berbeda dengan motif sebelumnya. Jika lagi ada inspirasi atau *mood*, satu pola bisa disiapkan satu hari dan jika lagi tidak ada *mood* maka satu pola tidak siap dalam satu minggu. Oleh karena itu orang yang membuat pola itu adalah orang yang betul-betul memiliki jiwa seni dan mampu mengekspresikannya kedalam bentuk nyata seperti tertuang pada pola.

Jika tidak pakai pola, maka pembuatan renda akan perlu waktu yang lama. Jika panjang renda itu 50 cm (sesuai dengan lebar selendang yang akan diberi renda), maka akan ada 5 motif dasar karena setiap motif dasar biasanya panjangnya lebih kurang 10 cm. Pada motif itu biasanya dibuat pula hiasan tambahan agar tidak terkesan monoton atau bolong (kosong), tergantung pada kreatifitas dari si pengrajin itu sendiri.

Setelah rancangan pola selesai diperlukan lagi waktu untuk memeriksa (mengecek) kemungkinan-kemungkinan ada yang harus dirapikan atau diperbaiki. Jika pola tersebut betul-betul sudah siap barulah dipasang atau digabungkan dengan selendang yang akan diberi renda itu. Dari hal diatas, diketahui bahwa dalam membuat pola diperlukan adanya inspirasi, kemauan, semangat, waktu khusus dan jika bisa dalam membuat pola itu jangan terputus-putus dalam waktu lama (misalnya 1 atau 2 hari) dan sebaiknya langsung dikerjakan. Pembuatan pola atau rancangan motif renda ujung ada 2 macam yakni;

- 1) Dibuat per motif. Ketika satu motif telah siap akan disambung dengan motif lain hingga mencapai ukuran lebar selendang untuk renda ujung, dan.

- 2) Dibuat langsung sepanjang panjang renda yang berukuran selebar selendang.

Ukuran panjang renda ujung, sebagaimana telah diungkapkan, adalah selebar selendang yang akan diberi renda, sedangkan untuk renda tepi (sisi kanan dan kiri selendang) adalah sepanjang selendang. Biasanya sebuah selendang berukuran 200 cm x 60 cm, yang berarti panjang renda ujung adalah 60 cm dan panjang renda tepi 200 cm. Lebar renda ujung berkisar antara 10-15 cm, sedangkan renda tepi berkisar antara 1-2 cm, atau tergantung pada kemauan pemesannya.

Secara umum pola yang dibuat hanya bisa langsung untuk setengah selendang (60 cm), sedangkan yang setengahnya lagi dibentuk sepanjang renda yang sudah jadi tersebut dengan motif yang sama. Bila pola tersebut sudah dihubungkan atau disambungkan dengan selendang maka akan terlihat kedua ujungnya mempunyai motif sama. Kesamaan ini merupakan hal yang penting agar selendang terlihat bagus kelihatannya. Seandainya motif tidak sama antara kedua ujung selendang, ataupun antara renda tepi menyebabkan selendang terlihat kaku dan janggal.

Untuk saat ini satu buah pola yang dibuat mendapat jasa (upah) sekitar Rp. 50.000,- s.d Rp. 150.000,-, tergantung pada rapat/jarang motif yang dibuat. Berhubung kerajinan renda ini merupakan warisan turun temurun bagi masyarakat Koto Gadang, maka membuat pola pun juga diwarisi dari generasi sebelumnya seperti ibu, kakak dan lainnya.

- Menggulung Benang

Langkah selanjutnya adalah membuka dan menggulung benang makau. Membuka benang adalah kegiatan melepaskan benang makau dari bungkusnya, untuk kemudian digulung dengan kelos. Setiap benang digulung pada satu buah kelos sesuai dengan warna benang yang digunakan untuk hiasan renda. Penggulungan benang pada kelos untuk pembuatan renda banyaknya antara 4-6 benang sekali jalan.

Banyaknya kelos atau gulungan benang sangat tergantung pada besarnya hiasan renda yang dibuat, jika banyak hiasannya maka banyak pula benang yang diperlukan. Hiasan untuk ujung selendang (renda ujung) dengan sendirinya lebih banyak kelosnya daripada tepi atau sisi selendang (renda tepi).

Banyaknya kelos yang terpakai tergantung pada motif, semakin besar motifnya semakin banyak pula kelosnya. Untuk renda tepi saja menggunakan kelos sebanyak 9-11 buah, sedangkan untuk renda dengan motif lain seperti bentuk daun dan lainnya menggunakan kelos 12-24 buah untuk satu motif. Apabila benang untuk membuat renda telah selesai digulung semuanya pada kelos, maka langkah selanjutnya menyatukannya pada pola yang telah terpasang diatas bantalan kayu. Penyatuan itu dilakukan dengan menyatukan ujung setiap benang pada satu titik pada pola tersebut, untuk kemudian direnda atau dijalin dengan memutar-mutar kelos-kelos tersebut secara teratur.

- Memasang Pola

Bila rancangan pola sudah dan penggulungan benang selesai yang diyakini tidak ada perbaikan lagi maka langkah selanjutnya memasang pola pada bantalan kayu (bangku). Pemasangan pola renda diatas bantalan kayu dengan menggunakan jarum pentul biasa (tidak berkepala seperti yang lazim dipakai untuk jilbab, menjahit pakaian dan sebagainya). Pada sekeliling pola agar tidak mudah lepas saat membuat renda. Diusahakan kertas pola itu terpasang erat diatas bantalan kayu itu dan dipastikan tidak menggelembung atau rata diatas bantalan kayu bulat untuk renda ujung,serta bantalan kayu (bangku) petak untuk renda tepi.

Selanjutnya, kertas pola ditutup dengan kain putih yang dibuat dilubangi berbentuk segi empat atau bulat ditengahnya dan diatas bantalan kayu. Kegunaan kain itu agar kelos tidak tersangkut pada jarum pentul saat diputar-putar kiri kanan membentuk renda. Diatas pola dari kertas itu diletakkan benang yang telah disiapkan sesuai warna yang diperlukan pada beberapa kelos yang dihubungkan dengan salah bagian

dari pola itu.

- Pembuatan Renda

Setelah pola terpasang kuat pada bantalan kayu dan semua benang sudah digulung pada kelos, langkah selanjutnya memulai pekerjaan membuat renda. Pembuatan renda pada hakikatnya adalah dengan jalan memutar-mutar atau menyilang-nyilangkan kelos yang sudah berisi benang. Setiap kelos digabung menjadi satu dan dihubungkan dengan titik dimana proses merenda mulai dilakukan. Biasanya ditempatkan pada bagian tengah dari pola motif, tergantung maunya si pengrajin. Jika ujung-ujung benang pada kelos itu terpasang dengan menggunakan jarum pentul, dimulailah proses membuat renda atau lazim juga disebut dengan *merendo* (merenda). Pembuatan renda dilakukan setelah pola diletakkan dengan jarum pentul ke bantalan kayu dan dimulai dari lingkaran tengah, dengan menggunakan 4 kelos benang. Untuk motif lainnya ditambah lagi dengan beberapa kelos yang telah diisi benang. Aktivitas selanjutnya adalah memutar-mutar kelos secara teratur mengikuti motif sampai selesai. Proses membuat renda dengan memutar-mutar kelos mengikuti motif tersebut disebut juga dengan "menjalankan motif". Dari bagian satu ke bagian lain dikait dengan pengait (*hak pen*), sedangkan proses menyambung benang juga dengan *hak pen* kecil. Disinilah letak keahlian pembuat renda tersebut yakni memutar kelos, mengunci, menarik sehingga terbentuk motif-motif yang berbeda-beda.

Setelah semua motif terbentuk dan diperiksa, apakah sudah tepat dan sempurna sesuai pola barulah jarum pentul dibuka dan kertas pola dilepaskan dari bantalan kayu tersebut. Renda yang sudah terbentuk itu kemudian digulung pada kumparan benang agar tidak berserakkan di lantai atau kacau letaknya. Selanjutnya, dibuat renda ujung yang lain dengan cara dan motif yang sama, dan kemudian kedua renda tepi dengan motif yang sama pula. Renda yang sudah selesai

dibuat, selanjutnya *diangkek* (diangkat) atau *dicabuik* (dicabut) dari bantalan kayu, dengan melepaskan jarum pentul yang mengerakannya dengan bantalan kayu. Dengan demikian, selesailah pembuatan renda dan akan diteruskan dengan pembuatan renda untuk ujung yang satunya lagi, dan renda tepi.

- Menyambungkan Renda ke Selendang

Menyambungkan renda ke selendang adalah kegiatan memasang renda pada selendang, baik hiasan pada ujung maupun pada sisi kiri dan kanannya. Pemasangan renda pada selendang pada dasarnya tidak sulit karena hanya menyambungkan renda ujung ke bagian lebar selendang, dan renda tepi pada bagian panjang selendang. Biasanya penyambungan itu dilakukan dengan jahit tangan dengan benang yang khusus untuk itu, namun ada juga yang dilakukan dengan mesin jahit. Demi kerapian dan keindahan selendang keseluruhan, pemasangan renda dilakukan dengan tangan atau sulaman tangan, baik pada selendang suji cair, *kapalo samek* maupun terawang.

Pekerjaan memasang renda pada selendang bisa dilakukan oleh si pembuat renda dan bisa juga oleh si pembuat selendang itu. Hal demikian disebabkan adakalanya pembuat renda dan selendang adalah orang yang berbeda. Namun, pada dasarnya pembuatan selendang dan renda bisa dilakukan oleh satu orang pengrajin, dan selanjutnya pemasangan renda pada selendang dilakukan oleh yang bersangkutan. Umumnya di Koto Gadang, semua orang pengrajin bisa membuat selendang dan renda, namun lebih banyak yang berprofesi sebagai pembuat selendang dibanding renda. Jika konsumen membeli selendang yang belum dipasang renda pada toko di Pasar Atas misalnya, biasanya pemasangan renda dilakukan pada waktu membeli tersebut. Pihak toko yang akan mengupahkannya pada penjahit pertokoan tersebut yang bisa ditunggu.

4. Motif

Motif adalah pola atau gambar yang menghiasi kain tenun, termasuk untuk renda. Bentuk-bentuk motif sulaman itu antara lain berupa flora, fauna dan geometris. Motif flora antara lain yakni motif bunga matahari, mawar, melati, dan tanjung. Motif fauna antara lain motif burung merak, kupu-kupu, kumbang, itik, singa dan sebagainya. Sedangkan motif geometris berbentuk lengkung lingkaran, gelombang, segitiga, segi empat, belah ketupat dan sebagainya.

Pembuatan motif renda, tergantung dari daya kreasi si pembuat motif itu sendiri dan ada juga dengan mencontoh hiasan pada keramik, kain batik dan sebagainya. Motif tersebut ada kalanya dipindahkan atau disesuaikan dengan bentuk alam sekitar serta jenis jahitan yang akan dibuat, apakah itu hiasan ruangan, pakaian, selendang dan sebagainya. Motif-motif yang dibuat umumnya motif kembang (bunga) seperti bunga matahari, bunga ros, bunga melati dan sebagainya. Selain motif-motif tersebut ada juga motif lain seperti gambar binatang, seperti burung dan sejenisnya dan itu banyak dipakai pada masa dahulu, tetapi sekarang lebih cenderung memakai motif kembang-kembang.

Motif-motif yang terdapat pada sulaman Koto Gadang pada umumnya berasal dari lingkungan di sekitar. Secara umum, motif itu ada yang berupa bunga, daun, buah, binatang atau bentuk-bentuk geometris. Motif-motif tersebut ada yang diambil dari bentuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan benda lain yang geometris. Pada semua jenis sulaman, biasanya ketiga motif itu sering digabungkan atau dikombinasikan dengan tata letak yang di sesuaikan, sehingga bentuk sulaman tersebut lebih bagus dan indah. Ada kalanya motif tertentu dibuat untuk jenis jahitan tertentu pula, namun pada dasarnya tergantung pada selendang yang akan dibuat.

Pada sekeliling tepi selendang dibuat motif khusus atau disebut motif tepi untuk bagian sisinya, dan motif ujung untuk bagian ujungnya. Penentuan motif untuk renda disesuaikan dengan letak atau posisinya pada selendang, dan pada hakikatnya motif untuk tepi selendang berbeda dengan

motif pada renda ujung. Dalam hal motif pada sulaman Koto Gadang, terdapat perbedaan pola antara jenis sulaman yang akan dibuat yaitu pola untuk sulaman *suji caie*, *kapalo samek*, terawang maupun kalengkang. Perbedaan yang jelas sekali adalah pada sulaman kalengkang karena selendang ini tidak mempunyai renda dan jambul-jambul pada kedua ujungnya. Namun, bila ingin memakai renda tepi dan jambul-jambul juga dibolehkan, tergantung pada yang memakai.

Motif yang dibuat oleh pengrajin renda pada dasarnya atas keinginan pemesan atau pemakainya. Namun, pada dasarnya motif pada hiasan tepi selendang atau renda itu tergantung pada motif selendang itu sendiri. Artinya, motif selendang mempengaruhi motif pada renda. Motif itu biasanya berbentuk lekuk-lekuk pada kedua ujung selendang serta bagian sisinya. Jika selendang itu akan diberi renda pada kedua ujungnya maka motif seperti pada selendang itu tidak langsung dibuatkan, tetapi dibuat tersendiri. Untuk motif sulaman kalengkang, bisa langsung dibuat sendiri karena tidak mesti memiliki renda, sehingga motifnya dibuat langsung pada selendang itu.

Nagari Koto Gadang yang sejak dahulu lebih dikenal dengan jahitan atau sulaman sujanya, namun jarang membuat motif hewan untuk *suji/kapalo samek* kecuali kalau diminta. Beberapa motif yang banyak digunakan untuk renda Koto Gadang, antara lain bunga tulip, bunga ros, kecubung, pucuk belah, jari-jari, kipas, bika-bika, *love* dan lain-lain. Diantara motif-motif tersebut terdapat pula pembagiannya seperti motif kecubung, ada yang kecubung besar, kecubung kecil, kecubung putar dan sebagainya. Fungsi dari motif/hiasan itu pada dasarnya adalah untuk menambah indahnya selendang yang dibuat, dan sekaligus selendang itu mempunyai nilai artistik dan ekonomis yang tinggi. Artinya, motif yang baik dan serasi dengan selendang dengan sendirinya menghasilkan selendang yang bagus dan enak dipandang. Suatu hal yang jelas, pemilihan motif itu disesuaikan dengan fungsi selendang itu, sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya motif selendang (termasuk renda) yang dipakai pada waktu

upacara-upacara perkawinan dan acara adat lainnya sudah baku sejak dahulu, kecuali ada pesanan khusus dari pemesan (konsumen).

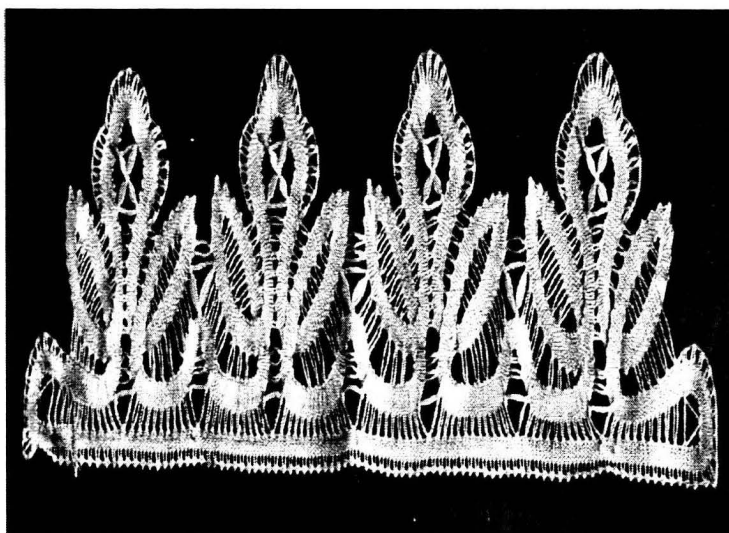
Pada masa sekarang, motif renda untuk selendang lebih ditentukan oleh pihak yang memesan atau selera konsumen, dan biasanya motif tersebut adalah yang lagi “ngetrend” (aktual). Para pengrajin umumnya bisa membuat aneka motif yang diharapkan karena telah memiliki banyak pengetahuan tentang motif lama yang diwarisi turun temurun. Jenis-jenis motif lama seperti; bunga, rebung, kecubung, kipas, roda-roda, dan lain-lain, sedangkan jenis motif baru seperti “pucuk balah”. Hanya saja, dari mana asal kedatangan motif itu tidak diketahui secara pasti karena sudah ada semenjak dahulu, begitupun arti atau makna yang terkandung dari motif lama itu.

Pada dasarnya motif dari renda bangku cukup banyak, namun tidak bisa didata secara lengkap karena tidak adanya catatan tentang itu. Motif itu hanya ada di kepala pengrajin yang diwarisi secara turun temurun dari generasi sebelum mereka. Para pengrajin mempunyai dan menggunakan motif berdasarkan pengetahuan yang diperoleh orangtuanya secara lisan dan pengamatan. Selama ini, belum ada pencatatan khusus tentang banyaknya dan jenis motif pada hiasan renda Koto Gadang. Hal yang pasti lebih dari 30 motif, dan diantaranya adalah bunga, tusuk balah (tusuk belah), kipas, kecubung besar dan lain-lain.¹⁵ Ada motif yang diduga pengaruh Eropa yakni motif “bunga tulip” dan *daun bodi*. Motif-motif tersebut mumi diciptakan oleh pengrajin setempat seperti kecubung, pucuk belah dan lainnya. Pembentukan motif renda ditentukan juga oleh besar kecil renda yang dibuat, jika motif renda berbentuk bunga besar maka rendanya juga besar, sebaliknya, jika rendanya kecil maka motif bunganya kecil. Apa filosofi dari motif-motif tersebut, sukar

¹⁵ Informasi dari seorang informan yang menjadi pengrajin renda disamping sulaman.

diketahui karena tidak banyak pengrajin yang mengetahuinya. Rata-rata pengrajin sekarang mewarisi dari generasi sebelumnya apa adanya, namun tidak bisa mengetahui arti atau makna yang terkandung dalam setiap motif itu. Apalagi sekarang, motif itu semakin banyak dan mengalami kreasi dengan motif dari luar Koto Gadang.

Berkaitan dengan warna, pada dasarnya warna renda hanya ada 3 macam yakni warna emas, perak dan putih. Pemilihan warna renda untuk dipasangkan pada selendang juga lebih ditentukan oleh konsumen atau pemesan. Pada masa dahulu, pemakaian warna itu mengandung makna, seperti warna emas menimbulkan kesan “mewah”, dan warna putih mencerminkan kebersihan atau kesucian. Andainya warna yang dipakai diluar warna tersebut, maka bisa nilainya “jatuh” atau tidak bagus. Pembuatan motif renda dan penyesuaian warna tergantung inovasi atau keahlian pembuat serta maunya pemesan.



Renda bangku produksi Koto Gadang, sebagai hiasan selendang

2. Konsumsi

1. Penggunaan

Pada dasarnya renda merupakan hiasan untuk selendang, disamping untuk hiasan lainnya seperti untuk barang-barang atau perlengkapan rumah tangga. Namun, penggunaan utama dari hiasan renda adalah sebagai kelengkapan selendang, khususnya selendang suji, dan *kapalo samek* pada masyarakat Koto Gadang. Selendang tersebut biasanya dipakai sebagai kelengkapan pakaian adat atau dalam kegiatan seperti *baralek* (pesta perkawinan), kenduri, pengangkatan penghulu dan lainnya. Sebagai bagian dari selendang, dengan sendirinya renda digunakan pada acara-acara adat yang ada di Koto Gadang.

Penggunaan lain dari renda adalah sebagai hiasan pada beberapa barang-barang rumah tangga seperti, sandaran kursi, alas gelas, alas baki, taplak meja, sarung bantal dan lain-lain. Disamping itu, hasil kerajinan juga dibuat sebagai aksesoris atau hiasan untuk barang-barang tertentu seperti dompet, tempat *handphone* (HP), kerah baju dan lain-lain. Bagi para pembeli atau konsumen dari luar Koto Gadang, adakalanya sulaman selendang dan renda itu digunakan sebagai koleksi, oleh-oleh atau kenangan untuk keluarga dan kenalannya, terutama oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai penggunaan dari renda tersebut menunjukkan bahwa renda bangku produksi Koto Gadang tidak saja sebagai hiasan selendang semata-mata melainkan juga menjadi bagian kelengkapan pakaian adat. Sampai saat ini, kain renda masih menjadi perlengkapan terpenting untuk selendang, hiasan perlengkapan rumah tangga, aksesoris dan lainnya.

Berdasarkan hal diatas, dapat dikemukakan beberapa penggunaan renda oleh masyarakat Koto Gadang dan sekitarnya adalah, 1) Hiasan selendang, 2) Kelengkapan pakaian adat, 3) Hiasan perlengkapan rumah tangga., dan 4) Aksesoris.

- Hiasan Selendang

Penggunaan renda sebagai hiasan selendang, dapat dikatakan, merupakan yang utama dibanding penggunaan lainnya. Hal itu disebabkan, keberadaan sebuah renda pada awalnya adalah untuk hiasan selendang yang kemudian berkembang untuk penggunaan lain-lain. Selendang tanpa adanya renda yang menghiasi pinggirnya dianggap tidak lengkap dan tidak menarik. Keterkaitan antara renda dengan selendang bagaikan nasi dengan sambal, nasi menjadi enak dimakan jika ada sambal, begitupun sebaliknya sambal tanpa nasi tidak terasa lengkap.

Selendang Koto Gadang yang memiliki renda sebagai hiasannya adalah selendang *suji caie* dan selendang *kapalo samek*, sedangkan selendang terawang dan kalengkang tidak memiliki renda pada pinggir dan ujungnya. Selendang terawang biasanya memiliki hiasan pada kedua ujungnya berupa jambul-jambul, sedangkan selendang kalengkang memiliki hiasan yang langsung dibuat pada ujungnya dengan sulaman, tidak dengan renda. Pada selendang *suji caie*, dan *kapalo samek*, renda itu dibuat terpisah atau dibuat sendiri-sendiri, bahkan pembuatannya tidak dilakukan oleh satu orang, Selendang (belum memiliki renda) dibuat oleh pengrajin selendang, sedangkan renda oleh pengrajin renda. Ketika keduanya selesai dibuat oleh masing-masing pengrajinnya, baru kemudian dipasangkan atau disatukan. Pemasangan atau penyambungan selendang dasar dengan renda biasanya dengan jahitan tangan agar lebih rapi karena jika pakai mesin kurang halus jahitannya.

Warna renda yang menjadi hiasan selendang di Koto Gadang adalah warna emas, perak dan putih. Renda berwarna emas dan perak dibuat dari benang makau dan lazim pula disebut *rendo makau* (renda makau), sedangkan renda untuk hiasan kelengkapan rumah tangga dan aneka aksesoris berwarna putih dan disebut *rendo putiah* (renda putih). Renda warna emas dan perak cocok untuk semua warna selendang, dan menjadi warna khas renda Koto Gadang. Warna renda yang tepat untuk hiasan selendang

adalah warna yang membuat selendang semakin enak dipandang. Untuk itu, dibutuhkan sekali keahlian pengrajin dalam menentukan warna serta motif untuk sebuah renda, juga selendang. Renda warna putih dibuat dari benang bordir yang harganya lebih murah dari benang makau. Renda warna putih yang lazim disebut renda putih pada umumnya dipakai sebagai hiasan perlengkapan rumah tangga seperti alas baki, taplak meja, sandaran kursi dan lain sebagainya.

Renda bangku Koto Gadang juga digunakan sebagai hiasan songket, khususnya songket yang dibuat oleh pengrajin songket di Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar. Namun demikian, hiasan renda yang digunakan disana bukan didatangkan dari Koto Gadang, dan nagari Padang Laweh (Kabupaten Agam). Hanya saja, dari segi keindahan dirasakan dan diakui bahwa produksi renda Koto Gadang lebih baik¹⁶.

- Kelengkapan Pakaian Adat

Pada dasarnya kain sulaman atau selendang Koto Gadang sejak dahulu digunakan pada acara adat yang melibatkan warga masyarakat, sebagai kelengkapan pakaian adat. Dengan kata lain, selendang itu tidak digunakan sehari-hari melainkan pada waktu acara adapt di nagari. Tidak digunakannya selendang itu sehari-hari karena selendang itu sejak dahulu dikhususkan sebagai kelengkapan pakaian adat, terutama kaum perempuan. Alasan lainnya karena biaya pembuatan atau harga selendang itu mahal sehingga kalau dipakai sehari-hari akan cepat aus atau rusak. Pemanfaatan sebagai pakaian adat, antara lain untuk pakaian perempuan, muda maupun tua, pakaian pengantin dan lainnya. Pakaian adat yang dimaksudkan disini adalah pakaian yang biasa digunakan ketika menghadiri acara atau upacara adat seperti

¹⁶ Di Pandai Sikek ,orang yang membuat renda untuk pasangan songket itu berasal dari Nagari Padang Laweh dan sudah menetap disana. Namun, demikian ada pula yang memakai renda Koto Gadang dimana orang Koto Gadang itu sendiri yang mengantarkannya ke Pandai Sikek.

baralek (pesta perkawinan), *mendo'a* (selamatan), *batagak pangulu*¹⁷ (mengangkat penghulu), kematian dan lain-lain.

Pada waktu pelaksanaan upacara adat di Koto Gadang, kaum laki-laki dan wanita memakai pakaian khusus yang berbeda dengan pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Pada pesta perkawinan, pengantin laki-laki (*marapulai*) dan pengantin wanita (*anak daro*) memakai pakaian adat khas Koto Gadang. Pengantin wanita biasanya memakai pakaian yang dihiasi dengan aneka warna yang meriah dan hiasan berupa pakaian dan selendang renda. Pakaian para wanita yang menghadiri acara adat itu disesuaikan dengan umur serta perannya dalam upacara tersebut. Artinya, antara wanita yang belum menikah, sudah menikah atau sudah punya cucu mempunyai perbedaan dalam pakaian dan selendang yang digunakan. Jenis pakaian dan selendang yang digunakan pada acara tersebut, sekaligus mencerminkan status wanita apakah sudah kawin atau belum, masih muda atau sudah tua, dan sebagainya.

Pemakaian selendang oleh pemakainya adalah dengan meletakkannya di bahu (melingkari leher), dimana kedua ujung selendang berada di depan. Selendang tersebut tidak boleh atau terlarang dipakai pada kepala, kecuali selendang kalengkang yang juga berfungsi sebagai kerudung bagi pengantin wanita, serta *tikuluak* yang biasa dipakai oleh perempuan yang sudah lanjut usia dalam kesehariannya. Pakaian penganten dan perlengkapan lainnya, umumnya yang dihiasi dengan berbagai bentuk sulaman (selendang berenda). Pakaian penganten laki-laki di Koto Gadang, "terawai" diberi sulaman yang terdapat pada bagian belakang/punggung, dan saku baju. Baju terawai ini terbuat dari kain sutra yang bermotif kotak-kotak atau garis-garis, dengan model *guntieng cino* (gunting Cina). Baju ini dipakai sebanyak 2 lapis, pada baju bagian dalam dipasangkan semua buah (kancing)nya,

¹⁷ Penghulu adalah pemimpin kaum di Minangkabau dan bergelar *datuak* (datuk). Peresmian atau pengangkatan penghulu di Minangkabau termasuk di Koto Gadang dilakukan secara adat, dan masyarakat yang mengahdirinya harus memakai pakaian adat, termasuk kaum wanita.

tetapi baju di bagian kedua/luarnya buah bagian atasnya saja yang dipasang. Kedua baju tersebut dihias dengan sulaman, satu jahit suji dan satu lagi jahit peniti yang boleh dipakai bergantian. Panganten laki-laki yang memakai baju terawai ini juga memakai sandal yang dihiasi sulaman.

Sulaman yang terdapat pada baju terawai ini, lebarnya kira-kira 10 cm dan panjangnya sepanjang baju bagian belakang tersebut, sedangkan untuk saku berukuran kira-kira 5 cm. Sulaman tersebut terlebih dahulu dijahitkan pada kain lain yang serasi pada dasar baju, setelah itu baru dijahitkan pada baju. Motif yang terdapat pada baju terawai ini berupa rangkaian bunga yaitu 4 buah bunga besar yang diselang-seling dengan bunga kecil dan daun, dengan warna banang serasi dengan dasar kain. Sedangkan bagi penganten wanita memakai baju kurung longgar yang terbuat dari kain *lame* yaitu sejenis kain mengkilat. Sarungnya sarung *lasam* yaitu sejenis kain batik halus. baju ini dilengkapi dengan selendang yang panjangnya 190/200 cm dan lebarnya 55 cm. Selendang untuk penganten ini biasanya berwarna merah yang searah dengan hiasan sekeliling selendang tersebut. Kedua ujung selendang dihiasi dengan renda benang makau yang lebarnya kira-kira 12 cm. Sedangkan renda keduanya berukuran kecil, berbentuk segitiga.

Pakaian laki-laki di Koto Gadang "terawai" juga diberi sulaman yang terdapat pada bagian belakang/punggung dan saku baju. Baju terawai ini terbuat dari kain sutera dengan motif ada yang berkotak-kotak atau garis-garis, dengan model gunting Cina (Esde, 1995; 43). Sedangkan untuk pakaian wanita adalah pada baju kurung yang biasanya longgar dan selendang untuk pengantin. Selendang untuk pengantin biasanya berwarna merah dan lazim dipakai adalah warna merah.

- Hiasan Perlengkapan Rumah Tangga

Pembuatan hiasan renda untuk perlengkapan rumah tangga dengan cara dirajut dengan tangan, tidak menggunakan bangku seperti halnya pembuatan renda untuk selendang. Kelengkapan rumah tangga yang menggunakan

hiasan dari renda atau rajutan di Koto Gadang, seperti taplak (alas) meja, saputangan, alas baki, alas gelas, sandaran kursi, pelaminan, tutup tirai, tutup *carano*,¹⁸ kipas, sapu tangan, tempat rokok (asbak), alas baki dan lain-lain. Benang yang digunakan untuk renda pada kelengkapan rumah tangga itu, sebagaimana telah disebutkan, adalah benang *putiah* (putih) dan jenis rendanya disebut dengan renda *putiah* (putih). Biasanya alat kelengkapan rumah tangga yang menggunakan hiasan renda itu dipakai pada saat-saat tertentu saja (tidak sepanjang hari), misalnya waktu lebaran, pesta (selamatan), kedatangan tamu dan lain-lain. Namun demikian, ada juga masyarakat menggunakannya untuk keperluan sehari-sehari, seperti taplak meja, dan sandaran kursi.

Kegunaan hiasan renda juga sebagai hiasan pelaminan seperti tirai, bantal besar, kelambu, dan lainnya. Bentuk-bentuk motif yang terdapat pada pelaminan itu seperti bunga mawar, bunga melati, burung merak, burung bergerai, kupu-kupu, singa dan motif-motif simetris. Pada tutup dan tirai *carano* atau dulang,¹⁹ diletakkan selebar kain yang sudah disulam dengan aneka warna dan umum dipakai adalah warna merah. Motif yang digunakan berkisar pada motif tumbuh-tumbuhan dan geometris berbentuk segitiga dan garis-garis lengkung serta dikelilingi hiasan kaca/cermin. Begitu juga pada kipas, saputangan dan tempat rokok yang telah disulam sedemikian rupa. Penggunaan lain adalah untuk perlengkapan rumah tangga adalah sebagai hiasan kelambu, seprai, sarung bantal, kain pintu, hiasan dinding dan lain-lain.

¹⁸ Carano adalah alat yang merupakan tempat sirih dan lainnya dalam upacara-upacara adat pada masyarakat Minangkabau.

¹⁹ Carano dan dulang adalah wadah khusus yang terbuat dari besi tipis yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Beda antara carano dan dulang yakni carano berbentuk seperti piala, sedangkan dulang seperti piring lebar.

- Aksesoris

Penggunaan hiasan renda Koto Gadang yang lain adalah sebagai aksesoris oleh pemiliknya atau sebagai hadiah (oleh-oleh) buat keluarga atau kenalan. Renda sebagai koleksi dan aksesoris, biasanya oleh orang luar Koto Gadang atau wisatawan yang datang ke Koto Gadang. Jenis aksesoris yang dibuat dari renda Koto Gadang seperti kerah baju, dompet, sarung *hand phone* (HP) dan lain-lain. Bagi para kolektor kain tradisional, dengan sendirinya hasil kerajinan sulaman dan renda Koto Gadang melengkapi koleksi yang dimilikinya. Demikian juga, menjadi koleksi museum tekstil, umum dan lainnya, disamping koleksi perorangan. Para perantau Koto Gadang yang sudah lama meninggalkan kampungnya, ketika pulang kampung kadangkala juga membawa sulaman Koto Gadang untuk dibawa ke rantau sebagai oleh-oleh bagi kenalan atau orang dihormatinya

2. Fungsi Sosial Budaya.

Kerajinan sulaman (renda), sebagaimana diketahui, merupakan ciri khas atau identitas sosial budaya masyarakat Koto Gadang dan Minangkabau umumnya. Artinya, kerajinan tersebut dan hasilnya dikenal mengenalkan masyarakat luar dengan karya budaya nenek moyang yang bernilai tinggi. Kerajinan tradisional Koto Gadang berupa perak, sulaman dan renda telah mengenalkan daerah Koto Gadang pada masyarakat lain sebagai produsen kain tradisional dan perak, pakaian adat dan tradisi adat yang berlaku di daerah tersebut. Sejak dahulu di Koto Gadang selendang biasanya dipakai pada waktu acara-acara adat seperti *baralek* (pesta perkawinan), pengangkatan penghulu dan lain-lain. Dalam lingkup lebih luas, semakin memperkenalkan Minangkabau sebagai etnis yang mempunyai budaya yang tinggi, tidak kalah dengan etnis lainnya di Indonesia. Dengan kata lain renda mempunyai fungsi sosial dan bagi masyarakat pemakainya.

Dalam upacara adat maupun upacara-upacara resmi lain hasil kerajinan Koto Gadang sering dipakai para ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang memakai selendang dan baju kurung dengan sulaman *suji caie* atau *kapalo samek* akan menunjukkan stratanya dalam masyarakat. Hal itu disebabkan karena jenis sulaman itu mahal harganya dan tidak semua warga masyarakat bisa memiliki atau membelinya, kecuali bagi mereka yang mampu atau membuat sendiri. Orang dikatakan, yang memiliki barang hasil kerajinan sulaman tersebut biasanya dari kalangan atau golongan masyarakat tertentu (berada), baik dilihat dari segi kemampuan maupun kedudukannya. Setiap orang Koto Gadang mesti memiliki selendang ini, bahkan, diharuskan mempunyai minimal 2 buah yakni *kapalo samek* dan *suji*, termasuk juga yang berada di rantau. Sulaman (renda) sebagai perlengkapan tambahan bagi setiap rumah walaupun itu pada dasarnya tidak mutlak karena untuk dapat memilikinya memerlukan dana yang tidak sedikit (mahal) sehingga bagi orang yang tidak mampu harus menabung atau mengumpulkan uang sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Sebaliknya bagi mereka yang memiliki sampai beberapa helai dianggap tingkat ekonominya cukup tinggi atau kaya. Ada kebanggaan bagi masyarakat karena memiliki selendang pada acara adat tersebut. Sudah menjadi pakem di Koto Gadang, pada waktu pesta atau kenduri para gadis memakai baju atau selendang yang berwarna cerah, sedangkan kaum ibu memakai pakaian lebih gelap. Bahkan, setiap anak perempuan yang lahir sudah disiapkan oleh orang tuanya.

Umumnya, seorang ibu selalu menginginkan agar anak perempuannya memakai pakaian dan atributnya (selendang, sandal dan lainnya) yang terlihat indah dan dari bahan yang bagus. Dengan hal demikian, sang ibu dan kerabatnya akan ikut dapat pujian atau paling tidak dinilai telah memberi anaknya pakaian yang pantas. Begitupun, apabila anak perempuan yang sudah bersuami diharapkan berpakaian yang bagus di tengah kerabat suaminya itu. Kondisi yang demikian menyebabkan pemilikan dan pemakaian selendang

pada acara-acara adat secara tidak langsung menjadi ajang menampilkan diri atau berlomba bagi warga masyarakat. Hal ini dapat dikatakan merupakan dampak negatif dari keberadaan selendang sebagai pakaian adat.

Penggunaan selendang yang bagus dan mahal, secara otomatis akan menaikkan prestise atau gengsi yang bersangkutan dimata masyarakat. Sebaliknya, apabila selendang yang dipakaikan itu biasa-biasa saja, maka tidak akan mendapat apresiasi dari masyarakat. Indikasinya, prestise atau gengsinya ditengah masyarakat tidaklah naik atau malahan dianggap rendah. Semua orang akan bisa menilai keindahan dan kemahalan sebuah selendang yang dipakai oleh pemiliknya, dan sekaligus menilai keberadaan sipemakai. Orang yang memakai selendang dari bahan yang mahal dan halus, berarti dari kalangan berada atau kaya. Sebaliknya pakaian yang dipakai oleh seseorang itu dari bahan yang murah dan tidak banyak hiasannya berarti orang dari kalangan orang biasa. Dapat dikatakan, dari pakaian, selendang dan renda yang dipakai seseorang akan kelihatan status sosial ekonomi yang bersangkutan.

Jenis Selendang, motif, bahan dan warna yang dipakai seorang perempuan Koto Gadang, memperlihatkan tingkat usia dan status diri/perkawinannya. Selendang dengan sulaman rapat, warna cerah dipakai oleh perempuan yang baru menikah (*anak daro*) pengantin muda dan ibu-ibu muda. Semakin bertambah usia seorang ibu, warna selendangnya harus semakin gelap/netral dan jahitan sulaman suji juga semakin berkurang (sulaman suji ringan) dan sulaman *kapalo sameknya* juga harus semakin berkembang

Penggunaan warna serta padat atau jarang motif juga berkaitan dengan si pemakai. Misalnya, untuk wanita muda biasanya warna yang dipakai adalah warna terang

seperti merah, kuning dan motifnya agak padat/rapat sehingga bahan dasar selendang itu terlihat sedikit saja. Bentuk dan warna serta cara pemakaian telah ditentukan berdasarkan umur dan kondisi (setempat). Ada pakaian bagi orang muda (berwarna terang), baru menikah (berwarna lembut), dan orang tua, (berwarna gelap seperti coklat, hitam). Selendang yang dipakai bagi ibu-ibu yang berumur 40-an ada yang berwarna kuning, merah hati, putih dan sebagainya dengan motif yang begitu rapat seperti halnya penganten baru. Untuk ibu-ibu yang sudah berumur atau tua biasanya selendangnya berwarna agak gelap seperti biru, dongker, merah hati dan sebagainya. Jika ada orang meninggal atau takziah, maka selendang yang digunakan adalah warna gelap.

Pada masa dahulu, perempuan Koto Gadang yang tidak bisa membuat renda akan menjadi bahan tertawaan/ejekan, dan mungkin juga sulit dapat jodoh. Oleh karenanya, kepandaian membuat renda atau sulaman menjadi penting bagi setiap perempuan Koto Gadang dan Minangkabau umumnya. Untuk meneruskan dan melestarikannya dengan mengajarkan atau mewariskan pada anaknya. Kepandaian membuat sulaman/renda diajarkan kepada anak atau keluarga sendiri (turun temurun), dan biasanya ketika anak sudah SD (Sekolah Dasar) sudah mulai diajarkan tentang cara menyulam tersebut.

Anak perempuan rata-rata sudah mulai diajar sejak kelas V SD, demikian juga dengan anak laki-laki. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki diajar, agar dapat mereka memanfaatkan kelak, seperti untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Andai sang anak tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, maka bisa menekuni pekerjaan menyulam tersebut sebagai pekerjaannya sehari-hari. Bagi kaum laki-laki, akan bisa memahami serta membantu isterinya menenun. Dalam kenyataannya proses pembelajaran bagi anak-anak tentang menyulam atau merenda memang dimulai dari membuat renda dan baru kemudian renda ujung. Hanya saja,

pada umumnya generasi muda sekarang memiliki kecenderungan ingin cepat siap atau tidak sabar. sehingga tidak paham bentuk menyulam yang baik.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat fungsi sosial budaya kerajinan renda bangku memiliki fungsi, antara lain;

1. Mengenalkan masyarakat dan Nagari Koto Gadang sebagai pemilik dan pewaris kerajinan renda bangku di Indonesia dan Minangkabau khususnya.
2. Menjadi kebanggaan bersama masyarakat Koto Gadang bahwa karya budaya mereka dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas.
3. Menunjukkan ketinggian budaya masyarakat Koto Gadang yang memelihara dan mewarisi karya leluhurnya sehingga tetap berkembang dan lestari.
4. Menggambarkan sistem sosial masyarakat Koto Gadang yang selalu menjaga marwah diri dan kaum, dengan menampilkan yang terbaik dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Menimbulkan minat generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan sulaman dan renda agar lebih dikenal dan disukai masyarakat luas.

3. Fungsi Ekonomi

Renda mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Koto Gadang dan Minangkabau umumnya karena menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Pada awalnya hasil renda dipakai untuk kebutuhan sendiri baik untuk kepentingan upacara adat maupun untuk pakaian sehari-hari oleh masyarakat setempat. Pada waktu dahulunya sulaman Koto Gadang termasuk renda, bukan untuk dikomersialkan tetapi sebagai koleksi pribadi dan keluarga yang diperlukan dan dipakai pada saat-saat tertentu seperti untuk menghadiri pesta perkawinan kaum kerabat, pengangkatan penghulu, mengunjungi kaum kerabat serta kegiatan sosial kemasyarakatan di nagari. Disamping itu, setiap keluarga akan menyimpannya sebagai persiapan untuk

anak perempuannya menikah kelak. Berbeda dengan sekarang, di samping untuk konsumsi pribadi dan keluarga (persiapan menikah bagi anak perempuan), hasil sulaman pengrajin Koto Gadang telah dijual untuk konsumsi orang luar. Dengan kata lain, renda telah mempunyai nilai jual (ekonomis) dan dikonsumsi oleh masyarakat lain. Sehingga, sulaman dan renda Koto Gadang telah bisa menghidupi ekonomi keluarga atau menjadi komoditi ekonomi bagi masyarakat pengrajin sulaman Koto Gadang. Setidaknya, menjadi sumber tambahan bagi para pengrajin dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan sekarang ini, hasil sulaman Koto Gadang sudah menjadi salah satu aset ekonomi yang pemasarannya sampai ke mancanegara. Sulaman Koto Gadang, khususnya renda telah banyak digunakan atau dikonsumsi orang Koto Gadang, tidak hanya di Sumatera Barat tetapi juga oleh turis manca negara yang langsung membelinya ke Koto Gadang. Pengrajin songket di Pandai Sikek dan daerah lain juga menggunakan renda Koto Gadang sebagai pasangan untuk songket produksi mereka.

Pengenalan sulaman Koto Gadang oleh masyarakat luar telah dimulai pada masa Belanda yang ditandai dengan ditampilkannya sulaman Koto Gadang pada berbagai pameran-pameran kain tradisional di masa itu. Keterkenalan dan keindahan sulaman Koto Gadang menyebabkan kebanyakan orang atau turis yang datang ke Kota Bukittinggi umumnya menyempatkan diri untuk mengunjungi sentra kerajinan di Koto Gadang. Selain mengunjungi kantor Yayasan Kerajinan Amai Setia yang menyediakan aneka macam sulaman Koto Gadang, termasuk renda serta aksesoris lainnya, mereka juga mendatangi secara langsung rumah pengrajin sekaligus melihat proses pembuatannya. Di kantor Amai Setia, mereka bisa melihat dan membeli aneka sulaman Koto Gadang sekaligus melihat proses membuatnya.

Bila ditinjau dari segi ekonomi, dapat dikatakan hasil sulaman (renda) Koto Gadang telah dapat mendatangkan

tambahan penghasilan bagi pengrajin. Dengan memanfaatkan waktu luang sehabis bekerja sawah atau ladang, mereka bisa menghasilkan renda untuk menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya.

Pada umumnya pengrajin sulaman dan renda sudah biasa menerima rombongan wisatawan asing yang berkunjung ke Koto Gadang. Selain wisatawan asing, para ibu-ibu pejabat dan pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia juga datang ke sana untuk membeli selendang dan lainnya. Oleh karena kain sulaman sudah menjadi komoditi ekonomi, maka motif-motif baru pada kain tenun songket itu pun bermunculan. Motif-motif baru itu muncul untuk menarik konsumen lebih banyak. Begitu juga dengan warna-warna yang ada sekarang beranekaragam mulai dari warna yang tua sampai warna-warna yang lembut serta perpaduan warna. Hal yang lebih menarik lagi sekarang adalah tampilan kain selendang lebih anggun dibandingkan dengan sulaman yang sudah lazim dilihat yakni motif benang emas yang tampilannya mewah dan cerah. Setiap pengrajin mengembangkan kreasi masing-masing terhadap tenun sulamannya, sehingga terkesan mewah dan menarik jika dipadukan dengan baju.

Semakin larisnya sulaman Koto Gadang dipasaran secara tidak langsung memberi peluang usaha bagi para pengrajin. Semula pengrajin membuat untuk kebutuhan sendiri kini sudah menjadi mata pencaharian bagi kaum wanita khususnya. Kain sulaman yang telah siap pakai tersebut dipasarkan dengan berbagai cara. Sistem pemasaran hasil produksi dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni pemasaran dengan cara sendiri dan melalui Amai Setia atau pihak ketiga. Pemasaran sendiri maksudnya adalah menjual langsung hasil kerajinan itu kepada konsumennya. Ada dua cara untuk itu, pengrajin berhubungan langsung dengan konsumen ataupun konsumen itu langsung memesan pada pengrajin. Jika melalui Amai Setia, para pengrajin mengantarkan sendiri hasil kerjanya ke kantor Yayasan Amai Setia. Artinya, pihak Amai

Setialah yang membeli dan kemudian menjualnya kepada konsumen yang datang kesana. Harga berbagai jenis sulaman di Amai Setia memang lebih mahal dari pada jika langsung kepada pengrajin ataupun membeli di pasar. Hal itu disebabkan jenis sulaman yang terdapat di Amai Setia adalah sulaman pilihan atau terjamin kualitasnya dan asli Koto Gadang.

Disamping itu, pembiayaan atau operasional Amai Setia salah satunya diharapkan dari penjualan barang-barang yang dijualnya itu, termasuk untuk menggaji pegawainya. Yayasan Kerajinan Amai Setia tidak saja menjual aneka sulaman Koto Gadang, tetapi juga menjual hasil kerajinan perak Koto Gadang dan lainnya. Tamu/konsumen dari sulaman Koto Gadang kebanyakan turis yang datang dari Jepang, Belanda, Australia, Belgia dan Amerika, disamping turis lokal. Hampir setiap bulan, ada turis mancanegara yang datang ke Koto Gadang untuk melihat sekaligus membeli selendang atau sulaman Koto Gadang. Mereka tersebut ada yang langsung berhubungan dengan pengrajin dan ada juga melalui Yayasan Amai Setia.

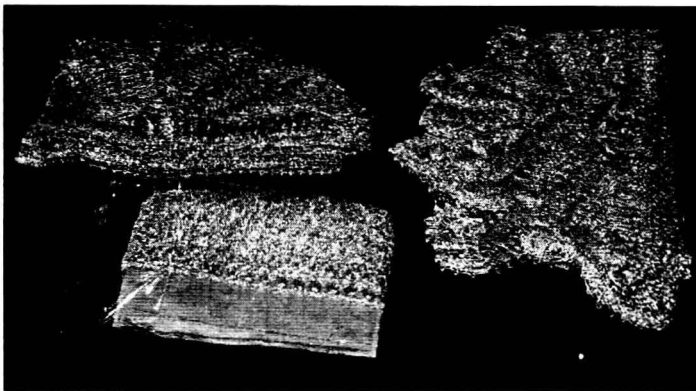
Meskipun sekarang keberadaan kain tenun sulaman Koto Gadang sudah mulai terancam oleh kehadiran berbagai jenis kain keluaran pabrik yang beredar dipasaran (bordiran), tetapi hingga kini masih eksis. Hal ini disebabkan karena besarnya dukungan dari masyarakat Koto Gadang untuk terus melestarikannya sebagai warisan nenek moyang yang mempunyai nilai seni tinggi. Upaya nyata yang dilakukan masyarakat Koto Gadang selain perlengkapan pakaian adat juga dijadikan pakaian kebanggaan para ibu-ibu setiap menghadiri acara resmi, pakaian penari-penari, penyambut tamu di ditempat-tempat tertentu seperti di hotel-hotel dan tempat lainnya.

Bertahannya penggunaan sulaman/selendang bagi masyarakat Koto Gadang berarti pekerjaan menenun akan tetap eksis pula. Setiap waktu penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan akan selendang tentu bertambah pula karena setiap keluarga tentu akan mewarisi kain tersebut

kepada keturunannya. Bila lingkaran seperti ini berjalan mulus maka pengrajin sulaman dan renda terus mempunyai pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Kerajinan sulaman dan renda telah memberi lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat Koto Gadang. Pekerjaan ini kelihatannya mudah dan santai mengerjakannya, tetapi memerlukan ketekunan, kesabaran dan semangat kerja serta ketenangan jiwa pengrajin itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas, difahami bahwa kerajinan renda bangku memiliki fungsi ekonomi bagi masyarakatnya, seperti;

1. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan ekonomi keluarga, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan.
2. Meningkatkan taraf kehidupan pengrajin dan menimbulkan kreatifitas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
3. Menjadi bekal keahlian bagi masyarakat Koto Gadang yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.
4. Menciptakan dan mengembangkan organisasi sosial untuk kelestarian kerajinan khas Koto Gadang seperti Yayasan Kerajinan Amai Setia yang telah eksis sejak zaman Belanda hingga sekarang.



Renda hasil kerajinan pengrajin Koto Gadang dalam kemasan untuk dijual pada konsumen

E. Kesimpulan

Daerah Sumatera Barat (baca; Minangkabau), sejak dahulu dikenal dengan produksi aneka kain tradisional yang tersebar pada beberapa daerah sebagai sentranya. Beberapa daerah yang cukup dikenal sebagai sentra produksi kain tradisional di Sumatera Barat adalah Silungkang dan Pandai Sikek dengan kerajinan songket, serta daerah Pariaman dan Agam dengan kerajinan sulaman. Hasil kerajinan daerah-daerah tersebut itu telah menjadikan Minangkabau dikenal luas sebagai penghasil aneka jenis kain tradisional yang sekaligus menunjukkan ketinggian dan kekayaan budaya masyarakatnya.

Salah satu daerah yang dikenal sebagai produksi kerajinan kain tradisional (sulaman) adalah Nagari Koto Gadang. Nagari yang juga dikenal telah banyak melahirkan banyak tokoh nasional itu sudah lama dikenal sebagai produsen kain tradisional berupa sulaman selendang dan renda, disamping kerajinan perakunya. Produksi kain tradisional nagari Koto Gadang atau yang lebih dikenal dengan sulaman Koto Gadang telah dikenal sejak masa Belanda dan masih eksis hingga sekarang. Jenis sulaman

produksi Nagari Koto Gadang adalah selendang yakni sulaman *suji caie*, *kapalo samek*, terawang dan kalengkang telah dikenal dan banyak diminati oleh masyarakat luar, termasuk para wisatawan dari mancanegara.

Disamping aneka sulaman, orang Koto Gadang juga memproduksi renda yang lazim disebut dengan *rendo* (renda) bangku. Penamaan kerajinan renda itu dengan "rendo bangku" karena cara membuatnya dengan menggunakan bangku sebagai salah satu peralatannya. Penggunaan bangku sebagai alat untuk pembuatan renda merupakan ciri khas renda Koto Gadang, ditandai dengan kehalusan rendanya dan keindahannya, serta diakui kualitasnya. Kerajinan renda bangku sendiri baru dikenal pada masa penjajahan Belanda dan diduga berasal Belgia. Walaupun dari segi asal usul berasal dari Belgia, tetapi motif yang digunakan murni milik masyarakat Koto Gadang. Renda bangku produksi Koto Gadang, adalah sebagai hiasan dari selendang, khususnya selendang *suji cair*, dan *kapalo samek* (kepala peniti). Renda bangku menjadi hiasan selendang dan dipasang pada bagian ujung (renda ujung) dan tepi (renda tepi). Renda juga sebagai hiasan perlengkapan rumah tangga seperti taplak meja, sandaran kursi, alas gelas, alas baki, kerah baju dan lain-lain, serta aksesoris dan lain-lain. Penggunaan untuk aksesoris timbul belakangan sebagai akibat perkembangan zaman dan daya kreasi pengrajin itu sendiri.

Kerajinan renda bangku mendapat pengaruh dari Eropa dan Cina, yang kemudian berkembang menjadi kerajinan khas Koto Gadang. Adanya pengaruh luar (Eropa dan Cina) menunjukkan bahwa

kerajinan renda bangku Koto Gadang sekaligus mencerminkan perpaduan budaya Minangkabau, Cina dan Eropa. Aktivitas membuat renda bangku Koto Gadang semakin berkembang semenjak didirikannya organisasi Yayasan Kerajinan Amai Setia pada bulan Februari 1911 oleh Rohanah Kudus, seorang pahlawan nasional. Organisasi yang kemudian menjadi yayasan itu didirikan dengan tujuan awalnya adalah meningkatkan pengetahuan dan peranan wanita Koto Gadang menjadi cikal bakal kerajinan sulaman dan renda dikenal oleh masyarakat luas. Dapat dikatakan, perkembangan kerajinan sulaman Koto Gadang tidak luput dari peran Yayasan Amai Setia sehingga masih eksis hingga sekarang.

Renda bangku Koto Gadang, pada hakikatnya tidak saja mempunyai fungsi ekonomis bagi pengrajin, tetapi juga menjadi kekayaan dan kebanggaan masyarakat Koto Gadang dan Minangkabau umumnya. Kerajinan membuat renda dan selendang telah membuat nama Koto Gadang dikenal sampai ke manca negara karena kehalusan dan kualitas yang dipercaya. Penggunaan selendang Koto Gadang yang dihiasi dengan renda (bangku) itu utamanya adalah sebagai kelengkapan pakaian adat yang biasa digunakan pada acara-acara adat seperti *baralek* (pesta perkawinan), *batagak pangulu* (pengangkatan penghulu), dan lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa produksi renda Koto Gadang juga mengandung aspek sosial dan budaya, karena berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan (budaya) yang tercermin dari pemakaiannya sebagai kelengkapan pakaian adat, dan kebanggaan memakainya. Akhirnya, berdasarkan penggunaan dan fungsinya dapat dikatakan bahwa renda bangku Koto Gadang sesungguhnya merupakan "pelengkap" dari keberadaan sulaman selendang Koto Gadang khususnya dan kain tradisional Minangkabau pada umumnya.

2. Saran

Renda bangku telah menjadi salah satu kekayaan budaya berharga yang dimiliki oleh masyarakat Koto Gadang,

dan Minangkabau umumnya. Seyogyanyalah, tetap dijaga kelestariannya oleh berbagai pihak agar tetap berdayaguna bagi pengrajin, masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat (kerajinan tradisional) sebagai kekayaan bangsa yang bernilai tinggi. Dengan demikian kain tradisional sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia semakin dikenal, tidak saja di Indonesia tapi juga di mancanegara. Untuk itu, beberapa hal yang dilakukan seperti;

- a. Pemerintah, tokoh masyarakat dan Yayasan Kerajinan Amai Setia agar terus melakukan pembinaan terhadap para pengrajin renda maupun sulaman agar tetap berkembang dan berinovatif terhadap produknya dengan tidak mengabaikan nilai tradisional yang menjadi kekhasannya selama ini.
- b. Penyuluhan dan pewarisan keahlian membuat renda serta sulaman selendang kepada generasi muda perlu dintensifkan, agar tidak hilang begitu saja. Disamping merupakan aktifitas ekonomis, juga sebagai upaya untuk tetap mempertahankan tradisi sulaman sebagai salah satu identitas masyarakat Koto Gadang khususnya, Minangkabau umumnya.
- c. Sehubungan dengan maraknya pencaplokan karya budaya dewasa ini, seyogyanyalah pemerintah mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan mendaftarkan renda bangku Koto Gadang ke UNESCO. Sebagaimana halnya sulaman selendang *kapalo samek* yang sudah dipatentkan pada tahun 1990 sebagai karya budaya masyarakat Koto Gadang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Zaiful, dkk. *Pengrajin Tradisional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta; Proyek IPNB Depdikbud. 1991.
- Azwar, Sativa Sutan, *Antakesuma Suji dalam Adat Minangkabau*. Jakarta; Djambatan. 1999
- Berhard Bart. *Revitalisasi Songket Lama Minangkabau*. Padang ; Studio Songket Erika Rianti. 2006.
- Chalid, Suhadini, dkk. *Tenun Ikat Indonesia*. Jakarta; Museum Nasional. 2000
- Christyawaty, Eny dan Ernati. *Kontinuitas Pola Pewarisan Seni Menenun Songket di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto. Kabupaten Tanah Datar*. Laporan Penelitian. Padang : BPSNT Padang. . 2009.
- Depdikbud. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Depdikbud. 1988.
- Ernati, dan Silvia Devi. *Sulaman sebagai Manifestasi Teknologi Pakaian Tradisional (Kasus Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Laporan Penelitian. Padang; BPSNT Padang. 2007.
- Esde, Erni, dkk. *Kerajinan Sulaman Sumatera Barat*. Laporan Penelitian. Padang; Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat. 1995.
- Harian Padang Ekspres. *Menelusuri Sejarah Batik Sampan; Mati Suri tergilas Kemajuan Teknologi*. Artikel. Jumat 19 Pebruari 1010
- Karmila, Mila. *Ragam Kain Tradisional Nusantara (Makna, Simbol dan Fungsi)*.. Jakarta; Bec Media Indonesia. 2010.
- Kartiwa, Suwati. *Ragam Kain Tradisional Indonesia; Tenun Ikat*. Jakarta; Gramedia.2007

Kuliah Kerja Lapangan Arsitektur Vernakular Nusantara 2005.
"Menuju Pelestarian Kawasan Pusaka" Nagari Rao-
Rao Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Koto
Gadang Kabupaten Agam Sumatera Barat 14-25
Februari 2005. Padang ; Jurusan Arsitektur Fak.
Teknik Sipil dan Perencanaan Univ. Bung Hatta
2005.

Mahzar, Hera. *Adat Istiadat Koto Gadang*. Koto Gadang.
2005.

Nahar. *Adat Istiadat Kotogadang*. Jakarta; 1984. (tanpa
penerbit).

Nuralia, Lia dan Siti Rohanah. *Kehidupan Pengrajin Perak di
Koto Gadang Sumatera Barat 1990-2006*. Laporan
penelitian. Padang; BPSNT Padang. 2005.

Razni, Sita Dewi, dkk. *Pakaian Tradisional Koto Gadang*.
Bukittinggi; Yayasan Kerajinan Amai Setia Koto
Gadang. 2005.

Rohanah, Siti dan Refisrul. *Kerajinan Songket Palembang;
Tinjauan Sejarah dan Prospeknya (1980-1997)*.
Laporan Penelitian. Padang : BPSNT Padang. 2006

Syarofi, Yudhie. 2007. *Songket Palembang; Nilai Filosofis,
Jejak Sjarah dn Tradisi*. Palembang; Pemerintah
Propinsi Sumatera Selatan.

Wardhani, Cut Kamari, dan Ratna Panggabean. *Tekstil*.
Jakarta; LPSN. 2005

B. Internet ;

1. Pengrajin Perak Koto Gadang Masih tetap Bertahan
<http://www.padangmedia.com/?mod=artikel&j=1&id=197>
2. Kain Sulaman Bukittinggi
[http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windo
wsmedia](http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windo
wsmedia)
3. Pengenalan Kain Sulam Bukittinggi
[http://kainsulaman.blogspot.com/2008/09/pengenalan-
ks.html](http://kainsulaman.blogspot.com/2008/09/pengenalan-
ks.html)

4. Sejarah Tenun di Minangkabau
<http://nurhidani.ngeblogs.com/2009/11/23/sejarah-tenun-di-minangkabau/>
5. Kerajinan Perak dan Sulaman Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumbar. <http://www.zimbio.com/member/rahmat212/artides/1sKS1w8bfJ5/Kerajinan+Perak+dan+Songket+Koto+Gadang+Kab>
6. Kerajinan Amai Setia
<http://www.kotogadang-pusako.com/?pilih=hal&id=33>
7. Duka Perajin Perak Koto Gadang
<http://www.minangforum.com/showthread.php?t=3845>
8. Pengaruh Asing pada Masyarakat dan Kebudayaan di Sumatera
<http://djuliantosusantio.blogspot.com/2009/10/pengaruh-asing-pada-masyarakat-dan.html>

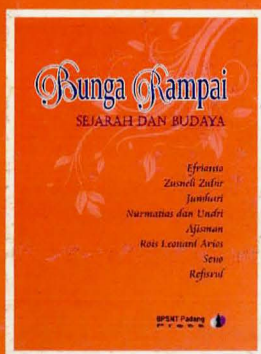
C. Artikel

- Ryan. "*Kain Tradisional Minangkabau*", Artikel dlm Majalah Travel Club Mei 2008.
- Harian Singgalang. *Perempuan Minang Kehilangan Renda Padang*; Singgalang Minggu, 4 April 2010, hlm 1.
- Harian Singgalang. *Tak Sumbang Dilihat Orang*. Padang; Singgalang Minggu, 4 April 2010, hlm 1.

Bunga Rampai sejarah dan bu

Perpustakaan Dir
Jenderal Kebu

959.8
EFR
b



BPSNT Padang Press
(Anggota IKAPI Sumbar)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji
Padang Sumatra Barat
Telp/faks: 0751-496181
www.bpsnt-padang.info

ISBN

978-602-8742-30-0



978-602-8742-30-6

